

DR. HJ. KHAIRIAH, M.PD

MULTIKULTURAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM



Editor : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

DR. HJ. KHAIRIAH, M.PD

**MULTIKULTURAL DALAM
PENDIDIKAN ISLAM**

EDITOR

PROF. DR. H. SIRAJUDDIN M, M. AG. MH

DR. HJ. KHAIRIAH, M.PD

**MULTIKULTURAL DALAM
PENDIDIKAN ISLAM**

Percetakan

Motto:
**“Maju dalam pendidikan,
Bermartabat dalam kehidupan,
Keadilan, kesetaraan dalam kemanusiaan,
Kebersamaan dalam keberagaman, demokratis, toleransi, harmonis”**

Kupersembahkan Kepada:

**Suami tercinta Drs. H. Syarifuddin, M.Si,
Anak-anak Tersayang:
Firdaus Muttaqin, ST, MT, Syauqas Rahmatillah, SE, Fitria Qadriani.**

KATA SAMBUTAN

**Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M. Ag., M.H.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**

Alhamdulillah wa syukurulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, keberkahan, taufik, dan hidayahNya kepada kita semua, rasa syukur harus selalu kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dalam mengabdikan kepada Allah SWT, bangsa, dan negara, khususnya aparatur sipil negara Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam menghadapi era globalisasi, era reformasi, dan era persaingan antarbangsa yang ketat, maka sudah tepat jika lembaga pendidikan IAIN Bengkulu fokus mengembangkan tridharma perguruan tinggi dalam berbagai bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam konteks pendidikan ini, metode, strategis, dan pembelajaran perlu mengembangkan keunikan dan keunggulan dalam upaya merespon perkembangan keragaman masyarakat. Pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan. Pendidikan multikultural merupakan proses pengakuan martabat manusia, sehingga terwujudnya keadilan dan kesetaraan, manusia yang sejahtera, dan bermartabat menuju *world class University* yang demokratis, toleran, dan harmonis.

Buku ini merupakan representasi dari penelitian, kajian pustaka, informasi dari media cetak maupun elektronik, buku-buku ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah tentang keberagaman budaya, etnis, suku, ras, adat istiadat, dan keyakinan agama. Keberagaman inilah yang membawa sebuah prestasi, yaitu kebersamaan, saling bekerjasama dalam membangun Indonesia yang maju, aman, damai, sejahtera dan harmonis.

Selamat membaca buku ini, semoga bermanfaat bagi pengembangan riset. Keberagaman budaya sebagai bentuk optimalisasi kemampuan manusia sebagai makhluk kreatif dan inovatif, membiasakan diri menjadi pembelajar sejati, mempelajari sesuatu secara lebih efektif dan efisien (Muhaimin, 1996). Tradisi riset optimalisasi pemanfaatan perpustakaan dan sarana prasarana lainnya untuk mendapatkan desain pengelolaan keberagaman yang lebih komprehensif, menjaga tatanan masyarakat yang seimbang dalam kesatuan bhinneka tunggal ika. Barakallah.

Bengkulu, 2020

Prof.Dr.H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H.

KATA PENGANTAR

Dr. Hj. Khairiah, M.Pd.
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya.

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI: UIN, IAIN, STAIN) telah mengalami perkembangan sangat pesat, sungguh mengharukan, sesuatu yang tidak terbayangkan setidaknya satu dekade lalu, kalau dulu hanya orang pinggiran, kampung, marjinal dan masyarakat sosial ekonomi bawah, namun saat ini masyarakat kota, modern dan mapan secara ekonomi maupun sosial masuk PTKI. Kalau dulu PTKI hanya kalangan hijau, namun sekarang warna warni, PTKI merupakan Indonesia masa depan yang ceria, tangguh, produktif, kontributif, dan kompetitif.

Perkembangan ini merupakan proses kerja panjang dan berpeluh keringat dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah namun keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat baik internal maupun eksternal. Kerja keras dari berbagai pihak melahirkan wajah baru PTKI, yaitu kalau dulu hanya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) paling tinggi, namun sekarang banyak PTKI beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Kalau dulu hanya mengkaji keilmuan tentang Pendidikan Agama Islam (PAI), Bahasa Arab, Pemikiran Islam, Syariah. Namun sekarang terdapat kejian keilmuan yang beraneka-ragam disamping ilmu agama Islam, seperti; Manajemen, Sains dan Teknologi, IT, Kedokteran/ Kesehatan, Hukum, Seni, dan lain sebagainya, tidak ada perbedaan dengan Pendidikan Tinggi Umum (PTU).

Berdasarkan perkembangan yang membanggakan tersebut, maka Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu selalu berinisiatif dan mengajak warga/masyarakat kampus untuk melakukan upaya dalam rangka pengembangan tradisi ilmiah. Tradisi ilmiah tersebut seperti membangun tradisi riset atau proyek-proyek ilmiah lainnya. Materi yang ada dalam buku ini menyikapi multikultural dalam pendidikan Islam, kebersamaan dalam keberagaman. Didasarkan dari pengalaman penulis peroleh dari menulis beberapa buku dan artikel selama ini.

Untuk memudahkan pemahaman, buku ini disusun berdasarkan urutan sebagai berikut: (1) Bab I memuat tentang latar belakang kebudayaan sebagai dasar keberadaan pendidikan multikultural, konsep kebudayaan, budaya dan lingkungan, pranata kebudayaan, hakikat, dasar, tujuan dan fungsi pendidikan multikultural; (2) Bab II menjelaskan tentang latar belakang teori dasar pemikiran multikulturalisme, pengertian, sejarah multikulturalisme dan multikulturalisme menurut Al-Qur'an dan Hadis yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW; (3) Bab III mengupas tentang latar belakang multikulturalisme di Indonesia dan di dunia Islam, contoh-contoh dan hikmah multikulturalisme; (4) Bab IV memuat latar belakang tentang teori, pengertian dan sejarah pendidikan multikultural; (5) Bab V memuat tentang kesetaraan dan keadilan serta problematika dalam pendidikan Islam multikultural serta solusinya, macam-macam kesetaraan dan keadilan multikultural serta semangat kebersamaan dalam multikultural; (6) Bab VI mendeskripsikan karakteristik dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural; (7) Bab VII memuat tentang peran guru dan model dan pengembangan pendidikan Islam multikultural, integrasi bangsa dan revitalisasi pendidikan Islam dalam multikultural; (8) Bab VIII menjelaskan peran sekolah/madrasah/pesantren dalam pengembangan pendidikan multikultural; (9) Bab IX menguraikan jenis, bentuk konflik dan solusi pelaksanaan pendidikan multikultural; (10) Bab X menjelaskan urgensi pendidikan multikultural di Indonesia; (11) Bab XI menjelaskan dimensi dalam pendidikan multikultural; (12) Bab XII mendeskripsikan problematika pendidikan multikultural di Indonesia; (13) Bab

XIII mengupas isu-isu globalisasi dalam pendidikan Islam multikultural; (14) Bab XIV mendeskripsikan multikultural dalam lembaga pendidikan; (15) Bab XV mendeskripsikan multikultural dalam beragama; (16) Bab XVI mendeskripsikan multikultural dalam bermasyarakat; dan (17) Bab XVII.

Buku ini adalah rekaman beberapa hasil riset, kajian pustaka, buku-buku, tulisan ilmiah, dengan harapan dapat membuka jalan kajian yang lebih kreatif, inovatif, efektif dan efisien, sebagai bagian upaya menumbuhkembangkan kepercayaan, saling menghargai, menghormati dan saling melindungi serta semangat berprestasi, dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebersamaan dalam Keberagaman, mewujudkan masyarakat yang damai, tenteram dan harmonis. Barakallah.

Bengkulu, 2020

Dr. Hj. Khairiah, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN — vi

KATA PENGANTAR— xiii

DAFTAR ISI — xviii

BAB I

**KEBUDAYAAN SEBAGAI DASAR KEBERADAAN PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL — 1**

- A. Pendahuluan — 1
- B. Konsep Kebudayaan — 4
- C. Budaya dan Lingkungan — 9
- D. Pranata Kebudayaan — 10
- E. Hakikat Pendidikan Multikultural — 12
- F. Dasar Pendidikan Multikultural — 16
- G. Tujuan Pendidikan Multikultural — 18
- H. Fungsi Pendidikan Multikultural — 22
- I. Kesimpulan — 23
- J. Saran — 23
- Daftar Pustaka — 24

BAB II

TEORI DASAR MULTIKULTURALISME — 26

- A. Pendahuluan — 26
- B. Pengertian Multikulturalisme — 28
- C. Sejarah Multikulturalisme — 31
- D. Teori Dasar dan Pemikiran Multikulturalisme — 35
- E. Multikultural dalam Hadist Nabi Muhammad SAW — 36
- F. Kesimpulan — 39
- G. Saran — 39
- Daftar Pustaka — 39

BAB III

GAGASAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA, DUNIA ISLAM — 41

- A. Pendahuluan — 41
- B. Multikulturalisme di Indonesia — 44
 - 1. Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia — 44
 - 2. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia — 47
 - 3. Ciri-ciri Multikulturalisme di Indonesia — 49
 - 4. Bentuk Multikulturalisme di Indonesia — 50
 - 5. Faktor-faktor Terjadinya Multikulturalisme — 52
- C. Multikulturalisme dalam Islam — 54
- D. Contoh Multikulturalisme di Indonesia dan Dunia Islam — 58
- E. Hikmah Multikulturalisme di Indonesia — 62
- F. Kesimpulan — 64
- G. Saran — 65
- Daftar Pustaka — 65

BAB IV

TEORI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL — 68

- A. Pendahuluan — 68
- B. Pengertian Pendidikan Multikultural — 70
- C. Sejarah Pendidikan Multikultural — 75
- D. Kesimpulan — 84
- E. Saran — 84
- Daftar Pustaka — 84

BAB V

KESETARAAN DAN KEADILAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL — 87

- A. Pendahuluan — 87
- B. Kesetaraan dalam Pendidikan Islam — 89
- C. Problematika Kesetaraan dalam Kehidupan — 92
- D. Problem Kesetaraan dan Solusi — 95
- E. Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam — 97

- 1. Keadilan dalam Multikultural — **98**
- 2. Macam-macam Keadilan dalam Multikultural — **99**
- 3. Semangat Kebersamaan dalam Multikultural — **100**
- F. Kesimpulan — **104**
- G. Saran — **104**
- Daftar Pustaka — **105**

BAB VI

KARAKTERISTIK DAN BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA — 108

- A. Pendahuluan — **108**
- B. Implikasi Pendidikan Multikultural — **110**
- C. Karakteristik Problematikan Pendidikan Multikultural di Indonesia — **112**
- D. Bentuk Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia — **118**
- E. Kesimpulan — **119**
- F. Saran — **120**
- Daftar Pustaka — **120**

BAB VII

PERAN GURU DAN MODEL PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL —122

- A. Pendahuluan — **122**
- B. Pendidikan Islam Multikultural dan Integrasi Bangsa — **124**
- C. Model Pendidikan Islam Multikultural — **125**
- D. Asumsi Pendidikan Islam Multikultural — **130**
- E. Islam dan Multikultural — **131**
- F. Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Multikultural — **136**
 - 1. Perlunya pandangan inklusif dalam kehidupan multikultural —**137**
 - 2. Sikap inklusif — **137**
 - 3. Sikap realisasi dalam kehidupan masyarakat multikultural — **138**
- G. Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam — **138**
 - 1. Al Qur'an menyebutkan manusia diciptakan dari diri yang Satu — **138**

- 2. Al Qur'an menekankan pentingnya saling percaya, pengertian dan menghargai — **140**
- H. Peran Guru dalam Pendidikan Islam Multikultural — **141**
 - 1. Membangun sensitivitas gender — **142**
 - 2. Membangun sifat kepedulian social — **142**
 - 3. Membangun sikap anti diskriminasi etnis — **142**
- I. Kesimpulan — **143**
- J. Saran — **144**
- Daftar Pustaka — **144**

BAB VIII

PERAN SEKOLAH/MADRASAH/PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL — 147

- A. Pendahuluan — **147**
- B. Peran Sekolah/Madrasah/Pesantren sebagai Sistem Sosial — **150**
 - 1. Kebijakan dan politik sekolah/madrasah/pesantren — **151**
 - 2. Budaya sekolah/madrasah/pesantren yang tersembunyi — **151**
 - 3. Gaya belajar sekolah/madrasah/pesantren — **151**
 - 4. Bahasa dan dialog sekolah/madrasah/pesantren — **151**
 - 5. Partisipasi dan input masyarakat — **152**
 - 6. Program penyuluhan/konseling — **152**
 - 7. Prosedur assesmen dan pengujian — **152**
 - 8. Materi pembelajaran sekolah/madrasah/pesantren — **152**
 - 9. Gaya dan strategi mengajar — **153**
 - 10. Sikap, persepsi, kepercayaan dan perilaku — **153**
- C. Peran sekolah/madrasah/pesantren sebagai Lembaga Pengembangan Budaya — **153**
- D. Multikultural sebagai Landasan Pembelajaran — **157**
- E. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Multikultura — **159**
- F. Kesimpulan — **162**
- G. Saran — **162**
- Daftar Pustaka — **163**

BAB IX

SOLUSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

DI INDONESIA — 166

- A. Pendahuluan — **166**
- B. Pengertian Masyarakat Multikultural — **171**
- C. Multikultural Pendidikan di Indonesia — **172**
- D. Dampak multicultural di Indonesia — **173**
- E. Jenis dan Bentuk Konflik Pendidikan Multikultural — **175**
- F. Upaya Penanggulangan Konflik Akibat Multikultural — **179**
- G. Kesimpulan — **183**
- H. Saran — **183**
- Daftar Pustaka — **184**

BAB X

URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA — 185

- A. Pendahuluan — **185**
- B. Pengertian Pendidikan Multikultural — **186**
- C. Pendekatan Pendidikan Multikultural di Indonesia — **188**
- D. Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia — **189**
- E. Pengertian Pendidikan Islam dan Multikultural — **195**
- F. Landasan Multikultural Pendidikan — **197**
- G. Pendidikan Islam Sebagai Upaya Membangun Multikultural — **198**
- H. Kesimpulan — **201**
- I. Saran. — **202**
- Daftar Pustaka — **202**

BAB XI

DIMENSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL — 205

- A. Pendahuluan — **205**
- B. Dimensi Pendidikan Islam Multikultural — **206**
- C. Dimensi Pendidikan Multikultural Menurut James Banks — **2098**
 - 1. Integrasi Isi/materi — **208**
 - 2. Konsruksi pengetahuan — **208**

- 3. Pengurangan prasangka — 209
- 4. Pendidikan yang adil — 209
- 5. Pemberdayaan budaya sekolah struktur social — 209
- D. Dimensi Pendidikan Multikultural Menurut Sunarto — 210
 - 1. Pendidikan multikultural berawal dari keTuhanan — 210
 - 2. Pendidikan multikultural mengajarkan agama dan toleransi — 210
 - 3. Pendidikan multikultural mengajarkan ajaran agama tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat — 211
 - 4. Pendidikan multikultural mengajarkan ajaran agama tentang keadilan — 212
- E. Kesimpulan — 212
- F. Saran — 213
- Daftar Pustaka — 213

BAB XII

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA — 215

- A. Pendahuluan — 215
- B. Keragaman Identitas Budaya — 217
- C. Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah — 220
- D. Kurang Kokohnya Nasionalisme — 221
- E. Fanatisme Sempit — 223
- F. Konflik Kesetaraan Nasional dan Multikultural — 225
- G. Kesejahteraan Ekonomi Tidak Merata — 226
- H. Keberpihakan Media Massa, khususnya Televisi Swasta — 229
- I. Problem Penyakit Budaya — 233
- J. Problem Pembelajaran Pendidikan Multikultural — 241
- K. Kesimpulan — 243
- L. Saran — 243
- Daftar Pustaka — 243

BAB XIII

ISU GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM — 250

- A. Pendahuluan — 250

- B. Isu-isu Globalisasi — **253**
- C. Ciri-ciri Globalisasi — **255**
- D. Isu Global dalam Pendidikan Islam — **256**
- E. Isu Global dalam Kehidupan — **260**
- F. Isu-isu Pasar Global — **262**
- G. Isu-isu Akulturasi — **263**
- H. Isu-isu Akulturasi Pendidikan Islam — **265**
- I. Kesimpulan — **268**
- J. Saran — **268**
- Daftar Pustaka — **268**

BAB XIV

MULTIKULTURAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN — 271

- A. Pendahuluan — **271**
- B. Peran Lembaga Pendidikan dalam Multikultural — **272**
- C. Membangun Pendidikan Berkesetaraan dalam Multikultural — **276**
- D. Implementasi Kurikulum Pendidikan Multikultural — **281**
- E. Kesimpulan — **283**
- F. Saran — **283**
- Daftar Pustaka — **284**

BAB XV

MULTIKULTURAL DALAM BERAGAMA — 286

- A. Pendahuluan — **286**
- B. Pengertian Masyarakat Multikultural dalam Beragama — **288**
- C. Peran Agama dalam Masyarakat Multikultural — **290**
- D. Membangun Toleransi dalam Masyarakat Multikultural — **292**
- E. Urgensi Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural — **294**
- F. Kesimpulan — **301**
- G. Saran — **302**
- Daftar Pustaka — **302**

BAB XVI

MULTIKULTURAL DALAM MASYARAKAT — 305

A. Pendahuluan	— 305
B. Pengertian Masyarakat Multikultural	— 306
C. Hakikat Masyarakat Multikultural	— 308
D. Karakteristik Masyarakat Multikultural	— 310
E. Pandangan Masyarakat Multikultural	— 313
F. Kesimpulan	— 315
G. Saran	— 315
Daftar Pustaka	— 315

BAB XVII

PENUTUP — 317

DAFTAR RIWAYAT HIDUP — 326

BAB I

KEBUDAYAAN SEBAGAI DASAR KEBERADAAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pendahuluan

Pendidikan Multikultural merupakan isu sangat strategis dan penting untuk dibahas karena sebuah bangsa lahir dari multikultural, sehingga pengelolaan pendidikan multikultural atau keanekaragaman budaya menjadi pendorong bagi perkembangan dan kebaikan sebuah bangsa.¹ Pendidikan multikultural adalah proses penanaman tatacara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.²

Azyumardi menyebutkan pendidikan multikultural merespon keberagaman kebudayaan dalam perubahan demografi dan budaya lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan secara keseluruhan.³ Prudence Crandall mengemukakan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (*etnis*), ras, adat istiadat, agama/ aliran kepercayaan dan budaya. Andersen dan Custer mengatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keberagaman budaya.⁴

Perkembangan pendidikan multikultural di dunia seperti masyarakat multikultural Amerika Serikat bersifat antar budaya etnis yang besar, yaitu budaya antar bangsa. Ada upaya untuk mengubah pendidikan multikultural dari yang bersifat asimilasi (berupa penambahan materi multikultural) menuju ke arah yang lebih radikal berupa aksi sosial, terkait nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan pada suatu masyarakat melalui sistem pendidikan, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi atau

¹Wasitohadi. *Gagasan dan Desain Pendidikan Multikultural di Indonesia dalam Scholaria*. Vol. 2. No. 1. Januari 2012, h. 116-149

²Banks, J. A. and Cherry A. Banks, (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspective*, (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989).

³Imron, Mashadi. *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme*. Balai Litbang Agama. (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009), h. 48

⁴H. A. Dardi Hasyim, Yudi Hartono. *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. (Surakarta: UPT penerbitan dan percetakan UNS, 2008), h. 28

toleransi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Mereka telah melaksanakannya sebagai upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam. Murrell P. menyebutkan pendidikan multikultural berkembang di dalam masyarakat Amerika Serikat bersifat etnis, budaya antar bangsa yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional, bertujuan proses Amerikanisasi.⁵

Multikultural di Indonesia bersifat normatif. Maksudnya petunjuk tentang berbagai kepentingan yang membimbing pada pengakuan yang lebih tinggi mengenai kebangsaan dan identitas kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Multikultural normatif pertama sekali diamanatkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia mencakup berbagai kelompok, etnis, telah berbagi komitmen dalam membangun bangsa Indonesia. Di dalam pendidikan multikultural terletak tanggung jawab yang besar untuk pendidikan nasional. Tanpa pendidikan yang difokuskan pada pengembangan perspektif multikultural dalam kehidupan, maka tidak mungkin menciptakan keberadaan aneka ragam budaya dalam masyarakat Indonesia di masa depan dan hanya multikultural yang dapat disikapi melalui pendidikan.

Pendidikan multikultural merupakan wacana lintas batas, terkait masalah keadilan sosial (*social justice*), demokrasi dan hak asasi manusia.⁶ Pendidikan multikultural diarahkan pada pengembangan kemampuan dalam mengkaji konsep warga Negara Indonesia yang cerdas, memiliki tanggung jawab, partisipatif, dan masyarakat berbudaya. Isnarmi Moeis menyebutkan pendidikan multikultural merupakan upaya mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik mereka, budaya nasional dan antarbudaya etnik lainnya.⁷ Azyumardi Azra menyebutkan pendidikan multikultural sebagai

⁵Murrell, KD, Lichtenfels R, Zarlenga D, Pozio E. 2000. *The systematics of Trichinella with a key to the species*. Vet Parasitol. 93: 293–307. Baca juga; Murrell KD, Pozio E. 2011. *Worldwide occurrence and impact of human Trichinellosis, 1986-2009*. Emerg Infect Dis. 17(12): 2194–2202.

⁶H.A.R Tilaar. *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*. (Indonesia: Tera, 2003), h.167

⁷Isnarmi Moeis. *Pendidikan Multikultural Transformatif. Integritas Moral. Dialog dan Adil*. UNP Press. (Padang: UNP Press, 2014).

pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan budaya lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan secara keseluruhan.⁸ Kebudayaan merupakan dasar budaya atau daya-budi, berarti hal-hal berkaitan dengan pikiran dan hasil dari tenaga pikiran.⁹ Sidi Gazalba menyebutkan kebudayaan adalah tata cara berpikir dan tata cara merasa dalam kehidupan manusia.¹⁰

Kebudayaan berawal dari manusia yang dihadapkan pada persoalan yang harus segera dapat dipecahkan dan diselesaikan. Manusia dituntut mampu menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhannya, upaya yang dilakukan manusia inilah disebut kebudayaan. Khadziq menyebutkan budaya terdiri atas pengetahuan/pendidikan, konsep dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok melalui sistem komunikasi.¹¹ Kebudayaan digunakan dalam menyelesaikan masalahnya (*way of life*) sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan. Dewasa ini manusia kebanyakan melupakan makna kehidupannya, hakikat ciptaannya, dan adat istiadat atau lazim disebut dengan istilah kebudayaan. Perkembangan kebudayaan disebabkan pengaruh globalisasi, modernisasi dan kemajuan teknologi yang makin meningkat. Globalisasi ditandai persaingan antar bangsa yang ketat.¹²

Indonesia sedang mengalami perkembangan kebudayaan yang dilatarbelakangi globalisasi. Globalisasi melahirkan peluang, ancaman, dan tantangan bagi kehidupan manusia di berbagai belahan bumi, termasuk imbasnya adalah kebudayaan bangsa (*culture and tradition*). Sejarah kebudayaan bangsa Indonesia masa lalu bersifat primitif dan kental seni, agama dan perilaku yang diturunkan secara turun-temurun seperti: saling tolong menolong, bahu membahu, rasa kepedulian dan saling sapa menyapa,

⁸Imron, Mashadi, *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme*. Balai Litbang Agama. (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009), h. 48

⁹ Sidi Ghazalba. *Masjid Pusat dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1996), h. 36-38

¹⁰Sidi Gazalba. *Ibid.*, h. 44

¹¹H.A.R Tilaar. *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*. (Indonesia:Tera, 2003), h.167

¹²J.M. Juran, *How to Think about Quality* dalam *Juran's Quality Handbook*, eds. Joseph M. Juran et al. (New York: MCGraw-Hill Companies, Inc., 1999), h. 2.

namun sekarang berangsur-angsur mulai luntur seiring perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, sehingga manusia disibukan dengan *handphonenya* dan sifat individualisme makin meningkat khususnya pada masyarakat perkotaan.

Perkembangan kebudayaan di Bengkulu, memiliki kebudayaan Festival Tabot yang dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram setiap tahunnya. Festival Tabot dapat menarik minat wisatawan dari berbagai daerah, se-Provinsi Bengkulu, seperti; Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Budaya yang ada dari masing-masing kabupaten disandingkan dan diperlombakan, sehingga berbagai budaya, suku, daerah, etnis, adat istiadat dan agama, bersatupadu disatukan dalam bingkai keberagaman budaya festival tabot dan diakui keberadaannya oleh pemerintah daerah dan masyarakat Bengkulu, seperti muatan lokal menjadi kurikulum lokal pada sekolah/madrasah se-Provinsi Bengkulu.

Khususnya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu memiliki program studi Program Doktor S-3 Pendidikan Agama Islam (PAI) Multikultural, memuat mata kuliah kurikulum Pendidikan Agama Islam Multikultural. Bab ini membahas tentang konsep kebudayaan, budaya dan lingkungan, pranata kebudayaan, hakikat pendidikan multikultural, dasar pendidikan multikultural, tujuan pendidikan multikultural, fungsi pendidikan multikultural dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

B. Konsep Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata *cultuure* (Belanda), *culture* (Inggris) dan *colere* (Latin) yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan terutama pengolahan tanah yang kemudian berkembang menjadi segala daya dan aktifitas manusia dalam mengolah dan mengubah alam. Sidi Ghazalba menyebutkan budaya berasal dari kata budi-daya, dari

bahasa Sansekerta yang berarti daya-budi. Secara harfiah berarti hal-hal yang berkaitan dengan pikiran dan hasil dari tenaga pikiran tersebut.¹³

Budaya berasal dari bahasa Indonesia (Sansekerta) *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari buddhi berarti budi atau akal.¹⁴ Pendapat lain budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya, berarti daya dari budi. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut, beberapa pendapat ahli antropologi dunia tentang definisi kebudayaan sebagai berikut: (1) E.B.Tylor (*Primitive Culture*): keseluruhan kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan lain seperti kebiasaan manusia yang bermasyarakat; (2) Sunaerjo Kolopaking: kebudayaan adalah totalitet dari pada milik dan hasil usaha (prestasi) manusia yang diciptakan oleh kekuatan djiwa dan oleh proses saling mempengaruhi antara kekuatan-kekuatan djiwa tadi dan antara djiwa manusia yang satu dan jiwa manusia yang lain;¹⁵ dan (3) Kunjtaraningrat: kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil keakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Masyarakat kebudayaan diartikan *the general body of the art* meliputi seni sastra, seni musik, seni pahat, seni rupa dan pengetahuan filsafat. Kebudayaan merupakan hasil budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup atau segala sesuatu yang diciptakan manusia baik yang konkret maupun abstrak. Sidi Ghazalba mendefinisikan kebudayaan sebagai tatacara berpikir dan tata cara merasa, yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial, dalam suatu ruang dan waktu.¹⁷ Budaya dan kebudayaan melekat pada proses berpikir manusia.

¹³Sidi Ghazalba. *Masjid Pusat dan Kebudayaan Islam*. (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1996), h. 36-38

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Edisi keempat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).

¹⁵Libat Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: UI Press, 1987), h.42

¹⁶Sidi Ghazalba, *ibid.*, h. 36-38

¹⁷Sidi Ghazalba. *Ibid.*, h. 44

Manusia mempunyai akal dan pikir. Berpikir adalah kerja organ sistem syaraf manusia yang berpusat di otak terhadap sesuatu guna memperoleh ide tentang kebenaran. Pada dasarnya ada dua macam pemikiran: (1) pemikiran untuk mencari hakikat kebenaran tentang sesuatu. Pemikiran ini muncul setelah melalui pancaindranya seseorang yang ingin tahu lebih dalam tentang hakikat dan asal-muasal kejadian sesuatu. Macam ini merupakan manifestasi dari rasa ingin tahu (*curiosity*) yang dimiliki setiap manusia. Setiap orang selalu ingin tahu lebih dalam tentang hal yang telah diterima oleh indra, yang selanjutnya menjadi tugas akal pikiran untuk menjawabnya. Akan tetapi, karena banyaknya rangsangan indra dan banyaknya rasa ingin tahu seseorang, maka akal melakukan seleksi sesuai skala prioritas yang dibutuhkan individu untuk dipikirkan secara serius; dan (2) pemikiran untuk memecahkan persoalan yang melekat pada dirinya, sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan jasmaniah, seperti rasa lapar, sakit, penderitaan dan menuntut kerja akal untuk memecahkan persoalan tersebut, supaya keluar dari hal tersebut.¹⁸

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan belajar dan tersusun dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut: (1) kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia yang meliputi kebudayaan material (bersifat jasmaniah) dan kebudayaan nonmaterial (bersifat rohaniah); (2) kebudayaan tidak diwariskan secara generatif (biologis) melainkan dengan belajar; (3) kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat; dan (4) kebudayaan adalah kebudayaan manusia.

Khadziq menyebutkan budaya mencakup 3 (tiga) kata kunci sebagai berikut: (1) gagasan; (2) perilaku; dan (3) hasil karya manusia. Sebagai pedoman pembahasan, pengertian kebudayaan merupakan program bertahan hidup dan adaptasi suatu kelompok dengan lingkungannya. Program budaya terdiri atas pengetahuan/pendidikan, konsep dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota kelompok melalui sistem komunikasi. Pendidikan

¹⁸Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), h. 29-30

multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial (*social justice*), demokrasi dan hak asasi manusia.¹⁹

Amerika Serikat ketika ingin membentuk masyarakat baru pascakemerdekaannya pada 4 Juli 1776 baru disadari bahwa masyarakatnya terdiri atas berbagai ras dan asal negara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini Amerika mencoba mencari terobosan baru, yaitu dengan menempuh strategi menjadikan sekolah sebagai pusat sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai baru yang dicita-citakan atau dalam bahasa lain, sekolah sebagai medium transformasi budaya.

Melalui pendekatan ini, nilai-nilai budaya yang harus diwariskan kepada generasi penerus dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT), maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Intinya, toleransi pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan bersama, tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat.²⁰

Kebudayaan Indonesia saat ini, sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh globalisasi.²¹ Globalisasi melahirkan peluang, ancaman, dan tantangan bagi kehidupan berbangsa di berbagai belahan bumi, termasuk imbasnya adalah kebudayaan bangsa Indonesia.

Kebudayaan mencakup subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok minoritas dalam berbagai bidang, seperti; sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Paradigma seperti ini mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang *ethnic studies* untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar

¹⁹H.A.R Tilaar. *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*. (Jakarta: IndonesiaTera, 2003), h.167

²⁰Murrell, KD, Lichtenfels R, Zarlenga D, Pozio E., *The systematics of Trichinella with a key to the species*. Vet Parasitol. 93, 2000: 293–307. Baca juga; Murell KD, Pozio E., *Worldwide occurrence and impact of human Trichinellosis*, 1986-2009. Emerg Infect Dis. 17(12), 2011: 2194–2202.

²¹Maksum, Ali. *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Malang: Aditya Media, 2011).

sampai perguruan tinggi yang bertujuan untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural seperti: toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, dan mediasi.²²

Model kebudayaan yang pernah dikembangkan di negara-negara maju, dikenal 5 (lima) pendekatan, yaitu: (1) pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme; (2) pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan; (3) pendidikan bagi *pluralisme* kebudayaan; (4) pendidikan dwi-budaya; dan (5) pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Konsep pendidikan keberagaman budaya, utamanya di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada telah melaksanakannya upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, pendidikan multikultural berkembang di dalam masyarakat Amerika bersifat etnis, budaya antar bangsa yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional, bertujuan proses Amerikanisasi.²³

Banks menyebutkan ada 4 jenis dan fase perkembangan pendidikan multikultural, yaitu; (1) pendidikan bersifat segregasi, memberikan hak berbeda antara kulit putih dan kulit berwarna terutama terhadap kualitas pendidikan; (2) pendidikan menurut konsep Salad Bowl. Masing-masing kelompok etnis berdiri sendiri yang hidup bersama-sama sepanjang yang satu tidak mengganggu yang lain; (3) konsep *Melting pot*, masing-masing kelompok

²²H.A.R Tilaar. *Kekusaan Dan Pendidikan Suatu Tinjauan Dan Persepektif Studi Kultural*. (Jakarta: IndonesiaTera, 2003), h.167

²³Murrell, KD, Lichtenfels R, Zarlenga D, Pozio E. 2000. *The systematics of Trichinella with a key to the species*. Vet Parasitol. 93: 293–307. Baca juga; Murell KD, Pozio E. 2011. *Worldwide occurrence and impact of human Trichinellosis, 1986-2009*. Emerg Infect Dis. 17(12): 2194–2202.

etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antara sesamanya. Namun, dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama, meskipun masing-masing kelompok tersebut mempertahankan bahasa serta unsur-unsur budayanya tetapi apabila perlu unsur-unsur budaya yang berbeda-beda tersebut ditinggalkan demi untuk menciptakan persatuan kehidupan sosial yang berorientasi sebagai warga Negara Amerika Serikat. Kepentingan Negara di atas kepentingan kelompok, ras, dan budaya; (4) Pendidikan multikultural melahirkan suatu pedagogik baru serta pandangan baru mengenai praksis pendidikan yang memberikan kesempatan serta penghargaan yang seragam terhadap semua anak tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, warna kulit, adat istiadat, serta agamanya.²⁴ Dengan demikian studi tentang kebudayaan dalam kehidupan manusia menjadi sangat signifikan.

C. Budaya dan Lingkungan

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan karena pada dasarnya manusia dan budaya tidak terpisah dari lingkungannya. Manusia dan budaya merupakan kolektivitas permanen yang hidup bersama dan berinteraksi dengan berbagai lingkungan yang mengitari dirinya dan harus bertahan hidup dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Keberhasilan bertahan hidup suatu kelompok bergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi kelompok sebagai berikut.

Pertama, anggota kelompok sosial harus hidup bersama dan berinteraksi. Kelompok sosial sebagai satu keseluruhan memiliki kelompok lain sebagai tetangga yang membentuk lingkungan sosial yang saling berinteraksi. Beberapa dari kelompok ini ada interaksi lokal dan memungkinkan interaksi tatap muka, sedangkan yang lain lebih berjarak. Dalam skala dunia, kelompok sosial utama seperti negara hidup dalam

²⁴James A Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice in Review of research in Education*, vol. 19, 1993, edited by L. Darling- Hammond. Washington D.C.: American Educational Research Association, Baca juga: James A, Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey Bass, 2001)

lingkungan sosial regional dan global dan harus beradaptasi dengan negara lain. Bagian budaya sebagian besar tersusun dari semua kebiasaan dan aturan yang memungkinkan semua skala interaksi yang berbeda ini dilakukan.²⁵

Kedua, ada suatu jenis lingkungan yang biasanya kita tidak memikirkannya karena tidak terlihat atau berinteraksi di dalam dunia ini. Namun faktanya, jutaan manusia sangat mempengaruhi hidup. Asalnya terletak pada pemikiran terhadap dorongan manusia yang mendasar (*a basic human drive*) atau kebutuhan universal untuk menemukan makna dan penjelasan dalam hidupnya. Cara memuaskan kebutuhan makna ini adalah mengembangkan keyakinan bahwa hidup ditentukan oleh sesuatu yang lebih tinggi, yang adanya di luar umat manusia, seperti Tuhan atau hal-hal supranatural lainnya. Tanpa memasukkan lingkungan metafisik dalam pembahasan kita, sulit untuk memahami secara utuh mengapa beberapa kelompok sosial hidup sebagaimana mereka lakukan. Misalnya, suku Baduy di Jawa Barat yang lebih menghargai kakinya untuk diberi bantal ketika sedang tidur daripada kepalanya karena memandang bahwa kaki lebih digunakan untuk menopang seluruh anggota tubuh mereka. Hal esensial tentang praktik dan berbagai tempat lain di dunia ini adalah lingkungan metafisik yang demikian itu nyata bagi yang mempercayainya seperti halnya Allah bagi orang Islam.²⁶

D. Pranata Kebudayaan

Pranata (*institution*) dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia dalam ruang dan waktu. Menurut Koentjaraningrat pranata kebudayaan sebagai berikut: (1) *kinship* atau *domestic institutions*; (2) *economic institutions*; (3) *educational institutions*; (4) *scientific institutions*; (5)

²⁵Sutarno, *Pendidikan Multikultural*, (Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam, 2007), h. 21

²⁶<http://Pujirokhayanti999.blogspot.com/2013/12/Makalah-Hakikat-Kebudayaan.html?m=1>

aesthetic and recreational institutions; (6) *religious institutions*; dan (7) *somatic institutions*.²⁷

1. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan (*kinship* atau *domestic institutions*), misalnya perkawinan, pengasuhan anak;
2. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda (*economic institutions*), misalnya pertanian, industri, koperasi, pasar;
3. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna (*educational institutions*), misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan;
4. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta (*scientific institutions*), misalnya penjelajahan luar angkasa,
5. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan keindahannya dan rekreasi (*aesthetic and recreational institutions*), misalnya batik, seni suara, seni gerak, seni drama, olahraga,
6. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib (*religious institutions*), misalnya masjid, doa, kenduri, upacara, pantangan, ilmu gaib,
7. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia (*somatic institutions*), misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran.²⁸

Pranata yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia dalam ruang dan waktu. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia, seperti: perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan dan kedokteran.

²⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 1974), h.18

²⁸Koentjaraningrat, *Ibid.*, h.18

E. Hakikat Pendidikan Multikultural

Hakikat multikultural adalah program bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan bisa berwujud gagasan, sistem sosial/perilaku dan hasil karya. Dalam dunia multikultural mementingkan berbagai macam perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya dan menfokuskan pada pemahaman dan hidup bersama dalam konteks sosial budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural harus dibelajarkan sejak dini, sehingga anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan *usage, folkways, mores, dan customs*.²⁹ Dengan pendidikan multikultural, peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender dan kemampuan akademik pendidikan.

Hakikat pendidikan multikultural sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi masyarakat Indonesia yang cukup majemuk dan daerah yang berpulau-pulau, merupakan konsep dasar dari sebuah perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pendidikan multikultural diyakini mampu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya, walaupun hal itu dilatarbelakangi oleh kondisi yang berbeda.³⁰

Pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi. Kurikulum menampilkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek. Para peserta didik lebih baik berbicara tentang rasa hormat diantara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerja sama, Pendidikan berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang

²⁹Sutarno, *Pendidikan Multikultural*, (Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam, 2007), h. 16

³⁰Suradi Ahmad, *Pendidikan Islam Multikultural*, (Bengkulu: Samudra Biru, 2018), h. 305-306

kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerjasama aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. H.A.R. Tilaar menyebutkan konsesi pendidikan multikultural merupakan keseluruhan dinamika budaya suatu masyarakat. Tinjauan studi kebudayaan harus diadakan melalui lintas batas (*Border crossing*) yang melangkahi batas-batas pemisah tradisional dari disiplin dunia akademik yang kaku, sehingga pendidikan multikultural tidak terikat pada horizon sempit yang hanya melihat pendidikan di sekolah (*school education*) dan proses pendidikan tidak melebihi sebagai proses transmisi atau reproduksi ilmu pengetahuan kepada generasi yang akan datang.³¹

Pendidikan multikultural menurut James A. Bank adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.³² Pendidikan multikultural harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran termasuk dalam setiap interaksi yang dilakukan diantara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Jenis pendidikan ini merupakan pedagogis kritis, reflektif dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, maka pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.

Bikhu Parekh menyebutkan pendidikan multikultural sebagai *an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives.*³³ Maksudnya multikultural dalam pendidikan, yaitu identitas,

³¹H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan, Suatu Tinjauan Dari Perspektif Kultural*, (Jakarta: Indonesia Tera, 2003), h.202

³²James A. Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey Bass, 2001), h.28

³³Parekh Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and political Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 2000), h.230

keterbukaan, diversitas budaya, dan transformasi sosial. Identitas sebagai elemen dalam pendidikan menyebutkan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu budaya tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya dalam sikap pribadi atau kelompok masyarakat dengan identitas mereka berinteraksi, saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, termasuk interaksi antar budaya yang berbeda. Dalam pendidikan multikultural identitas diasah melalui interaksi budaya internal maupun eksternal. Dengan demikian identitas dan budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam kurikulum pendidikan multikultural.³⁴

Konsep pendidikan multikultural menjadi komitmen global. Sanusi menyebutkan empat pesan dalam rekomendasi Unesco, yaitu: (1) pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerjasama dengan yang lain; (2) pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat; (3) pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan; dan (4) pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik, sehingga mereka mampu membangun kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara secara lebih kokoh.³⁵

James A. Banks menyebutkan 5 dimensi hakikat pendidikan multikultural dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan peserta didik, yaitu sebagai berikut:

³⁴Hamalik, Oemar, 2008, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. (Bandung: Rosdakarya, 2008)

³⁵Banks, J. A. and Cherry A. Banks. (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspective*, (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989).

1. Dimensi integrasi isi/materi (*content integration*).

Dimensi ini adalah oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan sudut pandang yang berbeda. Seperti pendekatan umum dengan mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja kedalam kurikulum mereka dengan tidak membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak diubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural;

2. Dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*).

Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;

3. Dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*).

Usaha guru membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku *intergroup* yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus;

4. Dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*).

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dalam aktivitas belajar yang

dapat digunakan sebagai upaya melakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar;

5. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*).

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstrakurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada disekolah.³⁶

F. Dasar Pendidikan Multikultural

Choirul mahfud menyebutkan dasar pendidikan multikultural sebagai berikut. (1) Kesadaran nilai penting keragaman budaya. Pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian integral dari kebudayaan universal; (2) Gerakan pembaharuan pendidikan. Ini ditujukan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di masyarakat. Seperti kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk masuk sekolah favorit itu. Sedangkan siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu; (3) Proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses (pendidikan) yang tujuannya

³⁶James A Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice in Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington D.C.: American Educational Research Association, 1993

tidak pernah terealisasi secara penuh. Pendidikan multikultural harus dipandang sebagai suatu proses terus menerus, dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh bukan sekedar meningkatkan skor.³⁷

H.A.R. Tilaar menyebutkan pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan baru.³⁸ Sebab jiwa dari globalisasi itu merupakan informasi yang tidak berbatas (*borderless information*), globalisasi yang dikenal dengan *global village*, muncul disebabkan perkembangan teknologi informasi. Dalam situasi inilah terjadinya proses lintas budaya yang mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lainnya. Pertemuan nilai-nilai budaya ini, tentunya dapat menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna ataupun sebaliknya.

Dalam konteks kebudayaan nasional, Tilaar menjelaskan bahwa globalisasi tidak diasumsikan sebagai massifikasi umat manusia tetapi sebaliknya menonjolkan individualitas manusia. Individualitas atau identitas suatu bangsa sebagai aset kekayaan manusia itu sendiri. Globalisasi bukan mengancurkan budaya bangsa, tetapi justru menyuburkan hidupnya berbagai jenis budaya global sebagai sumbangan bagi lahirnya mozaik budaya internasional yang lebih marak.³⁹

Untuk itu dalam konsepsi Tilaar pendidikan multikultural tidak terlepas dari keseluruhan dinamika budaya suatu masyarakat. Oleh sebab itu, tinjauan studi kultural haruslah diadakan melalui lintas batas (*border crossing*) yang melangkahi batas-batas pemisah yang tradisional dari disiplin-disiplin dunia akademik yang kaku sehingga pendidikan multikultural tidak terikat pada horison sempit yang hanya melihat pendidikan di sekolah (*school education*)

³⁷Choirul mahfud, *pendidikan multicultural*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2009), h.9

³⁸H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 137

³⁹H.A.R. Tilaar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi Visi, Misi dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*, (Jakarta: Grasindo, 1997), h. 56

dan proses pendidikan tidak melebihi sebagai proses transmisi atau reproduksi ilmu pengetahuan kepada generasi yang akan datang.⁴⁰

G. Tujuan Pendidikan Multikultural

Tujuan pendidikan agama Islam berwawasan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran agama Islam ke arah memberikan peluang seragam pada setiap anak. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan yang dihargai. Hal ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya *civitas academica* sekolah. Ketika siswa berada diantara sesamanya yang belatar belakang berbeda, mereka harus belajar satu dengan lainnya, berinteraksi dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan diantara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Tujuan pendidikan agama Islam berwawasan multikultural adalah untuk membantu siswa: (1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat; (2) menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosiohistoris etnik; (3) menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purbasangka; (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan keterasingan etnik; (5) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis melalui visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas; dan (6) mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.⁴¹

Tujuan Pendidikan Multikultural, sebagai berikut.

1. Pengembangan Literasi Etnis dan Budaya

Mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan, peristiwa kritis, individu yang berpengaruh, kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis mayoritas dan minoritas.

⁴⁰H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Study Kultural*. (Jakarta: Indonesia Tera, 2003), h. 202

⁴¹Suradi Ahmad, *Pendidikan Islam Multikultural*, (Bengkulu: Samudra Biru, 2018), h.316

2. Perkembangan Pribadi

Menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya yang berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa yang berisi pemahaman yang lebih baik tentang diri yang lebih baik tentang diri yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan presentasi intelektual, akademis dan sosial siswa.

3. Klasifikasi Nilai dan Sikap

Merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat untuk tumbuh-kembang lebih lanjut.

4. Kompetensi Multikultural

Dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antarpribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang dan kerangka berpikir alternatif dan menganalisa bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan dan perilaku.

5. Kemampuan Keterampilan Dasar

Untuk memfasilitasi pembelajaran yang melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis dengan memberi materi dan teknik yang lebih bermakna untuk kehidupan dan kerangka berpikir dari siswa yang berbeda secara etnis.

6. Persamaan dan keunggulan pendidikan

Tujuan persamaan multikultural berkaitan erat dengan tujuan penguasaan keterampilan dasar, namun lebih luas dan lebih filosofis. Untuk menentukan sumbangan komperatif terhadap kesempatan belajar, pendidikan harus memahami budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar dan keputusan pendidikan.

7. Memperkuat pribadi unruk reformasi sosial

Tujuan terakhir dari pendidikan multikultural adalah memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya meluas ke masyarakat. Tujuan ini melengkapi siswa sehingga mereka menjadi agen perubahan sosial (*social*

change agents) yang memiliki komitmen yang tinggi dengan reformasi masyarakat dengan reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan (*disparitis*) etnis dan rasial dalam kesempatan dan kemauan untuk bertindak berdasarkan komitmen ini. Untuk melakukan itu, mereka perlu memperbaiki pengetahuan mereka tentang isu etnis di samping mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, keterampilan tindakan sosial, kemampuan kepemimpinan dan komitmen moral atas harkat dan persamaan.

8. Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh

Dengan mengetahui kekayaan budaya bangsa itu tumbuh rasa kebangsaan yang kuat. Rasa kebangsaan itu tumbuh dan berkembang dalam wadah Negara Indonesia yang kokoh. Untuk itu pendidikan multikultural perlu menambahkan materi, program dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, diskriminasi dan *stereotype*.

9. Memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga negara dunia

Hal ini berarti individu dituntut memiliki wawasan sebagai warga dunia (*world citizen*). Namun, siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang hal yang ada di sekitar lokalnya. Mahasiswa diajak berpikir secara internasional dengan mengajak mereka untuk tetap peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya – *act locally and think globally*.

10. Hidup berdampingan secara damai

Dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain dan pada gilirannya dapat hidup bersampingan secara.⁴²

Zakiyuddin Baidhawi menjelaskan bahwa ada dua tujuan yakni awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Pada dasarnya tujuan awal pendidikan multikultural, yaitu membangun

⁴²Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.9

wacana pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan ataupun mahasiswa umum. Harapannya adalah jika mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai *pluralisme*, *humanisme* dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya.⁴³ Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis dan humanis. Hal ini dikarenakan tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural.⁴⁴

Berdasar tujuan pendidikan multikultural tersebut, pendidikan multikultural berupaya mengajak warga pendidikan untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang alamiah (*natural sunnatullah*). Menurut Suprpto, pendidikan multikultural menanamkan kesadaran kepada mahasiswa akan kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), kemajemukan (*plurality*), kebangsaan, ras, suku, bahasa, tradisi, penghormatan agama, menghendaki terbangunnya tatanan kehidupan yang seimbang, harmoni, fungsional dan sistematis serta tidak menghendaki terjadinya proses diskriminasi, kemanusiaan (*humanity*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratism values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.⁴⁵ Selain itu, tujuan pendidikan multikultural merupakan transformasi pembelajaran kooperatif di dalam proses pembelajaran setiap individu untuk mempunyai kesempatan yang seragam. Sedangkan, transformasi pembelajaran kooperatif itu sendiri mencakup pendidikan belajar mengajar, konseptualisasi dan organisasi belajar.

⁴³Zakiyuddin Baidhawiy. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 109

⁴⁴Zakiyuddin Baidhawiy. *Ibid.*, h. 110

⁴⁵Suprpto, *Penanaman Dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural*. Jurnal penelitian pendidikan agama dan keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret 2009.

Suatu strategi pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil, seperti pembelajar bekerja bersama, belajar satu dengan yang lain, berdiskusi, dan saling membagi pengetahuan, saling berkomunikasi, saling membantu untuk memahami materi pembelajaran, sehingga setiap anggota kelompok bertanggungjawab terhadap keberhasilan setiap anggota kelompoknya.

H. Fungsi Pendidikan Multikultural

The National Council for Social Studies (Goski, 2001) mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Fungsi pendidikan multikultural sebagai berikut: (1) memberi konsep diri yang jelas; (2) membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarah; (3) membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat; (4) membantu mengembangkan pembuatan keputusan (*decision making*), partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan (*citizenship skills*); dan (5) mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa.⁴⁶

Parsudi Suparlan menyebutkan multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Multikultural mengulas berbagai permasalahan seperti; politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas.⁴⁷

Multikulturalisme ini menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural karena multikulturalisme sebagai ideologi yang mengakui perbedaan dan kesederajatan baik secara individual maupun kelompok. Model multikulturalisme, masyarakat mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat, seperti sebuah mozaik. Multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan. Melalui pendidikan

⁴⁶Sutarno, *Pendidikan Multikultural*, (Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam, 2007), h. 61

⁴⁷Suparlan, Parsudi. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika, 1994).

multikulturalisme ini diharapkan tercapai kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

Malik Fajar menyebutkan, pendidikan multikulturalisme perlu di tumbuh kembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa.⁴⁹ Rahman merekomendasikan pentingnya pendidikan multikulturalisme di sekolah-sekolah seperti kurikulum berbasis kompetensi.⁵⁰

I. Kesimpulan

Kebudayaan sebagai dasar keberadaan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kebudayaan mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah keberagaman budaya. Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat, yang dipersepsikan sebagai jembatan, dalam mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan.

J. Saran

Untuk memperkokoh pluralisme dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk lain dari intoleransi dan dominasi sosial, maka implementasi kebudayaan sebagai keberadaan pendidikan multikultural dituntut berpegang pada prinsip-prinsip; menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang, kurikulum dicapai sesuai penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang

⁴⁸Suparlan, Parsudi. *Ibid.*, 1994

⁴⁹A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).

⁵⁰Rahman, Abdul. *Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala*. e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2, April 2013, h. 77-86

kebudayaan yang beragam, dan harus mendukung prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Suradi, *Pendidikan Islam Multikultural*, Bengkulu: Samudra Biru, 2018.

Asy'arie, Musa, *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*, 2004.

Banks, J. A. and Cherry A. Banks. (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspective*. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989.

Baidhawiy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005

Choirul Mahfud, *Pendidikan Multicultural*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009

H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*, Jakarta: Indonesia Tera, 2003.

Hasyim, H. A. Dardi, Yudi Hartono, *Pendidikan Multikultural di Sekolah*, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.

H. A. R. Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.

H. A. R. Tilaar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi Visi, Misi dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*, Jakarta: Grasindo, 1997.

H. A. R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Study Kultural*, Jakarta: Indonesia Tera, 2003.

Imron, Mashadi, *Pendidikan Agama Islam dalam Persepektif Multikulturalisme*. Jakarta; Balai Litbang Agama, 2009.

James A Banks, "Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice" In *Review of Research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington D.C.: American Educational Research Association, 1993.

James A, Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey Bass, 2001.

- Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1974.
- Libat Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Maslikhah, *Pendidikan Multikultural*. Jawa Tengah: PT. Temprina Media Grafika, 2007.
- Parekh Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and political Theory*, Cambridge: Harvard University Press. 2000.
- Suprpto, *Penanaman dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural*. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret, 2009.
- Sutarno, *Pendidikan Multikultural*, Kalimantan Selatan: Dinas Pendidikan dan FKIP Unlam, 2007.

BAB II

TEORI DASAR MULTIKULTURALISME

A. Pendahuluan

Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme menjamin pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda. Penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok termasuk kelompok minoritas untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan. Chairul Mahdud menyebutkan multikulturalisme adalah keberagaman budaya. Pengakuan martabat kehidupan manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan unik masing-masing.⁵¹

Sidi Gazalba menyebutkan kebudayaan sebagai tata cara berfikir dan merasa, dalam seluruh segi kehidupan, dari segolongan manusia membentuk satu kesatuan sosial, pada suatu ruang dan waktu dalam multikultural.⁵² Realita kebudayaan terkesan tidak sederajat, kebudayaan adalah *steotip* dan penuh prasangka yang muncul dalam hubungan antar budaya, maka berpotensi terjadi konflik sosial dalam masyarakat majemuk. Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. multikultural adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan, sehingga terhindar dari konflik dan perpecahan.⁵³

Kehadiran multikulturalisme sebagai solusi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sesuai perspektif kebudayaan dan keyakinan keagamaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat mengakui kesederajatan dan saling toleransi dalam keberagaman kebudayaan. Multikulturalisme adalah ideologi sebagai alat atau wahana

⁵¹Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 75.

⁵²Sidi Ghazalba, *Sistematika Filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h.44

⁵³Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h. 6.

untuk meningkatkan kesamaan derajat manusia dan kemanusiaannya.⁵⁴ Toleransi adalah nilai dan tradisi dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan multikultural. Dengan toleransi, terwujudnya masyarakat yang rukun, damai, tenteram dan harmonis serta terhindar dalam suasana konfliktual yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi dan tidak stabil. Toleransi memungkinkan masyarakat multikultural bergerak maju secara dinamis dalam situasi sosial yang damai dan stabil.

Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia dengan dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang beragam dan luas. Wacana mengenai multikultural telah memasuki babak baru. Indikasinya, diskusi tentang multikulturalisme. Khususnya di provinsi Bengkulu, baik di lingkungan tradisi akademis, maupun kebijakan publik dan multikulturalisme telah menjadi materi pendidikan, pelatihan, bahkan kursus singkat praktis. Fenomena tersebut khususnya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dibawah pembinaan Kementerian Agama, bahwa multikultural telah menjadi materi kurikulum KKNi mata kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) multikultural, dan telah dibuka program studi Program Doktor (S-3) Pendidikan Agama Islam. Distingi Multikultural, bertujuan mentransformasikan pendidikan dalam menginternalisasikan kesadaran terhadap nilai-nilai multikultural, sehingga dapat mengatasi konflik dan perpecahan.⁵⁵ Dalam dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya.

Pendidikan multikultural sebagai kekhasan keilmuan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dalam integrasi multikultural dengan kurikulum, proses membangun pengetahuan dan pengembangan budaya akademik yang unggul dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan keilmuan dan masyarakat, sehingga dapat membawa masyarakat kampus dalam kerukunan

⁵⁴Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam*, (Surakarta: Universitas Nahdlatul Ulama, Jawa Tengah, 2013), h.132

⁵⁵Data Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019

dan perdamaian, tanpa ada konflik, perpecahan dan kekerasan, meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan dalam mimbar akademik.⁵⁶

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, masyarakat haruslah peka menghadapi perputaran globalisasi. Untuk itu, penulis menjabarkan teori dasar multikulturalisme dalam menjawab problematika kemajemukan. Bab ini membahas tentang pengertian multikulturalisme, sejarah multikulturalisme, teori dasar dan pemikiran multikulturalisme, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi berarti plural, kulturalisme berarti budaya. Berasal dari kata *multi* (plural) dan *kultural* (tentang budaya), multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, berarti mencakup baik keberagaman tradisional, seperti; keberagaman suku, ras, keyakinan agama, adat istiadat maupun keberagaman bentuk sosial kehidupan (*subkultur*) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Sedangkan secara hakiki, terkandung makna pengakuan terhadap martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik.⁵⁷

Menurut para ahli, pengertian multikulturalisme sangat beragam, namun dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan, maka multikulturalisme adalah ideologi menjadi alat dalam meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya.⁵⁸ Multikulturalisme merupakan paham tentang keragaman budaya dan dalam keragaman inilah mulai lahir pemahaman-pemahaman tentang toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian dan sejenisnya.⁵⁹ Multikulturalisme merupakan

⁵⁶Zubaedi, *Ibid.*, h. 58.

⁵⁷Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 75.

⁵⁸Rustam Ibrahim, *Ibid.*, h.132

⁵⁹Achmad Rois, *Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah*, *Epistemé*, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, h. 307-308.

konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan.⁶⁰

Multikulturalisme adalah gerakan sosio-intelektual yang mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perbedaan serta menekankan pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang mempunyai kultur berbeda. Orientasinya adalah kehendak membawa masyarakat dalam suasana rukun, damai, egaliter, toleran, saling menghargai, saling menghormati tanpa ada konflik dan kekerasan serta tanpa menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada.⁶¹ Multikulturalisme merupakan konsep kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat, tanpa ada konflik, perpecahan dan tanpa kekerasan.⁶²

Conrad P. Kottak menjelaskan kultur memiliki beberapa karakter khusus sebagai berikut: 1) kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus; 2) kultur adalah sesuatu yang dipelajari; 3) kultur adalah sebuah simbol; 4) kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami; 5) kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat; 6) kultur adalah sebuah model; dan 7) kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif.⁶³

Kultur dapat diartikan sebagai sebuah sikap dalam bertingkah laku dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Poin penting yang digarisbawahi dari ciri-ciri kultur di atas adalah masing-masing kelompok masyarakat mempunyai keunikan dan kelebihanannya masing-masing, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa kultur yang satu lebih baik dari kultur yang lainnya. Plural berarti pengakuan yang berjenis-jenis, termasuk implikasi politis, sosial dan ekonomi serta demokratis, sehingga komunitas mempunyai keragaman

⁶⁰Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h. 6.

⁶¹Zubaedi, *Islam Dan Benturan Antar Peradaban*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007) h. 54.

⁶²Zubaedi, *Ibid.*, h. 58.

⁶³Achmad Rois, *Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah*, Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, h. 307-308.

budayanya masing-masing.⁶⁴ Intinya, pengakuan yang kesederajatan atas keberbagaian, baik dalam hal agama, suku, maupun budaya.

Multikulturalisme merupakan pandangan ideologis, memperjuangkan keterbukaan dalam perbedaan dengan penuh penghargaan tanpa ada dominasi. Dalam kehidupan beragama, pandangan ini mendasari adanya penghargaan sekecil apapun terhadap sikap hidup, tradisi dan ajaran agama lain tanpa ada dominasi. Semangat multikulturalisme ini ternyata dijunjung tinggi oleh Islam, sebuah potret sejarah perjuangan dakwah Islam bisa dijadikan buktinya. Sejak awal, Islam datang tidak membawa pedang atau senapan. Islam datang dengan damai. Para wali yang menyebarkan Islam di Jawa mengadopsi beberapa peninggalan Hindu seperti wayang untuk kepentingan penyebaran agama. Sunan Kalijaga juga tidak sungkan membakar kemenyan untuk kepentingan pengharum ruangan meski kemenyan tidak identik dengan agama Islam.⁶⁵ Demikian pula pada peristiwa penyembelihan sapi, sapi adalah binatang yang disucikan oleh pemeluk Hindu. Maka pada saat itu Sunan Kudus melarang masyarakatnya untuk menyembelih sapi, dikhawatirkan menyinggung perasaan umat Hindu, namun sampai saat ini masih ditaati oleh masyarakat Kudus, meskipun umat Hindu pada saat ini sukar ditemukan di Kudus.

Para *founding fathers* Indonesia juga memberi contoh nyata dalam menjunjung tinggi semangat multikulturalisme. Para *founding fathers* yang Muslim tidak bersikeras memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam untuk menghormati pemeluk agama lain di Indonesia Timur. Mereka dengan ikhlas mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dianggap menganakemaskan Islam. disamping itu, lambang negara (burung garuda) yang diciptakan Sultan Hamid II dari pontianak merupakan binatang khas agama Hindu. Seperti diketahui, garuda adalah kendaraan Dewa dalam agama Hindu. Kenyataan menarik ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa

⁶⁴R. Ibnu Ambarudin, *Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius*, (Yogyakarta: Madrasah Tsanawiyah Yogyakarta, 2016), h. 30-31.

⁶⁵Zubaedi, *libid.*, h. 55.

founding fathers tidak alergi dengan simbol-simbol agama lain dan menghormati simbol-simbol seperti menghormati simbol-simbol agamanya sendiri,⁶⁶ sebagai strategi dari integrasi sosial.

Multikulturalisme mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya. Hal ini membawa implikasi dalam bersikap bahwa realitas sosial yang sangat majemuk tidak menjadi kendala dalam membangun pola hubungan sosial masyarakat, penuh toleransi. Bahkan dapat tumbuh, hidup berdampingan secara damai, sikap menerima kenyataan dalam keberagaman yang melekat pada tiap-tiap identitas sosial dan politiknya.

C. Sejarah Multikulturalisme

Sejarah multikulturalisme merupakan sejarah awal masyarakat majemuk. Seperti Amerika, Canada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural karena mereka merupakan masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyang tanah asalnya.

Dalam sejarahnya, menurut Melani Budianta, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J. Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protentant* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa.⁶⁷

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori *melting pot* kemudian dikritik dan muncul

⁶⁶Zubaedi, *Ibid.*, h. 57.

⁶⁷Dede Rosyada, *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*, Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2.

teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Anglo Saxon Protestant* (WASP) diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism*, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka.

Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa. Dengan berbagai teori di atas, bangsa Amerika berupaya memperkuat bangsanya, membangun kesatuan dan persatuan, mengembangkan kebanggaan sebagai orang Amerika. Namun pada dekade 1960-an masih ada sebagian masyarakat yang merasa hak-hak sipilnya belum terpenuhi. Kelompok Amerika Hitam atau imigran Amerika Latin atau etnik minoritas lainnya merasa belum terlindungi hak-hak sipilnya. Atas dasar itulah, kemudian mereka mengembangkan *multiculturalism* yang menekankan penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas, baik dilihat dari segi etnik, agama, ras, atau warna kulit.⁶⁸

Multikulturalisme merupakan sebuah konsep membangun kekuatan sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai latar belakang etnik, agama, ras, budaya, dan bahasa dengan menghargai dan menghormati hak-hak sipil mereka termasuk hak-hak kelompok minoritas. Sikap apresiatif tersebut dapat meningkatkan partisipasi dalam membesarkan sebuah bangsa karena mereka akan menjadi besar dengan kebesaran bangsanya dan mereka akan bangga dengan kebesaran bangsanya itu.

⁶⁸Dede Rosyada, *Ibid.*, h. 3

Azyumardi Azra menegaskan bahwa Indonesia menyadari tentang kemajemukan ragam etnik dan budaya masyarakatnya. Indonesia diproklamirkan sebagai sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi, gagasan besar tersebut kemudian tenggelam dalam sejarah dengan politik monokulturnya di zaman Soekarno dan Soeharto.⁶⁹ Soekarno telah mematikan kreativitas-kreativitas lokal daerah yang berbasis etnik dan budaya tertentu. Zaman Soeharto dengan manajemen pemerintahan yang sentralistik, sehingga falsafat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian hanya menjadi slogan tetapi tidak pernah mewujudkan dalam teori ketatanegaraan. Ketika simpul-simpul yang mengikat demokratisasi itu dibuka dan dilepas zaman reformasi, maka gagasan multikulturalisme kini mengemuka dan langsung memasuki wilayah pendidikan, yang seharusnya teori-teori multikulturalismenya itu dirumuskan terlebih dahulu oleh para ahli bidang ilmu-ilmu sosial politik.

Dengan demikian, Indonesia tidak akan memiliki pretensi untuk kembali pada teori *melting pot* atau *salad bowl*. Indonesia dikuatkan oleh para ahli yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan multietnik yang justru menjadikan multikulturalisme sebagai *common platform* dalam mendesain pembelajaran yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika, bahkan nilai-nilai tersebut diupayakan melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan didukung pula oleh pendidikan agama Islam.⁷⁰

Isu-isu politik kebudayaan mengemuka dan berkembang cepat semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. Setelah isu demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pelimpahan sebagian kekuasaan pusat ke daerah-daerah yang dikenal sebagai otonomi daerah mulai tahun 1999, isu multikulturalisme muncul pada tahun 2002 sebagai alternatif yang kuat untuk menjadi perekat baru kesatuan bangsa. Isu multikulturalisme muncul sebagai akibat dari

⁶⁹Azra, Azyumardi, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai gagasan yang Berserak*, (Bandung: Nuansa, 2005).

⁷⁰Dede Rosyada, *Ibid.*, h. 4.

kesadaran bahwa kesatuan bangsa dan integrasi nasional yang selama ini dipelihara berdasarkan politik kebudayaan seragam dianggap makin kurang relevan dengan kondisi dan semangat otonomi daerah (*desentralisasi*) dan kedaerahan turut meningkat sejalan dengan reformasi politik tersebut.

Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an multikulturalisme muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lainnya. Bikhu Parekh menggaris bawahi asumsi dasar yang harus diperhatikan dalam kajian tentang multikulturalisme; (1) Manusia terikat dengan struktur dan sistem budayanya sendiri dimana dia hidup dan berinteraksi. Keterikatan ini tidak berarti bahwa manusia tidak bisa bersikap kritis terhadap sistem budaya tersebut, tetapi mereka dibentuk oleh budayanya dan selalu melihat segala sesuatu berdasarkan budayanya tersebut; (2) perbedaan budaya merupakan representasi dari sistem nilai dan cara pandang tentang kebaikan yang berbeda pula. Hal ini tidak berarti menegaskan koherensi dan identitas budaya, tetapi budaya pada dasarnya adalah sesuatu yang majemuk, terus berproses, dan terbuka.⁷¹

Semenjak Presiden Soeharto turun dari kekuasaannya, Indonesia dikenal sebagai era reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak akhir 1997, pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural didalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan masyarakat (*fabric of society*) tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat.⁷²

Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita. Disorientasi, dislokasi, atau krisis-budaya di kalangan masyarakat kita semakin merebak seiring dengan meningkatnya penetrasi dan ekspansi

⁷¹Bikhu Parekh. *What Is Multiculturalism?* Dalam Jurnal India Seminar, Desember 1999. Raz J. *Ethics in Public Domain: Essays in the Morality Of Law And Politics* (Oxford: Clarendon Press, 1996), h. 177.

⁷² Azra, Azyumardi. *Mengkaji kembali secara terbuka prinsip-prinsipkeseimbangan baru di antara masyarakat yang berbeda. Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan*. Cet. I; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999)

budaya Barat khususnya Amerika sebagai akibat proses globalisasi yang terus tidak terbendung.

Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya alien (asing), yang tidak memiliki basis kulturalnya dalam masyarakat kita, semakin menyebar dalam masyarakat kita sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan gaya hidup baru yang tidak selalu sesuai dengan kondusif kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat seperti, budaya McDonald, sebagai makanan instan saat ini tersebar di seluruh pelosok Indonesia,⁷³ sehingga setiap kebudayaan dipandang sebagai entitas yang distinktif, keberadaannya harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sinilah lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁷⁴

D. Teori Dasar dan Pemikiran Multikulturalisme

Teori dasar multikulturalisme berawal dari semangat menggali kekuasaan suatu bangsa yang tersembunyi di dalam budaya yang berjenis-jenis. Setiap budaya mempunyai kekuatan. Prinsip multikulturalisme telah menjadi acuan bagi pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan nasional sebagai strategi pendekatan dalam merajut kesatuan dan persatuan bangsa, antar warga yang belakangan ini mudah terbawa dalam suasana penuh konflikual, efek era globalisasi yang penuh keterbukaan.

Zubaedi menyebutkan multikulturalisme dipakai sebagai perangkat analisis atau perspektif guna memahami dinamika keberagaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku, etnis, bangsa, rasial, golongan dan keyakinan agama.⁷⁵ Prinsip multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keberagaman dan perbedaan sosio-kultural setiap kelompok. Paradigma multikulturalisme dalam konteks ini memberi pelajaran tentang memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama lain. Maka dari itu

⁷³Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 81-82.

⁷⁴Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 62.

⁷⁵Zubaedi, *Ibid.*, h. 64.

penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengetahui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya, semangat kerukunan, dan perdamaian dalam masyarakat.

Masyarakat multikulturalisme tidak jauh berbeda dengan konsep pluralisme. Pluralisme penekanannya terhadap keanekaragaman suku, bangsa, dan kebudayaannya sehingga setiap kebudayaan dipandang sebagai entitas yang distinktif, sedangkan multikulturalisme lebih menekankan relasi antar kebudayaan, seperti keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sinilah lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁷⁶

E. Multikulturalisme dalam Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, Bersabda: Takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara.⁷⁷

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya: Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang Arab terhadap non-Arab dan tidak ada keutamaan orang Arab dari orang non-Arab kecuali ketakwaannya.⁷⁸

Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

⁷⁶Zubaedi, *Ibid.*, h. 62.

⁷⁷Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, Juz I, 1992. Baca Juga: Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

⁷⁸Ahmad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut Lebanon: Darul Fikr. Baa Juga: Abdullah bin Abdul Muhsin, Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad, T.A.: T.P.1980

Ditanya kan kepada Rasulullah SAW. Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? maka beliau bersabda: Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran).⁷⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menciptakan perdamaian dan rasa aman bagi kehidupan seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: Siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya. Dan siapa yang menjadikanku sebagai musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat. (H.R. Al-Khotib)

Hadis Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan untuk menjalin komunikasi meskipun dengan non-Muslim. *Artinya:* Jika seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalin, maka jawablah dengan Wa'alaikum.⁸⁰ Hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk bersikap adil dengan memberikan hak secara proposional. Artinya: Allah SWT berfirman, wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diri-Ku sendiri dan Aku menjadikannya haram pula di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi.⁸¹

Agar pemahaman *pluralism* dan toleransi serta berkeadilan dapat tertanam dengan baik pada peserta didik, perlu ditambahkan uraian tentang proses pembangunan masyarakat Madinah setelah hijrah, dalam hal ini dapat ditelusuri dari piagam madinah. Sebagai suatu produk sejarah umat Islam, piagam madinah sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW, berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.⁸²

⁷⁹Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008).

⁸⁰Abu Zahw, Muhammad, *al Hadis wa al- Muhadddisun*, (Beirut: Dar alKitab al- Arabi, 1994).

⁸¹Abu Zahw, Muhammad, *al Hadis wa al- Muhadddisun*, (Beirut: Dar alKitab al- Arabi, 1994).

⁸²Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*,h. 341-344

Menurut Joko Tri Prasetya wujud kebudayaan menjadi 3 macam, yaitu: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya; (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat; (3) wujud benda-benda hasil karya manusia.⁸³ Nilai-nilai ini harus dimasukkan ke dalam materi kurikulum pembelajaran, sehingga melahirkan nilai-nilai berkeadilan, kesetaraan kepada peserta didik, seperti; (1) materi aqidah; (2) materi akhlak; (3) materi fiqih; dan (4) sejarah kebudayaan Islam.

Pertama, materi Aqidah. Dalam pembahasan materi tentang iman kepada Allah SWT, materi yang diusung adalah sifat-sifat Allah SWT. Dalam Asmaul Husna, diantara sifat Allah yang dibahas dan berkaitan dengan nilai multikultural, yaitu Al-Hakim (Maha Bijaksana).

Kedua, materi Akhlak. Materi akhlak memfokuskan kajiannya pada perilaku baik buruk terhadap Allah SWT, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, kelanggengan suatu bangsa bergantung kepada akhlak. Jika suatu bangsa meremehkan akhlak maka punahlah suatu bangsa.

Ketiga, materi Fiqih. Materi fiqih dapat diperluas dengan kajian fiqih siyasah (pemerintahan). Dari fiqih siyasah ini terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman Nabi, sahabat, ataupun khalifah-khalifah setelahnya. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia yang juga multi-etnis, multikultur dan multiagama.⁸⁴

Keempat, Materi Sejarah Kebudayaan Islam. Materi sejarah kebudayaan Islam yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang di terapkan Nabi Muhammad SAW. Ketika membangun masyarakat Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleransi.

⁸³Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Cet. 3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 32

⁸⁴Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 342-343

F. Kesimpulan

Teori dasar multikulturalisme berawal dari keberagaman budaya, yang menekankan kepada kesejahteraan, toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian dan saling menghargai. Isu multikulturalisme muncul pada tahun 2002 sebagai dampak kesadaran bahwa kesatuan bangsa dan integrasi bangsa, politik keberagaman dianggap semakin kurang relevan dengan kondisi dan semangat otonomi daerah (*desentralisasi*) dan kedaerahan turut meningkat reformasi politik tersebut. Multikulturalisme muncul pertama sekali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Dengan mengakui keberagaman dalam masyarakat dengan mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir teori dasar multikulturalisme yaitu demokrasi, toleransi, kesetaraan, saling menghormati dan menghargai.

G. Saran

Teori dasar multikulturalisme bertujuan mewujudkan kesejahteraan, toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian dan saling menghargai, melindungi segenap keberagaman, Jika pemahaman tentang teori multikultural sudah baik untuk dipertahankan dan jika belum baik untuk diperbaiki dan tingkatkan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera dan harmonis.

Daftar Pustaka

- Achmad Rois, *Pendidikan Islam Multikultural Telaah Pemikiran Muhammad Amin Abdullah*, Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013
- Azra, Azyumardi, *Mengkaji Kembali Secara Terbuka Prinsip-Prinsip keseimbangan Baru di Antara Masyarakat yang Berbeda. Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan*.Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Azra, Azyumardi, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam; Bingkai Gagasan yang Berserak*, Bandung: Nuansa, 2005.

- Bikhu Parekh, "What Is Multiculturalism?" *Dalam Jurnal India Seminar, Desember 1999. Raz J. Ethics in Public Domain: Essays In the Morality of Law and Politics* Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Dede Rosyada, *Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*, Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014.
- Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*, Surakarta: Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta Jawa Tengah, 2013
- R. Ibnu Ambarudin, *Pendidikan Multikultural untuk Membangun Bangsa yang Nasionalis Religius*, Madrasah Tsanawiyah (Yogyakarta: Madrasah Tsanawiyah, 2016.
- Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Zubaedi, *Islam dan Benturan Antar Peradaban*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

BAB III

GAGASAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM

A. Pendahuluan

Gagasan multikulturalisme sangat penting dan strategis untuk dibahas. Indonesia merupakan negara plural dan majemuk terbesar di dunia, dapat dilihat kondisi sosio budaya maupun geografis beragam dan wilayah luas. Memiliki keberagaman kebudayaan, adat istiadat dan keyakinan agama, memiliki potensi konflik dan perpecahan antarmasyarakat, maka gagasan kehadiran multikultural dianggap sangat penting. Seperti lahirnya gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghormati, menghargai antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁸⁵ Sehingga keberagaman tidak berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, pemicu konflik, sehingga rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme.

Multikulturalisme bersikap terbuka terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, suku, adat istiadat, maupun bahasa. Keragaman budaya tersebut membuat masyarakatnya memiliki kekhasan serta perilaku masing-masing. Sikap multikulturalisme meyakini, jika keberagaman tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi menimbulkan konflik, kekerasan dan perpecahan dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika keberagaman tersebut mampu dikelola dengan baik, maka perbedaan justru memperkaya dan berpotensi lebih produktif. Dalam hal ini pendidikan berbasis multikultural menjadi penting.

Pendidikan multikultural merupakan konsep yang relevan untuk konteks Indonesia. Pendidikan multikultural sejalan dengan semboyan bangsa Indonesia Bineka Tunggal Ika yang memiliki pengertian, Indonesia merupakan satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, bahasa,

⁸⁵Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h. 62.

adat istiadat dan keyakinan agama, yang berbeda-beda tetapi dalam memiliki satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

James A. Banks, menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai konsep, ide, falsafah, atau suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk perilaku kehidupan, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.⁸⁶ Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (*etnis*), ras, agama (aliran kepercayaan) dan budaya (*kultural*).⁸⁷ Pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Dengan demikian nantinya diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling pengertian dan keterbukaan, serta semua sikap dan nilai penting bagi harmoni sosial dan perdamaian.⁸⁸

Dede Rosyada menjelaskan bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat atau pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat dan diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman masyarakat.⁸⁹ Pendidikan multikultural dengan pemberian hak yang sederajat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas untuk seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia dan memiliki hak yang

⁸⁶James A, Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed). *Handbook of Research on Multicultural Education*. (San Francisco: Jossey Bass, 2001).

⁸⁷Budianta, Melani, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum, dalam Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Institute for Civil Society, 2003).

⁸⁸Azra, Azyumardi. *Prolog Urgensi Pendidikan Multikultural, Cerita Sukses Pendidikan Multikultural di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syahid Jakarta, 2010). Baca Juga: Baidhawiy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

⁸⁹Rosyada, Dede. *Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama Islam*, dalam *Jurnal Ta'dib*, vol. 11, Nomor 1, Tahun 2008.

sederajat untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini.⁹⁰ Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.⁹¹ Pendidikan multikultural sebagai pendidikan progresif dalam melakukan transformasi pendidikan secara komprehensif yang membongkar segala kekurangan dan kegagalan serta praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan.

H.A.R Tilaar menjelaskan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan baru. Sebab jiwa dari globalisasi itu merupakan informasi yang tidak berbatas (*borderless information*), globalisasi yang dikenal dengan *global village*, muncul disebabkan perkembangan teknologi informasi. Dalam situasi inilah terjadinya proses lintas budaya yang mempertemukan nilai-nilai budaya yang satu dengan yang lainnya. Pertemuan nilai-nilai budaya ini, tentunya dapat menghasilkan nilai-nilai baru yang bermakna ataupun sebaliknya.⁹² Tilaar menyebutkan pendidikan multikultural tidak terlepas dari keseluruhan dinamika budaya suatu masyarakat. Pendidikan multikultural tidak terikat pada horison sempit yang hanya melihat pendidikan di sekolah (*school education*) dan proses pendidikan tidak melebihi sebagai proses transmisi atau reproduksi ilmu pengetahuan kepada generasi berikutnya.⁹³

⁹⁰Suprpto, *Penanaman Dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural*. Jurnal penelitain pendidikan agama dan keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret, 2009.

⁹¹Yaqin, Ainul, M., *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

⁹²Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004).

⁹³Tilaar, H.A.R., *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi Visi, Misi dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*, (Jakarta: Grasindo. 1997).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas dan mendeskripsikan tentang gagasan multikulturalisme di Indonesia dan Dunia Islam. Pembahasan pada Bab ini sebagai berikut; multikulturalisme di Indonesia, multikulturalisme di dunia Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

B. Multikulturalisme di Indonesia

1. Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia

Indonesia memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan kebudayaan. Asumsi ini dibangun berdasarkan data, terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (*lingua franca*), 13.000 pulau dan 5 keyakinan agama resmi. Paling tidak keragaman latar belakang peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan terdapat paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).⁹⁴

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Multikulturalisme terdapat kaitan erat dengan pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun dalam melaksanakannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Multikulturalisme dapat terjadi di Indonesia karena letak geografis Indonesia, perkawinan campur dan iklim.⁹⁵ Dalam perspektif kebudayaan multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari

⁹⁴Data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2015

⁹⁵http://geoenviron.blogspot.com/2013/04/masyarakat-multicultural-dan_1110.html.
Diakses pada tanggal 27 September 2019.

masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut.

Asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *melting pot* yang sudah berjalan lama tentang kultural dominan Amerika khususnya di New York dan California. Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Indonesia merupakan bangsa dengan aneka suku, keyakinan agama, golongan, ras dan kelas sosial atau multikultural seperti; Amerika, Inggris, Canada, walaupun tersusun atas keberagaman, masing-masing bangsa mempunyai latar belakang (*historis*) dalam pengembangannya.⁹⁶

Multikulturalisme relevan dengan demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, kesukubangsaan, kebudayaan, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia dan hak budaya komunitas. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi seperti struktur kegiatan kehidupan manusia mencakup kehidupan sosial, kehidupan ekonomi & bisnis dan kehidupan politik di berbagai kegiatan dalam masyarakat. Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan multikultural. Jame menyebutkan pendidikan multikultural menunjukkan adanya keberagaman.⁹⁷ Sleeter, menyebutkan

⁹⁶Isnarmi Moeis. *Pendidikan Multikultural, Integritas Moral, Dialog dan Adil*. (Padang: UNP Press, 2014), h. 7

⁹⁷Collins, James T. *The Historical Relationship of the Language of Central Maluku, Indonesia*. Baca Juga: James, H., Mc Millan. *Formative Classroom Assessment Theory and Practice*. (New York: Teachers College Press, 2007).

pendidikan multikultural adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas.⁹⁸ Rangkaian kata pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan keyakinan agama.

Pendidikan multikultural dapat ditandai; *pertama*, proses pengembangan sikap dan tata laku, *kedua*, menghargai perbedaan dan keragaman budaya dan *ketiga*, penghargaan terhadap budaya lain. Alasan yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender dan kelas sosial (*social class*). Pendidikan multikultural hadir bersamaan dengan perkembangan sosial dan pendidikan multikultural bisa mempunyai polanya sendiri-sendiri sesuai dengan kesadaran proses pengolahannya.⁹⁹

Pendidikan multikultural sebagai pengembangan kesadaran budaya masih berada dalam taraf *soft* multikulturalisme (kesadaran di permukaan).¹⁰⁰ Seperti pengembangan kurikulum berbasis lokal, hanya mempersiapkan peserta didik dengan kesadaran budaya etnik masing-masing, padahal tujuan pendidikan multikultural adalah mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan budaya etnik masing-masing, budaya nasional, dan antarbudaya etnik lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya membangun Indonesia melalui gagasan pendidikan multikultural menjadi isu strategis dan sangat penting dalam pengelolaan keanekaragaman dengan segala potensi positif dan negatif dilakukan, sehingga keberagaman bukanlah ancaman atau masalah,

⁹⁸Sleeter, Christine E. *Un-Standardizing Curriculum, Multicultural Teaching in the Standards- Based Classroom*. (New York: Teachers College Press, 2005)

⁹⁹Isnarmi Moeis., h. 8-10

¹⁰⁰Isnarmi Moeis., h.10-11

melainkan sumber atau daya dorong positif bagi perkembangan dan kebaikan bersama sebagai sebuah bangsa.¹⁰¹

2. Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia

Berdasarkan tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Multikultural bertujuan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama dan budaya.¹⁰²

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik dan kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; dan (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.¹⁰³ Dengan demikian pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk.

Tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu sikap, pengetahuan dan pembelajaran.¹⁰⁴

1. Aspek sikap (*attitudinal goals*) adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik.

¹⁰¹Wasitohadi, *Gagasan dan Desain Pendidikan Multikultural di Indonesia dalam Scholaria*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2012, h. 116-149

¹⁰²Banks, J. A. and Cherry A. Banks. (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspective*. (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989).

¹⁰³Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural*. Surakarta, Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013, h. 146.

¹⁰⁴Kompasiana.com. *Prinsip dan Dimensi Pendidikan Multikultural*. 22 Januari 2012. Diakses pada tanggal 27 September 2019.

2. Aspek pengetahuan (*cognitive goals*) adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural.
3. Aspek pembelajaran (*instructional goals*) adalah untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran; memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat-alat konseptual untuk komunikasi antar budaya; mengembangkan keterampilan interpersonal; memberikan teknik-teknik evaluasi; membantu klarifikasi nilai; dan menjelaskan dinamika kultural.¹⁰⁵

Berdasarkan tujuan pendidikan multikultural tersebut di atas, maka kurikulum pendidikan multikultural hendaknya mewarnai perspektif fenomena keragaman kultural dalam materi kurikulum. James A. Bank dalam Zoran Minderovic dapat dilakukan dengan empat tahapan, yaitu: (1) tahap kontribusi (*contribution level*), (2) tahap penambahan (*additive level*), (3) tahap perubahan (*transformative level*), dan (4) tahap aksi sosial (*social action level*).¹⁰⁶

Prinsip pendidikan multikultural di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu: (1) Pendidikan multikultural berdasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*); (2) Pendidikan multikultural di tujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya; dan (3) Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruknya yang dibawanya.¹⁰⁷

Pendidikan multikultural pada prinsipnya adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan

¹⁰⁵Kompasiana.com. *Prinsip dan Dimensi Pendidikan Multikultural*. 22 Januari 2012. Diakses pada tanggal 27 September 2019.

¹⁰⁶James A, Bank dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*. (San Francisco: Jossey Bass, 2001).

¹⁰⁷Kompasiana.com. *Prinsip dan Dimensi Pendidikan Multikultural*. 22 Januari 2012. Diakses pada tanggal 27 September 2019.

suatu proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Akan tetapi tidak mudah untuk mendesain pendidikan multikultural secara praktis karena diharapkan dapat menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi di masyarakat, atau paling tidak mampu memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan. Selanjutnya mampu mencerdaskan dan mampu menyadarkan masyarakat pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural.

3. Ciri-ciri Multikulturalisme di Indonesia

Pierre L. Van Den Berghe, menyebutkan ciri-ciri masyarakat multikulturalisme sebagai berikut: (1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain; (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan *consensus* diantara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) Secara relatif seringkali mengalami konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi; dan (6) adanya dominansi politik satu kelompok terhadap kelompok lain.¹⁰⁸

Ciri-ciri masyarakat multikulturalisme sebagai berikut; (1) Integrasi sosial adalah sebuah sistem pembaruan, sehingga terjadi titik temu yang damai. Seperti yang di jelaskan di atas bahwa masyarakat *multikultural* tidak hanya satu kebudayaan, ras, suku, dan agama. Oleh karena dibuat integrasi sosial supaya semua masyarakat saling damai dan mencapai ketentraman bermasyarakat; (2) Segmentasi ialah masyarakat yang terbentuk dari bermacam-macam ras, suku, budaya, dan agama tetapi mereka masih bisa memiliki hal dapat memisahkannya. Seperti halnya yang menjadi pemisah adalah konsep yang diketahui *primodial*. Contohnya di kota besar terdapat berbagai ras, budaya, agama namun mereka tetap memiliki

¹⁰⁸Van den Berghe, Pierre L., *The Ethnic Phenomenon*. (New York: Elsevier, 1981).

ikatan *primordial* daerah; (3) Konsensus rendah disini merupakan keputusan atau kebijakan bersama. Keputusan yang di buat bersama untuk mencapai kesepakatan masyarakat, sehingga memutuskan sebuah keputusan masyarakat yang berbeda-beda; (4) Relatif potensi adanya konflik, di dalam sebuah majemuk pastinya banyak terdiri dari beragam suku, agama, adat dan budaya masing-masing berbeda. Dalam teori ini semakin banyak sebuah perbedaan yang ada di masyarakat maka kemungkinan besar memungkinkan terjadi konflik; dan (5) Karena adanya keberagaman yang terjadi, membuat timbulnya kelompok mayoritas dan minoritas. Di mana yang minoritas selalu ditindas oleh para mayoritas.¹⁰⁹

4. Bentuk Multikulturalisme di Indonesia

Berikut ini merupakan bentuk-bentuk multikultural yang ada di masyarakat; (1) Keanekaragaman ras dapat menunjukkan mengelompokkan manusia yang berdasarkan pada keadaan fisik dan ciri-ciri fisik; (2) Keberagaman agama menunjukkan pada berbagai macam masyarakat. Terdapat beberapa aliran kepercayaan yang telah dianut beberapa suku bangsa khususnya di Indonesia; (3) Keberagaman etnik atau suku bangsa yang menunjukkan kelompok manusia memiliki latar belakang budaya dan disadarkan dengan identitas. Faktor pembeda antar suku bangsa satu dengan yang lainnya adalah bahasa, kesenian, sistem kekerabatan, serta adat istiadat; (4) Masyarakat majemuk yang terdiri atas beberapa kelompok etnik kecil, sehingga tidak memiliki posisi yang dominan dalam aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan politik.¹¹⁰

Bentuk multikulturalisme sebagai berikut; (1) multukulturalisme isolasi; (2) multikulturalisme akomodasi; (3) multikulturalisme otonomi; (4) multikulturalisme kritikal/interaktif; dan (5) multikulturalisme kosmopolitan.¹¹¹

¹⁰⁹Banks, J. A. and Cherry A. Banks. (ed), *Multicultural Education: Issues and Perspective*. (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1989).

¹¹⁰Hefner, Robert. W, ed. *Politik Multikulturalisme. Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta, Widya Sari Press).

¹¹¹Kanisius, 2011. Kusruri, Endri. *Dinamika Masyarakat Pendetang dari Afrika di Purwokerto: Suatu Kajian Historis Sosiologis*. (Yogyakarta, Widya Sari Press, 2011).

Pertama, multikulturalisme isolasi. Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi saling mengenal antara satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

Kedua, multikulturalisme akomodatif. Masyarakat ini memiliki dominan kultural, yang membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan/mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang dominan kultural.

Ketiga, multikulturalisme otonomi. Dalam model ini kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok dalam multikultural jenis ini adalah mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

Keempat, multikulturalisme kritikal/interaktif. Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultural kolektif yang menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas.

Kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, yaitu tiap individu bebas dengan kehidupan-kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Nah itulah beberapa ulasan dari bentuk-bentuk masyarakat multikultural yang bisa anda ketahui dan bisa anda pelajari dalam mengenal masyarakat multikultural.¹¹²

5. Faktor-faktor Terjadinya Multikulturalisme

Faktor-faktor yang menyebabkan multikulturalisme dalam masyarakat adalah sebagai berikut: (1) perbedaan letak geografis; (2) adanya pengaruh budaya luar; (3) kondisi iklim yang berbeda; dan (4) integrasi bersifat nasional.¹¹³

Js. Furnival berpendapat bahwa masyarakat multikulturalisme terjadi karena beberapa penyebab. Berikut beberapa faktor penyebab masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural yaitu antara lain sebagai berikut: (1) keadaan geografis; (2) letak Indonesia; (3) kondisi iklim dan struktur tanah; (4) latar belakang sejarah; dan (5) keterbukaan terhadap budaya luar.¹¹⁴

Pertama, keadaan geografis. Keadaan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya masyarakat yang multikultural. Indonesia terdiri atas banyak pulau. Bentuk wilayah yang terpisah, se-regional dapat mengakibatkan komunikasi antar wilayah terputus sehingga setiap pulau berkembang sendiri-sendiri. Selain itu adanya isolasi geografis karena antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipisahkan oleh hutan belantara dan pegunungan yang tinggi, sehingga mengakibatkan masing-masing pulau yang terpisah mempunyai peradaban yang berbeda satu dengan yang lain.

¹¹²Kanisius, 2011. Kusurri, Endri. *Dinamika Masyarakat Pendetang dari Afrika di Purwokerto: Suatu Kajian Historis Sosiologis*. (Yogyakarta, Widya Sari Press, 2011).

¹¹³Kanisius, 2011. Kusurri, Endri. *Dinamika Masyarakat Pendetang dari Afrika di Purwokerto: Suatu Kajian Historis Sosiologis*. (Yogyakarta, Widya Sari Press, 2011).

¹¹⁴Syam, Nur. *Tantangan Multikultural Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius Horton, 2008)

Kedua, letak Indonesia. Letak Indonesia yang strategis di antara dua samudera, yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik dan juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sehingga Indonesia sebagai jalur lintas perdagangan internasional, yaitu antara India, Cina dan Asia Tenggara. Kondisi strategis antara dua samudera dan dua benua merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa–bangsa asing untuk datang, singgah atau bahkan menetap di Indonesia. Ada yang datang untuk berdagang, ada yang datang untuk menyebarkan agama yang di bawa. Oleh sebab itu, letak Indonesia pada jalur strategis pelayaran dunia mempengaruhi terciptanya pluralitas agama dan ras.

Ketiga, Kondisi iklim dan struktur tanah. Wilayah hidup suku–suku bangsa memperlihatkan variasi yang berbeda–beda. Ada komunitas yang mengandalkan pada laut sebagai sumber kehidupannya. Ada juga sebagian yang mengandalkan sektor pertanian. Perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah menciptakan dua macam kondisi ekologi yang berbeda, yakni daerah pertanian sawah (*wet rice cultivation*) yang banyak di temui di Jawa dan Bali dan daerah pertanian lading (*shifting cultivation*) yang banyak ditemui di luar Pulau Jawa. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara Jawa dan luar Jawa dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain kondisi dan struktur tanah antara daerah yang satu dengan daerah lain menyebabkan perbedaan mata pencaharian penduduk.

Keempat, latar belakang sejarah. Sejarah Indonesia pernah di jajah oleh bangsa asing menyebabkan banyak diantara para penjajah yang berdomisili dan menetap di Indonesia, sehingga terjadilah amalgamasi dan asimilasi kebudayaan. Oleh sebab itu, latar belakang sejarah mengakibatkan terjadilah diferensiasi ras, agama dan kepercayaan yang berbeda–beda di Indonesia.

Kelima, keterbukaan terhadap budaya luar. Pada zaman sekarang dapat kita jumpai masyarakat Indonesia semakin kompleks dan beraneka ragam. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pembangunan dan era globalisasi yang makin mempermudah hubungan dan komunikasi. Sehingga hal ini mengakibatkan

terjadinya percampuran kebudayaan yang menjadi struktur budaya masyarakat Indonesia lebih beragam.

C. Multikulturalisme dalam Islam

Indonesia merupakan negara multikulturalisme terbesar di dunia, karena kondisi kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas.¹¹⁵ Multikulturalisme menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari.¹¹⁶ Islam sangat menghargai multikulturalisme karena Islam adalah agama yang mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Mundzier menyebutkan Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan kemajemukan.¹¹⁷ Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat manusia terhadap upaya menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan yang multikultural.

Pertama, Al-Qur'an menyebutkan manusia diciptakan dari diri yang satu, dalam Surat Al Hujurat ayat 13, yang artinya sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara manusia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.¹¹⁸ Sesuai Surat Al Baqarah ayat 213 yang artinya manusia itu adalah umat yang satu, setelah perselisihan, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan

¹¹⁵Ainul Yaqin. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 4

¹¹⁶Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1. (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), h. 5

¹¹⁷Mundzier Suparta. *Ibid.*, h. 5

¹¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 345

tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah SWT memberikan petunjuk orang-orang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya dan Allah SWT selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.¹¹⁹

Al-Qur'an menjelaskan pentingnya saling percaya, pengertian, dan saling menghargai, menjauhkan sifat buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain dalam surat Al Hujurat ayat 12 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kecurigaan karena sebagian kecurigaan adalah dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu dengan yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha penerima taubat lagi maha penyayang".¹²⁰

Al-Qur'an mengajarkan agar selalu mengedepankan klarifikasi, dialog, diskusi dan musyawarah, tidak boleh menjatuhkan vonis tanpa mengetahui dengan jelas permasalahannya, dalam Surat Al Hujurat ayat 6 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."¹²¹

Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dalam Surat Al Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan benar dari pada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah

¹¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia. *Ibid.*, h. 745

¹²⁰Muhammad bin Alawi al-Maliky al-Hasany, Al Sayid, *Kaidah-kaidah Ulumul Quran*, (Pekalongan: Al-Asri, 2008), h. 743

¹²¹Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), h. 743

berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.¹²²

Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk menghindari konflik dan melaksanakan rekonsiliasi atas berbagai persoalan yang terjadi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan, membimbing ke arah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang, dalam Surat Asy Syuura yang artinya Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah SWT. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.¹²³

Kedua, Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang multicultural. Seperti semua hamba Allah SWT adalah bersaudara, yang artinya Diriwatkan oleh Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci dan saling bermusuhan. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara.¹²⁴

Hadis yang lain Rasulullah Muhammad SAW menyatakan tidak ada keutamaan dari orang Arab dengan orang non-Arab. Semua suku bangsa baik Amerika, Asia, Eropa berkulit putih atau hitam sederajat saja dihadapan Allah SWT. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan itu satu, bapak dan ibu kalian satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang Arab terhadap non Arab dan tidak ada keutamaan orang non Arab dari orang arab kecuali ketaqwaannya.¹²⁵

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah SAW.

¹²²Departemen Agama Republik Indonesia. *Ibid.*, h. 53

¹²³Shihab, M. quraish, *Membumikan al-Qur'an (fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat)*, (Bandung: PT Nizan Pustaka, 2004), h. 86.

¹²⁴Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Adab, No. 5604. *Imam Muslim, Sahih Muslim*, Kitab Al Bir, Wa ash-Ahillah wa Al Adab, No 4646

¹²⁵Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an dan Al-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997.

Agama manakah yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab Al '*Hanifiyyah as Samhah*' (Agama yang lurus lagi toleran).¹²⁶

Toleransi dalam Islam dapat dilihat pada masa awal Islam, para penguasa Muslim dalam waktu relatif singkat telah menaklukkan beberapa wilayah sekitarnya seperti; Mesir, Siria dan Persia. Ketika para penguasa Muslim menaklukkan daerah tersebut, di daerah tersebut telah ada dan berkembang beberapa pusat ilmu pengetahuan. Setelah daerah tersebut dikuasai Islam, kegiatan keilmuan masih berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dari penguasa Muslim. Di samping itu, komunitas non-Muslim seperti Kristen, Yahudi, dan bahkan Zoroaster dapat hidup dan menjalankan ibadah mereka masing-masing dengan relatif bebas di bawah kekuasaan para penguasa Muslim. Khususnya sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Islam masuk melalui budaya seperti para sunan yang memasukkan nilai-nilai Islam dengan tatacara menyelaraskannya dengan budaya penduduk setempat, contoh wayang merupakan tatacara sunan mengganti kebiasaan penduduk Jawa dalam membuat patung sebagai pengaruh dari Hindu-Budha.

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengajarkan manusia untuk menciptakan perdamaian dan rasa aman bagi kehidupan seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan, yang artinya Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang kafir dzimmi, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya dan siapa yang menjadikanku sebagai musuhnya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat.¹²⁷

Rasulullah SAW mengajarkan manusia untuk menjalin komunikasi meskipun dengan nonMuslim, yang artinya "Apabila seorang ahli kitab mengucapkan Salam, maka jawablah dengan 'wa'alaikum'". Rasulullah juga mengajarkan manusia untuk berlaku adil dengan memberikan hak secara proporsional, yang artinya Allah SWT berfirman "Wahai hamba-hambaku,

¹²⁶Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalany, *Fath Al Bary*, cet.I. Jilid I. (Madinah Al Munawarah, 1417/1996), h. 94

¹²⁷Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an dan Al-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997).

Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedhaliman terhadap diriku sendiri, dan aku telah menjadikannya haram pula di antara kalian, maka janganlah saling menzhalimi” (HR. Muslim).¹²⁸

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa multikulturalisme pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memandang multikulturalisme pada dasarnya sebagai bentuk toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada selama tidak melanggar batas-batas syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tetapi yang bisa kita lihat dalam lingkungan masyarakat yang masih memegang kental tradisi adat istiadat. Keanekaragaman yang ada bukan sebuah permasalahan namun justru menjadi suatu kekayaan yang bisa saling melengkapi dalam membangun peradaban masyarakat.

D. Contoh Multikulturalisme di Indonesia dan Dunia Islam

Contoh multikulturalisme di Indonesia sebagai berikut. (1) Masyarakat Bali yang sangat menerima perbedaan kebudayaan serta keberagaman lainnya yang sangat berbeda dari kebudayaan yang mereka miliki; (2) Toleransi kehidupan beragam didalam masyarakat yang dapat mempererat hubungan dan kesatuan dalam bernegara; (3) Saling berbaur antara satu dengan yang lain tanpa memperhatikan latarbelakang orang-orang yang memiliki satu visi dan misi dengan kita; (4) Tidak saling menyinggung kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lainnya; dan (5) Orang yang berasal suku Jawa, Bali dan Madura yang berbeda dalam satu organisasi yang sama. Mereka tidak mempermasalahkan latar belakang suku yang dimiliki karena memiliki tujuan bersama untuk dicapai dalam organisasi tersebut¹²⁹.

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat Indonesia yang didalamnya terdapat beragam kebudayaan, tidak ada perbedaan mengenai keyakinan agama, suku, ras. Multikultural ini menjadi ideologi yang mengakui serta menghargai tentang arti sebuah perbedaan baik individual maupun

¹²⁸Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalany, *Fath Al Bary*, cet.I. Jilid I. (Madinah Al Munawarah, 1417/1996), h. 94

¹²⁹Kanisius, 2011. Kusruri, Endri. *Dinamika Masyarakat Pendatang dari Afrika di Purwokerto: Suatu Kajian Historis Sosiologis*. (Yogyakarta, Widya Sari Press, 2011).

kebudayaan. Contoh; masyarakat multikultural di Bali, sangat toleran terhadap agama nonHindu.

Bali merupakan wilayah Indonesia dengan umat Hindu terbesar di Indonesia, meskipun mayoritas penduduk di Indonesia sebagian besar adalah Muslim. Toleransi kehidupan beragama di Pulau Dewata, memang sudah terjadi dan sudah berlangsung berabad-abad. Hal inilah yang membuat pondasi kultural di Bali menjadi sangat kuat dan tidak mudah dipecah-belah. Hubungan antarumat beragama di Bali, seperti umat Hindu, Islam dan agama lainnya dapat hidup berdampingan secara damai, saling tolong menolong, serta saling menghargai, saling berbaur satu dengan lainnya, dengan kondisi budaya dan masyarakat setempat. Lembaga-lembaga adat di Pulau Bali tumbuh dan hidup di dalam kalangan umat Islam yang ada di Bali. Bahkan rasa toleransi umat beragama di Bali pernah diuji saat terjadinya peristiwa ledakan bom pada tahun 2002 dan kemudian berlanjut pada tahun 2005. Saat setelah peledakan bom Bali tersebut, seakan tanah di Bali. Luluh lantah diakibatkan oleh orang-orang yang mengatas namakan jihad dengan membawa Islam. Masyarakat Bali memahami benar perbedaan agama Islam dan terorisme. Mereka memahami jika Islam bukanlah agama yang seperti itu, Islam adalah agama yang mengajarkan mengenai perdamaian. Umat Hindu yang ada di Bali benar benar terbuka dengan agama Islam, meskipun merupakan agama yang minoritas di Bali namun tetap saja masyarakat setempat benar benar menghargainya. Mereka memahami tentang posisi, kelas, serta pembagian tugas dari masing-masing bidang tersebut.¹³⁰

Proses multikulturalisme di Indonesia tak hanya berlangsung dengan damai dan harmonis, akan tetapi terdapat beberapa kasus multikulturalisme mengakibatkan perpecahan dan konflik, seperti: (1) Pembakaran Pasar Glodok, yaitu peristiwa Mei Kelabu yang terjadi di Jakarta; (2) Peristiwa Ambon-Maluku, merupakan konflik antara Suku Bugis-Buton-Makasar-Ambon, Islam berkonflik dengan Umat Kristen disana; (3) Peristiwa Sambas & Palangkaraya merupakan permasalahan yang terjadi antara suku Melayu,

¹³⁰ <https://www.ipsmudah.com/2017/03/contoh-konflik-antar-agama.html>

Dayak, serta Tionghoa yang melawan suku Madura; (4) Peristiwa Poso, merupakan permasalahan terjadi antara umat Islam dan Kristen yang ada di Poso dengan adanya unsur-unsur pemicu dari luar; (5) Peristiwa Aceh, merupakan permasalahan yang terjadi antara orang-orang Aceh dengan transmigrasi dari Jawa. Peristiwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM); (6) Penghancuran bangunan masjid-masjid milik Ahmadiyah yang ada di Parung, Bogor dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi.

Demikianlah beberapa contoh masyarakat multikultural di Indonesia. Ada yang berjalan harmonis sesuai dengan prinsip multikulturalisme, namun ada juga diantaranya berjalan dengan beragam konflik yang muncul. Tentu saja sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam suku, budaya, keyakinan agama, ras dan bahasa. Ditanamkan rasa saling toleransi antar umat beragama, kelompok. Sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan damai dan tenteram.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan keyakinan sebetulnya telah banyak memberikan sumbangsih besar bagi terciptanya perdamaian di muka bumi. Akan tetapi, karena pengetahuan dan kedewasaan masyarakat yang kurang mengenal toleransi, persoalan agama justru kerap menjadi pemicu lahirnya konflik horizontal.

1. Konflik Ambon (Islam vs Nasrani). Contoh konflik antar agama yang pertama adalah konflik atau kerusuhan yang terjadi di Kota Ambon, Maluku pada 19 Januari 1999. Konflik ini dipicu permasalahan sederhana, yakni tindak penolakan yang dilakukan 2 orang Muslim terhadap seorang warga nasrani. Konflik semakin membesar setelah ada banyak isu yang berembus dan membakar amarah kedua belah pihak, yakni orang Muslim dan orang Nasrani. Dari laporan yang ada, konflik Ambon disebut menyebabkan tewasnya 12 orang dan ratusan orang terluka. Konflik ini kemudian mereda setelah upaya rekonsiliasi dilakukan oleh pemerintah daerah setempat;
2. Kerusuhan Poso (Islam vs Nasrani). Kerusuhan Poso yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah juga merupakan contoh konflik antar agama yang memberikan dampak cukup serius. Konflik yang berlangsung antara umat

Islam dan Nasrani ini bahkan berlarut-larut dan terbagi menjadi 3 bagian karena kurangnya penanganan. Ketiga babak kerusuhan poso tersebut yaitu Poso I terjadi antara 25 s/d 29 Desember 1998, Poso II terjadi antara 17 hingga 21 April 2000, sementara Poso III terjadi antara 16 Mei hingga 15 Juni 2000. Tidak diketahui seberapa besar jumlah korban dan kerugian yang diderita karena konflik ini. Yang jelas setelah penandatanganan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001, antar kedua pihak yang bertikai, kondisi Poso berangsur membaik. Deklarasi Malino sendiri diinisiasi oleh Jusuf Kalla.

3. Konflik Tolikora (Islam vs Nasrani). Konflik di Tolikora Papua terjadi pada tanggal 17 Juli 2015 lalu. Konflik ini dimulai dengan adanya insiden pembakaran masjid oleh para jemaat Gereja Injil di Indonesia, saat masyarakat Muslim hendak mengadakan ibadah sholat Idul Fitri. Karena konflik ini, menewaskan 2 orang korban dan sedikitnya 96 rumah warga Muslim dibakar. Beruntung upaya rekonsiliasi dapat segera dilakukan sehingga jumlah korban tidak bertambah lagi.
4. Konflik Palestina dan Israel (Islam vs Yahudi) Contoh konflik antar agama bukan hanya terjadi di Indonesia. Di belahan dunia lain, konflik semacam ini juga kerap terjadi dan bahkan berlarut-larut hingga saat ini. Misalnya konflik yang terjadi antara warga Muslim, Palestina dan warga Yahudi, Israel dalam perebutan wilayah suci Yerusalem.
5. Konflik Rohingya (Islam vs Budha). Konflik rohingya yang terjadi di Myanmar juga merupakan contoh konflik antar agama. Dalam konflik ini, dua kubu yang bertikai adalah etnis Rohingya yang beragama Muslim dengan pemerintah Myanmar yang memberlakukan agama Budha sebagai agama resmi kerajaan. Konflik rohingya hingga kini masih berlangsung dan menjadi sorotan dunia internasional.
6. Konflik Uighur. Konflik ini terjadi antara Islam dan Komunis. Menurut Laporan Amnesty Internasional dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB (CERD). Cina melakukan degradasi terhadap kebudayaan Uighur dan identitas keislaman.

7. Konflik Islam dan Hindu di New Delhi India. Konflik ini berawal dari pengesahan Amandemen Undang-undang Kewarganegaraan India (CAB) pada Desember 2019, menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk Hindu dan Islam di New Delhi, India.

Demikianlah beberapa contoh konflik antar agama yang terjadi di Indonesia dan di dunia, dari beberapa konflik tersebut di atas, dapat di ambil pembelajaran untuk bertoleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Sehingga konflik seperti tersebut di atas tidak terjadi lagi di kemudian hari.

E. Hikmah Multikulturalisme di Indonesia dan Dunia Islam

Hikmah dan tujuan-tujuan multikulturalisme dapat dilihat dari ajaran-ajaran agama Islam yang termuat dalam Al-Qur'an antara lain adalah:¹³¹ *Pertama*, Sebagai simbol atau tanda kebesaran Tuhan, dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 20. "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan kamu dari tanah kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembangbiak".¹³²

Kedua, Sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi antara sesama umat manusia, dalam Al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan. Hai manusia sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³³

Ketiga, Sebagai ujian dan sarana manusia dalam berlomba menuju kebaikan dan prestasi, dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 48, disebutkan Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya salah satu ummat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lomba berbuat kebajikan hanya kepada Allah lah kembali

¹³¹Mujiburrahman, *Islam Multikultural*, Surakarta, Vol. 7. No. 1. Februari 2013, h. 72.

¹³²Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002). Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 20.

¹³³Imani, A. K. F., *Tafsir Nurul Qur'an*. (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005)

kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadaku apa yang telah kamu perselisihkan itu.¹³⁴

Keempat, Sebagai motivasi beriman dan beramal sholeh dan (ingatlah), ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 60, pukulallah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.¹³⁵

Multikulturalisme sangat penting dan menarik untuk diulas lebih detail karena dilatarbelakangi oleh pemikiran: (1) Perlunya sosialisasi. Pada dasarnya semua agama datang untuk mengajarkan dan menyebarkan perdamaian dalam kehidupan umat manusia; (2) Wacana agama yang toleran dan inklusif. merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama itu sendiri, sebab multikultur, semangat toleransi dan inklusivisme adalah hukum Tuhan atau sunnatullah yang tidak bisa diubah; (3) Adanya kesenjangan antara cita-cita ideal agama dan realitas empirik kehidupan umat beragama di tengah masyarakat; (4) Semakin menguatnya kecenderungan eksklusivisme dan intoleransi di sebagian umat beragama yang pada gilirannya memicu terjadinya konflik dan permusuhan yang berlabel agama; (5) Perlu dicari upaya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama.

Multikulturalisme merupakan ajaran Tuhan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi umat manusia dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang damai di muka bumi, hanya saja prinsip-prinsip multikulturalisme itu sering tercemari oleh perilaku radikalisme, eksklusivisme, intoleransi dan fundamentalisme. Hal ini dapat diatasi, jika kita bisa menjadikan iman dan takwa berfungsi dalam kehidupan nyata bagi bangsa dan negara. Jika iman

¹³⁴Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, (Jakarta, Departemen RI, 2000).

¹³⁵Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, (Depok, Gema Insani, 2007).

dan takwa berfungsi dalam kehidupan masing-masing agama telah berfungsi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perilaku-perilaku radikalisme, eksklusifisme, intoleransi, dan fundamentalisme, dapat terhindar dari diri umat beragama dan dapat menjalani hidup yang demokratis yang penuh dengan kebersamaan dan persaudaraan.

Dengan tercipta keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terhindar dari konflik-konflik yang bernuansa agama. Samsul Rizal Panggabean memberikan gambaran mengenai pandangan Islam tentang multikulturalisme. (1) Multikulturalisme Internal adalah keanekaragaman internal di kalangan umat Islam ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Kebudayaan Islam serupa dengan kebudayaan lainnya kecuali kebudayaan yang paling primitif. Kemajemukan internal ini mencakup antara lain: bidang pengelompokan sosial; bidang fikih; bidang teologi, bidang tasawuf dan dimasa modern seperti politik kepartaian; (2) Multikulturalisme eksternal ditandai dengan pluralitas keragaman, fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Muslim.¹³⁶

Multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Sebagai bagian dari kondisi yang majemuk, umat Islam terus berinteraksi dengan umat dari agama-agama lain. Melalui proses interaksi ini, umat Islam memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan lain dan umat agama lain memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan Islam.

F. Kesimpulan

Gagasan multikulturalisme di Indonesia dan dunia Islam berawal dari keinginan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan. Pendidikan multikultural dipersepsikan sebagai jembatan dalam mencapai kebersamaan dalam keberagaman, saling menghargai, menghormati dan hidup rukun serta harmonis. Multikultural menurut Islam adalah *sunnatullah* yang tidak berubah, tidak mungkin dilawan atau diingkari.

¹³⁶Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual alQur'an, (Bandung: Mizan, 1990), h. 24.

Ungkapan ini menggambarkan, Islam sangat menghargai multikultural karena Islam adalah agama yang tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati.

G. Saran

Gagasan multikulturalisme untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman, sehingga seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara damai, tenteram dan harmonis. Jika gagasan multikulturalisme ini telah baik diimplementasikan untuk dipertahankan, jika belum untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Cet. 1. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalany, *Fath Al Bary, cet.1. Jilid 1*. Madinah Al Munawarah, 1417/1996.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an*, Depok: Gema Insani, 2007.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo. 2002.
- Azra, Azyumardi, *Prolog Urgensi Pendidikan Multikultural, Cerita Sukses Pendidikan Multikultural di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Syahid, 2010.
- Baidhaw, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Budianta, Melani, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum, dalam Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Jakarta: Indonesian Institute for Civil Society, 2003.
- Collins, James T., *the Historical Relationship of the Language of Central Maluku*, Indonesia. James, H., Mc Millan, *Formative Classroom Assessment Theory and Practice*, New York: Teachers College Press. 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

- James A, Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*, San Francisco: Jossey Bass, 2001.
- Kanisius, 2011. Kusruri, Endri. *Dinamika Masyarakat Pendatang dari Afrika di Purwokerto: Suatu Kajian Historis Sosiologis*. (Yogyakarta, Widya Sari Press, 2011).
- Kompasiana.com, *Prinsip dan Dimensi Pendidikan Multikultural*, Januari 2012, Diakses pada tanggal 27 September 2019.
- Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pedidikan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1. Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
- Muhammad bin Alawi al-Maliky al-Hasany, Al Sayid, *Kaidah-kaidah Ulumul Quran*, Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- Mujiburrahman, *Islam Multikultural*. Surakarta, Vol. 7. No. 1. 2013
- Riantama. http://geoenviron.blogspot.com/2013/04/masyarakat-multicultural-dan_11110.html. Diakses pada tanggal 27 September 2019.
- Rosyada, Dede, *Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama Islam*, dalam Jurnal Ta'dib, vol. 11, Nomor 1, Tahun 2008.
- Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural*. Surakarta, Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
- Suprpto, *Penanaman dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural*, Jurnal Penelitin Pendidikan Agama dan Keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret, Tahun 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung: PT Nizan Pustaka, 2004.
- Syam, Nur, *Tantangan Multikultural Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius Horton, 2008.
- Sleeter, Christine E. *Un-Standardizing Curriculum, Multicultural Teaching in the Standars- Based Classroom*. New York: Teachers College Press, 2005.
- Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual alQur'an*, Bandung: Mizan, 1990.

- Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Tilaar, H.A.R., *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi Visi, Misi dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*, Jakarta: Grasindo. 1997.
- Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tunjauan dari Perspektif Study Kultural*, Jakarta: Indonesia Tera, 2003.
- Ustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural*. Surakarta, Addin.Vol.7. No. 1. 2013
<https://www.ipsmudah.com/2017/03/ccontoh-konflik-antar-agama.html>
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Adab, No. 5604. Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab Al Bir, wa ash-Ahillah wa Al Adab, No 4646
- Isnarmi Moeis, *Pendidikan Multikultural, Integritas Moral, Dialog dan Adil*. Padang: UNP Press, 2014.
- Van den Berghe, Pierre L., *The Ethnic Phenomenon*. New York: Elsevier, 1981
- Wasitohadi, *Gagasan dan Desain Pendidikan Multikultural di Indonesia dalam Scholaria*, Vol. 2. Nomor 1, Januari 2012, h. 116-149
- Yaqin, Ainul, M., *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
- Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar

BAB IV

TEORI DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses pengembangan sumberdaya manusia, agar memiliki kemampuan sosial dan perkembangan optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya.¹³⁷ Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia, dengan harapan mampu memahami dirinya, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya.¹³⁸ Pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan.

Pendidikan bertujuan mengasah rasa, karsa, dan karya, menuai tantangan sepanjang masa karena perbedaan budaya. Kebutuhan terhadap pendidikan yang mampu mengakomodasi dan memberikan pembelajaran agar mampu bersikap toleran terhadap budaya lain, maka pendidikan multikultural sangatlah penting, sebagai solusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai karakter dan toleran terhadap budaya lain. Pendidikan dan Multikultural merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi dan menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran, keyakinan agama.¹³⁹ Pluralitas budaya yang ada di Indonesia, menempatkan pendidikan Multikultural menjadi sangat urgen.¹⁴⁰ Untuk kebersamaan dalam keberagaman.

Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Keunikan budaya yang beragam tersebut memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku dan karakter

¹³⁷Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 7

¹³⁸Driyarkara, *Tentang Pendidikan* (Jakarta: Kanisius 1980), h. 8.

¹³⁹Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan* (Surabaya: JP. Books, 2007), h. 748.

¹⁴⁰M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 3. Baca juga: Ainurrofiq Dawam, *EMOH Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), h. 22.

pribadi masing–masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Tradisi yang terbentuk akan berlainan dari satu suku/daerah dengan suku/daerah yang lain. Pergumulan antar budaya memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisir konflik inilah memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan.¹⁴¹

James A. Banks, menyatakan pendidikan multikultural sebagai konsep, ide, falsafah, atau suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk perilaku kehidupan, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.¹⁴² Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (*etnis*), ras, agama (aliran kepercayaan) dan budaya (*kultural*).¹⁴³ Pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan.¹⁴⁴ Dengan demikian nantinya diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling pengertian dan keterbukaan, serta semua sikap dan nilai penting bagi harmoni sosial dan perdamaian.

Dede Rosyada pendidikan multikultural sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat dalam membina sikap siswa agar menghargai

¹⁴¹H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 9-10.

¹⁴²James A, Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed). *Handbook of Research on Multicultural Education*. (San Francisco: Jossey Bass, 2001).

¹⁴³Budianta, Melani, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum, dalam Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Institute for Civil Society, 2003).

¹⁴⁴Azra, Azyumardi. *Prolog Urgensi Pendidikan Multikultural, Cerita Sukses Pendidikan Multikultural di Indonesia*, (Jakarta: CSRC UIN Syahid Jakarta, 2010). Baca Juga: Baidhawiy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

keragaman masyarakat.¹⁴⁵ Pendidikan multikultural sebagai pemberian hak yang sederajat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas kepada seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia dan memiliki hak yang sederajat dalam mencapai prestasi terbaik bangsa.¹⁴⁶ Pendidikan multikultural adalah strategi yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.¹⁴⁷

Upaya memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menunjukkan adanya keragaman dalam pengertian dan pemahaman teori dan pendidikan multikultural. Bab ini membahas tentang pengertian, prinsip, tujuan dan relevansi pendidikan multikultural dengan tujuan pendidikan Islam, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Pengertian Pendidikan Multikultural

Multikultural berakar dari kata kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, seperti, multikultural adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya.¹⁴⁸

Multikultural mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun kelompok secara kebudayaan.¹⁴⁹ Multikultural memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari

¹⁴⁵Rosyada, Dede. *Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama Islam*, dalam Jurnal Ta'dib, vol. 11, Nomor 1, Tahun 2008.

¹⁴⁶Suprpto, *Penanaman Dan Sikap Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Nilai-Nilai Multikultural*. Jurnal penelitian pendidikan agama dan keagamaan. Vol VII, No 1, Januari-Maret, Tahun 2009.

¹⁴⁷Yaqin, Ainul, M., *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultur Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

¹⁴⁸Parsudi Suparlan, *Makalah, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h. 1.

¹⁴⁹Suparlan. *Membangun Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008).

masyarakat yang lebih kecil, kemudian membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik.¹⁵⁰

Multikultural sebagai sebuah ideologi terserap dalam berbagai interaksi dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia mencakup kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, bisnis, kehidupan politik dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat. Interaksi tersebut berakibat pada terjadinya perbedaan pemahaman tentang multikulturalisme.

Multikulturalisme ini berimplikasi pada perbedaan sikap dan perilaku dalam menghadapi kondisi multikulturalisme masyarakat. Sebagai sebuah ideologi, multikultural harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan hidup masyarakatnya.¹⁵¹ Satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan multikulturalisme adalah melalui pendidikan yang multikultural.

Pendidikan multikultural menunjukkan adanya keragaman dalam pengertian istilah tersebut. James Banks menyatakan bahwa pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*.¹⁵² Pengertian ini senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh Sleeter pendidikan multikultural adalah sekumpulan proses yang dilakukan oleh sekolah untuk menentang kelompok yang menindas.¹⁵³

Pengertian tersebut di atas tidak sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia, karena Indonesia memiliki konteks budaya yang berbeda dari Amerika Serikat, walaupun keduanya memiliki bangsa dengan multikebudayaan. Andersen dan Cusher mengatakan pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.¹⁵⁴ Posisi kebudayaan

¹⁵⁰Suparlan. *Makalah, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h. 1.

¹⁵¹Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h. 3.

¹⁵²James Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice*, Review of Research in Education, 1993, h. 3.

¹⁵³Sleeter, dalam G. Burnett, *Varieties of Multicultural Education: an Introduction*, (Eric learinghouse on Urban Education, Digest, 1994), h. 1.

¹⁵⁴Anderson, E. W., *Cross-Category Variation in Customer Satisfaction and Retention*. Marketing Letter, Vol. 5, No. 1, 1994, h. 19-30.

sebagai keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dan berstatus sebagai objek studi. Keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum.¹⁵⁵ Seperti proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pembelajaran, pelatihan, keterampilan dan cara-cara yang mendidik. Fuad menyebutkan pendidikan merupakan *transfer of knowledge* atau memindah ilmu pengetahuan.¹⁵⁶ Sedangkan Multikultural secara etimologis multi berarti banyak, beragam dan aneka sedangkan kultural berasal dari kata *culture*¹⁵⁷ yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan atau pemeliharaan.

Pendidikan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran kepercayaan (agama). Zakiyuddin Baidhawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*).¹⁵⁸

M. Ainul Yaqin menyebutkan pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi mudah.¹⁵⁹ John W. Santrock mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang

¹⁵⁵Andersen dan Cusher, *Multicultural and Intercultural Studies* dalam C. Marsh (ed), *Teaching Studies of Society and Environment* (Sydney: Prentice-Hall, 1994), h. 320.

¹⁵⁶ Fuad Ihsan (2005: 4-5) (Imam Barnadib, 1982), (Noeng Muhadjir, 1987), (Zahara Idris dan Lisma Jamal, 1992).

¹⁵⁷Alo Liliweri M.S., Iris Varner dan Linda Beamer, dalam *Inter-cultural Communication in the Global Workplace*, 2003, h. 7-9

¹⁵⁸Baidhawi, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 8.

¹⁵⁹Ainul Yaqin, M. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 25.

menghargai diversitas dan mewadahi prespektif dari beragam kelompok kultural atas dasar basis regular.¹⁶⁰

Mundzier Suparta menyebutkan beberapa definisi tentang pendidikan multikultural sebagai berikut; (1) Pendidikan Multikultural adalah sebuah filosofi; (2) Pendidikan Multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan; (3) Pendidikan Multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan; (4) Pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif.¹⁶¹

1. Pendidikan multikultural merupakan sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting, mereka yang tepat terhadap sesuatu, gambaran suatu perilaku yang harus diterima oleh sesama atau yang berkaitan dengan orang lain. Legitimasi dan vitalitas keragaman etnik dan budaya dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, maupun bangsa.
2. Pendidikan multikultural adalah menginstitutionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam system pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan (*equality*), saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial.
3. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya; dalam hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan memberangus praktik-praktek penindasan.
4. Pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan pendidikan dasar untuk semua anak didik yang menentang semua bentuk diskriminasi dan intruksi yang menindas dan hubungan antar

¹⁶⁰John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan, Terj. Tri Wibowo B.S.* (Jakarta: Kencana, 2007), h.184.

¹⁶¹Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: Al Ghazali Center, 2008), h. 37

personal di dalam kelas dan memberikan prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial.

Blum menyebutkan pendidikan multikultural sarat dengan penghargaan, penghormatan dan kebersamaan dalam suatu komunitas yang majemuk. Blum menegaskan pendidikan multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang kebudayaan orang lain, meliputi penilaian terhadap kebudayaan orang lain, akan tetapi bukan berarti menyetujui seluruh aspek kebudayaan tersebut, melainkan mencoba memahami dan mengakui keberadaan kebudayaan tertentu, sehingga dapat mengekspresikan nilai bagi anggotanya.¹⁶² Tiga elemen, yaitu; (1) menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang; (2) menghormati dan berkeinginan untuk memahami serta belajar tentang etnik/kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; dan (3) menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri; yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara.¹⁶³

Berdasarkan uraian diatas, pendidikan multikultural dapat dibagi tiga kata kunci yaitu; (1) pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan sikap dan perilaku; (2) pendidikan multikultural dapat menghargai perbedaan dan keragaman budaya; dan (3) pendidikan multikultural sebagai penghargaan terhadap budaya lain. Kata kunci tersebut akan menjadi landasan dalam merumuskan konsep Islam dalam memahami pendidikan multikultural.

¹⁶²A. Lawrence Blum, *Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 16.

¹⁶³A. Lawrence Blum, *Ibid*, h. 19.

C. Sejarah Pendidikan Multikultural

Multikultural berawal dari kebijakan resmi di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Perancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme.¹⁶⁴ Manusia sebagai pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat.¹⁶⁵ Pendidikan multikultural berawal dari meningkatnya keberagaman di negara-negara Barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa, maka Amerika Serikat memakai sistem demokrasi atau toleransi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey.¹⁶⁶

Indonesia, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa era reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Azyumardi Azra, krisis moneter, ekonomi, dan politik yang bermula sejak akhir 1997 telah mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara.¹⁶⁷

Tilaar menyebutkan pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme sesuai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran interkulturalisme ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM,

¹⁶⁴Murrell, KD, Lichtenfels R, Zarlenga D, Pozio E., *The systematics of Trichinella with a key to the species*. Vet Parasitol. 93, 2000, 293–307. Baca juga; Murell KD, Pozio E., *Worldwide occurrence and impact of human Trichinellosis, 1986-2009*. Emerg Infect Dis. 17(12), 2011, 2194–2202.

¹⁶⁵Paulo Freire Pedagogy of the Opressed, *Cultural Action for Freedom, Pedagogy of the Heart*, terj A. A. Nugroho, (Jakarta: Gramedia, 1984), *Pendidikan Kaum Tertindas, alih bahasa Utomo Dananjaya*, (Jakarta: LP3ES, 1995). *Pendidikan Yang Membebaskan*, terj. Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). *Pedagogi Hati, alih bahasa A. Widyamartaya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).

¹⁶⁶Azra, Azumardi. (2013). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, from <http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20.azra.html>.

¹⁶⁷Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.81

kemerdekaan dari kolonialisme dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.¹⁶⁸

Asal-usulnya pendidikan multikultural dimulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap *meltingpot*,¹⁶⁹ yang sudah berjalan lama tentang kultural dominan Amerika khususnya di New York dan California.¹⁷⁰ Will Kymlicka berpendapat, multikultural merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya.¹⁷¹ Multikultural sangat relevan dengan demokrasi yaitu keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, kesukubangsaan, kebudayaan, keyakinan keagamaan, ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan konsep lain yang relevan.¹⁷²

Keanekaragaman karakteristik spesifik ini mengarah pada suatu muara yaitu bercampurnya berbagai karakteristik. Bervariasinya karakteristik tersebut sebenarnya sebagai media aliran berkembangnya kebudayaan yang dibangun. Keberbedaan itu tetap dipertahankan, meskipun berada pada tujuan yang seragam untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya masing-masing. Tapestry merupakan bagaikan dekorasi pakaian yang terbentuk dari sehelai benang. Konsep ini diambil untuk menggambarkan kebudayaan Amerika yang dekoratif. Analog yang dapat disampaikan antara

¹⁶⁸H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 9-10

¹⁶⁹Alo Liliweri dalam Suparla. *Ibid.*, h. 3

¹⁷⁰James Banks, *Teaching Strategies for Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984), h. 164.

¹⁷¹Will, Kymlicka, *Misunderstanding Nationalism dalam theorizing Nationalism*, ed. R. Beiner, (Albany: State University of New York, 1999), h. 24.

¹⁷²Suparlan, (2002) *Makalah, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002, h. 3.

lain, kain yang terdiri dari satu warna kurang memberikan hasrat bagi pemakainya. Kain yang multiwarna sebagai perpaduan dekoratif memperkaya seni dekorasi tersebut.

Garden salad/salad bowl adalah kebudayaan ibarat mangkuk yang berisi campuran salad. Pada konsep ini yang ada masing-masing kelompok etnis memperjuangkan keberhasilan kelompoknya sendiri. Dapat saja masing-masing kelompok etnis hidup berdampingan tetapi tidak peduli satu dengan yang lainnya. Masing-masing masyarakat mengurus dirinya sendiri dan dapat hidup bersama sepanjang yang satu tidak mengganggu kelompok lainnya. Garden Salad/Salad Bowl tidak memperdulikan adanya komitmen untuk mengetahui dan saling berbagi antar unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki kelompok lain.

Parekh membedakan lima macam multikulturalisme; (1) isolasi; (2) akomodatif; (3) otonomis; (4) kritikal atau interaktif; (5) kosmopolitan.¹⁷³

1. Multikulturalisme isolasionis.

Multikulturalisme isolasionis mengacu pada masyarakat dalam berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu dengan lain.

2. Multikulturalisme akomodatif.

Multikulturalisme akomodatif yaitu masyarakat yang memiliki kultural dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Demikian sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultural kaum dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.

1. Multikulturalisme otonomis.

¹⁷³Parekh, *Bikhu the Concept of Multikultural Education in Sohen Modgil, et. al. (ed) Multicultural Education the Inevitable Debate*, (London: The Falmer Press, 1996)

Multikulturalisme otonomis maksudnya masyarakat plural pada kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

2. Multikulturalisme kritikal atau interaktif.

Multikulturalisme kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural pada kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.

3. Multikulturalisme kosmopolitan.

Multikulturalisme kosmopolitan berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat pada setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman kebudayaan, dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (*Linton*), konsep masyarakat tersebut, jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman mendalam untuk dapat mengerti secara benar tentang masyarakat multikultural.

Multikulturalisme di Indonesia, berkaitan erat dengan pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Multikultural terjadi di Indonesia disebabkan: (1) Letak geografis Indonesia; (2) perkawinan campur; dan (3) Iklim. Kondisi demikian

sangat berpotensi muncul keberagaman multikultural dari masing-masing individu, kelompok dan masuknya bangsa lain, maka peran pendidikan dianggap penting dan strategis dalam menjembatani keberagaman multikultural.

H.A.R. Tilaar menyebutkan pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan baru. Sebab jiwa dari globalisasi itu merupakan informasi yang tidak berbatas (*borderless information*), globalisasi yang dikenal dengan *global village* muncul disebabkan perkembangan teknologi informasi.¹⁷⁴ Selanjutnya Tilaar menyebutkan globalisasi tidak diasumsikan sebagai massifikasi umat manusia tetapi sebaliknya menonjolkan individualitas manusia. Individualitas atau identitas suatu bangsa sebagai aset kekayaan manusia itu sendiri.

Globalisasi bukan akan mengancurkan budaya bangsa, tetapi justru menyuburkan hidupnya berbagai jenis budaya global sebagai sumbangan bagi lahirnya mozaik budaya internasional yang lebih marak.¹⁷⁵ Oleh sebab itu, tinjauan studi kultural haruslah diadakan melalui lintas batas (*border crossing*) yang melangkahi batas-batas pemisah yang tradisional dari disiplin-disiplin dunia akademik yang kaku sehingga pendidikan multikultural tidak terikat pada horison sempit yang hanya melihat pendidikan di sekolah (*school education*) dan proses pendidikan tidak melebihi sebagai proses transmisi atau reproduksi ilmu pengetahuan kepada generasi yang akan datang.

Pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pendidikan bukan merupakan menara gading yang

¹⁷⁴H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 9-10

¹⁷⁵H.A.R. Tilaar, *Ibid.*, h. 9-10

berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya.¹⁷⁶ Pendidikan harus mampu membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Freire menyebutkan pendidikan merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada tingkat ketertinggalan.¹⁷⁷

Tilaar mengungkapkan program pendidikan multikultural, fokus tidak hanya diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Melainkan menjadi tekanan pada pendidikan *interkultural*, focus pada peningkatan pemahaman dan toleransi individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, sehingga akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan Multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (*difference*), atau *politics of recognition* politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.¹⁷⁸ Sikap *indifference* dan *Non-recognition* tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan.

Paradigma seperti ini mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang *ethnic studies* untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.¹⁷⁹ Pendidikan multikultural

¹⁷⁶Freire, Paulo. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj: Agung Prihantoro. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Baca Juga: Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*, terj: Tim redaksi. (Jakarta: LP3ES, 2008). Baca Juga: Paulo Freire dalam Siti Murtiningsih, *Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire*. (Yogyakarta: Resist Book, 2004).

¹⁷⁷Freire, Paulo. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj: Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*, terj: Tim redaksi. Jakarta: LP3ES, 2008.

¹⁷⁸Azumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, dalam <http://budpar.go.id/agneda/precongress/makalah/abstrak/58%20azra.html>

¹⁷⁹Azumardi Azra. *Ibid*.

dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu dan masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Contoh Kurikulum pendidikan multikultural mencakup subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan *ethnokultural* dan agama;¹⁸⁰ bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, sebagai berikut; (1) Pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme; (2) Pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan; (3) Pendidikan bagi pluralisme kebudayaan; (4) Pendidikan dwi-budaya; dan (5) Pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang, *Education for All*. Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, seperti tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian.¹⁸¹

Pendidikan multikultural mencakup seluruh peserta tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial, dan agama,¹⁸² memiliki lima dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program terhadap perbedaan pelajar (siswa); (1) integrasi isi/materi (*content integration*); (2) konstruksi

¹⁸⁰Eliade, 2001: 274- 275; 2002: 211). (Abdullah, 2003: xii). Kuntowijoyo (2003: 16)

¹⁸¹James Banks, *Multicultural Education: Theory and Practice*, 3rd ed. (Boston; Allyn and Boston, 1994), h. 196

¹⁸²H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123.

pengetahuan (*knowledge construction*); (3) pengurangan prasangka (*prejudice reduction*); (4) pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*); (5) pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*).¹⁸³

Pertama, dimensi integrasi isi/materi (*content integration*). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksikan materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak diubah, namun dapat menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Kedua, dimensi konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*). Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri.

Ketiga, dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar

¹⁸³James Banks, *Ibid.*, h. 196

yang datang ke sekolah dengan banyak *stereotype*, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teksbook multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

Keempat, dimensi pendidikan yang sama/adil (*equitable pedagogy*). Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (*cooperative learning*), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (*competition learning*). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

Kelima, dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*). Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan multikultural menuntut kesadaran dari tiap-tiap budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi perhatian dari Pasal 4 UU No. 20 tahun 2013 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

D. Kesimpulan

Teori pendidikan multikultural sebagai keragaman dalam pendidikan. Pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*, pendidikan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan dalam mencapai kebersamaan dalam keberagaman dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Demi tercapainya kehidupan yang rukun, damai, tenteram dan harmonis dalam masyarakat global.

E. Saran

Pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif, terkait isu dan masalah pendidikan, mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian dapat disarankan, jika ingin pendidikan multikultural sebagai alat pemersatu bangsa, maka tingkatkan pemahaman teori pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan dan masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi, 1966- 1993*. 1993.
- Al-Abrasyi, Athiyyah, *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969).
- Ainul Yaqin, M., *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo., 2002).
- Andersen dan Cusher, *Multicultural and Intercultural Studies dalam C. Marsh (ed), Teaching Studies of Society and Environment*. (Sydney: Prentice-Hall, 1994).
- Audah, Abd al-Qadir, al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Azra, Azumardi, Identitas dan Krisis Budaya, *Membangun Multikulturalisme Indonesia*, 10 Maret 2013.
- Baidhawi, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Banks, James, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984).
- _____, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice, Review of Research in Education*, 1993.
- Blum, A. Lawrence, *Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar Ras, Tiga Nilai Yang bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural, dalam Larry May, dan Shari ColinsChobanian, Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural, Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001.*
- Dawam, Ainurrofiq, *EMOH Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual" menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003)
- Driyarkara, *Tentang Pendidikan, Jakarta: Kanisius 1980. Effendi, Johan, Kemusliman dan Kemajemukan Agama, dalam Elpa Sarapung (Ed), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004)*
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).
- Idris, Zahara, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987)
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qolam, edisi ke-12, 1978). Kymlicka, Will, "Mitsunderstanding Nationalism" dalam *Theorizing Nationalism*, diedit oleh R. Beiner, Albany: State University of New York, 1999. Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma pendidikan*

Universal di Era Modern dan Post-Modernisme, Yogyakarta: IRCiSod, 2004.

Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan*, (Surabaya: JP Books, 2007)

Praja, Juhaya, *Epistemologi Hukum Islam*, (Jakarta: IAIN, 1988)

Santrock, John W., *Psikologi Pendidikan, alih bahasa Tri Wibowo B.S.* (Jakarta: Kencana, 2007)

Skeel, D.J., *Elementary Social Studies: Challenge for Tomorrow's World*. (New York: Harcount Brce College Publishers, 1995).

Suparlan, Parsudi, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

Suparta, Mundzier, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi Atas pendidikan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Al Ghazali Center, 2008).

BAB V

KESETARAAN DAN KEADILAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka suku, agama, ras, dan bahasa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Badan Pusat Statistik menunjukkan angka 1.340 suku bangsa, 17000 pulau. Kondisi kebangsaan sangat beragam. Indonesia berhasil menyatukan 1.340 suku yang tersebar diantara 17.000 pulau,¹⁸⁴ memiliki agama, adat istiadat dan bahasa beragam yang kemudian mempersatukan diri dibawah naungan satu nama yaitu Indonesia dan bhinneka tunggal eka.

Kondisi ini menyebabkan Indonesia memiliki struktur budaya yang berbeda dan unik di setiap wilayah. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, keyakinan religi, ras, suku dan tipe kesenian, seperti keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda, keragaman ras, suku dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh dan keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.¹⁸⁵

Masyarakat saat ini menuntut kesetaraan, keadilan dalam kehidupan berbangsa. Kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran menjadi idaman seluruh umat manusia. Khusus rakyat Indonesia masih dirasakan belum pernah datang kesetaraan, keadilan dan kemakmuran sampai sekarang dan mungkin juga di masa datang.

Upaya pencapaian kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran itu sebaiknya dengan pola menaikkan derajat, peringkat, kondisi serta kemampuan setiap perorangan ketingkat yang diinginkannya, seperti; dengan upaya kemandirian pada tahap awal, dengan membentuk massa-massa forming. Massa forming ini menjadi solid-utuh, jika para pembentuknya mempunyai visi, misi dan

¹⁸⁴Data Pusat Statistik (BPS)

¹⁸⁵Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke, *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, h. 18

peringkat setara dan sepadan, maka warga masyarakatnya menjadi utuh dan tidak mudah bercerai berai.¹⁸⁶

Fakta di lapangan warga masyarakat dan dunia pendidikan, masih sangat memilukan pada tingkat identitas kesetaraan masih jauh dari harapan seperti muncul dan berkembang dalam dunia pendidikan, masih berlaku paham dominansi dan kekuasaan, yang memiliki kedekatan dengan penguasa cenderung berpeluang menjadi pejabat, baik sebagai kepala dinas, kepala, wakil kepala sekolah/madrasah, dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain, sehingga kondisi seperti tersebut berpotensi mengakibatkan persaingan, sumber konflik identitas antarkelompok. Tuntutan kehadiran multikultural sangat diharapkan. Untuk menjembatani hal tersebut di atas, maka pendidikan multikultural menjadi sebagai solusi dalam proses dan pengelolaan pendidikan, agar berfungsi dan berjalan sesuai standar yang berlaku.

Pendidikan Islam multikultural diharapkan dapat berperan supaya mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia, sehingga terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai pada tingkat ketertinggalannya. Pendidikan multikultural menghasilkan manusia berkualitas, bertanggung jawab dan mampu mengantisipasi masa depan dan hidup dalam berperadaban. Pendidikan senantiasa menstimulasi, menyertai perubahan-perubahan dan perkembangan umat manusia. Selain itu, upaya pendidikan senantiasa mengantar, membina perubahan dan perkembangan kehidupan umat manusia, menuju kesetaraan dan toleransi.¹⁸⁷

Dengan keberagaman inilah pendidikan Islam multikulturalisme menjadi penting agar keberagaman menjadi sumber kekuatan dan kekayaan bangsa dan multikultural terpelihara dengan baik, sehingga cita-cita pembangunan bangsa Indonesia dapat lebih mudah tercapai. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang keberagaman, bangsa ini juga terhindar dari masalah

¹⁸⁶Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke, *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, h. 18

¹⁸⁷A. Suradi, *Pendidikan Islam Multikultural Tinjauan Teoritis dan Praktis di lingkungan pendidikan*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), h. 1

disintegrasi.¹⁸⁸ Dengan demikian bab ini membahas tentang kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan Islam multikultural sangat penting untuk dibahas; (1) Pengertian kesetaraan makhluk multikultural dalam pendidikan Islam; (2) Problematika keragaman dan solusinya dalam kehidupan; dan (3) Problem kesetaraan dan solusinya, dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Kesetaraan dalam Pendidikan Islam

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sederajat, kedudukan yang setingkat, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. Kesetaraan manusia bermakna manusia sebagai makhluk sosial memiliki tingkat atau kedudukan setingkat dihadapan Allah SWT. Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sungguh Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mengenal.¹⁸⁹

Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekadar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia.¹⁹⁰ Manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keragaman. Konsep kesetaraan bisa dikaji dengan pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pada pendekatan formal kita mengkaji kesetaraan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, baik berupa undang-undang, maupun norma, sedangkan pendekatan substantif mengkaji konsep kesetaraan berdasarkan keluaran/*output*, maupun proses terjadinya kesetaraan.

Kesetaraan sering dihubungkan dengan gender dan status sosial yang mencirikan perbedaan dan persamaan. Sedangkan konsep keberagaman

¹⁸⁸Ahmat Nurkolis, Skripsi: *Konsep Pendidikan Islam Multikultural Dalam Pemikiran IR. Soekarno*. (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), h. 1

¹⁸⁹Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), QS. Al Hujurat ayat 13.

¹⁹⁰AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35

merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia. Seperti kebudayaan Barat dan Timur mempunyai landasan dasar yang bertolak belakang.¹⁹¹ Budaya Barat bersifat antroposentris (berpusat pada manusia) sedangkan budaya Timur, yang diwakili oleh budaya India, Cina dan Islam, menunjukkan ciri *teosentris* (berpusat pada Tuhan). Dengan demikian konsep yang lahir dari Barat seperti demokrasi, mengandung elemen dasar serba manusia, sehingga manusialah yang menjadi pusat perhatiannya. Sedangkan dari Timur kehidupannya berlandaskan pada aturan Tuhan Allah SWT, maka konsep kesetaraan dan keberagaman berlandaskan kepada aturan Allah SWT melalui kitab suci dan ajarannya.

Jerman, Inggris, Perancis, Italia dan Yunani. Negara tersebut yang menjadikan alat pemersatu negara dan bangsa adalah bahasa. Australia, India, Sri Lanka dan Singapura, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan daratan. Jepang, Korea dan negara-negara di Timur Tengah, yang menjadi pemersatu negara dan bangsa adalah karena kesamaan ras. Sedangkan Indonesia adalah sebuah negara dan bangsa memiliki kesamaan sejarah masa lalu, selama 500 tahun Kerajaan Sriwijaya dan 300 tahun Kerajaan Majapahit dan sama-sama 350 tahun dijajah oleh Belanda serta 3,5 tahun dijajah oleh Jepang.¹⁹² Meskipun terdiri dari berbagai pulau, ras, suku, etnis, ada istiadat dan keyakinan agama, namun bersatu dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam menjaga keutuhan Bangsa dan negara. Untuk mempertahankan keutuhan NKRI kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan wahana strategis dan penting, media yang efektif dalam mengajarkan, mensosialisasikan Norma, nilai, etika dikalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrument dalam memupuk

¹⁹¹AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35

¹⁹²AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35

kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, memantapkan jati diri bangsa, membangun kesadaran kolektif sebagai warga masyarakat dengan mengukuhkan ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, adat istiadat, ras, suku bangsa, keyakinan, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan NKRI¹⁹³ karena memiliki kesamaan tujuan.

Tujuan pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani-rohani.¹⁹⁴ Dalam beranekaragam budaya. Budaya merupakan sifat yang khas bagi setiap individu (*person*) atau suatu kelompok (*comunitie*) yang sangat mungkin untuk berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak komunitas yang muncul, maka semakin beragam pula masing-masing budaya yang dibawa yaitu multikultural.¹⁹⁵

Pendidikan multikultural adalah proses mengenal realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami individu secara kultural berbeda dan dalam interaksi manusia yang kompleks, lalu sebagai cerminan pentingnya memperhatikan budaya, ras, perbedaan gender, etnis, agama dalam proses pendidikan.¹⁹⁶ Azyumardi Azra mengatakan, pendidikan multikultural yaitu pendidikan keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan budaya lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.¹⁹⁷ Prudence cradall, seorang pakar dari Amerika menyatakan, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara

¹⁹³Khairiah, *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 159

¹⁹⁴Hasan Baharun dan Robiatul Awwaliyah, *Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) Volume 5 Nomor 2 (2017), h. 228

¹⁹⁵Siti Julaiha, *Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam*, Journal Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1, Juni 2014, h. 110

¹⁹⁶Ismail Fuad, Skripsi: *Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 8

¹⁹⁷Azra, Azumardi. *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, From <http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azra.html>

sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama dan budaya.¹⁹⁸

Dengan demikian inti pendidikan multikultural yaitu sebagai sebuah ide atau konsep, gerakan pembaruan pendidikan dan sebagai sebuah proses. Maksudnya adalah Pendidikan multikultural sebagai sebuah ide diartikan bahwa bagi semua siswa dengan tanpa melihat gender, kelas sosial, etnik, ras dan karakteristik budaya harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar disekolah. Sebagai sebuah gerakan, pendidikan multikultural sebagai suatu pendidikan yang menuntut kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintasi batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita sehingga mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik perbedaan maupun kesamaan cita-cita pendidikan akan dasar-dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan dan solidaritas.

C. Problematika Kesenjangan dan Keragaman dalam Kehidupan

Keragaman masyarakat merupakan suatu kekuatan sekaligus kekayaan dari bangsa. Van De Berghe menjelaskan masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut: (1) Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan yang berbeda; (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) Kurang mengembangkan *consensus* diantara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai social yang bersifat dasar; (4) Secara relatif, sering kali terjadi konflik diantara kelompok yang satu dengan yang lain; (5) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; dan (6) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain.¹⁹⁹

¹⁹⁸Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 21

¹⁹⁹Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 21

Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Tetapi, kondisi aneka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri atas dua fase, yaitu *fase disharmoni* dan *fase disintegrasi*. Disharmoni menunjuk pada adanya perbedaan tentang tujuan, nilai, norma dan tindakan antar kelompok. Disintegrasi merupakan fase dimana sudah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, Norma dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok.²⁰⁰

Dalam menghindari pertentangan, hal penting yang perlu dilakukan meningkatkan pemahaman antarbudaya dan masyarakat ini adalah sedapat mungkin dihilangkan penyakit budaya. Penyakit budaya tersebut adalah *ethnosentrisme*, *stereotip*, prasangka, rasisme, diskriminasi dan *scape goating*. Hal yang tidak kalah penting adalah kajian mengenai corak kegiatan interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia dalam berbagai pengelolaan sumber daya merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.²⁰¹

Ethnosentrisme diartikan sebagai suatu kecenderungan yang melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri sebagai suatu yang mutlak serta menggunakannya sebagai tolok ukur kebudayaan lain. *Ethnosentrisme* adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. *Stereotip* adalah pemberian tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif. Pemberian tersebut bisa positif maupun negatif. *Stereotip* adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu, cenderung negatif tentang orang lain, karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Konsep *stereotip* dalam bentuk lain disebut stigma atau cacat. Stigmatisasi

²⁰⁰Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 76

²⁰¹Choirul Mahfud, *Ibid.*, h. 76

sekelompok orang kepada kelompok lain cenderung negatif.²⁰² Prasangka artinya anggapan yang belum tentu benar. Rasisme adalah ideologi yang didasarkan pada diskriminasi individu dan kelompok karena perbedaan ras. Rasisme dapat juga menjadi doktrin politik.²⁰³

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.²⁰⁴ Diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok.²⁰⁵ Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warna negara yang dilakukan berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi dan agama²⁰⁶

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu: (1) semangat religious; (2) semangat nasionalisme; (3) semangat pluralism; (4) semangat humanism; (5) dialog antar umat beragama; dan (6) membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antaragama, media massa dan harmonisasi dunia. Untuk menanggulangi masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu dengan menanamkan pendidikan Islam. Zuhairini menjelaskan tentang konsep kepribadian Muslim. Menurutnya pribadi Muslim bukanlah pribadi yang

²⁰²Allen, J.P.B. and H.G. Widowson, *Teaching the Communicative Use of English*. In C.J. Brumfit and K. Johnson (Eds). *The Communicative Approach to Language Teaching*. (Oxford: Oxford University Press, 1983).

²⁰³Liliweri, Alo, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001). Baca Juga: Liliweri, Alo, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009). Liliweri, Alo, *Prasangka&Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: PT LKiS, 2005).

²⁰⁴Theodorson, George A. And Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, (New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Bodes, 1979).

²⁰⁵Sears, D.O., Freedman, J.L. & Peplau, L.A., *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Erlangga, 1991).

²⁰⁶Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

egoistis, tetapi seorang pribadi yang penuh dengan sifat-sifat pengabdian baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya.²⁰⁷

Prinsip ajaran moral menurut Al-Quran sebagai berikut: (1) Seorang Muslim tidak boleh memandang hina kepada orang lain;²⁰⁸ (2) Seorang Muslim tidak boleh buruk sangka dan tidak boleh pula mengintai-intai kesalahan orang lain;²⁰⁹ (3) Islam menyuruh pada persatuan;²¹⁰ (4) Islam melarang takabur dan sombong;²¹¹ (5) Islam melarang seorang mukmin mencari aib orang lain;²¹² (6) Islam menyuruh berlaku adil dan membenci penganiayaan;²¹³ (7) Islam memperteguh tali silaturrahi;²¹⁴ (8) Islam mewasiatkan agar orang baik dengan tetangganya;²¹⁵ dan (9) Islam menyeru agar orang tolong-menolong dan mementingkan orang lain.²¹⁶

Ajaran tersebut harus ditanamkan, diajarkan, dan dididikkan kepada setiap individu muslim dan muslimah agar dapat menjadi hiasan dirinya. Hasil usaha tersebut membekas pada tiap pribadi muslim dan muslimah yaitu berupa sifat-sifat yang diwajibkan oleh Islam dimiliki oleh setiap muslim.²¹⁷

D. Problem Kesetaraan dan Solusinya

²⁰⁷Zuhairini, dkk. *Metode Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional. 1983)

²⁰⁸Amrullah, Karim, Malik, Abdul Tafsir Al-Azhar Jus XXX. (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987), QS. Al Hujurat ayat 13

²⁰⁹Amrullah, Karim, Malik, Abdul Tafsir Al-Azhar Jus XXX. (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987), QS. Al Hujurat ayat 12

²¹⁰Abdullah Abdul Malik, Abdul Karim, Tafsir Al-Azhar Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 1999), QS. Ali Imran ayat 103, Surat Al Anfal ayat 46.

²¹¹Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, cet. V), QS. Al Isra' ayat 37 dan Surat Luqman ayat 18.

²¹²Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, cet. V.), QS. Al Isra' ayat 36.

²¹³Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, cet. V), QS. An Nahal ayat 90, Surat Al An'am ayat 152 dan Surat Al Maidah ayat 8.

²¹⁴Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, cet. V), QS. Isra' ayat 26 dan Surat An Nisa' ayat 1.

²¹⁵Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. I, vol. VI), QS. Surat An Nisa' ayat 36.

²¹⁶Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, cet. V.) QS. Al Maidah ayat 2, Surat Al Baqarah ayat 280, Surat Ali Imran ayat 92 dan surat Al Hasyr ayat 9

²¹⁷Zuhairini, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 202

Kesetaraan merupakan suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban sebagai sesama manusia. Indikator kesetaraan sebagai berikut: (1) adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender dan golongan; (2) adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang layak; dan (3) adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.

Problem yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antarmanusia atau antar warga. Perilaku yang membedakan orang disebut diskriminasi.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) menyatakan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.²¹⁸

Faktor penyebab diskriminasi adalah; (1) Persaingan yang ketat dalam kehidupan, permasalahan ekonomi, tekanan dan intimidasi; dan (2) Ketidakberdayaan golongan miskin. Penghapusan diskriminasi dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang anti diskriminatif serta pengimplementasikannya di lapangan.²¹⁹ Pada tataran operasional, upaya mewujudkan persamaan di depan hukum dan penghapusan diskriminasi rasial antara lain ditandai dengan penghapusan Surat Bukti

²¹⁸Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM)

²¹⁹Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang *Ratifikasi atas Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Baca Juga: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi atau konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1999.²²⁰

Untuk mencegah terjadinya perilaku diskriminatif dalam rumah tangga, antara lain telah ditetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).²²¹

E. Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam

Nasionalisme bangsa Indonesia didasarkan pada tekad dan cita-cita bersama, di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat bangsa dan negara. Kesadaran ini terlihat pada semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda namun satu jua) adalah prinsip yang menjunjung tinggi cita-cita kebersamaan dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Prinsipnya adalah negara dan masyarakat harus memberikan ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dan tujuan nasionalisme Indonesia.

Pemahaman terhadap fenomena multikultural merupakan suatu keharusan karena realitas sosial masyarakat Indonesia sendiri, yang terdiri atas berbagai macam etnis, budaya, bahasa dan agama serta status sosial yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada satu wilayah, etnis, agama yang terbebas dari komunikasi dan interaksi dengan etnis, agama, serta golongan lainnya dalam kehidupan bangsa.²²² Dari keberagaman wilayah tersebut, maka setiap wilayah harus diberikan ruang pengakuan dan kesempatan setara untuk berkembang dan mempertahankan hak hidup masing-masing secara adil. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

²²⁰Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1999.

²²¹Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

²²²Martono dkk, *Hidup berbangsa dan Etika Multikultural*, (Surabaya: Forum Rektor Simpul, 2003), h. 11

1. Pengertian Keadilan Multikultural

Keadilan didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya. Menurut pendapat para ahli; (1) Aristoteles mengemukakan keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang menjadi haknya; (2) Magnis Suseno mengemukakan keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlukan sama sesuai hak dan kewajibannya masing-masing; (3) Thomas menyebutkan keadilan adalah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil, jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati; (4) Plato mengemukakan keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa, keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang yang dibuat oleh para ahli; (4) W.J.S Poerwadarminto mengemukakan keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang dan yang sepatutnya dan tidak sewenang-wenang; (5) Notonegoro Mengemukakan keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil, jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²³

Keadilan berdasarkan Pancasila, pada sila kelima berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen lahirnya Pancasila pada prinsipnya kesejahteraan sebagai dasar negara dan tidak ada kemiskinan bagi rakyat Indonesia merdeka. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. maka perlu dipupuk perbuatan dan sikap secara terperinci sebagai berikut: (1) Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; (2) Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain; (3) Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan; (4) Sikap suka bekerja keras; (5) Sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat

²²³Notonegoro. *Pancasila Secara Utuh Populer*. (Jakarta: Pancoran Tujuh, 1975)

untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama; (6) Asas yang menuju dan terciptanya keadilan sosial itu akan dituangkan dalam bergai langkah dan kegiatan, antara lain melalui delapan jalur pemerataan yaitu: Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan; dan (7) Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.²²⁴

Priyono, menyebutkan keadilan adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga prinsip keadilan yaitu: (1) kesamaan kebebasan yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas kesempatan.²²⁵

2. Macam-macam Keadilan Multikultural

Terdapat beberapa macam keadilan seperti (1) Keadilan legal atau moral; (2) Keadilan distributif; (3) Keadilan komulatif.²²⁶ *Pertama*, keadilan legal atau keadilan moral. Keadilan legal atau moral. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Plato berpendapat keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Sunoto menyebutnya jika terwujud setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.²²⁷ Ketidakadilan terjadi jika ada campur tangan terhadap pihak lain yang

²²⁴Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010). Baca Juga: H, Acmat. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Paradigm, 2007)

²²⁵AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35

²²⁶Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

²²⁷Sunoto. *Analisis iklim organisasi dan pengembangan karir terhadap komitmen organisasional guru dengan mediasi kepuasan kerja (Studi pada Dinas KB dan KS Kabupaten Pati)*. (Semarang: STIE STIKUBANK, 2008)

melaksanakan tugas-tugas yang selaras sebab hal itu menciptakan pertentangan dan ketidakserasian. Misalnya seorang pengurus kesehatan mencampuri urusan pendidikan, maka terjadi kekacauan.

Kedua, Keadilan Distributif. Aristoteles berpendapat bahwa kesamaan keadilan terlaksana, jika hal-hal diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*). Yohanes menyebutkan keadilan distributif adalah keadilan yang menyangkut alokasi keluaran (*outcomes*) dan *reward* pada anggota perusahaan. Perhatian mengenai keadilan distributif dirasakan adil dari penempatan hasil atau pemberian penghargaan kepada para anggota perusahaan.²²⁸ Keadilan distributif mengarah pada keadilan tingkat bawah, yang mencakup masalah penggajian, pelatihan, promosi, maupun pemecatan.

Untuk mengurangi kesenjangan perlu diterapkan prinsip-prinsip keadilan distributif. Akan tetapi permasalahannya adalah banyak prinsip keadilan distributif yang tidak selaras.²²⁹ Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dimaksudkan harus didasarkan pada pertimbangan atau kondisi sosial pada saat itu.

Ketiga, Keadilan Kumulatif. Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Aristoteles memberikan pengertian keadilan merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.²³⁰ Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) Keadilan komutatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.

3. Semangat Kebersamaan dalam Multikultural

²²⁸Budiarto, Yohanes, Rani P.W., *Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan Keadilan Interaksional Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan pada Perusahaan (Studi pada Perusahaan X)*, Jurnal Psikologi Vol. 3, No. 2. 2005.

²²⁹Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

²³⁰ AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35

Perkembangan terakhir menunjukkan, Intensitas dan ekstensitas konflik sosial di tengah-tengah masyarakat terasa kian meningkat. Terutama konflik sosial yang bersifat horisontal, yakni konflik yang berkembang di antara anggota masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik berdimensi vertikal, yakni antara masyarakat dan negara. Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah, karena masyarakat tidak selamanya bebas konflik.

Persoalannya menjadi konflik sosial dan berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, tetapi berubah menjadi destruktif bahkan anarkis, seperti sejumlah konflik sosial dalam masyarakat telah berubah menjadi destruktif bahkan cenderung anarkis. Kasus Ambon, Poso, Maluku, GAM di Aceh, Papua dan berbagai kasus yang menyulut kepada konflik yang lebih besar dan berbahaya.

Konflik sosial berbau SARA (terutama agama) ini tidak dianggap remeh dan harus segera diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi nasional. Banyak hal yang patut direnungkan dan dicermati dengan fenomena konflik sosial tersebut. Fenomena konflik sosial merupakan peristiwa yang bersifat insidental dengan motif tertentu dan kepentingan sesaat, atau bahkan justru merupakan budaya dalam masyarakat yang bersifat laten. Realitas empiris ini juga menunjukkan bahwa masih ada problem yang mendasar yang belum terselesaikan. Menyangkut penghayatan terhadap agama sebagai kumpulan doktrin di satu pihak dan sikap keagamaan yang mewujudkan dalam perilaku kebudayaan di pihak lain.²³¹

Kemajemukan masyarakat lokal tersebut bukan saja bersifat horisontal (perbedaan etnik, agama), tetapi juga sering berkecenderungan vertikal, maksudnya terpolarisasinya status dan kelas sosial berdasar kekayaan dan jabatan atau prestasi pekerjaan. Seperti: (1) perkembangan ekonomi pasar membuat beberapa kelompok masyarakat tertentu, khususnya dari etnik

²³¹Nawari Ismail dan Muhaimin, (*Pendamping*), *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, Bandung: CV. Lumbuk Agung, 2011), h. 179-182.

tertentu yang memiliki tradisi dagang, naik peringkatnya menjadi kelompok masyarakat yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat setempat yang mandeg perkembangannya; (2) kelompok masyarakat etnis dan agama tertentu, yang semula berada di luar *mainstream*, yaitu berada di pinggiran, mulai menembus masuk ke tengah *mainstream*, hal ini dapat menimbulkan gesekan *primordialistik*, apalagi bila ditunggangi kepentingan politik dan ekonomi tertentu seperti terjadi di Ambon, Poso, Aceh dan Papua.

Upaya bersama dalam menyikapi sebuah multikulturalisme adalah dengan menjalankan asas gerakan multikulturalisme menjadi sebuah ideologi yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan multikulturalisme, yaitu dengan asas-asas sebagai berikut: (1) Manusia tumbuh dan besar pada hubungan sosial di dalam sebuah tatanan tertentu, dimana sistem nilai dan makna di terapkan dalam berbagai simbol-simbol budaya dan ungkapan-ungkapan bangsa; (2) Keanekaragaman Budaya menunjukkan adanya visi dan sistem makna yang berbeda, sehingga budaya satu memerlukan budaya lain. Dengan mempelajari kebudayaan lain, maka memperluas cakrawala pemahaman makna multikulturalisme; (3) Setiap kebudayaan secara Internal adalah majemuk, sehingga dialog berkelanjutan sangat diperlukan demi terciptanya persatuan.²³²

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu; (1) kompetensi kebudayaan; (2) kemasyarakatan dan kepribadian.²³³

Pertama, kompetensi kebudayaan adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsesus

²³²Nawari Ismail dan Muhaimin, (*Pendamping*), *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*, Bandung: CV. Lumbuk Agung, 2011), h. 179-182.

²³³HustonSmith, *Agama Agama Manusia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001)

mengenai sesuatu. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan sah yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membentuk solidaritas sejati. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang memungkinkan seorang subjek dapat berbicara dan bertindak dan karenanya mampu berpartisipasi dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks tertentu dan mampu memelihara jati dirinya sendiri dalam berbagai perubahan interaksi.

Kedua, Semangat kebersamaan dalam perbedaan sebagaimana terpatri dalam wacana Bhineka Tunggal Ika perlu menjadi roh atau spirit penggerak setiap tindakan komunikatif, khususnya dalam proses pengambilan keputusan politik, keputusan yang menyangkut persoalan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Jika tindakan komunikatif terlaksana dalam sebuah komunitas masyarakat multikultural, hubungan diagonal ini menghasilkan beberapa hal penting, misalnya: (1) Reproduksi kultural yang menjamin bahwa dalam konsepsi politik yang baru, tetap ada kelangsungan tradisi dan koherensi pengetahuan yang memadai untuk kebutuhan konsensus praktis dalam praktik kehidupan sehari-hari; (2) Integrasi sosial yang menjamin bahwa koordinasi tindakan politis tetap terpelihara melalui sarana-sarana hubungan antar pribadi dan antar komponen politik yang diatur secara resmi (*legitemed*) tanpa menghilangkan identitas masing-masing unsur kebudayaan; dan (3) Sosialisasi yang menjamin bahwa konsepsi politik yang disepakati harus mampu memberi ruang tindak bagi generasi mendatang dan penyelarasan konteks kehidupan individu dan kehidupan kolektif tetap terjaga.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Dengan demikian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu satu nusa, satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh, beranekaragam budaya, etnik, suku, ras dan agama, yang kesemuanya itu menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu mengakomodasi kemajemukan, menjadi suatu kekuatan yang tangguh. Sehingga ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa dapat dihindari.²³⁴

F. Kesimpulan

Pendidikan Islam multikulturalisme merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat yang setara dan adil. Pendidikan Islam multikultural merupakan instrument untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional dan memantapkan jati diri Bangsa. Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan di masyarakat melalui pendidikan Islam multikultural.

G. Saran

Pendidikan Islam multikultural sebagai wahana strategis membangun kesadaran kolektif warga mengukuhkan ikatan sosial, menghargai keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, sehingga semua warga merasa setara dan adil dalam upaya menjaga keutuhan negara dan bangsa. Dengan demikian

²³⁴ AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35

disarankan jika ingin masyarakat merasa setara dan adil, maka tingkatkan pemahaman dan implementasi pendidikan Islam multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suradi, *Pendidikan Islam Multikultural Tinjauan Teoritis dan Praktis di Lingkungan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- A. Nurkolis. *Konsep Pendidikan Islam Multikultural dalam Pemikiran IR. Soekarno*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- AE. Priyono, *Peri-feralisasi, Oposisi dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- Allen, J.P.B. and H.G. Widowson, *Teaching the Communicative Use of English*. In C.J. Brumfit and K. Johnson (Eds). *The Communicative Approach to Language Teaching*. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- Azra, Azumardi. (2013). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, from <http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azra.html>.
- Baharun, Hasan dan Robiatul Awwaliyah, *Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) Volume 5 Nomor 2. 2017.
- Budiarto, Yohanes, Rani P.W., *Peran Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan Keadilan Interaksional Perusahaan terhadap Komitmen Karyawan pada Perusahaan (Studi pada Perusahaan X)*. Jurnal Psikologi Vol. 3, No. 2. 2005.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Data Pusat Statistik (BPS). Tahun 2015.

Fuad, Ismail, *Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Hasan Baharun dan Robiatul Awwaliyah, *Pendidikan Multikultural Dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) Volume 5 Nomor 2. 2017.

H, Acmat, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigm, 2010.

Ismail Fuad, *Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Julaiha, Siti, *Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*. Journal Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1, Juni 2014.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Khairiah, K., *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Martono dkk., *Hidup berbangsa dan Etika Multikultural*. Surabaya: Forum Rektor Simpul, 2003.

Notonegoro, *Pancasila Secara Utuh Populer*. Jakarta: Pancoran Tujuh, 1975.

Nursaid, *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Nurkolis, Ahmat, *Konsep Pendidikan Islam Multikultural dalam Pemikiran IR. Soekarno*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017

Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke, *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1. 2017.

Suradi, Ahmad, *Pendidikan Islam Multikultural Tinjauan Teoritis dan Praktis di lingkungan pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.

Sunoto, *Analisis Iklim Organisasi dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasional Guru dengan Mediasi Kepuasan Kerja (Studi pada Dinas KB dan KS Kabupaten Pati)*. Semarang: STIE STIKUBANK. 2008.

Siti Julaiha, *Internalisasi Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam*, Journal Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1. 2014.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang *Ratifikasi atas Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi atau konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

Zawahir Muntaha, Payiz dan Ismail Suardi Wekke, *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1. 2017.

Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Zuhairini, dkk., *Metode Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

BAB VI KARAKTERISTIK DAN BENTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menghargai perbedaan. Sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Pendidikan multikultural merupakan proses pengakuan setiap kebudayaan berada pada posisi yang sejajar dan setingkat, tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain, anggapan kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain melahirkan *fasisme*, *nativisme* dan *chauvinisme*.²³⁵

Pola pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia perlu dikelola dengan baik, jika dikelola secara efektif diharapkan dapat memperkaya kebudayaan dan peradaban yang bersangkutan sehingga nantinya terwujud masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera saling menghargai perbedaan. James Banks menyebutkan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara.²³⁶

Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar peserta didik laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus merupakan anggota dari kelompok ras, etnik dan kultural yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang seragam dalam mencapai prestasi akademik di sekolah.²³⁷

²³⁵Fuad, Ismail, *Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

²³⁶Banks, James, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984).

²³⁷Yaya Suryana dan A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.196

Pendidikan multikultural fokus pada karakteristik kelompok yang berbeda. Tilaar menyebutkan karakteristik adalah syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan berkenaan dengan kekhasan yang membedakan seseorang dengan orang lain.²³⁸ Selanjutnya Tilaar menyebutkan pendidikan multikultural memiliki ciri khas manusia budaya dan menciptakan masyarakat budaya (peradaban).²³⁹ Sedangkan yang lain menekankan masalah sosial (khususnya tentang penindasan), kekuasaan politik dan pengalokasian sumber ekonomi. Makna lain membatasi pada karakteristik sekolah lokal dan yang lain memberi petunjuk tentang reformasi semua sekolah tanpa memandang karakteristiknya.

Neto menyebutkan tujuh karakteristik pendidikan Islam multikultural, sebagai berikut: (1) pendidikan *antiracist* (pendidikan yang tidak membenci orang lain); (2) pendidikan dasar. Hak dasar bagi semua peserta didik untuk terlibat dalam akademis (kebutuhan yang diperlukan oleh semua peserta didik); (3) penting untuk semua peserta didik (semua peserta didik berhak dan membutuhkan pendidikan yang inklusif dan ketat); (4) luas (pendidikan multikultural membahas menembus seluruh pendidikan, termasuk sekolah, lingkungan fisik, kurikulum, dan hubungan sesama); (5) pendidikan untuk keadilan sosial; (6) pendidikan sebagai proses (peserta didik dan pendidikan dalam proses pendidikan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan prestasi belajar, lingkungan belajar, preferensi belajar, dan variabel budaya); (7) pedagogik kritis dalam berfikir kritis peserta didik oleh budaya, bahasa, keluarga, sekolah, artistic dan pengalaman pendidikan.²⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut berkenaan dengan makna dan implikasi pendidikan multikultural, seperti implikasi pendidikan multikultural, sejarah dari pendidikan multikultural,

²³⁸H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123.

²³⁹H.A.R Tilaar. *Ibid.*, h. 123.

²⁴⁰ Petty Pertanda. Tujuh Karakteristik Pendidikan Multikultural Neto, Baca Juga: AE. Priyono. *Peri-feralisasi, Oposisi, dan Integrasi Islam di Indonesia (Menyimak Pemikiran Dr. Kuntowijoyo)*, dalam Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 1993), h. 35.

karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia dengan judul: makna dan implikasi pendidikan multikultural, karakteristik problematika dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Implikasi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada para peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai dan ideologi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai.²⁴¹

Pendidikan multikultural mengarahkan peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender dan kemampuan akademis. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk mengubah pembelajaran ke arah memberikan peluang yang seragam pada setiap anak. Jadi, tidak ada yang dikorbankan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berbeda latarbelakang, mereka harus belajar satu dengan lainnya, berinteraksi dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Pendidikan multikultural bertujuan untuk membantu siswa: (1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat; (2) menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historis etnik; (3) menyelesaikan sikap-sikap yang penuh prasangka; dan (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi dan keterasingan etnik. Selain itu, tujuan

²⁴¹Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 29

pendidikan multikultural dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk.²⁴²

Pendidikan Multikultural dan implikasinya meliputi hal-hal berikut.

1. Pendidikan multikultural sebagai ide

Pendidikan multikultural sebagai ide adalah suatu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Sebagai sebuah ide, maka pendidikan multikultural ini harus mengenalkan pengetahuan tentang berbagai kelompok dan organisasi. Implikasinya adalah pemasukan bahan ajar yang berisi ide dari berbagai kelompok budaya. Diperlukan adanya pendidikan yang leluasa untuk mengeksplorasi perspektif dan budaya orang lain. Dengan mengeksplorasi itu diperoleh inspirasi sehingga membuat anak menjadi sensitif terhadap pluralitas cara hidup, yaitu cara yang berbeda dalam menganalisis pengalaman, ide dan cara melihat berbagai temuan sejarah yang ada di seluruh dunia.

2. Pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan

Pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai suatu gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan. Komponen itu mencakup hal-hal berikut. (1) Nilai-nilai yang mendasari, artinya nilai-nilai yang bersifat pluralisme harus mendasari seluruh komponen pendidikan; (2) Aturan prosedural, artinya aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak pada semua kelompok yang beragam itu; (3) Kurikulum, artinya keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum. Artinya dibutuhkan penyusunan kurikulum yang di dalamnya mencerminkan nilai-nilai multikultural. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah; (4) Bahan ajar, artinya materi multikultural itu harus tercermin dalam materi pelajaran, pada semua bidang studi. Multikultural bukan hanya diajarkan satu bidang studi melainkan lebih merupakan materi pelajaran yang bisa disisipkan pada semua bidang

²⁴²Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural*, (Surakarta: Addin, 2013), h.146

studi; (5) Struktur organisasi, artinya struktur organisasi sekolah itu perlu mencerminkan kondisi riil yang pluralistik; dan (6) Pola kebijakan artinya pola kebijakan yang diambil oleh pembuat keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya.

3. Pendidikan multikultural sebagai proses

Pendidikan multikultural merupakan suatu proses yang terus-menerus yang membutuhkan waktu jangka panjang untuk mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan dalam masyarakat.

C. Karakteristik Problematika Pendidikan Multikultural di Indonesia

Problematika pendidikan multikultural di Indonesia terjadi, dari berbagai kekerasan antarkelompok yang bergejolak, seperti persoalan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Karakteristik permasalahan SARA dapat dilihat dari faktor yang melatarbelakangi pertikaian yang disebabkan oleh: (1) kuatnya prasangka, *etnosentrisme*, *stereotip* dan *diskriminatif* antara kelompok; (2) merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan serta saling pengertian; (3) aktivitas politis identitas kelompok/daerah di dalam era reformasi; dan (4) tekanan sosial ekonomi.²⁴³

Ada tiga kelompok pemikiran yang berkembang di Indonesia dalam menyikapi konflik yang sering muncul, yaitu: (1) kelompok *primordialis*; (2) kelompok *instrumentalis*; (3) kelompok *konstruktivis*.²⁴⁴ *Pertama*, pandangan kelompok *primordialis*. Kelompok ini menganggap perbedaan berasal dari ikatan *primordial* seperti suku, ras, agama, dan antar golongan merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan. Contohnya, Peristiwa Sampit, Kerusuhan Anti Cina, Peristiwa Poso dan Ambon.

Kedua, pandangan kelompok *instrumentalis*. Menurut mereka, suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat saja, yang digunakan individu atau kelompok tertentu untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materil maupun nonmateril. Konsepsi ini lebih banyak digunakan

²⁴³Azra, Azumardi. (2013). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*, from <http://budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20.azra.html>.

²⁴⁴HustonSmith, *Agama Agama Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.81

oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas,

Ketiga, pandangan kelompok *konstruktivis*. Mereka beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, seperti yang dibayangkan kaum *primordialis*.²⁴⁵ *Etnisitas*, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. *Etnisitas* merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Kelompok ini menganggap persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. Kelompok ini selalu berpikir positif tentang kondisi multikultural Indonesia.

Selain hal tersebut, beberapa peristiwa budaya yang negatif dan sering muncul di tanah air seperti peristiwa di Poso, Ambon, Papua, Sampit, Aceh, Bali dan Jakarta. Hal ini disebabkan oleh problema kemasyarakatan sebagai berikut: (1) keragaman identitas budaya daerah; (2) kurang kokohnya nasionalisme; (3) fanatisme sempit; (4) kesejahteraan ekonomi yang tidak merata diantara kelompok budaya; (5) konflik kesatuan nasional dan multikultural; (6) pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah; dan (7) keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa.²⁴⁶ Penjelasan sebagai berikut;

1. Keragaman identitas budaya daerah

Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal berharga dalam membangun Indonesia multikultural. Namun, kondisi keragaman budaya berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial. Problematika muncul, jika tidak adanya komunikasi dan pemahaman terhadap keragaman budaya lain, maka sering menjadi konflik. Konflik yang terjadi dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama dan ras.

²⁴⁵Yaya Suryana dan A. Rusdiana. *Pendidikan Multikultural*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 204

²⁴⁶Sutarno. *Pendidikan Multikultural*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional, 2007)

Keragaman ini dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan isu memancing persoalan dan keributan. Dalam mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan manajemen konflik, agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural diharapkan setiap warga daerah dapat mengenal, memahami, menghayati dan bisa saling berkomunikasi dengan daerah lain.

2. Kurang kokohnya nasionalisme

Keragaman budaya memerlukan kesatuan seluruh pluralitas yang kuat negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai *integrating force*. Saat ini dirasakan Pancasila kurang mendapat perhatian, sejak isu kedaerahan semakin marak. Persepsi sederhana dan keliru yang dilakukan orang dengan menyamakan pancasila dengan ideologi orde baru yang perlu ditinggalkan. Kebijakan masa orde baru dirasakan terlalu tersentralisasi, sehingga ketika orde baru tumbang, maka segala hal yang menjadi dasar dari orde baru dianggap jelek, perlu ditinggalkan dan diperbaharui, termasuk di dalamnya pancasila.

Nasionalisme perlu ditegakkan dengan cara-cara edukatif, persuasif, dan manusiawi bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah membuktikan, peranan pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

3. Fanatisme sempit

Fanatisme sempit, seperti menganggap bahwa kelompoknyalah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit terjadi banyak menimbulkan korban di tanah air ini, seperti; gejala Bonek (bondo nekat) di kalangan suporter sepak bola. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta, maka hal tersebut justru tidak sehat. Terjadi pelemparan terhadap pemain lawan dan pengrusakan mobil

dan benda-benda yang ada di sekitar stadion, ketika tim kesayangannya kalah. Kemudian fanatisme sempit juga sering terjadi perseteruan dan perkelahian antara oknum aparat kepolisian dengan oknum aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apalagi jika fanatisme tersebut berbaur dengan isu agama (misalnya di Ambon, Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah), maka dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa.

4. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata diantara kelompok budaya

Kejadian yang nampak bernuansa SARA seperti Peristiwa Sampit setelah diselidiki ternyata berawal dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Keterlibatan orang dalam demonstrasi, apapun kejadian dan tema demonstrasi, seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi.

Bahkan demi selembar kertas duapuluh ribu, orang mau ikut terlibat dalam demonstrasi, meskipun tidak mengetahui maksudnya. Sudah banyak kejadian terungkap di media massa mengenai hal tersebut. Orang sangat mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan anarkis, ketika mengalami himpitan ekonomi. Mereka menumpah kekesalan kepada kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang mereka tidak mampu meraihnya. Hal ini terlihat dari gejala pengrusakan mobil-mobil mewah, oleh orang yang tidak bertanggung dalam berbagai peristiwa di tanah air. Mobil mewah menjadi simbol kemewahan dan keamanan, sehingga menjadi kecemburuan sosial bagi kelompok tertentu dalam peristiwa kerusuhan dan cenderung dirusak. Dengan demikian negara harus segera hadir dalam memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat demi menjaga keutuhan bangsa.

5. Konflik kesatuan nasional dan multikultural

Seperti ada tarik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk

mencapai kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, sebagai contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan anti pati terhadap kekuasaan pusat, sehingga bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Di sisi multikultural, terlihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat, dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat, contoh adanya gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Namun, ada gejala ke arah penyelesaian damai dan multikultural yang terjadi akhir-akhir ini. Salah seorang panglima perang OPM yang menyerahkan diri dan berkomitmen terhadap negara kesatuan RI telah mendirikan Kampung Bhineka Tunggal Ika di Nabire, Papua.

6. Pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah

Indonesia pada era reformasi dan demokratisasi dihadapkan beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Contohnya persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan tersebut, termasuk isu kedaerahan, putera daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi.

Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah adanya asas kesetaraan dan persamaan. Namun, jika isu ini terus menerus dihembuskan justru membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang dengan mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Faktor pribadi (misalnya iri, keinginan

memperoleh jabatan) dapat berubah menjadi isu publik yang destruktif, ketika persoalan itu muncul di antara orang yang termasuk dalam putra daerah dan pendatang. Konsep pembagian wilayah menjadi provinsi atau kabupaten baru yang marak terjadi akhir-akhir ini, selalu ditiup-tiupkan oleh kalangan tertentu, agar mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Mereka menggalang kekuatan dengan memanfaatkan isu kedaerahan ini. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang tertindas dan kurang beruntung.

7. Keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa.

Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Pemerintah harus hadir, perlu mewaspadaai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media, untuk kepentingan tertentu, justru dapat merusak budaya Indonesia. Contoh kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapat hukuman setimpal baik dari segi hukum maupun sanksi kemasyarakatan, sehingga dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan yang luhur.

Kasus perceraian rumah tangga para artis yang tiap hari diudarkan, dapat membentuk opini publik yang negatif, sehingga kesan kawin cerai di antara artis, sebagai budaya baru dan menjadi tren yang biasa dilakukan. Orang menjadi kurang menghormati lembaga perkawinan.

Isu kekayaan yang selalu menjadi tema sinetron, sehingga orang cenderung terlalu mengagungkan materi dan menghalalkan segala cara. Begitu juga tampilan yang seronok mengundang birahi, pengudaraan modus kejahatan baru ataupun iklan yang bertubi-tubi dapat menginspirasi orang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Televisi dan media massa harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidik dengan budaya yang baik. hal ini dikarenakan menonton televisi dan membaca koran

sudah menjadi tradisi yang kuat di negeri ini. Sehingga tontonan menjadi tuntunan, bukan tuntunan sekedar menjadi tontonan.

Peristiwa penggusuran gubuk liar yang memilukan ditampilkan dalam bentuk tangisan yang memilukan seorang anak atau orang tua yang dipadukan dengan tindakan aparat yang menyeret para gelandangan akan bermakna lain bagi pemirsa, jika yang ditampilkan adalah para preman bertato yang melawan tindakan petugas pamong praja. Ironi itu nampak bila yang disorot, yaitu tangisan bayi/orang tua dibandingkan dengan tato di lengan atau di punggung. Peristiwanya adalah penggusuran gubuk liar, tetapi simbol yang digunakan berbeda. Tangisan sebagai simbol kelemahan, ketidakberdayaan, dan putus asa. Tato sering dikonotasikan secara salah sebagai simbol preman dan tindakan pemalakan. Televisi sangat mempengaruhi opini publik dalam menyorot berbagai peristiwa.

D. Bentuk Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia terjadi penambahan materi multikultural dalam aktualisasinya, berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air. Pesan multikultural bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran.

Semua bidang studi bisa bermuatan multikultural, seperti; (1) berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Sekarang sudah ada satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya, namun benar-benar direncanakan secara sistematis; (2) berbentuk program pendidikan. Menurut Bunnet program pendidikan multikultural memiliki tiga macam program yang dapat diterapkan oleh sekolah dan masyarakat secara keseluruhan, yaitu: (a) berorientasi pada materi, merupakan bentuk pendidikan multikultural yang paling umum dapat cepat dipahami. Tujuan utamanya adalah memasukkan materi tentang kelompok budaya yang berbeda untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang hal tersebut; (b) Berorientasi pada siswa, bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademis kelompok siswa yang

berbeda meskipun pada saat itu tidak memberikan perubahan besar dalam muatan kurikulum; dan (c) Berorientasi sosial, Program ini bertujuan meningkatkan toleransi budaya dan ras serta mengurangi bias.²⁴⁷ (3) Gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Di Kabupaten Nabire, Papua ada sebuah kampung yang mencerminkan gerakan kebhinekaan yang bernama Kampung Bhineka Tunggal Ika.

Terdapat empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, jika dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia, seperti; (1) Pendekatan Kontribusi, level ini yang paling sering dilakukan dalam fase pertama gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya dalam pelajaran; (2) Pendekatan Aditif, pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan modul, buku. Pendekatan ini merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural karena belum menyentuh kurikulum utama; (3) Pendekatan Transformasi, pendekatan yang berupaya menumbuhkan asumsi dasar dalam melihat konsep, isu, tema atau masalah dari beberapa perspektif atau sudut pandang etnis; (4) Pendekatan Aksi Sosial, pendekatan aksi sosial mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang ada. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memiliki pendidikan politis.

E. Kesimpulan

Karakteristik dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengembangan pendidikan multikultural dapat dilakukan dan diarahkan kepada usaha edukatif, melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan kepada para peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai dan ideologi, sehingga memiliki kemampuan untuk

²⁴⁷Yaya Suryana dan A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 273

dapat hidup bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai. Karakteristik pendidikan multikultural adalah pendidikan yang tidak membenci orang lain, pendidikan dasar dan hak dasar peserta didik, pendidikan luas untuk keadilan sosial, pendidikan sebagai proses prestasi belajar, lingkungan belajar kondusif, preferensi belajar siswa, pedagogik kritis dalam berfikir kritis peserta didik oleh budaya, bahasa, keluarga, sekolah artistik dan pengalaman pendidikan.

F. Saran

Karakteristik pendidikan multikultural sebagai proses prestasi belajar, lingkungan belajar kondusif, preferensi belajar, pedagogik, berfikir kritis peserta didik. Dalam hal ini disarankan hendaknya Implikasi pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi pendidikan dan sebagai proses yang berlangsung terus menerus berjalan secara efektif. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, melalui penambahan materi multikultural yang ada dalam aktualisasinya bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran. Jika ingin pendidikan multikultural di Indonesia baik, maka tingkatkan pemahaman karakteristik dan bentuk multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- Alma, Buchari, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Banks, James, *Teaching Strategies for Ethnic Studies*, Newton: Allyn and Bacon, 1984.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harto, Kasinyo, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ibrahim, Rustam, *Pendidikan Multikultural*. Surakarta: Addin, 2013.

- Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Langgulang, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra,
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mujid, Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam, Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Noer Aly, Hery, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Suryana, Yaya dan A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural*, Surakarta: Addin, 2013.
- Tobroni, *Pendidikan Islam Paradigma Teologis*. Malang: UMM Press, 2008.
- Yaya Suryana dan A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

BAB VII

PERAN GURU DAN MODEL PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

A. Pendahuluan

Peran guru penting dan sangat strategis dalam menerapkan beberapa aksi, guna membangun keberagaman peserta didik. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di sekolah, diantaranya: (1) seorang guru harus mampu untuk bersikap demokratis, artinya setiap perilaku, baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif terhadap peserta didik yang berbeda agama; (2) seorang guru harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama.²⁴⁸

Seorang guru harus mampu menjelaskan inti dari ajaran agama adalah menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dialog dan musyawarah adalah bentuk penyelesaian segala masalah yang sangat dianjurkan oleh agama dan segala kepercayaan yang ada. Guru sebagai orang tua peserta didik di sekolah, sangat diharapkan mampu memberikan pendidikan yang baik, pemahaman yang benar dan mampu membentuk pribadi peserta didik menjadi manusia berakhlak mulia, menghormati yang tua, menghargai sesama teman dan saudara, serta menyayangi yang kecil.²⁴⁹ Demikian juga di tengah-tengah masyarakat mampu menampilkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik seperti memiliki sikap hormat kepada yang lebih tua, toleransi kepada sesama manusia dan menghargai perbedaan dengan dirinya dan menyayangi yang kecil, mengakui multikultural.

²⁴⁸Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Baca Juga: Djaramah Syaiful Bahra dan Zain Aswan, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Baca Juga: Haidir dan Salim, *Strategi Pembelajaran*, (Medan: Perdana Publishing, 2012). Baca Juga: Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). Baca Juga: Nata Abuddin, *Perspektif Islam tentang strategi pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenedia Group, 2009).

²⁴⁹Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Baca Juga: Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2011).

Multikultural berarti banyak kebudayaan dan berhubungan dengan kebudayaan. Multikultural bersifat keberagaman budaya.²⁵⁰ Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis agama, bahasa, gender, khas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah.²⁵¹

Banks menyebutkan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara.²⁵² Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang bertujuan mengubah struktur lembaga pendidikan supaya menjadi baik, siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis dan kultural yang bermacam-macam itu memiliki kesempatan yang sederajat untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.²⁵³

Gollnick & Chim (2007) dalam Iwan Supardi menyebutkan enam asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan disekolah, yaitu: (1) Perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai; (2) Sekolah harus menjadi model penyampaian HAM dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya; (3) Keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum; (4) Perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah; (5) Lembaga sekolah dapat sebagai tempat

²⁵⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 937.

²⁵¹M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Undersatanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 25.

²⁵²Banks, James, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon, 1984).

²⁵³Farida Hanum, *pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa*, Oktober 2015

untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap nilai, perilaku, dan komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam; dan (6) Kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme.²⁵⁴

Multikulturalisme memandang dunia dari bingkai referensi budaya yang berbeda dan mengenali serta menghargai kekayaan ragam budaya di dalam negara dan komunitas global. Multikulturalisme menegaskan perlunya menciptakan perbedaan yang berkaitan dengan ras, etnis, gender, orientasi seksual, keterbatasan dan kelas sosial yang diakui dan dipandang seluruh siswa sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses belajar mengajar.²⁵⁵

Dalam rangka membentuk pribadi peserta didik yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia, baik terhadap semua manusia dan lingkungannya serta terhindar dari perilaku yang tidak baik dan tindakan kejahatan, maka guru memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan analisis tersebut, maka bab ini membahas tentang model pendidikan Islam multikultural dan peran guru di dalamnya, yaitu pendidikan Islam multikultural dan integrasi bangsa, model pendidikan Islam multikultural, karakteristik dan asumsi pendidikan Islam multikultural, multikultural dalam hadis Nabi Muhammad SAW, peran guru dalam pendidikan Islam multikultural, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Pendidikan Islam Multikultural dan Integrasi Bangsa

Islam Multikultural merupakan pengembangan dari prinsip pendidikan multikultural yang mengadopsi dari nilai yang terkandung dalam sumber rujukan Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, atau dapat juga didefinisikan sebagai proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai dasar dan ideal ajaran Islam yang berusaha mengakomodasi aspek-aspek perbedaan dan disparitas

²⁵⁴Iwan Supardi, *Model Pendidikan Multikultural Ramah di Kota Pontianak*, (Pontianak: UNY, 2014), h. 119.

²⁵⁵Akhmad Hidayatulloh Al Arifin, *Implementasi Pendidikan Mutikultural dalam Praktis Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*, Vol.1 No.1 Juni 2012.

kemanusiaan sebagai *sunatullah* yang harus diterima dengan penuh arif dan lapang dada di tengah realitas manusia yang plural multikultural dalam berbagai dimensi untuk mencapai tatanan kehidupan yang berkeadilan.²⁵⁶

Pengertian integrasi bangsa adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah. Integrasi bangsa berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan bangsa. Integrasi berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya kesempurnaan atau keseluruhan, integrasi menurut istilah adalah kondisi pembauran dari berbagai komponen yang berbeda.

Pembauran ini pada akhirnya akan membentuk sebuah kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan bangsa adalah pembangunan beberapa kelompok yang memiliki prinsip yang berbeda yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Jadi pengertian integrasi bangsa adalah bersatunya penduduk, masyarakat dari berbagai golongan untuk melakukan sebuah tujuan/misi tertentu, yang mana tujuan/misi tersebut merupakan tujuan yang dianggap baik dan bermanfaat bagi sebuah bangsa. Contoh Integrasi bangsa adalah sumpah pemuda dan gotong royong.²⁵⁷

C. Model Pendidikan Islam Multikultural

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku seseorang ataupun kelompok orang dalam usaha, mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁵⁸ Pendidikan Agama Islam (PAI) yaitu proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani dan akal peserta didik kearah terbentuknya pribadi muslim yang baik. PAI merupakan alat yang dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia (sebagai makhluk pribadi dan sosial) pada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

²⁵⁶Ahmad Afnam Anshori, *Pendidikan Islam Multikultural sebagai Konflik Agama Islam di Indonesia*, Ilmu Aqidah Studi Keagamaan, Edisi 4, 2016, h. 29.

²⁵⁷Andi Aco Agus *Integrasi Nasional Sebagai Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia*, Sosialisasi Pendidikan Sosialogi, Edisi 1, 2016, h. 20.

²⁵⁸Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Pendidikan sebagai sarana dalam membentuk kepribadian manusia seutuhnya sangat bergantung pada pemegang kebijakan dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan yang telah berjalan di berbagai daerah, mulai dari sistem yang sederhana sampai menuju sistem pendidikan Islam yang modern. Sejarah perkembangan pendidikan Islam, baik yang bersifat operasional maupun teknis, metode, sarana dan kelembagaan serta dasar dan tujuannya harus sesuai dengan sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur`an dan sunah.

Pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari pendidik yang mengarahkan peserta didiknya pada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan dan terbentuknya pribadi muslim yang baik.²⁵⁹ Dalam konteks tujuan pendidikan Agama Islam di sekolah umum, Departemen Pendidikan Nasional (1998) merumuskan sebagai berikut; menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur adil, berdisiplin, bertoleran (*tasamuh*), menjaga keharmonisan antar personal.²⁶⁰ (1) Pendidikan Agama berwawasan multikultural. Maksudnya model pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai moral, seperti kasih sayang, cinta seseorang, tolong-menolong, toleransi, menghargai keberagaman dan sikap-sikap lain yang menjunjung kemanusiaan. Untuk merancang strategi hubungan multikultural dalam pendidikan (termasuk pendidikan agama).

Presma (2004:285) menjelaskan setidaknya dapat digolongkan pada dua pengalaman, yaitu pengalaman pribadi dan pengalaman pengajaran yang

²⁵⁹Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, cet.1. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 319-320

²⁶⁰Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.* h. 321

dilakukan oleh guru (pendidik) sebagai berikut: (1) Pengamalan pribadi dapat dikondisikan dengan menciptakan suasana, seperti seluruh peserta didik memiliki status dan tugas yang sama, seluruh peserta didik bergaul, berhubungan, berkembang dan berkelanjutan bersama seluruh peserta didik berhubungan dengan fasilitas, guru dan norma kelas yang sama. (2) Pengalaman pengajaran adalah guru harus sadar keragaman siswa, bahan kurikulum dan pengajaran seharusnya merefleksikan keragaman, serta bahan kurikulum dituliskan dalam bahasa daerah atau etnik yang berbeda.

Pendidikan Islam yang berwawasan multikultural adalah suatu pendidikan yang membuka visi dan cakrawala yang lebih luas. Mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga mampu melihat kemanusiaan sebagai keluarga yang memiliki perbedaan kesamaan cita-cita.²⁶¹ Nilai-nilai pendidikan Islam berbasis multikultural (1) nilai andragogi; (2) nilai perdamaian; (3) nilai inklusivisme; (4) nilai kearifan; (5) nilai toleransi.²⁶²

1. Nilai Andragogi

Sekolah atau pendidikan diharapkan mampu mengubah keterpurukan manusia dari berbagai sudut yang mengakibatkan diambang kehancuran. Knowles menggambarkan peserta didik sebagai dewasa diasumsikan memiliki kemampuan aktif untuk merencanakan arah, memiliki bahan, menyimpulkan ataupun mengambil manfaat, memikirkan secara baik untuk belajar, serta mampu mengambil manfaat dari pendidikan. Fungsi guru sebagai fasilitator bukan menggurui. Oleh karena itu, relasi antar guru dan siswa bersifat *multicommunication*. Pendidikan menjadi sarana bagi ajang kreativitas, minat dan bakat peserta didik, visi pendidikan yang demokratis, liberatif, kemudian

²⁶¹Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 322

²⁶²Knowles, Malcolm. *Andragogy: Concepts for Adult Learning*. Washington, D.C.: Departement of Health, Education and Welfare, 1975. Baca Juga: Knowles, Malcolm. *The Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy*. (New York: Association Press, 1977). Baca Juga: Knowles, Malcolm. *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. (Cambridge: Englewood Cliffs, 1980). Baca Juga: Knowles, Malcolm, Holton III, E.F. Swanson, R.A. *the Adult Learner*. (Houston: Gulf Publishing Company, 2005).

menjadi kebutuhan yang pokok ketika masih memiliki satu cita-cita tentang pentingnya membangun kehidupan yang harmonis.²⁶³

2. Nilai perdamaian.

Islam sebagai agama *rahmata lil'alam* memiliki misi menyebarkan kedamaian kepada semua umat manusia. Islam melarang jihad terhadap orang-orang non-muslim yang menyatakan ingin hidup rukun dan damai bagi umat Islam. Menurut Imam, damai adalah fitrah. Perdamaian Islam dibangun di atas tiga pilar, yaitu Islam, Iman dan Ihsan. Penghayatan serta pengamalan penuh Islam, Iman dan Ihsan, menjadi modal utama bagi terciptanya ketenteraman, keharmonisan dan kedamaian.²⁶⁴

3. Nilai Inklusivisme

Klaim-klaim sepihak sering muncul berkaitan dengan kebenaran suatu paham atau agama yang dipeluk oleh seseorang atau masyarakat, bahwa hanya agama yang dianutnya atau agama tertentu yang benar. Sementara agama lain tidak dianggap benar. Namun realitasnya terdapat beragam agama dan keyakinan yang berkembang di masyarakat pluralitas agama, keyakinan dan pedoman hidup manusia adalah fakta sosial yang tidak dapat dimungkiri.

Nurkholis Madjid memaparkan inklusivisme adalah sebuah sikap yang bertujuan menumbuhkan suatu sikap kejiwaan yang melihat adanya kemungkinan orang lain itu benar. Alasannya manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, maka setiap orang pada dasarnya suci dan benar.²⁶⁵ Sejalan dengan QS Al Rum ayat 30. Tegakkan wajahmu kepada agama secara lapang dada, yaitu fitrah Tuhan yang difitrahkan kepada manusia. Tidak ada perubahan pada ciptaan Tuhan. Itulah agama yang lurus, tapi sebagian besar dari manusia tidak mengetahuinya.²⁶⁶

²⁶³Maksum, Ali. *Ajakan Suci, Pokok-Pokok Pikiran tentang NU, Ulama, dan Pesantren*, (Yogyakarta: Lajnah Ta'lif Wa an-Nasyr. LTN-NU DIY, 1955), h. 270

²⁶⁴Imam Taufiq, *Al Qur'an Bukan Kitab Teror, (Membangun Perdamaian Berbasis Al Qur'an)*, (Kudus: Bentang Pustaka, 2016).

²⁶⁵Misrawi, Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi Inklusivisme, Pluralisme, Multikulturalisme*, Jakarta, 2007.

²⁶⁶Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), QS Al Rum, ayat 30.

4. Nilai Kearifan

Dalam Islam, kearifan dapat dipelajari melalui ajaran sufi. Sufi berarti kebijakan atau kesucian yaitu secara membersihkan hati dari kelakuan buruk. Sufi mengajari manusia untuk membersihkan nafsu, hati, jiwa melalui pendekatan esoteris melihat Allah tidak untuk ditakuti, tetapi untuk dicintai.²⁶⁷ Tidak Aku (Allah) ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.²⁶⁸ Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.²⁶⁹

5. Nilai Toleransi

Istilah berasal dari bahasa Inggris, yaitu *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan menitik beratkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks berbeda agama dan budaya. Toleransi adalah sikap menghargai terhadap kemajemukan.²⁷⁰ Toleransi diwujudkan dalam kata dan perbuatan, dijadikan sebagai sikap menghadapi pluralitas agama yang dilandasi dengan kesadaran ilmiah dan harus dilakukan dalam hubungan kerjasama yang bersahabat dengan antar pemeluk agama.

6. Nilai Humanisme

Pendidikan dan pembelajaran yang bersifat aktif-pasif serta berdasarkan minat dan kebutuhan siswa sangat penting untuk memperoleh kemajuan, baik dalam bidang intelektual emosi (EQ), afeksi, maupun keterampilan yang berguna untuk hidup praktis. Tuntunan gerakan manusia bertujuan

²⁶⁷Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Baca Juga: Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2011).

²⁶⁸Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), QS Azd Zduriyat, ayat 56.

²⁶⁹Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). Baca Juga: Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2011).

²⁷⁰Ahmad Wahib, Greg Barton juga menyebutkan Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Munawir Sjadzali dan Djohan Effendy sebagai Cendekiawan Muslim Neo Modernis. Lebih jauh lihat Greg Barton.

dihormatinya martabat manusia.²⁷¹ Humanisme merupakan sebuah aliran yang baik, sesuai dengan kemanusiaan, sehingga pikiran, rasa, situasi seluruhnya ikut menentukan baik buruknya tindakan kongkret. Menghidupkan rasa perikemanusiaan.²⁷² Humanisme menolak sikap diskriminasi.²⁷³

7. Nilai Kebebasan

Setiap manusia memiliki hak yang sederajat di hadapan Allah SWT. Derajat manusia tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, ataupun agama. Allah memiliki ukuran tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap kemuliaan seseorang. Pendidikan adalah media kultural untuk membentuk manusia. Hubungan antara pendidikan dan manusia tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah humanisasi, yaitu sebagai media dan proses pembimbingan manusia muda menjadi dewasa menjadi lebih manusiawi.²⁷⁴

D. Asumsi Pendidikan Islam Multikultural

Esensi Pendidikan Islam Multikultural. (1) Pendidikan Islam Multikultural merupakan usaha komprehensif dalam mencegah terjadinya konflik antar agama; (2) Mencegah terjadinya radikalisme agama; (3) Pada saat yang sama memupuk terwujudnya sikap yang apresiatif positif terhadap pluralitas dalam dimensi dan perspektif apapun; dan (4) Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural pluralistik memiliki visi dan misi untuk mewujudkan agama pada sisi yang lebih santun, dialogis, apresiatif terhadap pluralitas dan peduli terhadap persoalan hidup yang komunal transformatif.

Karakteristik pendidikan Islam berwawasan multikultural, yaitu: (1) belajar hidup dalam perbedaan; (2) membangun saling percaya; (3) memelihara saling pengertian (*mutual understanding*); dan (4) menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*). Asumsi PAI dalam pendidikan multikultural pluralistik; (1) inovasi dan reformasi pendidikan; (2) identifikasi

²⁷¹Masruri, *Membuka Indera Keenam*. (Solo: CV. Aneka, 2003), h. 98.

²⁷²Depdiknas, Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas, 2006.

²⁷³Freire, Paulo, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj: Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 253.

²⁷⁴Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 323-325

dan pengakuan pluralitas; (3) perjumpaan lintas batas; (4) interdependensi dan kerja sama dan (5) pembelajaran efektif dan proses interaksi²⁷⁵

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya) dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.²⁷⁶ Ada banyak ilmuwan dunia yang memberikan definisi kultural dan sangat beragam, walaupun demikian ada beberapa titik kesamaan yang mempertemukan keragaman definisi yang ada tersebut, seperti pengidentifikasian asumsinya.

Asumsi pendidikan Islam multikultural dapat dikembangkan pemahaman terhadap sebuah paham tentang kultural yang beragam, saling pengertian, toleransi dan sejenisnya, agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik berkepanjangan. Pendidikan multikultural merupakan proses kesetaraan budaya.

E. Islam dan Multikultural

Islam berarti tunduk, patuh, dan damai. Jadi, karakteristik Islam adalah gagasan komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam hidup dan kehidupan manusia. Islam sebagai agama diturunkan untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian. Segala bentuk terorisme, brutalisme, perusakan, dan tindakan kekerasan serta kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok muslim radikal yang mengatasnamakan Islam sebenarnya bertentangan ajaran Islam itu sendiri. Tidak ada doktrin dalam Islam juga agama-agama lain yang mengajarkan terorisme, brutalisme, perusakan, pembakaran ataupun tindak tanduk kekerasan lainnya.²⁷⁷ Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, meletakkan konsep dan doktrin yang memberikan *rahmat* bagi *al-'alamin*.

Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis-multikultural begitu bagus dalam

²⁷⁵Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 325-326

²⁷⁶Choirul Mahfiid, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 75.

²⁷⁷Faisal Ismail, *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), h. 200.

memandang dan menempatkan martabat dan harkat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota sosial. Diantara nilai-nilai Islam yang menghargai dimensi pluralis-multikultural adalah: (1) konsep kesamaan (*as-sawiydti*); (2) konsep keadilan (*al-'adalah*); (3) prinsip-prinsip kebebasan beragama; dan (4) konsep toleransi (*tasamuh*).²⁷⁸

1. Konsep Kesamaan (*as-sawiydti*)

Memandang manusia pada dasarnya sederajat. Satu-satunya pembedaan kualitatif dalam pandangan Islam adalah ketakwaan. Konsep ini secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme, baik feodalisme religius, feodalisme kapitalis, ataupun feodalisme aristokratis.²⁷⁹

Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara positif dan optimistik. Menurut Islam, seluruh manusia berasal dari satu asal, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya satu, namun dalam perkembangannya kemudian terpecah menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaan dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu dengan lain. Mereka harus tetap saling mendekati, saling menghormati dalam interaksi sosial.²⁸⁰

Islam dijadikan dasar perspektif kesatuan umat manusia (*universal humanity*), yang pada gilirannya mendorong solidaritas antar manusia.²⁸¹ Pada waktu melakukan ibadah haji terakhir, Nabi Muhammad SAW membuat pernyataan dengan etika global: Wahai umat manusia, semua orang berasal dari Adam, sedang Adam dari ekstrak tanah. Orang Arab tidak lebih mulai dari

²⁷⁸Umar Hasyim, *Toleransi dan kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: FT. Bina Ilmu, 1991), h. 23-25.

²⁷⁹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 142.

²⁸⁰Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 1. Dan Al Hujurat ayat13.

²⁸¹Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta: Bentang, 2000), h. 2

pada non Arab, orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam, kecuali karena kelebihan ketakwaannya.²⁸²

Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW melihat usungan jenazah, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri sebagai penghormatan. Diantara sahabat ada yang memberitahu, bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi. Nabi bersabda: Tapi dia adalah manusia.²⁸³ Hal ini membuktikan Islam tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, etnik, suku ataupun kebangsaannya, hanya ketakwaan seseoranglah yang membedakannya dihadapan Sang Pencipta Allah SWT.

2. Konsep Keadilan (*al-'adalah*)

Membongkar budaya nepotisme dan sikap-sikap korup, baik dalam politik, ekonomi, hukum, hak dan kewajiban, bahkan dalam praktik-praktik keagamaan. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berlaku adil terhadap siapapun,²⁸⁴ jangan sampai kebencian terhadap suatu pihak itu mendorong untuk tidak berlaku adil.²⁸⁵ Adil dilakukan terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok, dan juga terhadap lawan.²⁸⁶

Diceritakan bahwa sekelompok bangsawan Arab berusaha memperoleh perlakuan istimewa terhadap seorang terpidana dari kalangan mereka. Mereka berusaha menggunakan Usamah bin Zaid (cucu angkat Nabi Muhammad SAW) untuk merayu beliau agar dapat meringankan hukuman si terpidana. Maka beliau bersabda: Hai Usamah, orang-orang sebelummu dulu menjadi rusak, karena mereka itu, jika ada yang mencuri dari lingkungan ma-

²⁸²Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 827. Baca Juga: Hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad no. 828. Baca Juga: Hadits riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud no. 829.

²⁸³Hamidy, Mu'ammal, AM, Imron, Fanany BA., Umar, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991, jilid 2). Baca Juga: Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi mengesahkannya no. 830. Baca Juga: Hadits Al Bukhari 8 : 31, Muslim : 5 : 2, Al Lu'lu-u Wal Marjan 1 : 116 no. 303.

²⁸⁴Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, cet. I, edisi I. QS. An Nisa' ayat 58).

²⁸⁵Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), cet. V. QS. Al Maidah ayat 8.

²⁸⁶Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 280.

syarakat yang lemah tidak berdaya, mereka tegakkan hukum potong tangan itu. Tapi, kalau yang mencuri dari lingkungan masyarakat yang kuat, yang terhormat, mereka membiarkan pencuri bebas dari hukuman. Demi Tuhan yang menguasai aku, andaikata Fatimah putriku sendiri itu mencuri, maka saya Muhammad yang memotong tangannya.²⁸⁷ Ini artinya Islam mengajarkan untuk menegakkan keadilan kepada siapapun dan dari golongan manapun.

Banyak perilaku nabi yang memberikan contoh kepada kita dalam menerapkan prinsip-prinsip kebebasan. Diantaranya adalah Ketika terjadi *Fathu Makkah*, Nabi dan para pengikutnya tidak melakukan tindakan balas dendam dan tidak pula memaksa orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Para kepala suku masyarakat Arab di jazirah Arab berbondong-bondong kepada nabi dan dengan kesadaran sendiri yang mendalam, mereka menyatakan diri memeluk agama Islam.²⁸⁸

3. Prinsip-prinsip Kebebasan Beragama

Nabi Muhammad SAW, ketika beliau di Madinah meletakkan dasar-dasar kerukunan hidup antar umat Islam, komunitas Yahudi dan komunitas non-muslim lewat piagam Madinah yang telah disepakati oleh para wakil dari masing-masing kelompok. Piagam Madinah seperti dikenal dalam sejarah, merupakan suatu piagam politik pertama di dunia yang memuat dasar-dasar toleransi dan kebebasan agama yang dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, ide tentang toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama sebenarnya memiliki akar-akar historis yang sangat kuat dalam struktur ajaran Islam dan menemukan bukti-bukti yang jelas dan nyata dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Begitu pula ketika Yerusalem masuk dalam kekuasaan Islam, Umar Ibn Khatthab memberikan kebebasan beragama kepada kelompok-kelompok non-muslim dan membiarkan rumah-rumah ibadah (gereja dan sinagog) tetap berfungsi seperti sediakala. Sebagaimana kita lihat Yerusalem sekarang ini

²⁸⁷Hamidy, Mu'ammal, AM, Imron, Fanany BA., Umar, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1991, jilid 2).

²⁸⁸Faisal Ismail, *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), h. 201

mempunyai rumah-rumah ibadah dari berbagai agama (Islam, Kristen dan Yahudi) yang diwarisi dari sejarah toleransi umat Islam di masa lampau. Begitu pula ketika Amru Ibn Ash berhasil menaklukkan Negeri Mesir, tidak terjadi pemaksaan oleh umat Islam kepada penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Keberadaan komunitas Kristen di Mesir dewasa ini yang diperlakukan dengan baik dan adil oleh pemerintah dan rakyat mesir merupakan bukti nyata tentang toleransi umat Islam terhadap kelompok minoritas, dan keadaan ini sebenarnya merupakan kesinambungan dari warisan sejarah toleransi umat Islam di masa lampau.²⁸⁹

4. Konsep Toleransi (*tasamuh*)

Toleransi dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *tasamuh*, berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Dengan demikian, toleransi dapat diartikan memberikan kemerdekaan kepada golongan kecil untuk menganut dan menyatakan pandangan-pandangan politik dan agamanya, memberikan hak-hak istimewa seperti yang diperoleh golongan besar.

Toleransi berarti membolehkan, membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi toleransi mengandung konsesi, artinya pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, bukan didasarkan kepada hak. Jelaslah bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan dalam menghormati perbedaan atau prinsip orang lain iru hendaklah tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Suatu tanda bahwa ada sikap dan suasana toleransi di antara sesama manusia, atau katakanlah di antara pemeluk agama yang berbeda ialah ketika adanya sikap mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, *agree in*

²⁸⁹Faisal Ismail, *Ibid.*, h. 202

disagreement atau setuju dalam perbedaan, saling mengerti dan adanya kesadaran serta kejujuran.²⁹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* sudah mengembangkan prinsip-prinsip multikulturalisme jauh sebelum wacana multikulturalisme itu muncul. Islam adalah agama yang sempurna, didalamnya ada aturan-aturan tentang urusan dunia dan akhirat. Diantaranya adalah terdapat dasar-dasar peraturan untuk hidup berdampingan secara damai dengan siapa pun. Dasar-dasar membina masyarakat damai secara umum, yakni termasuk kepada golongan selain Islam memang ada dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, seseorang tidak boleh mencela, mencaci, mengumpat, menganggap rendah, berprasangka buruk, benci membenci, hasut menghasut, berkata yang menyakitkan orang lain. Semuanya itu adalah untuk menjaga agar persaudaraan dan suasana aman damai tetap berjalan. Maka semua anggota masyarakat hendaknya menghindari hal-hal yang menjurus kepada panasnya suasana masyarakat.

F. Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Multikultural

Pendidikan Agama yang diberikan di sekolah merupakan sebagai upaya menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, jika tidak dikelola dengan baik cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah rawan konflik. Hal ini membuat konflik memiliki akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit diatasi karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya.

Alasan agama memiliki *ambivalensi*, seperti: (1) agama memiliki kecenderungan *absolutistik*, yaitu kecenderungan untuk memutlakkan keyakinan keagamaannya sebagai kebenaran tunggal; (2) akar konflik keagamaan seperti ini, karena para pemeluk agama mengambil sikap untuk memandang agama dari sudut pandang agamanya sehingga yang lebih mencuat ke

²⁹⁰Umar Hasyim, *Ibid.*, h. 23-25.

permukaan bukan esensi kebenaran yang hendak ditawarkan oleh agama, melainkan semangat untuk menegaskan yang lain; (3) *truth claim* itulah maka setiap agama menyatakan ajarannya merupakan totalitas sistem makna yang berlaku bagi seluruh kehidupan, baik individual maupun sosial sehingga secara kodrat cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya.

Pandangan inklusif dalam kehidupan *pluralism* sebagai berikut.

1. Perlunya pandangan inklusif dalam kehidupan multikulturalisme

Ketika hadir secara historis, agama berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup ditengah masyarakat maka berimplikasi pada perilaku sosial. Dalam konteks ini pandangan inklusif sangat diperlukan untuk menerima kenyataan hidup pluralisme sebagai syarat mutlak bagi penganut agama apapun.

2. Sikap inklusif

Sikap inklusif ada karena Al-Qur'an mengajarkan paham *religijs plurality*. Bagi orang Islam, dianut suatu keyakinan bahwa sampai hari ini pun di dunia ini terdapat keragaman agama. Meskipun ada klaim bahwa kebenaran agama ada pada Islam.²⁹¹ Akan tetapi, di dalam Al-Qur'an disebut pula adanya hak orang lain untuk beragama dan agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.²⁹² Sikap dan prinsip inilah yang menjadi kejayaan Islam sekaligus mendasari kebijakan politik kebebasan beragama. Inklusivisme Islam tersebut juga memberikan formulasi Islam adalah agama terbuka. Islam menolak eksklusivisme, absolutisme, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Hal inilah yang perlu ditanamkan pada peserta didik dalam pendidikan agama Islam agar melahirkan sikap inklusif sekaligus toleransi positif di kalangan umat beragama, sejalan dengan semangat Al-

²⁹¹Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007, cet. V), QS. Ali Imran ayat 13.

²⁹²Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. I, vol. VI), QS. Al-Baqarah ayat 256.

Qur'an agar fenomena lahiriah tidak menghalangi usaha untuk menuju titik temu antara semuanya.²⁹³

3. Sikap realistis dalam kehidupan masyarakat Multikultural

Seorang agamawan harus memiliki sikap yang lebih realistis ketika berhadapan dengan realitas empiris kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, terutama dalam memposisikan agama; (1) Dari luar, diakui adanya bermacam-macam agama yang benar. Inilah dimensi relatif suatu agama. Agama-agama ini memiliki satu tujuan, yaitu keselamatan dengan jalan berbeda-beda. Melalui perbedaan ini, agama dapat memperkaya satu dengan lainnya; (2) Dari dalam, diakui adanya satu agama yang benar, inilah dimensi mutlak suatu agama. Pendirian ini tidak harus menolak kebenaran agama lain, walaupun benar pada tingkat-tingkat tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan pesan agama yang dianut.²⁹⁴

G. Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam

Multikulturalisme dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi petunjuk agar manusia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah SWT: Artinya: bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, antara yang hak dan yang batil.²⁹⁵

Dari sekian banyak petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat manusia terhadap upaya menjaga kerukunan pesan-pesan tersebut, sebagai berikut.

1. Al-Qur'an Menyebutkan Manusia Diciptakan dari Diri yang Satu

²⁹³Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Ali Imran ayat 64.

²⁹⁴Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 327-328

²⁹⁵Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. I, vol. VI), QS. Al Baqarah ayat 185.

Sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha mengenal.²⁹⁶ Ayat ini menjelaskan Allah SWT menciptakan manusia dari asal yang satu sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Semua manusia sederajat di hadapan Allah SWT. Manusia menjadi mulia bukan karena suku, warna kulit, ataupun jenis kelamin, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah SWT.²⁹⁷ *Syu`ub* seperti; terdapat pada ayat tersebut berarti bangsa, sedangkan kata *qabail* lebih khusus lagi dari kata *syu`ub*, yaitu suku-suku. Bangsa dan suku ini termasuk berada dalam masyarakat, atau sebagai unsur dari masyarakat.²⁹⁸

Al-Qur'an menyebutkan dahulu manusia adalah umat yang satu. Ketika timbul perselisihan, Allah SWT mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah SWT menurunkan bersama mereka kitab yang berisi petunjuk untuk memberikan keputusan yang benar dan lurus diantara manusia tentang perkara yang mereka selisihkan.

Firman Allah SWT: yang artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah SWT mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan dan Allah SWT menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah SWT memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya.

²⁹⁶Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. I, vol. VI), QS Al Hujurat ayat 213.

²⁹⁷Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 331-333

²⁹⁸Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 236

Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.²⁹⁹

2. Al-Qur'an Menekankan Pentingnya Saling Percaya, Pengertian, dan Menghargai.

Menjauhi buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Firman Allah SWT yang artinya; Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu dengan lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha penerima taubat lagi maha penyayang.³⁰⁰

Ketika menghadapi permasalahan, Al-Qur'an mengajarkan untuk selalu mengedepankan klarifikasi, dialog, diskusi dan musyawarah. Maka tidak boleh menjatuhkan vonis tanpa mengetahui dengan jelas permasalahannya. Firman Allah SWT: artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.³⁰¹

Al-Qur'an mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Firman Allah SWT yang artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah SWT, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³⁰²

²⁹⁹Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. I, vol. VI), QS Al Hujurat ayat 213

³⁰⁰ Shihab, M. Quraish, *Ibid.*, QS Al Hujurat ayat 12.

³⁰¹ Shihab, M. Quraish, *Ibid.*, QS Al Hujurat ayat 6.

³⁰² Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Ibid.*, QS. Al Baqarah ayat 256.

Allah SWT dalam Al-Qur'an menekankan untuk menghindari konflik dan melaksanakan rekonsiliasi atas berbagai permasalahan yang terjadi, yaitu upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan.³⁰³ Firman Allah SWT yang artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah SWT. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.³⁰⁴ Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

H. Peran Guru dalam Pendidikan Islam Multikultural

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berfungsi menanamkan kesadaran di kalangan generasi muda akan identitas dirinya, identitas kolektifnya, serta menumbuhkan calon warga negara yang baik dan terpelajar dalam masyarakat yang homogen ataupun yang majemuk. Sementara itu, guru berfungsi untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme, menjadi warga negara yang baik. Namun, dalam perannya guru diharapkan pada berbagai kesulitan untuk memprediksi karakteristik masyarakat yang datang .

Peran guru dan pihak sekolah diperlukan untuk mendidik para siswa, diantaranya: (1) membangun paradigma keagamaan: (a) seorang guru harus mampu bersikap demokratis dalam segala perilaku, baik sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif; (b) guru seharusnya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang berhubungan dengan agama; (2) menghargai keragaman bahasa. Guru harus memiliki keragaman bahasa dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut di sekolah, sehingga dapat membangun sikap peserta didik untuk selalu menghargai keragaman bahasa orang lain, aksen, dan dialek yang berbeda. Seorang guru harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan bahasa yang ada di sekolah.

³⁰³ Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 336-337

³⁰⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, QS. Asy Syura ayat 40.

Dengan demikian diharapkan peserta didik akan mempelajari dan mempraktikkan sikap yang sama

1. Membangun *Sensitivitas Gender*

Pendidikan multikultural, pendidikan memiliki peran sangat strategis untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan membangun sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki peran dalam membangun kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai kesadaran gender dan sikap anti diskriminasi terhadap kaum perempuan di sekolah dengan cara berikut. (1) Memiliki wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender. Wawasan ini penting karena guru merupakan figur utama yang menjadi pusat perhatian peserta didik di kelas sehingga diharapkan mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik perempuan ataupun laki-laki; (2) Mampu mempraktikkan nilai-nilai keadilan gender secara langsung di kelas atau di sekolah; (3) Sensitif terhadap permasalahan gender di dalam ataupun di luar kelas.³⁰⁵

2. Membangun Sifat Kepedulian Sosial

Guru memiliki peran terhadap pengembangan peserta didik untuk peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan sekitarnya seperti; (1) guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan para peserta didiknya, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran, para siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah, korupsi, pengusuran, dan lain-lain; (2) guru dapat menerapkan sikap tersebut di sekolah atau di kelas dengan cara bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa harus mengistimewakan salah satu dari mereka meskipun latar belakang status sosial mereka berbeda.

3. Membangun Sikap Anti Diskriminasi Etnis

Guru berperan sangat penting dalam menumbuhkan sensitivitas anti diskriminasi terhadap etnis lain di sekolah. Oleh sebab itu, seorang guru

³⁰⁵ Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 275-279

dituntut untuk (1) memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis sehingga dapat memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan perilakunya yang tidak memihak atau tidak berlaku diskriminatif terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang etnis atau ras tertentu; (2) memberikan perlakuan adil terhadap seluruh peserta didik yang ada. Dengan demikian, diharapkan peserta didik meniru dan berlatih untuk bersikap dan bertingkah laku adil terhadap teman-temannya yang berbeda etnis.

Keempat. Membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Pada aspek ini guru sebagai penggerak utama kesadaran peserta didik agar selalu menghindari sikap yang diskriminatif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk di luar sekolah. Dengan memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik diharapkan peserta didik dapat mencontoh, menerapkan dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap mereka yang memiliki perbedaan kemampuan sehingga dapat saling memahami, menghormati dan menghargai.

Kelima, membangun sikap anti diskriminasi umur. Guru dituntut memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang pentingnya sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda umur diharapkan dapat mempermudah guru untuk memberikan contoh dan bimbingan tentang bersikap kepada orang yang berbeda umur. Misalnya, guru harus dapat memberikan perhatian yang sama terhadap peserta didiknya tanpa harus membedakan anak yang lebih tua dengan yang lebih muda.³⁰⁶

I. Kesimpulan

Peran guru adalah melatih dan mendidik peserta didik dengan memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme untuk menjadi warga negara yang baik. Seorang guru diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi peserta didik dan masyarakat. Membangun paradigma keagamaan,

³⁰⁶ Yaya Suryana dan Rusdiana, *Ibid.*, h. 279-280

keragaman bahasa, membangun sensitivitas gender, sifat kepedulian sosial, sikap anti diskriminasi etnis, perbedaan kemampuan, serta membangun sikap anti diskriminasi umur. Peran guru dalam proses mentransformasi nilai-nilai ajaran Islam, yang mengakomodir aspek-aspek perbedaan kemanusiaan sebagai *sunnatullah* yang harus diterima dengan penuh arif, bijaksana dan lapang dada terhadap multikultural, seperti kasih sayang, cinta seseorang, tolong menolong, toleransi, menghargai keberagaman dan sikap-sikap lain yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

F. Saran

Peran guru penting dalam melatih dan mendidik peserta didik, memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme untuk menjadi warga negara yang baik. Maka jika ingin model pendidikan multikultural menjadi baik, maka tingkatkan peran guru dalam pendidikan Islam multikultural di lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Edisi 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ahmad Afnam Anshori, *Pendidikan Islam Multikultural sebagai Konflik Agama Islam di Indonesia*. Ilmu Aqidah Studi Keagamaan, Edisi 4, 2016.
- Akhmad Hidayatulloh Al Arifin, *Implementasi Pendidikan Mutikultural dalam Praktis Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*, Vol.1 No.1 Juni 2012.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Andi Aco Agus, *Integrasi Nasional Sebagai Parameter Persatuan dan Kesatuan Bangsa Negara Republik Indonesia*, *Sosialisasi Pendidikan Sosialogi*, Edisi 1, 2016, h. 20.

Banks, James, *Teaching Strategies For Ethnic Studies*, Newton: Allyn and Bacon, 1984.

Choirul Mahfiid, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djaramah Syaiful Bahra dan Zain Aswan, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Farida Hanum, *pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa*. 2015

Faisal Ismail, *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 827.

Hadits riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad no. 828.

Hadits riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Dawud no. 829.

Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi mengesahkannya no. 830.

Hadist Al Bukhari 8: 31, Muslim: 5: 2, Al Lu'lu-u Wal Marjan 1: 116 no. 303.

Hamidy, Mu'ammal, AM, Imron, Fanany BA., Umar, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits- Hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, jilid 2. 1991.

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, edisi I. 2006.

Haidir dan Salim, *Strategi Pembelajaran*, Medan: Perdana Publishing, 2012.

Iwan Supardi, *Model Pendidikan Multikultural Ramah di Kota Pontianak*, Pontianak: UNY, 2014.

Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, Cet.3; Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Knowles, Malcolm, *Andragogy: Concepts for Adult Learning*. Washington, D.C.: Departement of Health, Education and Welfare, 1975.

Knowles, Malcolm, *the Modern Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy*, New York: Association Press, 1977.

Knowles, Malcolm, *the Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*, Cambridge: Englewood Cliffs, 1980.

- Knowles, Malcolm, Holton III, E.F. Swanson, R.A., *the Adult Learner*, Houston: Gulf Publishing Company, 2005.
- M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural, Cross Cultural Undersatanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Maksum, Ali. Ajakan Suci, *Pokok-Pokok Pikiran tentang NU, Ulama dan Pesantren*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif Wa an-Nasyr. LTN-NU DIY, 1955.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Republik Indonesia, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, cet. V. 2007.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. I, vol. VI.
- Syamsu Yusuf dan Nani Sugandhi, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Umar Hasyim, *Toleransi dan kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: FT. Bina Ilmu, 1991.
- Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, Cet.1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2011.

BAB VIII

PERAN SEKOLAH/MADRASAH/PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

A. Pendahuluan

Peran sekolah/madrasah/pesantren sangat penting dalam pengembangan pendidikan multikultural. Bennett menyatakan pendidikan multikultural merupakan komitmen dalam menggapai kualitas pendidikan, mengembangkan kurikulum, membangun pemahaman tentang kelompok etnis dan memerangi praktik penindasan dan memerangi segala praktik penindasan.³⁰⁷ Dalam hal membutuhkan satu kesatuan sistem sosial budaya dalam masyarakat.

Arifin, A menyebutkan sistem adalah sebuah kesatuan terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan kait berkait antara satu dengan lainnya. Sedangkan sosial adalah manusia yang berkaitan dengan masyarakat dan para anggotanya.³⁰⁸ Mempunyai kedudukan dalam struktur organisasi. Nasution menyebutkan struktur memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik yang masing-masing mempunyai kedudukan tertentu di dalam menjalankan peranan, seperti yang diharapkan dan menjamin kelancaran di dalam segala usaha pendidikan.³⁰⁹ Sistem sosial merupakan suatu kesatuan orang dalam masyarakat yang disusun oleh karakteristik dari suatu pola hubungan dan dikoordinasikan secara berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan.

Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah tidak otomatis memberlakukan pendekatan multikultural dalam pengembangan pembelajaran di Indonesia. Perencanaan pendekatan pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural yang digunakan haruslah

³⁰⁷Bennett et al. *Indonesian infertility patients' health seeking behaviour and patterns of access to biomedical infertility care: an interviewer administered survey conducted in three clinics*. Reproductive Health, 2012. Baca Juga: Bennet et al. (2014). *Reproductive knowledge and patient education needs among Indonesian women infertility patients attending three fertility clinics*. Contents lists available at Science Direct. 2014.

³⁰⁸Arifin. *Sistem Komunikasi Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatam, 2011), h. 27

³⁰⁹Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. (Bandung: Jemmars, 2016), h. 83

dikembangkan dengan kesadaran dan pemahaman mendalam tentang pendekatan multikultural pada lembaga pendidikan sekolah/madrasah/pesantren.

Lembaga pendidikan sekolah/madrasah/pesantren di Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntunan dan tantangan perkembangan masyarakat.³¹⁰

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, sebagai berikut. (1) Relevansi. Kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi dan evaluasi. Relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum; (2) Fleksibilitas. Implementasi kurikulum berkenaan dengan kebebasan/keluwesannya. Program pengembangan kurikulum sesuai minat dan bakat peserta didik; (3) Prinsip Kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus; (4) Praktis dan Efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan, alat-alat sederhana dan biayanya murah. Tepat pelaksanaannya dan menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya; (5) Efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan, baik kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kuantitas ditinjau dari komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitas dilihat dari hasil pelaksanaan kurikulum yang ada; (6) khusus. Pengembangan kurikulum, harus memperhatikan prinsip keimanan, nilai dan budi pekerti luhur, penguasaan integrasi nasional, keseimbangan etika, logika, estetika dan kinetika, kesamaan memperoleh kesempatan, abad pengetahuan dengan teknologi

³¹⁰Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab X Tentang kurikulum, pasal 36 ayat 1

informasi, pengembangan keterampilan hidup, berpusat pada anak dan pendekatan menyeluruh dan kemitraan.³¹¹

Kemampuan sekolah/madrasah/pesantren dalam menyediakan pengembangan kurikulum untuk pemenuhan pengalaman belajar dan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan mengolah informasi menjadi sesuatu hasil belajar. Proses dan pengembangan keragaman budaya, hanya sekolah/madrasah/pesantren yang dapat menyelesaikan masalah keragaman budaya tersebut.

Keragaman budaya menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum pendidikan multikultural, baik sebagai proses maupun kurikulum sebagai hasil. Keragaman budaya dalam pendidikan sering menjadi sumber konflik, pemicu pemecahan seperti pada pemenuhan alat dan perlengkapan pembelajaran kepada masing-masing guru pengasuh mata pelajaran agama dan umum. Maka pengembangan kurikulum pendidikan multikultural kepada pihak sekolah/ madrasah/ pesantren, harus menjadi faktor yang diperhitungkan dan pertimbangan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi dan pelaksanaan kurikulum pada sekolah/madrasah/pesantren menjadi sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bab ini membahas peran madrasah/sekolah/pesantren dalam pengembangan pendidikan multicultural yaitu Peran sekolah/madrasah/pesantren sebagai system social, peran sekolah/madrasah/pesantren sebagai lembaga penembangan budaya, multicultural sebagai landasan pembelajaran, perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural, dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif diskriptif.

³¹¹Hamalik, O., *Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1990). Baca Juga: Hasan, S.H., *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: P2LPTK. Baca Juga: Kaber, A., *Pengembangan Kurikulum*. (Jakarta: P2LPTK, 1988). Baca Juga: Nasution, S., *Asas-Asas Kurikulum*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

B. Peran Sekolah/Madrasah/Pesantren Sebagai Sistem Sosial

Sekolah/madrasah/pesantren merupakan sebuah sistem sosial yang unik dalam keragaman budaya, adat istiadat, ras, suku, keyakinan agama individu menyatu dalam satu kesatuan sistem sekolah/madrasah/ pesantren. Keberhasilan sekolah/madrasah/pesantren tidak terlepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Persimpangan sangat terbuka antara sekolah/madrasah/pesantren dengan lingkungan eksternal, nilai-nilai komunitas dan keyakinan, berdampak pada perkembangan budaya sekolah/ madrasah/ pesantren. Sistem penggabungan sosial budaya menjadi sangat penting, karena mempengaruhi berbagai reaksi, kegiatan dan perilaku.³¹² Perilaku seseorang dalam masyarakat merupakan sistem sosial saling memengaruhi dan berulang secara teratur. Faktor penting dalam sistem sosial adalah *consensus* antara anggota masyarakat tentang keyakinan dan nilai tertentu. Reaksi sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar (*extra system echange*) tidak selalu bersifat *adjustive*. Namun, sebuah sistem sosial dalam kurun waktu tertentu dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat *visious circle*.

Lingkungan sekolah/madrasah/pesantren merupakan suatu sistem sosial terdiri atas sejumlah variabel dan faktor utama sehingga dapat diidentifikasi sebagai budaya sekolah/madrasah/pesantren, sebagai kebijakan dan politik kurikulum dan bidang studi. Variabel dan faktor sekolah/madrasah/ pesantren sebagai sistem sosial itu, seperti; (1) kebijakan dan politik sekolah; (2) budaya sekolah/madrasah/pesantren dan kurikulum yang tersembunyi; (3) gaya belajar; (4) bahasa dan dialek sekolah/madrasah/pondok pesantren; (5) partisipasi dan input masyarakat; (6) program penyuluhan/konseling; (7) prosedur asesmen dan pengujian; (8) materi pembelajaran; (9) gaya dan strategi mengajar; dan (10) sikap, persepsi, kepercayaan dan perilaku staf sekolah/madrasah/pesantren.³¹³

³¹² Parekh, B., *Rethinking Multiculturalisme: Keragaman Budaya dan Teori Politik*, (Terj.), (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

³¹³ <http://muinarifah.blogspot.com/2014/08/sekolah-adalah-sistem-sosial.html> diakses 06 November 2019

1. Kebijakan dan Politik Sekolah/Madrasah/Pesantren

Kebijakan dan politik sangat menentukan perkembangan anak didik dan potensinya. Kebijakan dan politik sekolah/madrasah/pesantren terkait kekhasan dan keunggulan juga dapat dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan.

2. Budaya Sekolah/Madrasah/Pesantren, Kurikulum (*Hidden Curriculum*)

Budaya yang berlangsung di sekolah/madrasah/pesantren dan kurikulum yang tersembunyi sangat menentukan kepribadian peserta didik yang dikembangkan pada lingkungan sekolah/madrasah/pesantren. Misalnya di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tertentu dibudayakan untuk setiap hari guru atau kepala sekolah menyambut kedatangan siswa di depan pagar secara bergiliran untuk bersalaman untuk mengajarkan nilai keakraban, kekeluargaan, rasa saling hormat dan kasih sayang di antara peserta didik dengan guru dan tenaga kependidikan.

3. Gaya Belajar dan Sekolah/Madrasah/Pesantren

Gaya belajar siswa hendaknya diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan dan dalam menciptakan gaya (*style*) sekolah itu dalam menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan akrab dengan kondisi siswa. Tentu berbeda gaya sekolah/madrasah/pesantren perkotaan dengan segala fasilitasnya dengan gaya sekolah pedesaan dengan segala keterbatasannya.

4. Bahasa dan Dialek Sekolah/Madrasah/Pesantren

Bahasa dan dialek sekolah/madrasah/pesantren di sini berkaitan dengan bahasa dan dialek yang digunakan di tempat sekolah/madrasah/pesantren itu berada. Contohnya SD/MI di Aceh, khususnya daerah pedesaan, masih banyak menggunakan bahasa dengan dialek Acehnya, sehingga dapat membuat program mingguan misalnya. Kegiatan ini untuk menumbuh sikap hormat dan kesantunan pada anak didik melalui penggunaan bahasa dan dialek yang dibudayakan di sekolah/madrasah/pesantren.

5. Partisipasi dan Input Masyarakat

Jika kesadaran masyarakat pendidikan tinggi dan komite sekolah/madrasah/pesantren dipimpin oleh seorang yang memiliki wawasan pendidikan yang baik, maka cenderung sekolah/madrasah/pondok pesantren tersebut banyak mendapat bantuan dari masyarakat, baik dana maupun pemantauan pengembangan ke depan. Untuk itu komite sekolah perlu dipimpin oleh orang yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

6. Program Penyuluhan/ Konseling

Sekolah/madrasah/pesantren perlu menyusun rencana program bimbingan dan penyuluhan/ konseling dalam membantu mengatasi kesulitan belajar pada anak, baik itu anak yang mengalami kelambatan belajar maupun anak yang memiliki bakat khusus. Kemungkinan ada anak yang lemah dalam mata pelajaran tertentu ternyata dia memiliki bakat yang besar dalam menari dan menyanyi yang membutuhkan penyaluran bakat yang memadai.

7. Prosedur Asesmen dan Pengujian

Asesmen dan pengujian tidak identik dengan duduk di kelas dan mengerjakan soal dalam bentuk *paper-pencil test*. Asesmen bersifat holistik yang menggambarkan kemampuan aktual keseharian anak. Anak dinilai secara berbeda dalam arti dikurangi skornya jika dia terlibat dalam tindakan kurang bermoral atau sebaliknya, siswa yang menunjukkan perilaku dan sikap baik, maka dia mendapat skor tambahan.

8. Materi Pembelajaran

Materi pelajaran pada setiap bidang studi atau bidang yang paling cocok dapat memasukkan materi budaya itu dalam pembelajaran. Perlu ada bidang studi pendidikan multikultural tersendiri di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk lebih mengenalkan budaya secara lebih terencana, terorganisir dan matang, bukan hanya sekedar dititipkan pada materi yang ada pada bidang studi yang lain.

9. Gaya dan Strategi Mengajar

Guru yang sedang mengajar anak didik tentunya sarat dengan nilai budaya. Guru memiliki ideologi dan nilai-nilai budaya yang diperoleh sepanjang hidupnya. Hal itu tentunya sangat mewarnai gaya dan strategi mengajar yang digunakan di sekolah.

10. Sikap, Persepsi, Kepercayaan dan Perilaku

Seluruh staf sekolah/madrasah/pesantren mendukung pembelajaran dan membantu menciptakan kondisi pembelajaran yang diinginkan. Staf sekolah/ madrasah/ pesantren, tidak hanya sekedar berurusan dengan benda mati seperti kertas, penggaris, alat tulis atau tanaman yang ada di sekolah/ madrasah/ pesantren, namun bergaul dengan seluruh komponen sekolah/ madrasah/ pesantren. Sikap sinis dan tidak peduli dari staf sekolah/ madrasah/ pesantren sangat mempengaruhi kinerja sekolah/madrasah/pesantren.³¹⁴ Untuk itu sangat diperlukan memilih orang yang benar-benar cocok, memiliki komitmen tinggi untuk profesi guru yang mengajar pada sekolah/madrasah/ pesantren yang dikenal sebagai sebuah sistem sosial.

C. Peran Sekolah/Madrasah/Pesantren sebagai Lembaga Pengembangan Budaya

Lembaga sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni *skhole*, *scolae*, *skhoe* atau *scolae* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak ditengah kegiatan mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan waktu luang adalah berhitung, membaca huruf, mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi kegiatan *scolae* anak-anak didampingi orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk menciptakan sendiri dunianya di sekolah/ madrasah/ pesantren.³¹⁵

³¹⁴Parekh, B., *Rethinking Multiculturalisme: Keragaman Budaya dan Teori Politik. (Terj.)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

³¹⁵Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.142

Sunarto menyebutkan sekolah/madrasah/pesantren dipimpin oleh seorang kepala, dan kepala dibantu oleh wakil kepala, jumlah wakil kepala bisa berbeda pada setiap lembaga pendidikan, tergantung kebutuhan. Ketersediaan sarana prasarana pada suatu sekolah/madrasah/pesantren memiliki peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.³¹⁶

Pendidikan madrasah memiliki sejarah panjang sebagai lembaga pendidikan di dunia Islam khususnya Indonesia.³¹⁷ Ditunjukkan adanya peraturan pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menjalankan fungsinya agar dapat melaksanakan dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.³¹⁸ Sistem pendidikan Nasional diproyeksikan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Khususnya dalam mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maka pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan memiliki kontribusi penting dalam sistem pendidikan nasional.

Sejak Indonesia merdeka, telah terjadi proses perkembangan madrasah/pesantren, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1950 yaitu madrasah mengandung makna: (a) tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran; (b) pondok pesantren yang memberikan pendidikan setingkat madrasah.³¹⁹ Berkaitan dengan kesamaan status, pemerintah menetapkan keberadaan madrasah dipandang sebagai sekolah umum yang bercirikan agama Islam, mencakup; (1) lembaga pencerdasan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia; (2) lembaga pelestarian budaya keislaman bagi masyarakat Indonesia; dan (3)

³¹⁶Abdullah Idi. *Ibid.*, h. 142

³¹⁷Abdurrahman Mas' Us., *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Peng. Mark R. Woodward & Lik Arifin Noor. (yogyakarta:LKiS, 2004)

³¹⁸Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³¹⁹Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. (Jakarta: Ciputat Press, 2005)

lembaga pelopor bagi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia.

Kehadiran madrasah/pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam setidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu; (1) sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam; (2) usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesempatan kerja dan memperoleh ijazah; (3) adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka dan; (4) sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan moderendari hasil akulturasi.³²⁰

Madrasah sebagai lembaga pendidikan umum perlu dikembangkan peran dan fungsinya agar pembinaan peserta didik dapat berlangsung optimal, tentu dengan manajemen dan kepemimpinan madrasah yang baik. Seperti; perberdayaan personil, perbaikan kurikulum, pembinaan pribadi, keterampilan dan disiplin siswa, serta mengembangkan sarana dan prasarana yang optimalisasi, sehingga terwujudnya peningkatan kualitas madrasah dan pesantren yang baik.³²¹

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua. Pesantren berfungsi sebagai suatu lembaga; (1) penyebaran agama dan tempat mempelajari pendidikan agama Islam; (2) pembinaan tenaga-tenaga bagi pengembangan agama; (3) Usaha perubahan sosial dan kemampuan yang lebih baik.³²² Dengan demikian pengaruh pesantren tidak hanya pada kehidupan santri dan alumninya saja, melainkan meliputi kehidupan masyarakat sekitarnya.

³²⁰Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)

³²¹Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)

³²²Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: kencana, 2006)

Pesantren merupakan bagian integral sistem pendidikan, maksudnya pendidikan agama Islam diatur dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia merupakan bagian dari sistem pendidikan yang khas dan unik, dan paling tua di Indonesia, telah diakui kualitasnya, terlihat dari pada kemampuannya dalam mencetak kader-kader bangsa yang handal dan mumpuni, dalam bidang agama dan dalam pentas kepemimpinan nasional.³²³

Keberadaan madrasah/pesantren di Indonesia, berawal dari kalangan ahli mengasumsikan pesantren sebagai pola pendidikan Islam yang diadopsi dari pola pendidikan zaman sebelum kedatangan Islam yang di kenal dengan istilah cantrik, yaitu pola pendidikan tersebut telah diislamkan oleh para dai' Islam di awal kedatangannya. Sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan zaman pralislam, memiliki perbedaannya: (1) materi pengajaran dalam cantrik lebih mengedepankan pada pelatihan fisik yang dikenal ilmu kanuragan; (2) materi yang diajarkan dalam pesantren lebih bersifat ilmu pengetahuan keagamaan.³²⁴ Dengan demikian jelas tergambar bahwa ada titik perbedaan antara pola pendidikan cantrik dengan pola pendidikan pesantren.

Realitas masyarakat dan bangsa Indonesia terdapat keberagaman sistem pendidikan, seperti; posisi pendidikan sebagai objek dalam proses pengembangan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan sebagai objek yang merasa terabaikan dalam pengembangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, berubah menjadi subjek yang menentukan dalam implementasinya.³²⁵

Implementasi pendidikan sekolah/madrasah/pesantren menjadi penentu pendidikan multikultural sebagai landasan bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Padahal multikultural itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, sekolah dalam memberikan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam

³²³Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: kencana, 2006)

³²⁴Harjanto. *Perencanaan Pengajaran*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

³²⁵Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 1950

proses pembelajaran serta mengolah informasi menjadi sesuatu sebagai hasil belajar. Oleh karena itu, pendidikan multikultural hendaknya menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, misi pengembangan budaya dan pembelajaran pendidikan sekolah/ madrasah/ pesantren sebagai landasan pendidikan.

D. Multikultural Sebagai Landasan Pembelajaran

Landasan pembelajaran adalah suatu dasar atau tolak ukur dalam sebuah interaksi antara peserta didik dan pendidik serta sumber belajar yang dijadikan acuan dalam sebuah lingkungan belajar.

Menurut beberapa ahli, landasan yang digunakan dalam sebuah pembelajaran sebagai berikut. (1) Taba. Kebudayaan adalah sebuah landasan dalam pengembangan kurikulum; (2) Ki Hadjar Dewantara. Akar pendidikan suatu bangsa adalah kebudayaan; (3) Print Kurikulum merupakan konstruk dari kebudayaan dan kebudayaan berarti keseluruhan dari totalitas dari cara manusia hidup dan cara ia mengembangkan pola kehidupannya sehingga ia tidak saja menjadi landasan, tetapi sekaligus menjadi target hasil dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; (4) Longstreet dan Shane. Kebudayaan berfungsi sebagai lingkungan kurikulum. Lingkungan dilihat dari 2 perspektif, yaitu sebagai lingkungan eksternal (lingkungan tempat tatanan sosial seperti sekolah berada) dan lingkungan internal (lingkungan terbentuk dari visi masing-masing pendidik, fungsi kurikulum digunakan.³²⁶

Kedudukan multikultural dalam proses pembelajaran sangat penting, realita proses pengembangan sering ditentukan oleh pandangan pengembang tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Secara intrinsik filosofi, visi dan tujuan pendidikan para pengembang pembelajaran sangat dipengaruhi oleh akar budaya pengembang yang melandasi pandangan hidupnya. Burnett menyebutkan pentingnya pertimbangan budaya dalam meningkatkan proses

³²⁶<http://viviana4areguler.blogspot.com/2017/06/makalah-pendidikan-multikultural.html> diakses 06 november 2019 jam 19:11 WIB

belajar siswa.³²⁷ Semua orang menginterpretasikan perilaku, informasi, dan situasi melalui lensa budaya sendiri, dalam sudut pandang diri sendiri.

Wloodkowski menyatakan kebudayaan adalah dasar dari motivasi intrinsik dan mengembangkan model belajar yang komprehensif dalam arti pengajaran yang responsif terhadap kultural.³²⁸ Model merupakan pedagogi lintas disiplin dan lintas budaya. Shane menyatakan manusia pada umumnya tidak menyadari berbagai kualitas dibentuk oleh budaya yang menjadi ciri perilaku. Landasan yang diperlukan dalam pengembangan pembelajaran adalah teori belajar.³²⁹ Maehr mengatakan keterkaitan antara kebudayaan dan bahasa, persepsi, kognisi, keinginan berprestasi, motivasi berprestasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar.³³⁰

Proses pembelajaran menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah tidak otomatis memberlakukan pendekatan multikultural dalam pengembangan pembelajaran di Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan pendekatan multikultural haruslah dikembangkan dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan multikultural.³³¹

Andersen dan Cusher mengatakan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Posisi kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari, menjadi berstatus sebagai obyek studi.³³² Maksudnya keberagaman

³²⁷A Odekunle, S Jacinto, M Burnett, M Clapperton, Y David, S Durga, K Greene, J Jarvis, *Anaemia in pregnancy: associations with parity, abortions and child spacing in primary healthcare clinic attendees in Trinidad and Tobago*, (Makerere Medical School, Uganda, 2010).

³²⁸Wloodkowski. Raymond J dan Judith H Jeynes, *Hasrat untuk Belajar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³²⁹Lisa M. Edwards, Regina H. Lapp-Rincker, Jeana L. Magyar-Moe, Jason D. Rehfeldt, Jamie A. Ryder, Jill C. Brown, dan Shane J. Lopez, *A Positive Relationship Between Religious Faith and Forgiveness: Faith in the Absence of Data*. 1-9. Dipetik pada tanggal 9 juni 2012 di <http://www.epnet.com/index.php> melalui Website PNRI (perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

³³⁰ Wloodkowski. Raymond J dan Judith H Jeynes, *Hasrat untuk Belajar*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³³¹Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang otonomi daerah

³³²Andersen, A.N., Wohlfahrt, J., Christens, P., Oslen, J., and Melbye, M., *Maternal Age and Fetal Loss: Population Based Register Linkage Study*. British Medical Journal 320, 2000: 1708-1712.

kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang pembelajaran.

E. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Multikultural

Perencanaan pembelajaran pendidikan merupakan unsur penting dalam proses pembentukan karakter dan perkembangan manusia seutuhnya. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, karena pendidikan merupakan unsur yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus diterimanya. Pendidikan yang membawa manusia menuju peradaban dan kemajuan seperti; politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan harapan mencapai ketenteraman, kerukunan, kedamaian, harmonis, sehingga terhindar dari berbagai macam bentuk konflik.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³³³ Pengembangan ide dalam konteks otonomi dan pelaksanaan pembelajaran dari pusat lebih banyak berisikan prinsip dan petunjuk teknis sedangkan kewenangan dalam pengembangan yang lebih operasional dan rinci diberikan kepada daerah. Pada konteks sentralisasi, pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai ide dan pelaksanaan pembelajaran memang tetap ada pada pusat tetapi harus tetap memberikan ruang yang besar bagi daerah untuk memasukkan karakteristik budayanya.

Pengembangan perencanaan pelaksanaan pembelajaran sebagai proses terjadi pendidikan sekolah/madrasah/pesantren. Pengembangan pembelajaran pendidikan haruslah didahului oleh sosialisasi agar para pengembang (guru) dapat mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, proses belajar di kelas dan evaluasi sesuai dengan prinsip pendekatan multikultural. Diperlukan adanya sosialisasi yang sepenuhnya faham dengan karakteristik perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

³³³UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1

multikultural. Pada tahap ini, target utama adalah para guru paham dan berkeinginan untuk mengembangkan RPP multikultural dalam kegiatan belajar yang menjadi tanggung jawabnya.³³⁴

Multikultural berarti keanekaragaman budaya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai pengakuan atas keberagaman budaya. Budaya berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa, dan multikultural telah membentuk suatu ideologi yang dikenal dengan multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan berbagai pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap umur, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, Bahasa, ras, dan kebutuhan khusus.³³⁵ Pendidikan multikultural merupakan usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah/madrasah/pesantren yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, etnis, suku, keyakinan agama dan adat istiadat agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi keberagaman budaya dalam masyarakat. Sesuai tujuan pendidikan multikultural, yaitu menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang beragam.

Imron Mashadi Menyebutkan pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur dan sejahtera tanpa ada perbedaan etnis, ras, suku, keyakinan agama, dan budaya. Dengan semangat membangun kekuatan di seluruh sector sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai bangsa lain.³³⁶

Sutarno menyebutkan tujuan pendidikan multikultural mencakup delapan aspek, yaitu; (1) pengembangan literasi etnis dan budaya; (2) pengembangan pribadi; (3) klarifikasi nilai dan sikap; (4) menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, suku, tingkat

³³⁴Parekh, B., *Rethinking Multiculturalisme: Keragaman Budaya dan Teori Politik*.(Terj.), (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

³³⁵Tilaar, H. A. R. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Grasindo, 2004).

³³⁶Mashadi, Imron. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikultural*, (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009)

sosial, keyakinan agama dan kelompok budaya; (5) membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan; (6) persamaan dan keunggulan pendidikan; (7) memperkuat pribadi untuk reformasi sosial; dan (8) memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh.³³⁷

Pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Maksudnya memfasilitasi siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis.

Kedua, pengembangan pribadi. Maksudnya memfasilitasi siswa bahwa persamaan semua budaya setiap etnis dan nilai antar satu dengan yang lain, sehingga memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain (kelompok etnis) walaupun berbeda budaya masyarakatnya.

Ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Maksudnya pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat, keadilan, persamaan, dan demokratis, sehingga pendidikan multikultural membantu siswa memahami berbagai konflik nilai tidak dapat dihindari dalam masyarakat pluralistik.

Keempat, menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, suku, tingkat sosial, keyakinan agama dan kelompok budaya.

Kelima, membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Maksudnya peningkatan pemahaman guru terhadap keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Keragaman budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu,

³³⁷Sutarno, Alfonsus. 2008. *Etiket Kiat Serasi Berelasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008)
Baca Juga: Sutarno dan Salimi Nurhadi, 2006, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional Guru*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 1 Desember 2006, 63–79

sehingga guru harus mampu memahami siswa sebagai individu yang memiliki ciri unik dan memperhitungkan lingkungan fisik dan sosial yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.

Ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Maksudnya pendidikan multikultural memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan dan keterampilan, sehingga mampu menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial. Serta *Kedelapan*, Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh.³³⁸

F. Kesimpulan

Peran sekolah/madrasah/pesantren sebagai sistem pengembangan pendidikan multikultural pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda. Secara intrinsik filosofi, visi dan tujuan pendidikan para pengembang pembelajaran sangat dipengaruhi oleh akar budaya pengembang yang melandasi pandangan hidupnya. Pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran multikultural haruslah didahului oleh sosialisasi agar para pengembang (guru) dapat mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, proses belajar di kelas dan evaluasi sesuai dengan prinsip pendekatan multikultural. Pendekatan multikultural bukan saja mampu menjadi media pengembangan budaya lokal tetapi juga merupakan media pengembang budaya nasional, maupun budaya universal.

G. Saran

Langkah-langkah pembelajaran berbasis keberagaman budaya menuju transformasi kurikulum multikultural, seperti status quo atau kurikulum dominan, hari libur dan pahlawan, integrasi pembelajaran, keragaman budaya,

³³⁸Sutarno. *Pendidikan Multikultural*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Baca Juga: Sutarno, Alfonsus, *Etiket Kiat Serasi Berelasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008). Baca Juga: Sutarno dan Salimi Nurhadi, 2006, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional Guru*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 1 Desember 64 2006 : 63 – 79

reformasi struktural, hubungan manusia, seperti pendidikan kebersamaan dalam keberagaman. Jika ingin mengembangkan pendidikan Islam Multikultural maka tingkatkan peran guru dan model pendidikan Islam multikultural.

Daftar Pustaka

A Odekunle, S Jacinto, M Burnett, M Clapperton, Y David, S Durga, K Greene, J Jarvis, *Anaemia in Pregnancy: Associations with Parity, Abortions and Child Spacing in Primary Healthcare Clinic Attendees in Trinidad and Tobago*, Makerere Medical School, Uganda, 2010.

Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Abdurrahman Mas' Us, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Peng. Mark R. Woodward & Lik Arifin Noor. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: kencana, 2006.

Andersen, A.N., Wohlfahrt, J., Christens, P., Oslen, J., and Melbye, M., *Maternal Age and Fetal Loss: Population Based Register Linkage Study*. British Medical Journal 320, 2000: 1708-1712.

Arifin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2011.

Bennett et al., *Indonesian Infertility Patients' Health Seeking Behaviour and Patterns of Access to Biomedical Infertility Care: An Interviewer Administered Survey Conducted in Three Clinics*. Reproductive Health, 2012.

Bennet et al., *Reproductive Knowledge and Patient Education Needs Among Indonesian Women Infertility Patients Attending Three Fertility Clinics*. Contents Lists Available At Science Direct. 2014.

Didin Nurdin dan Imam Sibaweh, *Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Frank J Mifflen dan Sydney C Mifflen, *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Tarsito, 1986.

Gerungan, W. A., *Psychologi Social*. Jakarta: PT. Eresco, 1978.

- Gunawan, in M. Batubara, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam: dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Hasan, S.H., *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: P2LPTK.
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Hamalik, O., *Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kaber, A., *Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: P2LPTK, 1988.
- Lisa M. Edwards, Regina H. Lapp-Rincker, Jeana L. Magyar-Moe, Jason D. Rehfeldt, Jamie A. Ryder, Jill C. Brown, dan Shane J. Lopez, *A Positive Relationship Between Religious Faith and Forgiveness: Faith in the Absence of Data*. 1-9. Juni 2012
- Mashadi, Imron, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikultural*. Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009.
- Muinarifah.blogspot.com/2014/08/sekolah-adalah-sistem-sosial-html diakses 06 November 2019.
- Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Jemmars, 2016.
- Nasution, S., *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Padil, M., *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2007.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 1950
- Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Sutarno, Alfonsus, *Etiket Kiat Serasi Berelasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Sutarno dan Salimi Nurhadi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional Guru*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 1 Desember 64. 2006: 63 – 79

- Sutarno, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Sutarno, Alfonsus, *Etiket Kiat Serasi Berelasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Sutarno dan Salimi Nurhadi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasional Guru*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 1 Desember 64, 2006: 63 – 79
- Tilaar, H. A. R., *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab X Tentang kurikulum, pasal 36 ayat 1
- Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1
- Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, in D. Nurdin, & I. Sibaweh, *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Wlodkowski. Raymond J dan Judith H Jeynes, *Hasrat untuk Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

BAB IX

SOLUSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 15000 pulau. Indonesia juga merupakan negara kaya keberagaman, seperti; suku, agama, ras, budaya dan bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, setiap suku bangsa memiliki kebudayaan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Suku bangsa merupakan bagian dari suatu negara, memiliki norma, adat istiadat yang berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Norma tersebut diterapkan agar masyarakat lebih taat dan patuh, sehingga tidak bertindak sembarangan.³³⁹

Menyikapi suku bangsa yang berbeda tersebut, tata cara pandang terhadap penyelesaian suatu masalah berbeda-beda. Seperti; realita dan fakta saat ini sering terjadi pertentangan antarindividu, kelompok, golongan atau masyarakat yang berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), jika terjadi pertentangan, maka mereka mengelompokkan diri sesuai asal-usul daerah dan suku bangsanya (*primodialisme*). Hal tersebut menyebabkan pertentangan atau ketidakseimbangan (*disintegrasi*), membahayakan kelangsungan bangsa. Dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945 melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa, sehingga terhindar dari berbagai pertentangan di kalangan masyarakat yang beragama.

Pengertian keragaman masyarakat (multikultural) disikapi berbeda-beda dikalangan para ahli: (1) J. S. Furnivall menyatakan masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri, tanpa ada pembaharuan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik; (2) J. Nasikun menyatakan masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh

³³⁹Rokhman, Fathur. *Membangun Komunikasi Lintas Budaya yang Bermakna dalam Masyarakat Multikultural: Studi Sosiolinguistik*. Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Tahun 2006.

masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yang bersifat *deverse* yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial; (3) Clifford Geertz menyatakan masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terikat oleh ikatan *primordial*.³⁴⁰ Untuk melanjutkan alat pemersatu kepada generasi berikutnya, sehingga terikat antara satu kelompok dengan kelompok lain, oleh karena itu kehadiran pendidikan multikultural sangat diharapkan.

Pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografis, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di Indonesia. Problem pendidikan multikultural di Indonesia dapat dipetakan menjadi dua hal, yaitu problem kemasyarakatan pendidikan multikultural dan problem pembelajaran pendidikan multikultural.³⁴¹

Problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia sebagai berikut: (1) keragaman identitas budaya daerah; (2) pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah; (3) kurang kokohnya nasionalisme; (4) fanatisme sempit; (5) konflik kesatuan nasional dan multikultural; dan (6) kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya.³⁴²

Pertama, keragaman identitas budaya daerah. Maksudnya keragaman identitas dan budaya berpotensi konflik. Keanekaragaman pada dasarnya dapat memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal berharga dalam membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi keragaman budaya juga sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik

³⁴⁰Rokhman, Fathur. *Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Dwibahasa: Kajian Sociolinguistik di Banyumas*. (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003).

³⁴¹Abdullah, Irwan, dkk. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

³⁴²Sutarno. *Pendidikan Multikultural*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

dan kecumburuan sosial. Jika potensi ini tidak ada komunikasi dan pemahaman antar kelompok budaya, maka dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural. Sehingga dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan masing-masing warga dapat saling kenal mengenal, memahami, menghayati dan saling berkomunikasi.³⁴³

Kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah.³⁴⁴ Implementasi kebijakan tersebut membawa beragam tantangan baru yang sangat kompleks, yaitu persoalan budaya. Seperti pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya.³⁴⁵ Contoh kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi di atur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan, termasuk didalamnya isu kedaerahan, atau putra daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan, jika isu tersebut terjadi dan dihembus secara terus menerus, justru membuat perdebatan dan pertikaian dalam masyarakat, dalam hal ini pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang urgen, sebagai solusi mengurai pandangan yang sempit mengenai isu kedaerahan tersebut, sehingga pendidikan multikultural berupaya menimbulkan saling toleransi dan harmonisasi dalam masyarakat.

Ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Maksudnya dengan adanya keragaman budaya, maka membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas bangsa Indonesia, seperti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi sebagai pemersatu kekuatan bangsa Indonesia. Dewasa ini mulai terasa kurang mendapat perhatian semenjak isu kedaerahan dimunculkan. Seharusnya nasionalisme perlu

³⁴³Taruna, Dody S. *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*. (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2010).

³⁴⁴Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

³⁴⁵Taruna, Dody S. *Ibid.*,

ditegakkan namun secara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi dan bukan melalui pengerahan kekuatan. Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian pendidikan multikultural dapat menjadi alat untuk memperkokoh nasionalis melalui empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam koridor keberagaman bangsa yang plural ini.

Keempat, fanatisme sempit. Maksudnya fanatisme sempit adalah menganggap kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit ini banyak menimbulkan korban di masyarakat, seperti suporter sepak bola. Kecintaan terhadap klub sepak bola yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta adalah tidak baik dan tidak sehat. Apalagi jika dikaitkan dengan isu agama (Ambon, Maluku, Poso dan Papua), maka berdampak kepada disitegrasi bangsa. Maka disinilah pendidikan multikultural memiliki peran penting sebagai alat peredam fanatisme sempit karena pendidikan multikultural terkandung ajaran menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda agama, ras, suku, etnis atau golongan.

Kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Maksudnya adanya tarik menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipat terhadap kekuasaan pusat, sehingga hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Sedangkan di sisi multikultural adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan alasan pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat. Contohnya adanya gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Oleh

karena itu pendidikan multikultural dapat menjembatani berbagai perbedaan sehingga tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural.

Keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Maksudnya peristiwa yang nampak bernuansa SARA, seperti Sampit beberapa tahun yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Orang dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi mendera mereka. Mereka menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Dengan adanya tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak destruktif. Dari peristiwa tersebut, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendidik seseorang untuk berperilaku menurut aturan yang berlaku dan mengajarkan perbedaan budaya yang dijumpai di masyarakat, karena di dalam masyarakat terdiri dari beragam lapisan, seperti si kaya dan si miskin. Serta perlu mengajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya.³⁴⁶

Problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia sebagai berikut: (1) guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik; (2) guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan; (3) rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang merangsang minat, ingatan dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khazanah budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing serta dalam dimensi pengalaman belajar yang diperoleh.³⁴⁷

Proses pembelajaran siswa dalam kelas yang berpotensi menimbulkan masalah etnis peserta didik, sebagai berikut: (1) seleksi dan integrasi isi mata

³⁴⁶ Parekh, B., *Rethinking Multiculturalisme: Keragaman Budaya dan Teori Politik. (Terj.)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

³⁴⁷ Sutarno. *Pendidikan Multikultural*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

pelajaran; (2) proses mengkonstruksikan pengetahuan; (3) masalah mengurangi prasangka; dan (4) kesetaraan paedagogik.³⁴⁸

Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai problem atau masalah, yang dapat diidentifikasi menjadi dua problem utama, yaitu problem kemasyarakatan dan problem pembelajaran pendidikan multikultural. Oleh karena bab ini diangkat dengan judul solusi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia yaitu pengertian masyarakat multikultural, multikulturalisme di Indonesia, dampak multikultural Indonesia, jenis dan bentuk konflik masyarakat multikultural, upaya penanggulangan konflik akibat multikultural dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif.

B. Pengertian Masyarakat Multikultural

Masyarakat merupakan sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan terikat oleh rasa toleransi bersama, multi berarti banyak atau beranekaragam dan kultural berarti budaya. Multikultural juga dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.³⁴⁹

Dengan demikian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang memiliki struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya. Berbagai pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian masyarakat multikultural:

³⁴⁸Sutarno. *Ibid.*, h. 17

³⁴⁹ Parekh, B., *Rethinking Multiculturalisme: Keragaman Budaya dan Teori Politik.* (Terj.), (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

1. J. S. Furnivall menyatakan masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri, tanpa ada pembaharuan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik;
2. J. Nasikun menyatakan suatu masyarakat multikultural bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan yang bersifat *deverse* yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial;
3. Clifford Geertz menyatakan masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang lebih kurang berdiri dan masing-masing subsistem terikat oleh ikatan primordial;
4. Azyumardi Azra menyebutkan masyarakat multikultural adalah pandangan tentang keberagaman dunia, kemudian diejawantahkan menjadi aneka kebijakan yang menekankan penerimaan realitas plural dan keberagaman hidup masyarakat.
5. Suparlan mendefinisikan masyarakat multikultural menjadi satu ideologi yang mengutamakan dan mengakui adanya perbedaan, tapi perbedaan itu memiliki kesamaan derajat antar satu dengan lainnya, baik pada tataran individu maupun level kebudayaan.

C. Multikultural Pendidikan di Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural, memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti dengan sebenarnya masyarakat multikultural itu.

Multikultural sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan

masyarakat yang lain. Setiap masyarakat menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Dari sinilah muncul istilah multikulturalisme.

Multikulturalisme merupakan pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam *politics of recognition*.³⁵⁰ Lawrence Blum mengungkapkan multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Multikulturalisme dapat disimpulkan mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan, setiap orang ditekankan saling menghargai dan menghormati keberagaman kebudayaan di masyarakat. Multikulturalisme terbentuk dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang beragam dan luas serta kondisi geografis.

Indonesia memiliki banyak pulau, setiap pulau dihuni oleh sekelompok manusia, sehingga membentuk suatu masyarakat, dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan, tentu saja hal tersebut berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam, sehingga muncul berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Terkait konsep dasar multikulturalisme dengan pembentukan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka multikultural merupakan proses upaya mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia.

D. Dampak Multikultural di Indonesia

³⁵⁰Azyumardi Azra. *Identitas Dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Tahun 2007.

Kebudayaan umat manusia sangat beraneka ragam. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif pada perubahan kebudayaan dan kehidupan masyarakat.

1. Dampak positif: (a) keanekaragaman memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka dalam menjalin hubungan sosial maupun berbudaya; (b) memberikan ikatan dan hubungan antar sesama; (c) dapat saling berbagi bersahabat dan menghargai antar setiap budaya, tanpa adanya batasan sebuah keanekaragaman;
2. Dampak negatif: (a) rentan terhadap konflik. Perbedaan nilai-nilai budaya dan norma dasar sulit disesuaikan antara masing-masing agama, selalu bertentangan dan ini memudahkan munculnya sebuah konflik; (b) munculnya sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain; (c) munculnya sikap fanatisme dan ekstrim. Fanatisme atau fanatik adalah suatu keyakinan yang kuat terhadap agama, kebudayaan dan kelompok. Ekstrim adalah sangat kuat, keras yang solidaritas terhadap persamaan atau kelompoknya sendiri.³⁵¹

Keanekaragaman budaya memiliki dampak tersendiri baik positif maupun negatif, sebagai berikut. *Pertama*, dampak positif (manfaat) masyarakat multikultural; (1) keanekaragaman membuat masyarakat lebih terbuka dalam menjalin hubungan sosial; (2) memberikan ikatan yang lebih kuat dengan menerima kekurangan masing-masing kelompok; (3) saling berbagi pengetahuan dan menghargai antar budaya, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah pembatas dalam menjalin suatu hubungan.

Kedua, dampak negatif (kerugian) masyarakat multikultural (1) munculnya sikap fanatik dan ekstrim dalam mendukung suatu kelompok; (2) adanya politik aliran yang mementingkan kemajuan suatu kelompok tertentu dalam bidang politik; (3) munculnya sikap primordialisme, memegang teguh

³⁵¹Harahap, Ahmad Rivai, *Multikulturalisme dan Penerapannya dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama*. Tahun 2004.

hal yang dibawa sejak lahir, baik tradisi maupun kepercayaan; (4) memicu konflik, sangat wajar jika konflik muncul dalam lingkungan masyarakat multikultural karena keanekaragaman yang ada; (5) munculnya sikap etnosentrisme, pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan yang dianutnya (merendahkan kelompok lain).³⁵²

E. Jenis dan Bentuk Konflik Pendidikan Multikultural

Konflik masyarakat merupakan proses sosial diasosiatif yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat karena ketidakselarasan dan ketidakseimbangan dalam suatu hubungan masyarakat. Menurut Narjdana konflik adalah akibat situasi, keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Berdasarkan tingkatannya konflik dapat dibagi menjadi konflik horizontal dan vertikal.³⁵³

1. Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok sosial yang sifatnya sederajat. Konflik sosial horizontal dapat berupa konflik antar suku, antar ras, agama, maupun konflik antar golongan; (1) Konflik antar suku, konflik antar suku pada umumnya disebabkan oleh primordialisme yang berkembang menjadi etnosentrisme. Contoh: konflik antara suku Dayak dan suku Madura yang terjadi di Sampit, konflik antara suku-suku kecil di Papua; (2) Konflik antar ras, konflik antar ras pada umumnya disebabkan oleh primordialisme yang berkembang menjadi stereotipe. Contoh: sistem politik Apartheid di Afrika, segregasi di Amerika; (3) Konflik agama, konflik maslaah agama pada umumnya disebabkan oleh primordialisme yang berkembang menjadi fanatisme. Konflik agama dapat berupa konflik intern umat beragama misalnya konflik antar golongan pemeluk

³⁵²Supardan, D., (2004) Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global untuk Integrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimental terhadap Siswa Sekolah Menengah Umum di Kota Bandung). Disertasi PPS UPI. Baca Juga: Supardan, *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, (Bandung: Rizqi Press, 2015).

³⁵³Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Islam murni dengan golongan Ahmadiyah, maupun konflik antar umat beragama (*ekstern*) misalnya konflik masyarakat Ambon pemeluk Islam dengan masyarakat Ambon pemeluk Kristen; (4) Konflik antar golongan, konflik antar golongan pada umumnya disebabkan oleh semangat *in group* yang kuat sehingga dengan kelompok *out group* menimbulkan antipati. Contoh: konflik antar pendukung partai Demokrat dengan simpatisan PDIP.

2. Konflik Vertikal

Konflik yang terjadi diantara lapisan-lapisan di dalam masyarakat. Contoh konflik vertikal: (1) konflik antar kelas atas dengan kelas bawah, konflik antar kelas atas dengan kelas bawah dapat berupa konflik kolektif dan individual. Konflik kolektif misalnya konflik antara buruh dengan pimpinan perusahaan untuk menuntut kenaikan gaji. Konflik individual misalnya konflik antara pembantu dengan majikan yang berakibat pada kekerasan; (2) konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, misalnya pemberontakan dan gerakan seporadis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka); (3) konflik antara orang tua dan anak, konflik antara orang tua dan anak menimbulkan hambatan dalam sosialisasi nilai dan norma dan terkadang menimbulkan kenakalan remaja.³⁵⁴

Faktor penyebab munculnya konflik multikultural sebagai berikut; (1) faktor geografis; (2) kondisi iklim dan cuaca; (3) pengaruh budaya asing; (4) keanekaragaman suku bangsa; dan (5) keanekaragaman agama.³⁵⁵

1. Faktor geografis

Kondisi geografis ini mempengaruhi fenomena alam yang sering terjadi dalam wilayah tersebut. Baik secara langsung maupun tidak langsung, fenomena alam mempengaruhi kehidupan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Perbedaan kondisi geografis ini menimbulkan corak hidup yang beranekaragam dalam masyarakat. Contohnya Indonesia sebagai negara

³⁵⁴Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

³⁵⁵Supardan, *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, (Bandung: Rizqi Press, 2015).

kepulauan memiliki banyak daerah gunung dan daerah laut, tentunya corak hidup masyarakat di daerah gunung berbeda dengan mereka yang hidup di daerah laut atau pesisir pantai.

2. Kondisi iklim dan cuaca

Kondisi geografis, kondisi iklim dan cuaca juga termasuk fenomena alam yang dipengaruhi faktor geografis dari suatu wilayah. Perbedaan iklim dan cuaca mempengaruhi pola perilaku manusia dalam menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Contohnya masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih dingin menggunakan pakaian yang lebih tebal, sedangkan yang tinggal di daerah panas mengenakan pakaian yang lebih tipis.

3. Budaya asing

Penyebaran budaya antar masyarakat dari seluruh dunia ikut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tersebut, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, maka media penyebaran budaya menjadi lebih luas dan lebih mudah dilakukan. Masuknya budaya asing dalam suatu lingkungan masyarakat, memunculkan kebiasaan baru akibat benturan budaya asing dengan budaya lokal, oleh karena itu pengaruh budaya asing merupakan salah satu pemicu munculnya masyarakat multikultural.

4. Keanekaragaman suku bangsa

Suku bangsa atau etnis adalah kelompok manusia yang anggotanya mendefinisikan diri mereka berdasarkan garis keturunan dan ciri ciri fisik yang dianggap serupa. Identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas suatu kelompok tersebut. Contoh yang paling mudah kita ambil adalah Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa yang beranekaragam, ada suku Bali, Batak, Aceh dan masih banyak lagi. Semua suku tersebut disatukan dalam sebuah negara sehingga membentuk kehidupan masyarakat multikultural dalam satu kesatuan yaitu NKRI.

5. Keanekaragaman agama

Agama adalah sebuah kepercayaan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dalam kehidupan. Agama memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan asal

usul dan makna kehidupan. Agama memiliki ikatan yang kuat dengan seseorang karena setiap agama memiliki aturan, kitab suci, dan tempat tempat suci yang mempengaruhi kehidupan penganutnya. Ada beberapa jenis agama yang ada di dunia. Penganut agama yang berbeda dalam suatu wilayah menciptakan lingkungan masyarakat multikultural. Oleh karena itu, agama merupakan salah satu faktor yang dapat memicu timbulnya masyarakat multikultural.³⁵⁶

6. Keanekaragaman Ras

Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan manusia dalam suatu kelompok besar berdasarkan ciri fisik, asal usul geografis, tampang, dan kesukuannya. Paradigma ras sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu lebih menekankan pada sifat biologis atau konstruk sosial seseorang. Para antropolog dan ilmuwan evolusi mengidentifikasi istilah ras untuk membahas perbedaan genetika (biologis), sedangkan sejarawan dan ilmuwan sosial mendefinisikan ras sebagai kategori kebudayaan atau konstruksi sosial, suatu teknik tertentu orang berbicara tentang diri mereka dan tentang orang lain. Perbedaan ras dapat menjadi faktor pemicu timbulnya masyarakat multikultural.

Bentuk masyarakat multikultural terbagi dua yaitu; (1) Berdasarkan kekuatannya seperti masyarakat dengan kompetisi seimbang, masyarakat dengan mayoritas dominan (kelompok mayoritas yang dominan), minoritas yang dominan, fragmentasi (masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok kecil dan tidak ada yang mendominasi); (2) Berdasarkan kecenderungan perkembangan dan praktik multikulturalismenya; (a) multikulturalisme isolasionis. Maksudnya kelompok masyarakat multikultural yang menjalankan kehidupannya secara otonom dengan interaksi antar kelompok yang minimal satu dengan lain; (b) multikulturalisme akomodatif. Maksudnya masyarakat yang memiliki budaya dominan yang membuat penyesuaian tertentu bagi kaum minoritas. Masyarakat multikultural ini biasanya memberikan kebebasan bagi

³⁵⁶Parekh, Bikhu. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

kaum minoritas untuk mempertahankan kebudayaan mereka; (c) multikultural otonomis. Maksudnya masyarakat multikultural yang hidup bersama berusaha menciptakan kesetaraan sebagai budaya mereka. Kelompok dominan yang berusaha menciptakan tingkatan-tingkatan dalam kehidupan bermasyarakat ditentang dalam sistem ini; (d) multikulturalisme kritikal/interaktif. Maksudnya kelompok masyarakat multikultural yang tidak terlalu fokus dengan kehidupan kultural otonom, melainkan lebih ingin menciptakan budaya kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif masing-masing kelompok masyarakat; (e) multikulturalisme kosmopolitan. Maksudnya jenis sistem yang berusaha menghilangkan batas-batas budaya dalam kehidupan mereka, sehingga nantinya tercipta sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu.³⁵⁷

F. Upaya Penanggulangan Konflik Akibat Multikulturalisme

Lingkungan masyarakat terdiri atas beragam adat istiadat, budaya, keyakinan agama, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Keragaman tersebut disebut multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia yang memiliki struktur sendiri-sendiri dan beragam.³⁵⁸ Seperti keanekaragaman agama, suku, ras, etnis, bahasa, warna kulit, profesi, pola pikir, kemampuan ekonomi adalah contoh-contoh dari keanekaragaman sosial dalam masyarakat.

Keanekaragaman sering berpotensi konflik dalam masyarakat. Misalnya perlakuan kelompok masyarakat yang berasal dari suku betawi yang menertawakan tatacara berbicara orang-orang Jawa dengan logat mereka yang khas (medok), sedangkan mereka yang berasal dari kelompok Jawa merasa tidak dihargai, tersinggung dan sakit hati atas perlakuan orang-orang Betawi. Maka, terjadilah konflik diantara dua kelompok suku yang berbeda tersebut. Jika saling menghargai dan memahami, dengan menerima segala

³⁵⁷Naim, Ngaimun & Achmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, (2012).

³⁵⁸Supardan, *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, (Bandung: Rizqi Press, 2015).

perbedaan yang ada dalam kehidupan dan manajemen konflik, sehingga terhindar dari konflik dan dapat digunakan sebagai strategi penanggulangan konflik.

Gibson, et al., menyebutkan langkah penanganan konflik secara efektif jika konflik telah terjadi; (1) menjabarkan kepentingan teknik penyelesaian konflik; (2) membangun hubungan kerja yang baik; (3) memberikan pilihan yang baik; (4) dilihat sebagai keabsahan; (5) pengenalan alternatif prosedural suatu pihak; (6) memperbaiki komunikasi ; (7) mengarahkan ke komitmen yang bijaksana.³⁵⁹

Pertama, menjabarkan kepentingan teknik penyelesaian konflik yang ditempuh melalui: (1) memudahkan pencarian kepentingan yang seragam dan tidak berkonflik dari kedua kelompok; (2) membicarakan kepentingan setiap kelompok kepada yang lain tanpa menyorot secara tidak pantas kelompok yang lain untuk memaksakan kepentingan dengan dasar kepentingan tertentu.

Kedua, membangun hubungan kerja yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui: (1) memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengatasi perbedaan-perbedaannya dalam perdebatan yang hangat; (2) memelihara jenis hubungan yang diinginkan oleh kelompok tapi sesuai; (3) mempermudah kelompok untuk mengatasi bersama-sama bila konflik timbul lagi.

Ketiga, memberikan pilihan yang baik. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui: (1) memacu kelompok untuk sumbang saran beberapa pilihan sebelum mengevaluasi mereka dan memilih di antara mereka; (2) mendorong/memberi semangat kepada kelompok untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan nilai-nilai untuk perolehan bersama.

Keempat, dilihat sebagai keabsahan. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui: (1) dengan tidak dipandang oleh kelompok sebagai pengganggu; (2) dengan menanamkan pada kelompok rasa bahwa penyelesaian yang dibuat adil dan memadai.

³⁵⁹Gibson et. al. *Organization Behaviour-Structure Process*. Boston: Irwin Homewood. Alih Bahasa: Djoekban Wahid. (Jakarta: Erlangga, 1996).

Kelima, pengenalan alternatif prosedural suatu pihak. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh dengan membolehkan kedua pihak untuk mengembangkan penilaian mereka sendiri yang realistis dan alternatif pokok pihak lain.

Keenam, memperbaiki komunikasi. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui: (1) memperbanyak pertanyaan dan pengujian dari yang menjadi dasar perkiraan; (2) mempermudah pengertian dan diskusi dari pandangan pengikut; (3) membentuk komunikasi antar kelompok dua arah yang efektif.

Ketujuh, mengarahkan kekomitmen yang bijaksana. Teknik penyelesaian konflik ini ditempuh melalui: (1) memberi kesempatan kelompok untuk merancang kebijaksanaan yang realistis, operasional dan cenderung terlaksana; (2) menempatkan pihak-pihak dengan sumber yang efektif untuk acara di kejadian yang mereka gagal untuk mencapai persetujuan akhir atau kejadian yang tidak terlaksana.³⁶⁰

Pemilihan Strategi di atas didasarkan atas pemikiran konflik multikultural di Indonesia memiliki banyak variasi karena penyebab konflik yang berbeda-beda. Ketujuh langkah di atas memiliki lingkup lebih luas sehingga diharapkan mampu menyelesaikan konflik dari yang paling ringan hingga konflik yang paling berat.

Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik: (1) penarikan diri, yaitu proses penyelesain konflik antara dua atau lebih pihak; (2) taktik penghalusan dan damai, yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan; (3) bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi faktual; (4) taktik paksaan dan penekanan yang menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan melalui sikap otoriter; (5) taktik yang

³⁶⁰Supardan, *Manusia, Kekerasan, Multikultural dan Transformasi Pendidikan*, (Bandung: Rizqi Press, 2015).

berorientasi pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi.³⁶¹

Satu hal yang harus kita pahami adalah perbedaan bukanlah hambatan. Seharusnya kita tidak menyalahkan perbedaan yang ada, karena perbedaan sudah selayaknya terjadi. Tapi salahkanlah mengapa kita tidak bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dan ikhlas. Memang sulit untuk menerima begitu banyak perbedaan yang ada dalam kehidupan. Namun, seharusnya kita bisa mengambil banyak pelajaran dari setiap perbedaan yang ada. Karena sesungguhnya, segala bentuk perbedaan bukanlah hambatan untuk kita menjalin persaudaraan, dan menyetakannya, sebagai berikut; (1) saling menghargai antarsuku. Jika suku Betawi menganggap bahwa suku Jawa memiliki dialek bahasa yang lucu dengan kekhasannya, janganlah menertawakan atau bahkan melecehkan mereka bagaimanapun bentuknya. Jika suku Jawa menyadari yang dilakukan oleh masyarakat suku Betawi, seminimal mungkin tidak membuat sakit hati atau dendam yang terpendam; (2) Memahami kondisi masing-masing. Mungkin ada yang merasa sakit hati atau tersinggung atas perilaku yang dilakukan oleh tetangga yang berasal dari tingkat ekonomi yang berbeda yang menyakitkan, bahkan seolah tidak peduli. Tapi itu semua tergantung cara pandang perbedaan yang ada; (3) Sesulit apapun masalah yang dihadapi berusaha untuk tersenyum, meski sulit.

Menghindari nilai-nilai yang dapat memecah belah persatuan dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Untuk membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari, yaitu:

1. *Primordialisme*

Perasaan kesukuan yang berlebihan. Sikap ini tercermin dari anggapan suku bangsanya adalah yang terbaik. Perasaan superior, menganggap lebih rendah suku yang lain adalah sikap yang kurang terpuji bagi masyarakat multikultur yang sangat rentan mengundang konflik.

³⁶¹Azyumardi Azra, *Identitas Dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia*, (1997), h. 37

2. *Etnosentrisme*

Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Indonesia bisa maju dengan bekal kebersamaan, sebab tanpa itu yang muncul adalah disintegrasi sosial. Jika sikap dan pandangan ini dibiarkan maka memunculkan provinsialisme yaitu paham atau gerakan yang bersifat kedaerahan dan eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat;

3. *Diskriminatif*

Sikap yang membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga negara.

4. *Stereotip*

Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat jika perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian.

G. Kesimpulan

Solusi pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia yang sering terjadi adalah dengan menyerahkan berbagai bentuk keragaman dan perbedaan, seperti; suku, agama, ras dan adat istiadat, sehingga saling menghargai dalam segala bidang dan kegiatan, memahami kondisi masing-masing dan harmonis. Dengan demikian tidak terjadi sementasi, struktur dalam lembaga yang nonkomplementer, konflik, tidak terjadi integrasi dengan paksaan dan tidak ada dominasi politik terhadap kelompok lain.

H. Saran

Pendidikan multikultural diharapkan peserta didik dapat menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman suku bangsa tentu banyak permasalahan dibalik

keragaman tersebut. Jika keberagaman masih menjadi konflik disarankan untuk segera diperbaiki dan jika keberagaman sudah menjadi asset kekayaan bangsa dan sudah mendapatkan pemecahan permasalahannya untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, dkk. (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*
- Gibson et. al. (1996). *Organization Behaviour-Structure Process*. Boston: Irwin Homewood. Alih Bahasa: Djoekban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, Ahmad Rivai, 2004. *Multikulturalisme dan Penerapannya dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama*.
- Naim, Ngaimun & Achmad Sauqi. (2012). *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Parekh, Bikhu. (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya (Suatu Pengantar)*. Bogor: Ghalia. Indonesia.
- Rokhman, Fathur. *Membangun Komunikasi Lintas Budaya yang Bermakna dalam Masyarakat Multikultural: Studi Sosiolinguistik. Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Semarang*. Tahun 2006.
- Sutarno. (2007). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Taruna, Dody S. (2010). *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*. Kementerian Agama RI.
- Yaqin, M. Ainul. (2005). *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

BAB X

URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pendidikan multikultural merupakan isu sangat penting seiring munculnya demokratisasi era reformasi. Multikultural adalah pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui. Multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain sebagai satu kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, dan keyakinan agama. Menurut Gurpreet Mahajan multikultural merupakan gerakan multikultural yang muncul pertama kali sekitar Tahun 1950an di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman memberi penegasan kesamaan seseorang atau kelompok dengan segala perbedaannya, diakui di ruang publik.³⁶²

Multikultural merupakan respons kebijakan baru terhadap keberagaman. Seperti adanya komunitas yang berbeda mendapatkan perlakuan yang sederajat oleh warga negara dan bangsa. Kepedulian diarahkan pada kelompok etnis, minoritas, termasuk perempuan. Multikultural terumus dalam bentuk sejumlah prinsip, kebijakan untuk mengakomodasi keberagaman sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari suatu masyarakat.³⁶³

Multikultural merupakan upaya menciptakan, menjamin dan mendorong pembentukan ruang publik yang memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing.³⁶⁴ James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk

³⁶²Badwaik RT, Mahajan HM, Borkar AS, Honrao R, Chopade SS. A Drug Utilization Study of Antiepileptic Drugs Use in a Tertiary Care Hospital of Central India. *J Cont Med A Dent.* 2015; 3 (2).

³⁶³Winatasaputra, U., *"Multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia" dalam Dialog Multikultural untuk Membina Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: JICA FPMIPA UPI, 2008).

³⁶⁴Zuriah, N., (2011), *Model Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Perguruan Tinggi Kota Malang)*. Disertasi. Bandung: PPS UPI.

people of color.³⁶⁵ Pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai anugerah Tuhan. Kondisi tersebut memungkinkan seseorang mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi. Dengan demikian, Bab ini membahas tentang urgensi pendidikan multikultural di Indonesia sebagai berikut; (1) pengertian pendidikan multikultural; (2) pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia; (3) urgensi pendidikan multikultural di Indonesia; (4) pengertian pendidikan Islam dan multikultural; (5) landasan kultural pendidikan; (6) pendidikan Islam sebagai upaya membangun multikultural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

B. Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural terdapat beragam definisi menurut beberapa pendapat para ahli. Andersen dan Cusher mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.³⁶⁶ Muhaemin el Ma'haddi berpendapat pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.³⁶⁷

Paradigma multikultural memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama orang lain (*the others*). Atas dasar ini maka penerapan multikultural menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam dan etnis, agama, budaya hingga orientasi politik, bisa mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di belakang hari.³⁶⁸

³⁶⁵Banks, James H. (2002). *Introduction to Transportation Engineering*, International

³⁶⁶Anderson, L. Krathwohl, *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen Revisi Taksonomi Bloom*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

³⁶⁷Muhaemin El-Ma'hady dalam [www. re-searchengines.com](http://www.re-searchengines.com).

³⁶⁸Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 65

Paulo Freire mendefinisikan pendidikan multikultural bukan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Melainkan pendidikan multikultural mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan suatu kelas sosial sebagai akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya.³⁶⁹ Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, seperti tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial dan keyakinan agama.

Pendidikan Islam multikultural adalah sikap menerima kemajemukan ekspresi budaya manusia dalam memahami pesan utama agama, terlepas dari rincian anutannya. Basis utamanya dieksplorasi dengan melandaskan pada ajaran Islam, sebab dimensi Islam menjadi dasar pembeda sekaligus titik tekan dari konstruksi pendidikan ini. Penggunaan kata pendidikan Islam tidak dimaksudkan untuk menegaskan ajaran Islam saja, karena pendidikan Islam sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis multikultural.³⁷⁰

Suatu masyarakat disebut multikultural jika didalamnya ada tiga aspek yakni 1). keanekaragaman subkultural, 2) keanekaragaman perspektif dan 3). keanekaragaman komunal. Robert W. Hefner mengemukakan Multikultural adalah dimasukannya kaum marjinal dan tidak diuntungkan, termasuk komunitas religious kedalam kehidupan publik.³⁷¹ Conrad P. Kottak menjelaskan multikultur memiliki beberapa karakter khusus, antara lain: (1) kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus; (2) kultur adalah sesuatu yang dipelajari; (3) kultur adalah sebuah simbol; (4) kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami; (5) kultur adalah sesuatu

³⁶⁹Paulo Freire, *Pendidikan Pembebasan* (Jakarta: LP3S, 2000)

³⁷⁰Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 41

³⁷¹Dodi S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 66

yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat; (6) kultur adalah sebuah model; dan (7) kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif.³⁷²

Dengan demikian multikultural merupakan sikap saling menerima dan menghargai keberagaman kebudayaan yang ada dan memiliki kesetaraan sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pendidikan multikultural merupakan sistem pendidikan yang memperhatikan dan menghargai keragaman budaya serta menjadikan semua keragaman budaya yang ada dalam lingkungan pendidikan sebagai aset dan potensi yang mendukung kearah tercapainya tujuan pendidikan.

C. Pendekatan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia memakai pendekatan transformasi, seperti Gorski, menyebutkan tiga jenis transformasi, yaitu: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar; (3) transformasi masyarakat.³⁷³ Pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat memiliki tantangan dan penuh permasalahan antar kelompok. Pendidikan multikultural bukan sebatas merayakan keragaman belaka, tetapi meliputi tatanan masyarakat yang masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Termasuk kehidupan siswa dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaan dominansi sosial budaya. Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan toleransi, saling menghargai dalam masyarakat.

Choril Mahfud menyebutkan lima proses pendekatan dalam pendidikan multikultural yaitu: (1) menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program sekolah formal; (2) menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan

³⁷²Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 123 - 125

³⁷³Alexander, M. Corrigan, A. Gorski, L. Hankins, J. & Perruca, R. (2010). *Infusion Nursing Society, Infusion Nursing: An evidence Based Approach*. Third Edition. St. Louis: Dauders Elsevier.

kelompok etnik adalah sama; (3) pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural; (4) pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, seperti kebudayaan yang diadopsi ditentukan oleh situasi; (5) pendidikan multikultural meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan.³⁷⁴

Kesadaran kompetensi kebudayaan menjauhkan diri dari konsep dua budaya atau dikotomi antara pribumi dengan nonpribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan kompetensi kebudayaan merupakan upaya meningkatkan kesadaran multikulturalisme sebagai pengalaman masyarakat. Pendidikan multikultural dapat dijadikan upaya menghindari dikotomi dengan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri peserta didik.³⁷⁵ Dengan demikian Indonesiaan yang memiliki semboyan *bhinneka tunggal ika*, sebagai alat pemersatu bangsa dapat diselaraskan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Sedangkan di Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas, hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya dan saling mempengaruhi.³⁷⁶

³⁷⁴Choril Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 191-196.

³⁷⁵Tilaar, H.A.R., *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grassindo, 2004)

³⁷⁶ Mahfud, C., *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Begitu juga komposisi agama yang dianut terdiri dari enam agama, berdasarkan laporan terakhir berturut-turut adalah Islam (87, 18 %), Kristen (6, 96 %), Katolik (2, 91%), Hindu (1, 69%), Budha (0, 72%), Khonghucu (0, 05%) dan agama lainnya (0, 50%).³⁷⁷ Keragaman etnis dan agama ini menjadi keunikan bangsa Indonesia dibanding bangsa lainnya di dunia.

Indonesia sebagai masyarakat majemuk, berpotensi munculnya masalah, integrasi bangsa menjadi rapuh. Secara historis, adanya sumpah pemuda pada tahun 1928, sebagai alat pemersatuan bangsa Indonesia dalam masyarakat majemuk. Penggunaan awal, alat pemersatu bangsa (*bhinneka tunggal ika*) ini, tidak dilakukan dengan paksa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sejarah mencatat adanya beberapa upaya pemberontakan oleh separatis, maka secara pemaksaanpun harus dilakukan.³⁷⁸

Kemajemukan merupakan *sunnatullah, blessing in disguise* bagi bangsa Indonesia, dengan merayakan kemajemukan berarti merawat Indonesia.³⁷⁹ Setelah kejatuhan Soeharto (*orde baru*), kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi bangsa dan pada gilirannya memunculkan budaya *hybrid*. Budaya ini berpotensi melenyapkan identitas budaya nasional. Budaya lokal mutlak diperlukan, bagi terwujudnya integrasi sosial, budaya dan politik bangsa Indonesia. Pemahaman budaya dibutuhkan, jika masyarakat multikultural bertransformasi dari dimensi sosiologis menuju kontestasi politik.³⁸⁰

Persatuan dan kesatuan bangsa terus menerus diuji eksistensinya, seperti konflik sering terjadi dan membawa implikasi besar terhadap kehidupan masyarakat, konflik sering dilatarbelakangi agama. Contoh, konflik Ambon, Poso, Cikeusik. Konflik ini sebenarnya tidak diawali oleh faktor

³⁷⁷Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), h.13.

³⁷⁸Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ibid.*, h.13.

³⁷⁹Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 5

³⁸⁰Donny Gahral Adian, "*Reasoning in a multicultural society*", *Wacana* Vol. 13 No. 2 Oktober 2011, h. 362.

agama, tetapi persoalan ekonomi, sosial dan hukum secara umum. Kemudian para pelakunya melibatkan agama untuk mendapatkan dukungan emosional dari kelompok agama. Dalam hal ini, agama dimanfaatkan sebagai faktor pemersatu bagi komunitas agama tertentu, sehingga menjadi faktor pemecah belah antar kelompok agama yang berbeda.

Fenomena menunjukkan bahwa pendidikan agama baik di sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan menafikan hak hidup agama lain, seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat, dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Seharusnya pendidikan agama dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal dalam agama sekaligus mengembangkan teologi yang inklusif dan toleran.³⁸¹ Dalam kasus ini, maka pendidikan multikultural sangat urgen kehadirannya.

Urgennya pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu sarana alternatif pemecahan konflik. Penyelenggaraan pendidikan multikultural pada dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang terdiri atas berbagai macam unsur sosial dan budaya. Pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya.³⁸²

Pendidikan multikultural yang ditanamkan sejak didi kepada anak-anak peserta didik, baik melalui pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap peserta didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat keragaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan multikultural tidak terbatas pada usia anak-anak sekolah, tetapi kepada masyarakat pada umumnya, melalui seminar, konferensi, dengan tema pentingnya toleransi dalam

³⁸¹Erlan Muliadi, *Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Islam Volume I, Nomor 1, (2012): h. 55-68.

³⁸²Media Indonesia, Rabu, 08 September 2008.

keberagaman, sehingga masyarakat Indonesia dapat menerima, bahwa mereka hidup dalam perbedaan dan keragaman.

Pendidikan multikultural di Indonesia memiliki tiga tantangan sebagai berikut: (1) agama, suku, bangsa, dan tradisi; (2) kepercayaan; (3) toleransi.³⁸³

1. Agama, suku bangsa dan tradisi

Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagaimanapun juga hal itu menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama,

2. Kepercayaan

Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan risiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya risiko dari kecurigaan/ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat/plural.

3. Toleransi

Toleransi merupakan bentuk tertinggi bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan, jika mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural.

Struktur kultural masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengolah perbedaan tersebut menjadi

³⁸³Munib, Achmad, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. (Semarang: Unnes Press, 2009), h. 100

suatu aset, bukan sumber perpecahan. Pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.

Pada kenyataannya pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar. Sekolah dan perguruan tinggi hendaknya sebagai instirusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural dengan model masing-masing sesuai dengan otonomi pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil, jika terbentuk pada diri setiap peserta didik sikap saling toleransi, tidak bermusuhan dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, keyakinan agama dan adat istiadat.

Stephen Hill menjelaskan bahwa pendidikan multikultural dikatakan berhasil jika prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan adanya multidimensi aspek kehidupan yang tercakup dalam pendidikan multikultural, sehingga perubahan yang diharapkan, dapat terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dan harmonis dalam kehidupan masyarakat, sesuai tujuannya; (1) agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya; (2) sebagai landasan pengembangan kurikulum Nasional; (3) menuju masyarakat Indonesia yang multikultural.³⁸⁴

Pertama, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Pendidikan multikultural selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, namun juga sebagai upaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan akar budaya yang dimiliki sebelumnya, saat peserta didik berhubungan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Pertemuan antar budaya di era globalisasi, dapat menjadi ancaman serius bagi peserta didik. Seperti kehilangan arah dan melupakan asal budayanya sendiri. Dengan beragamnya kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyaknya budaya, agar peserta didik tidak

³⁸⁴Munib, Achmad, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. (Semarang: Unnes Press, 2009), hal. 105.

melupakan asal budayanya sendiri. Pendidikan multikultural sebagai alat diharapkan dapat membimbing peserta didik agar mampu membangun bangsa Indonesia sesuai kondisi perkembangan budaya masyarakat Indonesia.³⁸⁵

Kedua, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting jika dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu. Pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut; (1) mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak seperti sekarang menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan; (2) harus merubah teori tentang konten, yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik; (3) teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi dan politik; (4) proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan peserta didik terbiasa hidup dengan keberanekaragaman budaya; (5) evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.

Ketiga, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Inti dari cita-cita reformasi Indonesia adalah mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis dan ditegakkan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintah yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial serta rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai konsep yang relevan

³⁸⁵Munib, Achmad, *Ibid*, hal. 105)

dengan multikultural seperti demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas dan konsep-konsep lain yang relevan dengan masyarakat multikultural.³⁸⁶

Masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika merupakan keanekaragaman suku bangsa dan budaya masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberanekaragaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, toleransi antar kebudayaan dan hidup harmonis.

E. Pengertian Pendidikan Islam dan Multikultural

Pendidikan dalam Islam dikenal juga dengan istilah *tarbiyah*, *ta'dib*, *taklim*, *riyadhah*, *irsyad* dan *tadris*.³⁸⁷ Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri, sesuai dengan lingkup pendidikan. Istilah yang paling tepat yang dapat digunakan dalam pendidikan Islam yaitu, *al ta'adib*, *al ta'lim* dan *al tarbiyah*.³⁸⁸

Muhammad al Naquib al Attas menuturkan istilah yang lebih relevan dalam konteks pendidikan Islam adalah *al ta'dib*, hal ini didasari dari hadits Rasulullah SAW. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah hidangan Allah SWT bagi setiap manusia atas bumi, maka barangsiapa yang mempelajarinya, berarti dia belajar dari hidangannya.³⁸⁹ Ketika Al-Qur'an sendiri digambarkan sebagai undangan Allah maka menghadiri jamuan di atas bumi dan sangat dianjurkan untuk mengambil bagianya dengan memiliki pengetahuan tentangnya. Istilah *ta'dib* menurut Naquib, istilah inilah yang paling tepat untuk menunjukkan proses pendidikan dalam Islam, karena istilah *ta'dib* merupakan sebuah sistem

³⁸⁶Fay, Brian, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach* (Oxford: Backwell, 1996), h. 203.

³⁸⁷Irsyad, bimbingan dan belajar dapat digunakan sebagai peristilahan dalam pendidikan Islam.

³⁸⁸Basuki dan Miftahul Ulum, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2007), h. 1

³⁸⁹Basuki dan Miftahul Ulum, *Ibid.*, h. 1

Islam yang di dalamnya terdapat tiga subsistem penting yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan (*'Urn*), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). Jadi *tarbiyah* adalah bagian atau subsistem dari *ta'dib* itu sendiri.³⁹⁰

Pengertian pendidikan Islam selanjutnya banyak diinterpretasikan oleh para kalangan ahli pendidikan dengan tafsiran yang berbeda. Di antaranya sebagai berikut.

1. Zakiah Darajat menitikberatkan pendidikan Islam pada dua segi. (1) Pendidikan Islam lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan dirinya sendiri maupun orang lain; (2) Pendidikan Islam bersifat teoretis dan praktis. Artinya, pendidikan Islam merupakan pendidikan iman dan pendidikan amal. Ajaran Islam berkaitan dengan ajaran sikap dan tingkah laku individu dan masyarakat, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan individu dan masyarakat.³⁹¹
2. Ahmad Taufiq, menurutnya Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada peserta didik secara sadar dan tersencana dalam rangka mengembangkan potensi fitrahnya untuk mencapai kepribadian Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.³⁹²
3. Jusuf Amir Fasisal, menurutnya Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada ajaran Islam. Ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunah serta pendapat para ulama.³⁹³
4. Abd. Aziz, menurutnya Pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah serta pengembangan pemahaman kedua sumber tersebut berdasarkan kepada *ra'yu* dan *ijtihad*.³⁹⁴

³⁹⁰Basuki dan Miftahul Ulum, *Ibid.*, h.

³⁹¹Sembodo Ardi Widodo, *Kajian FHosofis Pendidikan Barat dan Islam*, (Jakarta: Nimas Multima, 2003), h.173

³⁹²Ahmad Taufiq dan Muhammad Rohmadi, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: YUMA Pressindo, 2011), h. 220

³⁹³Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 29

³⁹⁴Abd. Aziz, *Orientasi Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 8

Berdasarkan uraian atau penjelasan diatas terkait pengetahuan pendidikan Islam maka pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mendidik, membimbing, membina para peserta didik yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunah serta pendapat para ulama dengan tujuan membentuk generasi Islam yang beriman, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia.

F. Landasan Multikultural Pendidikan

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman khazanah budaya yang perlu dilestarikan melalui pendidikan formal. Generasi muda juga perlu dibekali pendidikan yang mampu membentuk karakter ke-Indonesiaan untuk menunjang pelaksanaannya.

Landasan Yuridis yang dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan model pendidikan ini mencakup tiga landasan, yaitu: (1) Pancasila sebagai landasan ideal bangsa; (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan konstitusional; (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional.³⁹⁵

1. Pancasila

Pancasila sebagai landasan ideal bangsa. Sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila mengandung pesan nilai, moral, etika, dan rasa toleransi yang termaktub dalam sila-sila Pancasila. Sebagai Falsafah dan ideologi bangsa, maka Pancasila harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

2. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. Didalamnya mengandung muatan nilai, norma, dan etika masyarakat maupun berbangsa. Hal ini dapat dicermati dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD. Muatannya menganjurkan pentingnya keselarasan hak dan kewajiban setiap warga negara.

3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003

³⁹⁵Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), h. 206

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pendidikan nasional. Di dalamnya mengandung implikasi perlunya mendesain pembelajaran yang sesuai dengan budaya masyarakat, norma masyarakat dan kebutuhan masyarakat.

G. Pendidikan Islam Sebagai Upaya Membangun Multikultural

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI perlu mengembangkan konsep pendidikan multikultural, seperti diberlakukan dalam pendidikan sekolah dan madrasah dari tingkat SD/MI sampai dengan tingkat SLTA/MA. Desain pendidikan multikultural sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah dan madrasah serta pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstrakurikuler atau menjadi bagian kurikulum mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri dan terpadu atau terintegrasi.³⁹⁶ Peserta didik harus dibuka mata dan wawasannya untuk melihat perbedaan yang ada di sekitarnya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dan plural. Paling tidak heterogenitas dan pluralitas masyarakat dapat dilihat dari eksistensi keragaman suku, ras, keyakinan agama dan budaya. Inilah realitas bangsa multikultural dan multireligius. Kekayaan ini harus dijaga menjadi keragaman dibawah semangat kebersamaan dan bukan penyatuan.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan instrumen pendidikan yang mampu mengarahkan kemajemukan ini. Pendidikan multikultural adalah satu jawaban karena pendidikan multikultural merupakan ranah yang strategis untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Pendidikan multikultural merupakan wahana paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme serta sebagai satu media penting yang dapat membentuk corak pandangan hidup seseorang atau masyarakat. Selain itu, lembaga pendidikan dapat membentuk manusia yang cerdas, bermoral, memiliki semangat hidup dan memiliki semangat mengembangkan ilmu dan teknologi

³⁹⁶Hujar AH. Sanaky, *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 204

guna membangun bangsanya. Pendidikan multikultural merupakan bagian pendidikan nasional mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya.³⁹⁷

Pendidikan Islam sebagai upaya membangun multikultural saat ini harus mampu mengembangkan nilai-nilai multikultural yang memang sudah terkandung dalam ajaran Islam.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islam:³⁹⁸

1. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman. Dengan demikian, diharapkan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keragaman yang ada.
2. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman dan kesadaran peserta didik terhadap realitas yang pluralis multikultural. Hal ini penting dilakukan karena tanpa adanya usaha secara sistematis, realitas keragaman nantinya dipahami secara sporadis, fragmentaris, atau bahkan memunculkan eksklusivitas yang ekstrem.
3. Pendidikan Islam tidak memaksa atau menolak peserta didik karena persoalan identitas suku, agama, ras atau golongan. Mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan secara setara, egaliter dan diberikan medium yang tepat untuk mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. Masing-masing masing-masing peserta didik memiliki posisi yang setara dan harus memperoleh perlakuan yang seragam.
4. Pendidikan Islam memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya *sense of self* kepada setiap anak didik. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi anak didik yang berasal dari

³⁹⁷Choirul Mahfiid, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 208

³⁹⁸Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 53 - 54

kalangan ekonomi kurang beruntung, atau kelompok yang relatif terisolasi.³⁹⁹

Pendidikan agama memang masih banyak menuai kritik. Penyebabnya adalah kegagalan pendidikan agama. Seperti praktik pendidikannya lebih banyak memperhatikan aspek kognitif dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan kurang pembinaan aspek afektif dan *konatif volutif*, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Pendidikan agama dalam praktiknya berubah menjadi pengajaran agama, sehingga peserta didik tidak mampu membentuk pribadi-pribadi Islami. Pendidikan agama lebih mengutamakan pengajaran agama daripada pendidikan moral. Padahal intisari pendidikan agama justru terletak pada pendidikan moral tersebut.

Berkaitan dengan tantangan modernitas yang kian kompleks, terutama dengan pluralitas dan multikulturalitas, selain langkah-langkah tersebut, perlu dilakukan beberapa hal:⁴⁰⁰

Pertama, selain memberi uraian tentang ilmu-ilmu keislaman klasik, peserta didik perlu diperkenalkan dengan persoalan-persoalan modernitas yang arnat kompleks seperti yang dihadapi umat Islam sekarang ini dalam hidup keseharian mereka.

Kedua, pengajaran ilmu-ilmu keislaman tidak seharusnya selalu bersifat doktrinal, melainkan perlu dikedepankan uraian dimensi histories dari doktrin-doktrin keagamaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat melatih para peserta didik untuk merumuskan ulang pokok-pokok rumusan realisasi agama yang sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman serta mereka dapat mencari jalan keluar (*problem solving*) sesuai dengan nilai-nilai keagamaan Islam yang meraka yakini.

Ketiga, pengajaran yang dulunya hanya bertumpu pada teks (*nash*) perlu diimbangi dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas terhadap konteks

³⁹⁹Choirul Mahfiid, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 208

⁴⁰⁰M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), h. 78-81.

dan realitas, mengingat bahwa nash itu terbatas, sedangkan kejadian-kejadian yang dialami manusia selalu berkembang.

Keempat, penekanan pada aspek kognitif anak harus diimbangi dengan aspek afektif dan psikomotorik. Penghayatan dan internalisasi budi pekerti dan akhlak batiniah yang bernuansa penghayatan tasawuf merupakan sebuah metode pendidikan dan pengajaran yang lebih menekankan pada kematangan dan kedewasaan berpikir dan berperilaku, seperti penanaman sifat rendah hati, kesabaran, toleransi, tenggang rasa, kepuasan batiniah, cara berfikir yang matang dan seterusnya.

Kelima, pendidikan agama Islam era modernitas tidak lagi memadai jika hanya terfokus pada pembentukan moralitas individual yang saleh, namun kurang begitu peka terhadap, *moralitas public*. Moralitas publik sangat terkait dengan realitas struktur sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya yang mempunyai logika kepentingan sendiri-sendiri. Pendidikan Islam perlu memasuki diskursus moralitas publik, lantaran sumber kejahatan moral tidak lagi hanya dari individu-individu, melainkan telah bergeser ke struktur jaringan yang sangat kompleks.

Oleh karenanya pelaksanaan pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan *out put* yang memiliki kesalehan individual juga kesalehan social sebagai modal utama dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompleks dengan kondisi masyarakat yang multikultural dan multireligius. Terbentuknya anak didik yang memiliki cakrawala pandang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, memiliki sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda serta jauh dari sikap stereotip, egoistik, individualistik, dan eksklusif akan menciptakan suasana masyarakat yang bermoral, toleran, damai dan harmonis.

H. Kesimpulan

Pendidikan multikultural di Indonesia menjadi sangat urgen karena masyarakatnya terdiri atas berbagai macam ras, suku budaya, bangsa dan keyakinan agama, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragama inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam

konflik. Melalui pendidikan multikultural yang memperkenalkan budaya asli kepada peserta didik diharapkan peserta didik tidak melupakan asal budayanya sendiri. Pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan formal saja, melainkan dipelajari masyarakat luas, secara non formal melalui berbagai macam diskusi, presentasi dan konferensi agar terciptanya masyarakat Indonesia yang tenteram, damai dan harmonis.

I. Saran

Peserta didik yang memiliki cakrawala pandang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, memiliki sikap simpatik, respect, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda, sehingga terciptanya suasana masyarakat yang bermoral, toleran, damai dan harmonis. Dengan demikian penulis dapat menyarankan jika ingin pendidikan multikultural di Indonesia baik, maka tingkatkan pemahaman tentang urgensi pendidikan multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. Amin. (2005). *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP.
- Abudin Nata. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ahmad Taufiq dan Muhammad Rohmadi. (2011). *Pendidikan Agama Islam*, Surakarta: YUMA Pressindo
- Alexander, M. Corrigan, A. Gorski, L. Hankins, J. & Perruca, R. (2010). *Infusion Nursing Society, Infusion Nursing: An evidence Based Approach*. Third Edition. St. Louis: Dauders Elsevier.
- Ali Maksum. (2011). *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing
- Anderson, L. Krathwohl. (2010). *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Aessmen Revisi Taksonomi Bloom*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardi Widodo Sembodo. (2003). *Kajian Fhosofis Pendidikan Barat dan Islam*. Jakarta: Nimas Multima.

- Aziz Abd. (2010). *Orientasi Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Teras.
- Azra Azyumardi. (2007). *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Badwaik RT, Mahajan HM, Borkar AS, Honrao R, Chopade SS. (2015). *A Drug Utilization Study of Antiepileptic Drugs Use in a Tertiary Care Hospital of Central India*. India: J Cont Med A Dent.
- Basuki dan Miftahul Ulum. (2007) *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Ponorogo: STAIN Po PRESS
- Choirul Mahfiid. (2006). *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dodi S. Truna. (2010). *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural*., Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Donny Gahral Adian. (2011). *Reasoning in a multicultural society*, Wacana Vol. 13 No.2.
- Erlan Muliadi. (2012). *Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Islam. Volume I, Nomor 1.
- Fay, Brian. (1996). *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.
- Freire, Paulo. (2000). *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S.
- Hernandez, Hilda. (2002). *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*. New Jersey & Ohio: Prentice Hall.
- Gahral Adian, Donny. (2011). *Reasoning in a multicultural society*. Wacana Vol. 13 No.2 Oktober 2011
- Hasyim Umar. (1991). *Toleransi dan kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: FT. Bina Ilmu.
- Hujar AH. Sanaky. (2016). *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Ismail Faisal. (1999). *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Munib, Achmad. (2009). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.

- Muliadi Erlan. (2012). *Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Islam Volume I.
- Nata Abudin. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi. (2008). *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Paulo Freire. (2000). *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S.
- Ruslani. (2000). *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, Yogyakarta: Bentang.
- S. Truna Dodi. (2010). *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sembodo Ardi Widodo. (2003). *Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam*, Jakarta: Nimas Multima.
- Tholhah Hasan Muhammad. (2005) *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan. (2013). *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Zubaedi (2006). *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan. (2013). *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

BAB XI

DIMENSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

A. Pendahuluan

Multikultural sangat penting untuk dibahas karena multikultural dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang penyebaran kedamaian dalam kehidupan manusia, serta berupaya mengatasi masalah kerukunan umat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam jenis kelamin, suku bangsa, Bahasa dan keyakinan agama. Islam adalah agama yang sempurna dan jalan menuju keselamatan manusia. Kemajemukan merupakan *sunatullah* yang meski terjadi, seperti adanya langit dan bumi. Pengingkaran atas kemajemukan berarti pembangkangan atas kehendak-Nya.⁴⁰¹ Islam bersama Rasulullah SAW sebagai *Rahmatan lil'Alamin* merupakan pondasi dalam pendidikan yang mengajarkan perdamaian dan resolusi konflik dalam pendidikan multikultural di Indonesia.

Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan menghargai perbedaan, sehingga perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan.⁴⁰² Sikap saling toleransi inilah yang nantinya menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Sejatinya keragaman ini menjadi alat perekat harmonisasi bangunan kebersamaan antar sesama. Dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik etnis, agama, budaya, maupun orientasi politik, diharapkan dapat mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di belakang hari.⁴⁰³ Namun, faktanya perbedaan SARA seringkali memicu timbulnya sebuah konflik dan ketegangan, seperti konflik Ambon Maluku (1999 s/d 2002), dipicu oleh konflik interpersonal meluas menjadi konflik etnis religius dan mengakibatkan hancurnya tatanan sosial, ekonomi dan politik. Kemudian pada tahun 2012

⁴⁰¹Said Aqil Siradj. *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*. (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 203

⁴⁰²M. Amin Abdullah. *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. (Jakarta: PSAP, 2005), h. 78-81.

⁴⁰³Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Ptistaka Pelajar, 2006), h. 65

terjadi konflik di Lampung Selatan, mengakibatkan menewaskan sejumlah orang dan ribuan orang lainnya harus mengungsi. Konflik ini dipicu karena kesalahpahaman antara dua kelompok warga yang berbeda.

Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan menghormati perbedaan, setiap peradaban, dan kebudayaan berada pada posisi sejajar, tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan lain, anggapan kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain, melahirkan *fasisme, nativisme* dan *chauvinism*.⁴⁰⁴ Pendidikan multikultural diharapkan dapat memperkaya kebudayaan atau peradaban, sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, harmonis, dan saling menghargai perbedaan. Berkaitan implementasi program guru yang respon terhadap perbedaan peserta didik, yaitu: (1) dimensi integrasi isi/materi atau *content integration*; (2) dimensi konstruksi pengetahuan atau *knowledge construction*; (3) dimensi pengurangan prasangka atau *prejudice reduction*; (4) dimensi pendidikan yang sama/adil atau *equitable pedagogy*; dan (5) dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial atau *empowering school culture and social structure*.⁴⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut berkenaan dengan dimensi dalam pendidikan Islam multikultural, yaitu definisi pendidikan Islam multikultural, dimensi dalam pendidikan Islam multikultural dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Dimensi Pendidikan Islam Multikultural

Indonesia merupakan negara dan bangsa yang menganut keanekaragaman agama. Terdapat enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Indonesia memperkenalkan slogan Bhinneka Tunggal Ika untuk menunjukkan

⁴⁰⁴Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011), h. 206

⁴⁰⁵Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam* Addin, Vol.7, No.1, Februari 2013, h.143

keragaman suku, ras, dan agama.⁴⁰⁶ Bahkan prinsip keagamaan terdapat dalam Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendidikan agama Islam berbasis multikultural merupakan sesuatu hal yang sangat relevan. Jika ingin mengaitkan multikulturalisme dengan agama, maka haruslah terlebih dahulu memahami agama dan relevansinya dengan realitas multikultural.⁴⁰⁷ Pendidikan multikultural merupakan usaha edukatif yang diarahkan untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada para peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai dan ideologi.⁴⁰⁸

James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan ide, gagasan, gerakan, pembaharuan pendidikan. Rangkaian penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam kehidupan, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok dan negara.⁴⁰⁹

Sangkot Sirait menyebutkan pendidikan Islam multikultural sebagai sistem pengajaran yang lebih memusatkan perhatian kepada ide-ide dasar Islam yang membicarakan betapa pentingnya memahami dan menghormati budaya dan agama orang lain.⁴¹⁰ Pendidikan Islam multikultural sebagai proses pendidikan yang berprinsip pada demokrasi, kesetaraan dan keadilan, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian, serta mengembangkan sikap mengakui, menerima dan menghargai keragaman berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁴¹¹

Secara normatif, Al-Qur'an menegaskan manusia diciptakan dengan latar belakang yang beragam. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat

⁴⁰⁶ Lasijan. *Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Jurnal TAPI. 10. 2. 2014, h. 128

⁴⁰⁷ Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014), h. 60.

⁴⁰⁸ Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h.29

⁴⁰⁹ Yaya Suryana dan A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.196

⁴¹⁰ Sangkot Sirait, *Antologi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), h. 169

⁴¹¹ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.19

13 dijelaskan, Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Allah SWT jadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah SWT ialah manusia yang paling bertakwa.⁴¹²

C. Dimensi Pendidikan Multikultural Menurut James Banks

James Banks menjelaskan pendidikan multikultural memiliki lima dimensi berkaitan membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan peserta didik, yaitu: (1) dimensi integrasi isi/materi atau *content integration*; (2) dimensi konstruksi pengetahuan atau *knowledge construction*; (3) dimensi pengurangan prasangka atau *prejudice reduction*; (4) dimensi pendidikan yang sama/adil atau *equitable pedagogy*; dan (5) dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial atau *empowering school culture and social structure*.⁴¹³

1. Integrasi isi/materi atau *content integration*

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum, melalui pendekatan umum seperti para guru bekerja ke dalam kurikulum dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Rancangan dan unit pembelajarannya tidak diubah. Akan tetapi guru menambah topik secara khusus, berkaitan dengan materi multikultural.⁴¹⁴

2. Konstruksi pengetahuan atau *knowledge construction*

Suatu dimensi, para guru membantu peserta didik untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki dengan menggabungkan antara

⁴¹²Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS Al-Hujurat ayat 13

⁴¹³Rustam Ibrahim, *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam* Addin, Vol.7, No.1, Februari 2013, h.143

⁴¹⁴Rustam Ibrahim, *Ibid.*, h.143

pemahaman para peserta didik terhadap perubahan perkembangan pengetahuan mereka sendiri.

3. Pengurangan prasangka atau *prejudice reduction*

Seorang guru berusaha membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Contoh, ketika peserta didik masuk sekolah dengan perilaku negatif atau memiliki kesalahpahaman terhadap perbedaan ras atau etnik kelompok lainnya, maka pendidikan multikultural dapat membantu peserta didik mengembangkan perilaku *intergroup* yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mantap dan pasti. Mengembangkan citra positif tentang perbedaan kebudayaan secara konsisten dan terus-menerus sehingga peserta didik terhindar dari perilaku negative terhadap ras, etnik yang berbeda dengan mereka.

4. Pendidikan yang adil atau *equitable pedagogy*

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar terhadap sejumlah peserta didik dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas pembelajaran dapat digunakan sebagai upaya memberlakukan peserta didik secara adil, dalam bentuk kerjasama atau *cooperative learning* dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif atau *competition learning*. Pendidikan multikultural dikembangkan untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, gender dan peserta didik dengan berkebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang sederajat dalam memperoleh pengalaman pendidikan dan prestasi akademis.

5. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*)

Memberdayakan budaya peserta didik yang berasal dari kelompok budaya yang berbeda dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial sekolah dengan memanfaatkan potensi budaya peserta didik yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

D. Dimensi Pendidikan Multikultural Menurut Sunarto

Sunarto menyebutkan pendidikan Islam multikultural memiliki beberapa dimensi sebagai berikut: (1) pendidikan multikultural berawal dari ketuhanan dan berkembangnya gagasan multikultural; (2) pendidikan multikultural mengajarkan ajaran agama tentang toleransi; (3) pendidikan multikultural mengajarkan ajaran agama tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat; (4) pendidikan multikultural mengajarkan ajaran agama tentang keadilan.⁴¹⁵

1. Pendidikan multikultural berawal dari ketuhanan dan berkembangnya gagasan multikultural

Dimensi ketuhanan maksudnya sumber dan tujuan peradaban dunia adalah ketuhanan. Agama berisikan ajaran tentang kebenaran yang tertinggi dan mutlak, eksistensi manusia dan petunjuk kehidupan, selamat di dunia dan di akhirat, yakni sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, beradab dan manusiawi, memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan makhluk lainnya.⁴¹⁶ Agama sebagai keyakinan anggota masyarakat, dapat menjadi bagian sistem nilai menjadi pendorong dalam berperilaku sesuai nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya masing-masing. Keberagaman yang dianggap relevan sesama pemeluk agama sebagai berikut; (1) agama sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia, arah dan tujuan hidup manusia; (2) agama sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kehidupan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Agama juga mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat.

2. Dimensi ajaran agama tentang toleransi

Toleransi sebagai sikap menenggang rasa (menghargai, membolehkan) berbeda agama, kepercayaan, pendirian dan pendapat dengan diri individu, poin pentingnya, yaitu sebagai berikut. (a) Tenggang rasa, artinya

⁴¹⁵Sunarto. *Sistem Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural*. Jurnal Al-Tadzkiyah. Vol. 8. No. 2, 2017, h. 216.

⁴¹⁶https://www.academia.edu/38608087/PENDIDIKAN_AGAMA_ISLAM_DAN_MULTIKULTURALISME.docx. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019

menghormati pilihan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. (b) Kesadaran, artinya sikap sadar diri individu dalam memahami, menghargai dan menjalankan agama yang diyakininya serta sikap sadar dalam mengakui adanya keragaman keyakinan agama orang lain. Alex R. Rodger menyebutkan pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan paham toleransi. Pendidikan agama adalah sebagai wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar keyakinan agama di dalam proses pendidikan dan secara khusus mempertanyakan adanya bagian dari pendidikan dalam masyarakat.⁴¹⁷

3. Dimensi ajaran agama tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat

Musyawarah dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi antar sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan bermartabat. Aspek-aspeknya adalah: (1) mengutamakan kepentingan bersama, artinya sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bersama tanpa dibatasi unsur-unsur keragaman budaya; (2) mengutamakan musyawarah dan mufakat, artinya sikap yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan bersama; (3) kekerabatan artinya sikap bersahabat, kekeluargaan, rasa persaudaraan dan menjadi bagian dari kelompok masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai berikut; (1) bersumber pada Pancasila; (2) setiap keputusan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; (3) setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam musyawarah; (4) setiap keputusan harus dilaksanakan semua orang; (5) jika mufakat tidak tercapai,

⁴¹⁷Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014), h.65

maka dilakukan voting.⁴¹⁸ Uraian di atas merupakan penjelasan tentang prinsip musyawarah untuk mufakat secara lebih baik yang menjadi prinsip dalam musyawarah.

4. Dimensi ajaran agama tentang keadilan

Pendidikan multikultural membantu peserta didik supaya mengerti, menerima, dan menghargai orang lain dari suku, budaya, dan nilai berbeda. Peserta didik perlu diajak melihat nilai budaya lain sehingga mengerti secara dalam, sehingga akhirnya dapat menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara-cara yang mendidik.⁴¹⁹

Pengakuan terhadap multikultural merupakan proses suatu kondisi berupaya mengurangi batas atau sekat, sehingga mewujudkan suasana yang penuh persahabatan dan perdamaian saling toleransi, sehingga dapat membentuk sikap empati terhadap orang lain serta memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia, merasa sederajat dalam hubungan sosial dan anti terhadap diskriminasi.⁴²⁰

E. Kesimpulan

Dimensi yang terkandung dalam pendidikan multikultural adalah dimensi integrasi isi/materi atau *content integration*, dimensi konstruksi pengetahuan atau *knowledge construction*, dimensi pengurangan prasangka atau *prejudice reduction*, dimensi pendidikan yang sama/adil atau *equitable pedagogy* dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial atau *empowering school culture and social structure*. Pendidikan Islam multikultural memiliki beberapa dimensi, yaitu pendidikan Islam multikultural berawal dari Ketuhanan dan berkembangnya gagasan multikultural, pendidikan Islam multikultural mengajarkan ajaran agama tentang toleransi, pendidikan Islam

⁴¹⁸Mahfud, C., *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁴¹⁹Sunarto, *Sistem Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural*. Jurnal Al-Tadzkiyah. Vol. 8. No. 2, 2017, h. 216.

⁴²⁰Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural* (Jakarta: PT. Rajawal Press, 2014), h.65

multikultural mengajarkan ajaran agama tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan pendidikan Islam multikultural mengajarkan ajaran agama tentang keadilan.

F. Saran

Peserta didik diharapkan setelah memahami tentang dimensi pendidikan Islam multikultural memiliki sikap dan perilaku dewasa penuh persahabatan, hidup damai, tenteram dan harmonis. Dengan demikian jika ingin peserta didik lebih paham tentang pendidikan Islam multikultural dan diterapkan di masyarakat dengan baik, maka tingkatkan pemahaman dimensi pendidikan Islam multikultural kepada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aly. (2011). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren, Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alma, Buchari. (2009). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Maksum. (2011). *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Harto, Kasinyo. (2012). *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harto, Kasinyo. (2014). *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*. Jakarta: PT. Rajawal Press
- Ibrahim, Rustam. (2013). *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*. Addin, Vol.7, No.1.
- Langgulang, Hasan. (2000). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Al Husna Zikra
- M. Amin Abdullah. (2005). *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP.
- Mahfud, Choirul. (2009). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mujid, Abdul. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam, Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Noer Aly, Hery. (1999). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Rustam Ibrahim. (2013). *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam Addin*, Vol. 7, No.1.
- Sangkot Sirait. (2010). *Antologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Idea Press.
- Siradj, Said Aqil. (1999). *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Sirait, Sangkot. (2010). *Antologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Idea Press.
- Suryana, Yaya dan A. Rusdiana. (2015). *Pendidikan Multikultural*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tobroni. (2008). *Pendidikan Islam Paradigma Teologis*. Malang: UMM Press.

BAB XII PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa yang memiliki aneka suku, agama, ras, dan bahasa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Badan Pusat Statistik menyatakan angka 1.340 suku bangsa. Dengan kondisi yang begitu beragam, jalinan kebangsaan Indonesia sangat beragam. Indonesia telah berhasil menyatukan 1340 suku, tersebar di 17000 pulau, memiliki agama, adat dan bahasa yang berbeda di bawah naungan satu nama Indonesia.⁴²¹

Indonesia memiliki struktur budaya yang beragam dan unik di setiap wilayah. Perbedaan ini terlihat dari perbedaan agama, bahasa, adat istiadat dan tipe kesenian. Suatu masyarakat dikatakan multikultural, jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan tersebut antara lain struktur budaya berakar pada perbedaan standar nilai, ras, suku dan agama, keragaman ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka dan postur tubuh serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.⁴²²

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur, tetapi kadang tidak disikapi dengan cukup baik oleh masyarakat. Terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa kebudayaan yang beragam merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat malah cenderung menutup diri dan kurang menghargai budaya masyarakat lain. Multikulturalisme telah memunculkan rasa harga diri dari suatu kelompok di dalam masyarakat. Rasa harga diri merupakan paham *tribalisme* seperti hak suatu kelompok untuk diakui keberadaannya dalam mengembangkan kebudayaannya. Jika rasa harga diri tumbuh tanpa disertai kesadaran untuk

⁴²¹Data BPS Tahun 2015

⁴²²Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke, *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, h. 18

saling bertoleransi, maka pada akhirnya muncul berbagai masalah sosial dalam masyarakat.

Permasalahan konkret yang muncul karena keragaman budaya dan latar belakang sosial masyarakat dapat kita lihat pada berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Contoh, konflik disertai aksi kekerasan yang terjadi di Ambon Maluku tahun 1999-2002. Konflik yang dipicu oleh konflik interpersonal meluas menjadi konflik etnis religius dan menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik Ambon Maluku. Kemudian konflik di Lampung Selatan yang terjadi pada tahun 2012 dipicu karena kesalahpahaman antara kelompok warga masyarakat. Konflik sosial mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia dan memerlukan upaya penyelesaian yang tepat, seperti konflik sektarian antara Sunni dan Syi'ah. Gambaran kasus-kasus kerusuhan dan pertikaian etnis yang sering terjadi di negeri ini menegaskan kembali bahwa pluralitas budaya masyarakat Indonesia merupakan persoalan krusial yang perlu dikelola secara serius, sistematis, dan kontinyu dengan menilik pada akar persoalan.⁴²³

Pengelolaan pluralitas atau multikulturalisme perlu dikembangkan sebagai suatu kesadaran tentang multikulturalisme di dalam masyarakat. Dengan memiliki kesadaran multikultural, diharapkan nantinya masyarakat mampu menerapkan sikap-sikap yang mendukung pada multikulturalisme seperti saling menghargai budaya lain, toleransi, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap golongan masyarakat tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahas bab ini dengan judul problematika pendidikan multikultural di Indonesia sebagai berikut; keragaman identitas budaya daerah, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah, kurang kokohnya nasionalisme, fanatisme sempit, konflik kesatuan nasional dan multikultural, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, keberpihakan media massa khususnya televisi swasta, problem penyakit

⁴²³Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke, *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1, 2017, h. 18

budaya, problema pembelajaran pendidikan multikultural, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

B. Keragaman Identitas Budaya Daerah

Keragaman budaya menjadi modal, sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah ikut memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal berharga dalam membangun Indonesia yang multikultural. Sesuai manfaat keberagaman budaya sebagai berikut; (1) *promotes* nilai-nilai kemanusiaan; (2) *improve* produktivitas dan profitabilitas; (3) *help* untuk membuat kolam bakat; (4) *exchange* ide-ide inovatif; dan *other* manfaat keanekaragaman.⁴²⁴

1. *Promotes* nilai-nilai kemanusiaan

Maksudnya suatu organisasi mengakui dan merayakan serta memperingati keragaman yang berbeda, sehingga orang-orang dalam organisasi berfikir, nilai dan kontribusi mereka layak direalisasikan oleh organisasi dan manajemen.

2. *Improve* produktivitas dan profitabilitas

Maksudnya keragaman budaya bisa membawa manfaat nyata bagi bidang bisnis di seluruh dunia. Persuasi aktif dalam keberagaman di tempat kerja, dampak produktivitas, dan profitabilitas organisasi serta karyawan, terdapat peningkatan produktivitas pekerjaan dan profitabilitas untuk organisasi.

3. *Help* untuk membuat kolam bakat

Maksudnya menjadikan organisasi dengan keunggulan kompetitif, membantu dalam kemajuan, dan dalam lingkungan yang besar serta kompetitif.

4. *Exchange* ide-ide inovatif

Maksudnya sebuah organisasi terdiri atas orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda budaya, dan pengalaman, ide-ide kreatif dan inovatif baru menopang dalam pikiran orang yang berbeda. Pertukaran ide dinamis

⁴²⁴Kymlicka, W. & Banting, K., *Multiculturalism and the Welfare State Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*, (New York: Oxford University Press, 2006)

seperti yang terjadi antara orang yang memiliki persepsi yang berbeda menghasilkan hasil yang kreatif, situasi seperti ini pernah dibuat dalam kelompok orang yang berfikir sejenis dan mempunyai budaya yang serupa,

5. *other* manfaat keanekaragaman

Maksudnya mempromosikan keragaman budaya dapat mengurangi tingkat ketidakhadiran. Perputaran karyawan yang lebih rendah, mengurangi biaya yang ada kaitannya dengan perekrutan karyawan baru, serta mengurangi tanggungjawab hukum dalam gugatan diskriminasi.⁴²⁵ Dalam dunia persaingan keragaman budaya mempunyai banyak manfaat.

Keragaman suku bangsa di Indonesia menurut Van Vollenhoven yang membagi Indonesia ke dalam 19 daerah suku bangsa, yaitu: (1) Aceh, Gayo-Alas; (2) Bangka dan Belitung; (3) Bali dan Lombok; (4) Gorontalo; (4) Melayu; (5) Minangkabau, Mentawai; (6) Kalimantan; (7) Minahasa; (8) Ambon; (9) Jawa Barat; (10) Sulawesi Selatan; (12) Ternate; (13) Sumatra Selatan; (14) Irian; (15) Timor; (16) Batak; (17) Jawa Tengah dan Jawa Timur; (18) Surakarta dan Yogyakarta; dan (19) Toraja.⁴²⁶

Keragaman bahasa di Indonesia menurut Gorys Keraf, sebagai berikut; (1) bahasa Austronesia Barat atau bahasa Indonesia Melayu meliputi: bahasa hesperonesia (Indonesia bagian barat) meliputi: bahasa Minahasa, Aceh, Batak, gayo, Minangkabau, Melayu, Lampung, Melayu Tengah, Bima, Mentawai, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bali Sasak, Gorontalo, Toraja, Bugis Makasar, Manggarai, Nias, Sumba, Sabu. Bahasa Indonesia Timur meliputi: bahasa Timor Ambon, Sula Bacan, Halmahera Selatan Irian Barat; (2) Bahasa Austronesia Bagian Timur/Polinesia meliputi: bahasa Melanesia (Melanesia dan Pantai bagian Timur Irian). Melanesia (bahasa Yunani pulau hitam) yaitu sebuah wilayah yang memanjang dari Pasifik Barat

⁴²⁵Kymlicka, W. & Banting, K., *Multiculturalism and the Welfare State Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*, (New York: Oxford University Press, 2006)

⁴²⁶ Van Vollenhoven, cetakan kedua 1987, *Penemuan Hukum*, Djembatan, 1987, Baca Juga: Hollewan, JF., *Van Vollenhoven of Indonesian Adat Law: Selection From Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, (Vol 1, 1918: Vol II , 1931), M Nijhoff, The Hague, 1981, Baca Juga: Ihromi, TO., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2006).

hingga ke Laut Arafura, timur dan utara laut Australia; (3) Bahasa Heonesia (bahasa Mokronesia dan Polinesia).⁴²⁷

Keberagaman seni dan budaya. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Seperti wujud keberagaman itu adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni drama, seni musik, seni suara, dan seni rupa. Namun, kondisi keragaman budaya sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Komunikasi dan pemahaman yang terputus pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik. Konflik-konflik yang terjadi selama ini di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras, misalnya Peristiwa Sampit. Keragaman ini dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan isu yang memancing persoalan.⁴²⁸

Gagasan menarik diangkat untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun benteng saling pengertian adalah dengan multikulturalisme dan sikap toleransi serta empati antarbudaya. Multikulturalisme mengajak masyarakat menerima realitas keberagaman dengan kaca mata kesederajatan dalam kehidupan menyangkut nilai-nilai, sistem, kebiasaan, budaya, dan politik yang mereka anut. Masyarakat diminta melihat dan menyikapi perbedaan. Multikulturalisme menghimbau tidak boleh ada diskriminasi terhadap suatu komunitas suku tertentu, karena hal itu menjadi benih perpecahan dan konflik. Sehingga setiap suku bangsa bahu-membahu membangun peradaban bangsanya ke arah yang lebih baik. Sikap toleran dan empati sangat penting untuk ditumbuhkembangkan di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia.

⁴²⁷ Keraf, Gorys, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores: Nusa Indah, 2004), Baca Juga: Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Baca Juga: Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Baca Juga: Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, (Jakarta: Gramedia, 2010),

⁴²⁸ Setiawan, Nurkholis dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010).

Cara berpikir seperti ini membawa masyarakat pada tindakan dan sikap toleran, rukun, damai, saling menghargai, sehingga tidak memperuncing perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tetapi mencari nilai-nilai universal yang dapat mempersatukan masyarakat, bangsa dan negara.

C. Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah

Era reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Seperti persoalan budaya. Terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya.⁴²⁹ Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa, tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Jika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan, termasuk di dalamnya isu kedaerahan.

Konsep putra daerah menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan merupakan tuntutan pemerataan kemampuan, namun tidak perlu diungkapkan menjadi sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya tentu adalah adanya asas kesetaraan dan persamaan. Namun, jika isu ini terus menerus dihembuskan justru membuat orang terkotak oleh isu kedaerahan yang sempit. Orang mudah tersulut oleh isu kedaerahan. Faktor pribadi (iri, keinginan memperoleh jabatan) dapat berubah menjadi isu publik yang

⁴²⁹UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. Baca Juga UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839). Pada tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437). Baca Juga: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844).

destruktif, jika persoalan tersebut muncul di antara putra daerah dan pendatang.

Konsep pembagian wilayah yang menjadi provinsi atau kabupaten baru yang marak terjadi akhir-akhir ini pun, selalu ditiup-tiupkan oleh kalangan tertentu agar mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Mereka menggalang kekuatan dengan memanfaatkan isu kedaerahan tersebut. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang merasa tertindas dan kurang beruntung.

D. Kurang Kokohnya Nasionalisme

Indonesia merupakan negara plural, terlihat dari sisi etnis, ras, keyakinan agama dan kepercayaan. Keragaman budaya, kebhinnekaan, atau multikulturalisme merupakan realitas dalam masyarakat, kebudayaan masa silam, masa kini dan masa mendatang. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan suatu bangsa, negara dan masyarakat terhadap keberagaman dan kemajemukan dalam masyarakat.⁴³⁰

Keragaman budaya membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan (*integrating force*) seluruh pluralitas negeri ini. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku, bangsa, atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Konsep multikulturalisme sebetulnya bukan hal baru di Indonesia, karena kesadaran multikultur sudah muncul sejak benih Indonesia mulai tumbuh pada masa kebangkitan nasional. Sebagai unsur pemersatu bangsa Indonesia adalah negara dan Pancasila yang merupakan titik puncak kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia.⁴³¹

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi dan berfungsi sebagai *integrating force*. Saat ini Pancasila kurang mendapat

⁴³⁰Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*, (Jakarta: PT. Rajawal Press, 2014).

⁴³¹Liliweri, Alo. *Prasangka&Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta: PT LKiS, 2005).

perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan makin semarak. Persepsi sederhana dan keliru, banyak orang menyamakan antara Pancasila dengan ideologi orde baru kemudian beranggapan harus ditinggalkan. Seharusnya tidak semua hal yang ada pada masa orde baru itu jelek, demikian juga tidak semuanya baik.⁴³² Nilai nasionalisme perlu ditegakkan, dengan cara-cara yang edukatif, persuasif dan manusiawi bukan dengan pengerahan kekuatan. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa, sejarah telah mencatat peranan pancasila dalam menyatukan berbagai daerah di tanah air. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan semangat nasionalisme untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Isu globalisasi atau persaingan global merupakan penyebab goyahnya nasionalisme di Indonesia saat ini, diantaranya masuk dan berkembangnya pemikiran liberal dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Era globalisasi masyarakat berlomba-lomba berkiblat pada dunia barat sehingga kecintaan terhadap produk dalam negeri mulai hilang, dengan semakin banyaknya produk asing seperti Kentucky fried chicken (KFC), Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut membanjiri Indonesia. Membeli produk luar negeri mereka menganggap suatu kebanggaan dan menaikkan prestise di hadapan masyarakat,⁴³³ Kebudayaan luar ke suatu daerah, cenderung merusak tatanan hidup masyarakat yang telah terikat dengan nilai-nilai luhur religiutas, sehingga menyebabkan kekhawatiran tercabutnya akar-akar tatanan sosial masyarakat madani,⁴³⁴ mengakibatkan generasi penerus menjadi lupa dengan jati diri bangsa Indonesia, hal ini berdampak pada nasionalisme. Sehingga muncul sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga, tidak ada rasa kepedulian terhadap kehidupan kebangsaan.

⁴³²Satiman, Sudewo. *Dengan Semangat Berkobar; Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).

⁴³³Jamli, Edison, dkk., *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

⁴³⁴Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 14.

Nilai nasionalisme saat ini berada pada titik nadir karena semua kebijakan berkiblat pada neoliberalisme, sehingga kesejahteraan rakyat jauh dari cita-cita pendiri bangsa. Moralitas bangsa Indonesia mencapai titik kulminasi terendah.⁴³⁵Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya, bahkan lebih ironisnya telah menjadi mata pencaharian, sebagai tambahan pendapatan untuk biaya hidup yang membumbung tinggi. Sedangkan bagi yang sudah hidup layak, korupsi merupakan bagian dari kekuasaan, sehingga mengakibatkan kepada kurang kokohnya nasionalisme bangsa Indonesia.

E. Fanatisme Sempit

Fanatisme penting jika dikaitkan dengan konteks keagamaan maupun konteks praktik kenegaraan. Jika masyarakat tidak memiliki fanatisme tersebut, maka masyarakat dapat dikatakan tidak punya jati diri. Menurut bahasa (etimologi), fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang berarti dasar, sedangkan menurut istilah (terminology)-nya,

Fanatisme sempit merupakan fundamentalisme atau aliran pemikiran yang sempit, cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid (kaku) dan literalis (tekstual). Selanjutnya dari gerakannya.⁴³⁶ Kaum fundamentalis muncul sebagai penyaring dan pembendung dari hancurnya norma-norma agama⁴³⁷ Fundamentalisme berlebihan dari suatu golongan dapat berakibat radikalisme Karena keegoan golongan yang tidak jarang bahkan merugikan golongan yang lainnya.berikut ini adalah beberapa contoh dari fundamentalis yang berbuah fanatisme.⁴³⁸ Fanatisme tersebut hendaknya tetap membuka diri secara cermat untuk menerima paham-paham lainnya dalam kerangka berpikir kebhinnekaan. Artinya, dalam kehidupan masyarakat di dunia ini,

⁴³⁵Sutiman, Sudewo, *Dengan Semangat berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003)

⁴³⁶ William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3-4.

⁴³⁷Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 14.

⁴³⁸Karen Armstrong, *Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam)*, (Yogyakarta: IKON TERALITERA, 2002), hlm. 193.

kelompok atau golongan tertentu belum tentu lebih unggul dari kelompok atau golongan lainnya.

Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah yaitu fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknyalah yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Fanatisme sempit adalah sebuah keadaan seseorang atau kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama dan kebudayaan secara berlebihan (membabi buta), sehingga berakibat kurang baik bahkan cenderung menimbulkan perseteruan dan konflik serius.⁴³⁹

Gejala fanatisme sempit sering menimbulkan korban, seperti banyak terjadi di tanah air, yaitu gejala Bonek (bondo nekat) di kalangan suporter sepak bola. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta maka hal ini justru tidak sehat. Terjadi pelemparan terhadap pemain lawan dan pengrusakan mobil dan benda-benda yang ada di sekitar stadion, ketika tim kesayangannya kalah.⁴⁴⁰ Kecintaan dan kebanggaan pada korps memang baik dan sangat diperlukan, namun kecintaan dan kebanggaan yang berlebihan, yang ditunjukkan dengan bersikap memusuhi kelompok lain dan berperilaku menyerang kelompok lain, maka fanatisme sempit ini menjadi tidak baik.⁴⁴¹ Terjadinya perseteruan dan perkelahian antara oknum aparat kepolisian dengan oknum aparat tentara nasional Indonesia (TNI) yang kerap terjadi, merupakan contoh dari fanatisme sempit. Jika fanatisme ini berbaur dengan isu agama (misalnya di Ambon,

⁴³⁹ Ulfianti, S. (2012). Fanatisme Remaja Indonesia Pada Korean Wave. Jurnal Artikel Korean Wave. 1(1), pp 1-4.

⁴⁴⁰ Nastiti, Aulia. D. (2010). "Korean Wave" di Indonesia: Antara Budaya Pop, Internet, dan Fanatisme Pada Remaja (Studi Kasus Terhadap Situs Assian Fans Club Di Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya). Journal of Communication. 1 (1), pp1-23.

⁴⁴¹ Wijayanti, Ardiani. A. (2012). Hallyu: Youngstres Fanaticism of Korean Pop Culture (Study of Hallyu Fans Yogyakarta City). Journal of Sociology. 3 (3), pp 1-24.

Maluku dan Poso, Sulawesi Tengah),⁴⁴² maka dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa, membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

F. Konflik Kesatuan Nasional dan Multikultural

Keberagaman masyarakat Indonesia tidak hanya budaya, melainkan juga pandangan politik, keagamaan, dan etnis. Bertolak dari keberagaman tersebut, maka masalah sering terjadi seperti baru-baru ini terjadi dan belum teratasi adalah konflik pandangan cita-cita dari kelompok tertentu yang saling berebut pengaruh dan mendominasi atas pandangannya.⁴⁴³

Dahrendorf menjelaskan bahwa masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Jadi, masyarakat pada suatu kelompok saling berebut dominasi hingga perebutan otoritas.⁴⁴⁴ Konflik merupakan proses lumrah yang tidak dapat dihindari. Konflik merupakan kondisi, secara positif konflik mampu membentuk suatu struktur masyarakat yang kuat, sedangkan secara negatif konflik mampu melemahkan susunan kerangka masyarakat. Contoh konflik memiliki makna positif, yaitu konflik komunal. Konflik komunal adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan golongan pada suatu komunitas besar yang awalnya terbentuk dari sejumlah kesamaan persepsi antargolongan tersebut. Misalnya agama yang sah diakui oleh negara ada 6 macam dan kesepakatan itu sudah terwakilkan oleh berbagai agamawan, namun masih tetap terjadi konflik keagamaan meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya.⁴⁴⁵ Sehingga Indonesia sebagai suatu bangsa multikultur dengan kondisi masyarakat yang mudah terombang-ambing, ditunjang sikap berbagai golongan ingin memperebutkan posisi strategis

⁴⁴² Saad, Munawar M., *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*. (Pontianak: Kalimantan Persada Press, 2003)

⁴⁴³Hemafitria, Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPKN)*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2019, h. 1-11, Baca Juga: Najwan (2009). Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009*: 195 – 208.

⁴⁴⁴Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat*, (Jakarta. CV. Rajawali, 1986)

⁴⁴⁵ Al-qadrie, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Terj. Suaisi Asy' ari)*, (Jakarta: INIS, 2003).

dalam aspek transformasi sosial, politik, ekonomi demi mewujudkan pandangan dan cita-cita.

Cita-cita ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun, dalam penerapannya, pernah mengalami konsep stabilitas nasional dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Adanya Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengerah kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Untunglah perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Kini semua pihak yang bertikai sudah bisa didamaikan dan diajak membangun daerah secara bersama-sama.⁴⁴⁶

Di sisi multikultural, terlihat adanya upaya keinginan memisahkan diri dari kekuasaan pusat (republic Indonesia), dengan alasan pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat, contohnya muncul gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua. Namun, ada gejala ke arah penyelesaian damai dan multikultural yang terjadi akhir-akhir ini. Seorang panglima perang OPM yang menyerahkan diri dan berkomitmen terhadap negara kesatuan RI telah mendirikan Kampung Bhineka Tunggal Ika di Nabire, Irian Jaya.⁴⁴⁷

G. Kesejahteraan Ekonomi yang Tidak Merata

⁴⁴⁶Alfian, Ibrahim., *Sejarah Aceh Selayang Pandang dalam Selama Rencong adalah Tanda Mata, Aceh dalam Rentang Konflik dan Harapan di Masa Depan, Bahrul Ulum, ed.*”, (Jakarta: Koalisi NGO HAM, Banda Aceh, 2006).

⁴⁴⁷Anwar, Dewi fortuna, dkk., *Konflik kekerasan internal; tinjauan sejarah, ekonomi-politik dan kebijakan di Asia Pasifik*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2005), Baca Juga: Elisabeth, Adriana dkk., *Pemetaan peran dan kepentingan para actor dalam konflik di Papua*. (Jakarta: LIPI, 2004), Baca Juga: Fisher, Simon dkk., *Mengelola konflik*, (Jakarta: The British Council, 2000), Baca Juga: Ishak, Otto syamsuddin dkk., *Oase gagasan papua damai*, (Jakarta: Imparsial, 2012), Baca Juga: Widjojo, Muridan S., *Papua road map*, (Jakarta: LIPI, 2009).

Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang berkontribusi sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pembangunan sosial dan ekonomi di luar Pulau Jawa, khususnya Bagian Timur Indonesia mengalami ketertinggalan (seperti tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia/IPM), meskipun daerah tersebut kaya sumber daya alam.⁴⁴⁸ Bambang Brodjonegoro menyebutkan pemerataan harus menjadi *mainstream* pembangunan. Tidak lagi hanya sekadar efek samping pembangunan.⁴⁴⁹ Pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata antar wilayah merupakan satu tantangan utama pembangunan Indonesia.

Kesenjangan antar wilayah bersifat kompleks dan multisektoral, berbagai upaya perlu ditingkatkan untuk mengatasinya. Hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk.⁴⁵⁰ Dengan demikian dapat diprediksi kesenjangan semakin lebar pada masa mendatang, sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar. Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut ikut memperlemah suatu daerah.

Bambang menilai strategi yang mengedepankan pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, yaitu; *Pertama*, pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan. *Kedua*, pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan pedesaan dan kota-kota sedang. *Ketiga*, pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang

⁴⁴⁸ Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol 1: hal, 1-15

⁴⁴⁹ Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Bambang Brodjonegoro. *Memberikan sambutan pada Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Selasa (10/7) IDF 2018.* Mengusung Tema sejalan dengan agenda Nawa Cita Presiden Jokowi.

⁴⁵⁰ Fleisher B, Haizheng Li, dan Min Qiang Zhao. 2009. Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. *Journal of Development Economics*, Department of Economics, Ohio State University, Columbus, OH 43210, United States. No 17.

tertinggal yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan dan kawasan Timur Indonesia.⁴⁵¹

Ketimpangan antar wilayah memicu terjadi konflik antar wilayah. Seperti Kejadian Sampit, setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi.⁴⁵² Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi, karena seseorang mengalami tekanan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi. Ironisnya demi selembar kertas dua puluh ribu rupiah, seseorang rela ikut terlibat dalam suatu demonstrasi, sementara dia sendiri tidak mengetahui maksud dan tujuan demonstrasi tersebut.

Ketimpangan tersebut, seseorang dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis, ketika himpitan ekonomi yang mendera mereka. Mereka menumpah kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya.⁴⁵³ Terlihat dari gejala perusakan mobil-mobil mewah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung dalam berbagai peristiwa. Mobil mewah disimbolkan dengan kemewahan dan keamanan,⁴⁵⁴ sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi kelompok tertentu. Bahkan dalam kehidupan sehari-haripun sering dijumpai mobil-mobil mewah dicoreti dengan paku, ketika mobil berhenti atau diparkir di daerah tertentu, yang masyarakatnya mayoritas dari kelompok tertindas ini.

⁴⁵¹Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. ed. 4. (Yogyakarta: BPFE, 2010)

⁴⁵²Alwasilah, A.C. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008).

⁴⁵³Amalia, Euis. 2008. "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa", Makalah disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.

⁴⁵⁴Abdel-Rahman, Hesham and Ping Wang. 1996. *Social Welfare and Income Inequality in a System of Cities*. Department of Economics and Finance, University of New Orleans, New Orleans: hal. 094-119

H. Keberpilihan Media Massa, Khususnya Televisi Swasta

Media penyiaran merupakan bentuk media yang efektif dan efisien dalam mencapai audiensinya, seperti radio dan televisi. Media penyiaran memegang peranan sangat penting dalam ilmu komunikasi. ⁴⁵⁵ Saat ini televisi sebagai media komunikasi paling populer. Pada hakekatnya, media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Bermula dari ditemukannya *elecctrische telescope* sebagai perwujudan gagasan dari seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dan satu tempat ke tempat lain. Hal ini terjadi antara tahun 1883-1884. Akhirnya Nipkov diakui sebagai “bapak” televise. ⁴⁵⁶

Pertelevisian di Indonesia sendiri, mulai masuk di Indonesia (Jakarta) pada tahun 1962, bertepatan dengan “*The 4th Asian Games*”. Ketika itu Indonesia menjadi penyelenggara. Peresmian pesta olahraga tersebut bersamaan dengan peresmian penyiaran televisi oleh Presiden Soekarno, tanggal 24 Agustus 1962. Televisi yang pertama muncul adalah TVRI dengan jam siar antara 30-60 menit sehari. ⁴⁵⁷

Dunia pertelevisian di Indonesia berkembang pesat seiring dengan deregulasi pertelevisian Indonesia oleh pemerintah sejak tanggal 24 Agustus 1990 melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 111 tahun 1990, yang mengatur tata cara penyiaran di Indonesia. Hal ini terbukti dengan bermunculannya televisi-televisi swasta. Pada saat itu pemerintah mengizinkan lima saluran televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV dan Indosiar, mandiri untuk beroperasi secara nasional. ⁴⁵⁸ Dan saat ini tercatat sudah ada 10 stasiun televisi swasta nasional yang telah mengudara yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, Trans TV, Trans7, Global TV, Metro TV dan

⁴⁵⁵Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutaithir*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 13

⁴⁵⁶Kuswandi, Wawan, *Kornunikasi Massa Sebuah A na/isis Media Televisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 6

⁴⁵⁷ Kuswandi, Wawan, *Kornunikasi Massa Sebuah A na/isis Media Televisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 34

⁴⁵⁸Ishadi SK., *Dun/a Penyiaran Prospek dan Taniangan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 20

TV One. Ini masih ditambah dengan puluhan tv lokal dan tv kabel lainnya. Hal ini membuktikan bahwa televisi memang sudah menjadi barang penting di Indonesia dan menjadi media komunikasi yang paling efektif.⁴⁵⁹

Media komunikasi baik cetak maupun elektronik, tentu saja memiliki ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Terkait persoalan kebebasan pers, otonomi dan hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan.⁴⁶⁰ Perlu mewaspadaai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media, untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia.

Contoh kasus; (1) peristiwa memilukan, penggusuran gubuk liar yang ditampilkan dalam bentuk tangisan seorang anak atau orang tua, kemudian dipadukan dengan tindakan aparat yang menyeret para gelandangan, menimbulkan pemahaman berbeda bagi pemirsa. Ironi itu nampak jika yang disorot, yaitu tangisan bayi/orang tua dibandingkan. Peristiwanya adalah penggusuran gubuk liar, tetapi simbol yang digunakan berbeda. Tangisan sebagai simbol kelemahan, ketidak berdayaan dan putus asa; (2) Kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapat hukuman yang setimpal, baik dari segi hukum maupun sanksi kemasyarakatan dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan yang luhur; dan (3) Kasus perceraian rumah tangga para artis yang tiap hari diudarakan, dapat membentuk opini publik yang negatif, sehingga kesan kawin cerai di kalangan artis, menjadi budaya baru dan tren yang biasa dilakukan. Sehingga orang menjadi kurang menghormati lembaga perkawinan. Dalam hal ini media sangat mempengaruhi opini publik dalam menyorot berbagai peristiwa.⁴⁶¹

⁴⁵⁹Ishadi SK., *Dun/a Penyiaran Prospek dan Taniangan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 20

⁴⁶⁰Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Reinaja Rosdakarya, 1993). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi dengan Contoh Anal Isis Statistik*, (Bandung: PT Remaja Roasdakarya, 2001).

⁴⁶¹Kymlicka,W., *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1995).

Media sebagai sumber berita memiliki kebebasan untuk menyampaikan realitas dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan yang dimiliki media bukanlah kebebasan yang kebablasan, tetapi masih terdapat kontrol di dalamnya. Aturannya tetap ada walaupun bergeser dari dominasi negara kepada pertimbangan rasional etika moralitas, serta interaksi antar-institusi social.⁴⁶² Kebebasan pers bukan berarti boleh menyebarluaskan fitnah, kabar bohong dan kebencian, tetapi kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. Hal yang diungkap pers haruslah fakta.⁴⁶³

Menurut Ibrahim dan Akhmad, media memiliki peran sosio-kultural sebagai cermin. Media tidak mencerminkan peristiwa secara netral dan secara sempurna. Media terlebih dahulu menyeleksi materi yang dimasukkan dalam berita⁴⁶⁴ Banyak fakta menunjukkan, media tidak bisa bersikap netral atau tidak berpihak pada realitas-realitas politik yang ada, karena pemilik-pemilik media itu sendiri adalah politisi yang memerlukan pemberitaan untuk membuat mereka dikenal oleh masyarakat ataupun memperkenalkan visi-misi partai politik mereka. Keberpihakan media dalam politik di Indonesia begitu dalam sehingga sulit untuk melihat sikap netral mereka ataupun pilihan untuk tidak masuk ke ranah politik dan tetap memilih berjuang atas nama kepentingan rakyat.⁴⁶⁵

Keberpihakan berbagai sisi, tidak hanya semata-mata demi keuntungan perusahaan tetapi ada ideologi-ideologi yang disembunyikannya demi kepentingan pemilik media massa. Media massa tidak lagi memainkan peranan sebagai agen yang memproduksi dan menyebarkan informasi tetapi

⁴⁶² Subiakto, H. & Ida, R., *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

⁴⁶³ Subiakto, H. & Ida, R., *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

⁴⁶⁴ Ibrahim, I.S. & Akhmad, B.A., *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁴⁶⁵ Intan, Permata, Sari, Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014, *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 21 No. 1, Juli 2018: 73-86 ISSN: 1410-8291 | e-ISSN: 2460-0172, <http://bppkibandung.id/index.php/jpk>, DOI:10.20422/jpk.v21i1.49273.

juga sebagai aktor yang turut menentukan berita yang layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁴⁶⁶

Seperti Surya Paloh memanfaatkan media miliknya untuk mempromosikan partai yang mereka miliki, yaitu Nasional Demokrasi. Begitu pula Abu Rizal Bakrie. Politisi-politisi ini mampu menaikkan popularitas dengan mudah, karena mereka pemilik media-media besar di Indonesia. seperti pada Tahun 2014 pemilihan calon presiden, para pemilik media menetapkan pilihan politiknya, baik secara individu, pemilik media, ataupun sebagai ketua umum partai politik mereka. Seperti Abu Rizal Bakrie (ARB) yang merupakan ketua partai Golkar, pemilik media ANTV dan TV One menentukan pilihan politiknya untuk mendukung Prabowo sebagai presiden RI. Pilihan ARB, kemudian juga memengaruhi pilihan media yang dimilikinya, sehingga TV One menjadi basis terbesar media pendukung Prabowo. Begitu juga dengan Surya Paloh, pilihan politik partai politiknya (Nasional Demokrasi) menyebabkan media miliknya (Metro TV) merupakan basis terbesar media pendukung Jokowi. Media pendukung Jokowi dan media pendukung Prabowo merupakan salah satu pihak yang boleh dipersalahkan atas semua kejadian, karena media memiliki andil dan tanggung jawab besar dalam memenangkan calon pilihannya. Media tidaklah netral, mereka berpihak.⁴⁶⁷ Cara efektif dan mudah untuk menaikkan poplaritas seseorang dengan muncul di layar televisi.⁴⁶⁸ Media mampu mengubah bentuk-bentuk marketing dalam dunia politik dari langsung menjadi melalui media.⁴⁶⁹

Media online dimanfaatkan untuk membangun karakter baik bagi kedua calon pemimpin seperti Jokowi selalu dikonstruksikan sebagai sosok yang merakyat, sedangkan Prabowo selalu diberitakan sebagai sosok yang

⁴⁶⁶Junaedi, F., *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013).

⁴⁶⁷Sudibyo, A., *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2001)

⁴⁶⁸Junaedi, F., *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013).

⁴⁶⁹Utomo, W.P., Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2013, [Online] 17 (1), 67–84. Available from: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10894>.

tegas, nasionalis dan cerdas. Selain itu, berita online juga dimanfaatkan untuk menepis isu-isu yang merugikan berbagai pihak seperti pembawaan Jokowi yang merakyat adalah pencitraan semata atau kasus HAM 1998 yang kembali diungkit untuk menjatuhkan Prabowo. Media menggunakan kekuatannya untuk membentuk opini publik, sehingga mampu untuk memengaruhi kebijakan Negara.⁴⁷⁰ Media memiliki kekuatan besar. Seperti pemilik kekuasaan bukan lagi pemilik teknologi, tetapi pemilik informasi. Media memiliki kekuatan untuk mengontrol negara, meskipun di saat bersamaan bertindak sebagai wakil *public interest*.⁴⁷¹

I. Problema Penyakit Budaya

Problema bukan untuk dimusuhi, tetapi dikelola secara arif dan bijaksana. Masing-masing individu yang terlibat dalam problema perlu menjernihkan pikiran dan hati dari prasangka, *stereotype*, *etnosentrisme*, *rasisme* dan *diskriminasi* dan *scape goating* terhadap pihak lain. Pemahaman terhadap adanya penyakit budaya tersebut merupakan kunci utama dalam proses resolusi dan manajemen konflik.

Negara membutuhkan solusi yang memuaskan dalam menghadapi ancaman konflik dan separatisme di daerah-daerah yang lebih sering disebabkan oleh tumbuh berkembangnya berbagai penyakit budaya seperti prasangka, stereotype, etnosentrisme, rasisme dan diskriminasi ini. *Pertama*, prasangka. Definisi klasik prasangka pertama kali dikemukakan oleh psikolog dari Universitas Harvard, Gordon Allport yang menulis konsep itu dalam bukunya, *The Nature of Prejudice* pada tahun 1954. Istilah ini berasal dari *praejudicium*, yakni pernyataan atau kesimpulan tentang sesuatu berdasarkan perasaan atau pengalaman yang dangkal terhadap orang atau kelompok tertentu. Allport menyebutkan prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau tidak luwes, dapat dirasakan atau dinyatakan.⁴⁷²

⁴⁷⁰Syahputra, I., *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁴⁷¹Syahputra, I., *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

⁴⁷²Allport, Gordon. 2003. 'Inventing Personality: Gordon Allport and the Science of Selfhood'. <http://psycnet.apa.org/record/2004-14140-000>.

Johnson mengatakan prasangka adalah sikap positif atau negatif berdasarkan keyakinan *stereotype* tentang anggota dari kelompok tertentu. Prasangka yang berbasis ras disebut rasisme, berbasis etnis disebut etnisme.⁴⁷³ John menyebutkan prasangka adalah sikap antipati yang berlandaskan secara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Prasangka merupakan rintangan atau hambatan bagi kegiatan komunikasi karena orang yang berprasangka sudah bersikap curiga dan menentang dan tidak dapat berpikir logis, obyektif dan segala yang dilihatnya dinilai secara negatif.⁴⁷⁴ Liliweri menyebutkan prasangka merupakan pandangan emosional dan negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kelompok sendiri.⁴⁷⁵ Adorno mengemukakan pada dasarnya prasangka merupakan tipe kepribadian.⁴⁷⁶

Berdasarkan pengertian diatas, maka prasangka mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Prasangka tetap ada di pikiran, sedangkan diskriminasi mengarah ke tindakan sistematis. Secara umum prasangka mengandung tipe afektif (berkaitan dengan perasaan negatif), kognitif (selalu berpikir tentang suatu *stereotype*) dan konasi (kecenderungan perilaku diskriminatif). Prasangka didasarkan atas sebab-sebab seperti: (1) generalisasi yang keliru pada perasaan; (2) *stereotype* antaretnik; dan (3) kesadaran *in group* dan *out group* yaitu kesadaran ras mereka sebagai kelompok lain yang berbeda latar belakang kebudayaan.

Kedua, stereotype. Merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik/ras. Orang cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. *Stereotype* merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang

⁴⁷³Johnson, Doyle Paul. Teori Sosiologi Klasik dan Modern jilid 2. Robert M.Z. Lawang. Penerjemah. (Jakarta: Gramedia, 1990)

⁴⁷⁴Black, John, *Urban Transport Planning*. (London, Croom Helm. 1981)

⁴⁷⁵Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008).

⁴⁷⁶Adorno, Th, and Horkheimer, M. *Dialectic of Enlightenment Translated By Cumming, J.* (New York: Herder & Herder, 1979).

bersifat subyektif, hanya karena dia berasal dari kelompok yang lain. Pemberian sifat itu bisa sifat positif maupun negatif. Verdeber (1986) menyatakan stereotipe adalah sikap dan juga karakter yang dimiliki seseorang dalam menilai karakteristik, sifat negative, maupun positif orang lain, hanya berdasarkan keanggotaan orang itu pada kelompok tertentu. Stereotipe memiliki valensi dari positif hingga negatif atas sesuatu yang disukai/tidak (*favorability*).⁴⁷⁷

Allan G. Johnson (1986) menegaskan *stereotipe* adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu.⁴⁷⁸ Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain. Ada kecenderungan untuk memberi label atau cap tertentu pada kelompok tertentu dan yang termasuk problem yang perlu diatasi adalah *stereotipe* yang negatif atau memandang rendah kelompok lain.

Misalnya, seseorang dari suku tertentu diberi label, pandai bicara untuk orang dari daerah Batak. Seseorang menyimpulkan ini karena dari pengalaman dia mengetahui bahwa mereka memang banyak bicara. Ditambah dengan pengetahuan yang dia dapatkan dari televisi yang memperlihatkan bahwa sebagian besar pengacara yang terkenal di Indonesia dan sering muncul dari pemberitaan di televisi itu ternyata berasal dari orang Batak. Kita menggeneralisasikan secara salah dari informasi terbatas yang ada. Untuk mengatasi masalah ini adalah perlu memberi informasi yang benar dan lebih komprehensif tentang sesuatu hal sehingga *stereotipe* semacam ini tidak tumbuh. Di dalam menghadapi fenomena budaya yang ada di tanah air ini, perlu memberi informasi yang benar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan antar golongan. Seringkali, keberadaan individu dalam suatu kelompok telah dikategorisasi dan digeneralisasi.

⁴⁷⁷Sutarno, *Pendidikan Multikultural*. Banjarmasin: Pendidikan Jarak Jauh Kerja Sama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dengan FKIP ULM BJM, 2014. h. 4-14

⁴⁷⁸Allen, G.R., *Marine Fishes of South East Asia.*, (Perth Western Australia: Kaleidoscope Print and Prepress Periplus Edition, 1997).

Miles Hewstone dan Rupert Brown (1986) mengemukakan tiga aspek esensial dari stereotipe: (a) karakter atau sifat tertentu yang berkaitan dengan perilaku, kebiasaan berperilaku, gender, dan etnis. Misalnya wanita Priangan itu suka bersolek; (b) bentuk atau sifat perilaku turun temurun sehingga seolah-olah melekat pada semua anggota kelompok. Misalnya orang Ambon itu keras; (c) Penggeneralisasian karakteristik, ciri khas, kebiasaan, perilaku kelompok pada individu yang menjadi anggota kelompok tersebut.⁴⁷⁹

Ketiga, etnosentrisme. Pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sumner, seorang antropolog beraliran interaksionisme menyebutkan etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang menggunakan pandangan sebagai tolok ukur untuk menilai kelompok lain.⁴⁸⁰ Pengertian etnosentrisme menurut para ahli berbeda-beda; (1) Joseph A De Vito, menyebutkan etnosentrisme merupakan kecenderungan mengevaluasi nilai, kepercayaan dan perilaku dalam budaya sendiri yang lebih baik, lebih logis dan lebih wajar dari pada budaya lain;⁴⁸¹ (2) Alo Liliweri, menyebutkan etnosentrisme adalah paham setiap penganut kebudayaan atau kelompok dalam suku bangsa menganggap lebih superior dibandingkan dengan kelompok luar;⁴⁸² (3) Harris (1985) menyebutkan etnosentrisme adalah kecenderungan individu merasa kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok lain yang dianggap liar, inhuman, bahkan menjijikkan tidak rasional; (4) Adorno (1950), menyebutkan etnosentrisme ialah seseorang yang cenderung kurang terpelajar, kurang bergaul, pemeluk agama fanatik, bahkan disertai prasangka

⁴⁷⁹Sutarno, *Pendidikan Multikultural*. Banjarmasin: Pendidikan Jarak Jauh Kerja Sama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dengan FKIP ULM BJM, 2014, h. 4-14

⁴⁸⁰Fani Rahmadani, *Pengaruh Etnosentrisme Dan Stereotip Remaja Etnik Lampung Terhadap Komunikasi Antar budaya Dengan Etnik Bali*. (Lampung: Universitas Lampung, 2014), h. 19

⁴⁸¹Devito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. (Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2011), h. 533

⁴⁸²Liliweri, Alo. *Prasangka&Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta: PT LKiS, 2005). Baca Juga: Liliweri, Alo. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 3001).

terhadap kelompok etnis lain;⁴⁸³ (5) *ethnosnetrisme sebagai a nearly universal syndrome of discriminatory attitudes and behavior, the attitude include seing own group as virtuous and superior, one own standard of value as universal and outgroup as contemptible and inferior.*⁴⁸⁴

Contoh etnosentrisme di Indonesia adalah perilaku Carok dalam Masyarakat Madura. Carok adalah tindakan atau upaya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, jika harga dirinya merasa terusik. Konsep Carok dianggap sebagai perilaku brutal, tidak masuk akal dan tidak manusiawi.⁴⁸⁵ Kebiasaan memakai koteka bagi masyarakat papua pedalaman. Jika dipandang dari sudut masyarakat yang bukan warga papua pedalaman, memakai koteka mungkin hal sangat memalukan, bagi warga pedalaman papua, memakai koteka dianggap wajar, bahkan dianggap sebagai suatu kebanggaan. Contoh lain, kebudayaan Aceh dalam setiap kegiatan selalu delakukan pesijuek sebagai tanda kehormatan dan kemuliaan, namun pada sebagian orang, hal demikian merupakan tidak masuk akal karena tidak sesuai syariat.

Keempat, rasisme. Ras pertama kali diperkenalkan Franqois Bernier, antropolog Perancis, gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Eropa diasumsikan orang berkulit putih sebagai warga masyarakat kelas atas, sedangkan dengan orang Afrika yang berkulit hitam sebagai warga kelas dua.

Buffon, anthropolog Perancis menerangkan penduduk berdasarkan pembedaan biologis sebagai parameter. Abad 19, para ahli Biologi membuat klasifikasi ras atas tiga kelompok, yaitu Kaukasoid, Negroid dan Mongoloid. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada ras yang benar-benar murni. Secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok tertentu secara genetik seperti warna kulit, mata,

⁴⁸³Adorno, Th, and Horkhieimer, M. *Dialectif of Enlightenment Translated By Cumming, J.* (New York: Herder & Herder, 1979).

⁴⁸⁴Hammond, Jenny and Friends. *English for Social Purpose*, (Sydney: Macquarie University, 1992).

⁴⁸⁵A. Latief Wiyata. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006)

rambut, hidung, atau potongan wajah.⁴⁸⁶ Perbedaan warna kulit, suku, hingga daerah tinggal. Rasis selalu lekat dengan superioritas kelompok tertentu karena merasa lebih unggul dapat melakukan sekehendaknya. Akhirnya, hak-hak orang yang berbeda, justru dilanggar, bahkan mengarah pada tindakan kriminalisme. Carus, Secara kultural dan ciri ras ada empat jenis: Eropah, Afrika, Mongol dan Amerika, yang mencerminkan siang hari (terang), malam hari (gelap), cerah pagi (kuning) dan sore (senja) yang merah.⁴⁸⁷

Rasisme telah ada di dunia sejak lama, bahkan telah mengakar dengan sangat kuat. Hampir di setiap negara, kasus-kasus rasisme selalu muncul dan membuat adanya kesenjangan sosial. Rasisme sudah menyebar luas hingga rasanya sulit dihentikan, seperti; (1) Amerika. Masih menganggap hanya orang kulit putihlah yang bisa hidup dengan baik. Banyak imigran kulit hitam dianggap pengganggu; (2) India. Orang India dengan kulit putih mendapatkan perlakuan yang baik, sementara orang yang kulit hitam harus menunduk dan menghormati orang berkulit putih, selain warna kulit di India terdapat kebencian terhadap suku tertentu dan sistem kasta masih dipegang sangat erat; (3) Arab Saudi. Memperlakukan orang non-Arab dengan sangat buruk karena mereka menganggap ras unggul adalah hanya ras Arab. Diskriminasi ras terhadap orang berkulit hitam Arab Afrika bahkan sering dipojokkan jika berada di pemerintahan tidak pernah diberikan jabatan tinggi karena dianggap memalukan; (4) Israel. Orang Israel merasa lebih unggul dari non-Israel termasuk orang Palestina. Israel melakukan penyerangan secara bertubi-tubi dengan membabi buta, mereka ingin melenyapkan semua orang yang bukan dari sukunya; (5) Jepang. Masyarakat Jepang sangat bangga dengan dirinya sendiri, bahkan telah terbentuk dipikiran mereka, jika ada orang berasal dari non-Jepang pantas dibuat semena-mena. Pernah ada diskriminasi terhadap Miss Universe Jepang hanya karena berketurunan separuh Jepang dan

⁴⁸⁶Fani Rahmadani, *Ibid.*, h. 19

⁴⁸⁷James A Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice in Review of research in Education*, vol. 19, 1993, edited by L. Darling-Hammond. Washington D.C.: American Educational Research Association, Baca juga: James A, Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey Bass, 2011)

separuh orang kulit gelap. Sebenarnya sekarang diskriminasi sudah dilarang, namun masih memiliki *positive discrimination* untuk tetap membuat Jepang menjadi bangsa yang sangat hebat.⁴⁸⁸ Indonesia baru-baru ini pada tanggal 17 Agustus 2019 di ujung timur Indonesia terjadi protes besar, konflik tersebut dipicu oleh perlakuan rasis aparat keamanan dan anggota masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Kelima, diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu pelayanan yang tidak adil terhadap suatu individu tertentu. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa ditemui di masyarakat. Hal ini disebabkan karena manusia cenderung membeda-bedakan satu manusia dengan manusia lainnya dari segi tertentu saja. Segi-segi tersebut bisa berbentuk suku, golongan, kelamin, agama dan kepercayaan, aliran atau ideologi politik dan karakteristik manusia lainnya, biasanya memicu adanya tindakan diskriminasi.⁴⁸⁹ Tindakan diskriminasi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu, misalnya tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau hukum. Diskriminasi adalah terapan keyakinan atau ideologi. Jadi diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya.

Contoh diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari; (1) Para difabel tidak diberi fasilitas umum yang layak oleh pemerintah; (2) Seorang Ibu memperlakukan anaknya semena-mena karena anaknya penyandang autisme; (3) Seorang guru terlalu memperhatikan peserta didik yang cerdas, sedangkan yang biasa saja malah diabaikan; (4) Wasit di suatu pertandingan sepakbola yang cenderung memberi keputusan menguntungkan bagi tim tuan rumah; (5) Rumah sakit tidak memberikan pelayanan kepada pasien yang miskin karena tidak bisa membayar biaya pengobatan; (6) Perusahaan cenderung menerima lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibanding lulusan Perguruan Tinggi

⁴⁸⁸James A. Bank, dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey Bass, 2011). Baca Juga: <https://www.boombastis.com/negara-rasis/63820>

⁴⁸⁹Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2. Baca Juga <https://materiips.com/contoh-diskriminasi-dalam-kehidupan-sehari-hari>

Swasta (PTS); (7) Perempuan masih dianggap tidak layak menjalani beberapa profesi yang biasa dilakukan laki-laki, seperti sopir dan montir; (8) Orang tidak mengenyam pendidikan formal dianggap masa depan suram; (10) Masih adanya anggapan sekolah negeri jauh lebih baik ketimbang swasta; (11) Masih banyak siswa SMA yang menganggap, jurusan IPA jauh lebih baik dan menjanjikan dibanding jurusan IPS maupun Bahasa; (12) Anak yang berpenampilan culun masih sering dijadikan bahan olok. Mereka dianggap sebagai manusia aneh dan tidak mempunyai kemampuan dan masa depan yang baik; (13) Adanya ketidakadilan dalam putusan hakim pada kasus pencurian ayam dengan kasus korupsi. Pelaku pencurian ayam dihukum penjara hingga puluhan tahun, sedangkan pelaku korupsi hanya dihukum penjara selama beberapa bulan saja. Hal tersebut di atas merupakan tanda adanya diskriminasi.⁴⁹⁰

Keenam, Kambing Hitam (Scape Goating). Kambing hitam adalah Orang atau pihak yang disuruh bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak diperbuatnya. Orang itu harus menanggung konsekuensi yang bisa berupa hukuman atau sanksi, padahal tidak melakukan kesalahan.⁴⁹¹ Teori kambing hitam (*scape goating*) mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Ketika terjadi depresi ekonomi di Jerman, Hitler mengkambing hitamkan orang Yahudi sebagai penyebab rusaknya sistem politik dan ekonomi di negara itu. Ada satu pabrik di Auschwitz, Polandia yang digunakan untuk membantai hampir 1, 5 juta orang Yahudi. Tua muda, besar kecil laki-laki dan perempuan dikumpulkan. Kepala digunduli dan rambut yang dikumpulkan mencapai hampir 1, 5 ton. Rambut yang terkumpul itu dikirimkan ke Jerman untuk dibuat kain. Richard Chamberlain berteori bahwa bangsa Aria adalah bangsa yang besar dan mulia yang mempunyai misi suci untuk

⁴⁹⁰Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2. Baca Juga: <https://materiips.com/contoh-diskriminasi-dalam-kehidupan-sehari-hari>

⁴⁹¹T.A. Tatag Utomo. *Mencegah & Mengatasi Krisis Anak melalui Pengembangan Sikap Mental Orang Tua*. Grasindo, h. 161-162

membudayakan umat manusia. Bangsa Aria (Jerman) ini merasa bahwa kekacauan ekonomi dan politik di Jerman ini disebabkan oleh bangsa Yahudi.⁴⁹²

J. Problema Pembelajaran Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural dengan problema pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan sadar budaya. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis multikultural pada tahap awal, antara lain: (1) guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik; (2) guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang diajarkannya; (3) rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan untuk merangsang minat, ingatan, dan pengenalan peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya dan pengalaman belajar yang diperoleh.⁴⁹³

Keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam, antara lain: *pertama*, masalah seleksi dan integrasi isi (*content selection and integration*) mata pelajaran: (1) guru mampu memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran; (2) guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik.

Kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan (*the knowledge construction process*); (1) aspek budaya manakah yang dapat dipilih sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat; (2) guru dapat menggunakan *frame of reference* dari budaya tertentu dan mengembangkannya dalam perspektif ilmiah; (3) guru

⁴⁹²Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2. Baca Juga: <https://materiips.com/contoh-diskriminasi-dalam-kehidupan-sehari-hari>

⁴⁹³Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2

tidak bias dalam mengembangkan persepektif itu. Misalnya kincir air diambil sebagai *frame of reference* dari khasanah budaya local (tradisional), tetapi dapat dipakai untuk menjelaskan PLTA.

Ketiga, masalah mengurangi prasangka (*prejudice reduction*); (1) agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Dalam perlakuan ini muncul masalah kesetaraan status budaya peserta didik yang budayanya jarang dijadikan media pembelajaran; (2) agar guru dapat mengusahakan kerjasama (*cooperation*) dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu bukan merupakan kompetisi, tetapi sebuah kebersamaan. Contoh jika guru memilih Bagong (tokoh wayang di Jawa Tengah) untuk pembelajaran, maka guru harus menjelaskan siapa Bagong dan mampu mengidentifikasi tokoh serupa seperti Cepot (Jawa Barat), Sangut (Bali), Dawala dan Bawok (pesisir utara Jawa).⁴⁹⁴ Dengan mengambil contoh yang sepadan, di samping guru dapat menghindari prasangka bahwa dia mengutamakan unsur budaya tertentu. Situasi tersebut mendorong kebersamaan antar peserta didik dan saling memperkaya unsur budaya masing-masing.

Keempat, masalah kesetaraan pedagogy (*equity paedagogy*): Masalah ini muncul, jika guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan (secara tidak sadar) menafikan budaya kelompok lain. Untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka, mencari tahu dari tokoh sehingga guru dapat melaksanakan kesetaraan pedagogy.⁴⁹⁵ Seorang guru harus memiliki khasanah budaya mengenai berbagai unsur budaya dalam tema tertentu, misal: (1) Sastra Hikayat Rakyat dengan tema durhaka. Contoh; Malin Kundang (Minangkabau), Tangkuban Perahu (Sunda), Loro Jonggrang

⁴⁹⁴James A Banks, *Multicultural Education: Historical Development, Dimentions and Practrice in Review of research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. (Washington D.C.: American Eductional Research Association, 1993).

⁴⁹⁵Liliweri, Alo. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), Baca Juga: Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2

(Yogyakarta); (2) Obat-obatan: jamu (Jawa), minyak kayu putih (Maluku); (3) Tekstil/tenun: batik (Jawa), kain ikat (Nusa Tenggara), songket (Melayu Deli, Palembang, Kalimantan, Lombok dan Bali); (4) Perahu Layar: Phinisi (Bugis-Makasar), Cadik (Madura), Lancang Kuning (Melayu). Seni teater: Ludruk (Jawa Timur), Wayang Wong (Jawa Tengah), Lenong (Betawi), Ketoprak (Yogyakarta); (5) Tokoh Pahlawan: Dewi Sartika (Sunda), Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Malahayati (Aceh), Kartini (Jawa Tengah).

K. Kesimpulan

Pendidikan multikultural merupakan proses upaya mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah, mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi keberagaman budaya. Problema pendidikan multikultural di masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut: keragaman identitas budaya daerah, kurang kokohnya nasionalisme, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya, fanatisme sempit, konflik kesatuan Nasional dan multikultural.

L. Saran

Pendidikan multikultural di Indonesia sebagai proses upaya mengembangkan kepribadian pesesrta didik, meliputi berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi keberagaman budaya. Dengan demikian dapat disarankan, tingkatkan implementasi pendidikan multikultural agar peserta didik terhindar dari sifat prasangka, stereotipe, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi dan *scope goating*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Latief Wiyata. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006)

Abdel-Rahman, Hesham and Ping Wang, *Social Welfare and Income Inequality in a System of Cities. Department of Economics and Finance*, (New Orleand: University of New Orleans, 1996).

- Anwar, Dewi fortuna, dkk., *Konflik kekerasan internal; tinjauan sejarah, ekonomi-politik dan kebijakan di Asia Pasifik*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2005)
- Adorno, Th, and Horkheimer, M. *Dialectic of Enlightenment Translated By Cumming, J.* (New York: Herder & Herder, 1979).
- Alfian, Ibrahim., *Sejarah Aceh Selayang Pandang dalam Selama Rencong adalah Tanda Mata, Aceh dalam Rentang Konflik dan Harapan di Masa Depan, Bahrul Ulum, ed.*, (Jakarta: Koalisi NGO HAM, Banda Aceh, 2006).
- Allport, Gordon. 2003. *Inventing Personality: Gordon Allport and the Science of Selfhood*. <http://psycnet.apa.org/record/2004-14140-000>.
- Al-qadrie, *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Terj. Suaisi Asy'ari)*, (Jakarta: INIS, 2003).
- Allen, G.R., *Marine Fishes of South East Asia.*, (Perth Western Australia: Kaleidoscope Print and Prepress Periplus Edition, 1997).
- Allport, Gordon. 2003. *Inventing Personality: Gordon Allport and the Science of Selfhood*. <http://psycnet.apa.org/record/2004-14140-000>.
- Alwasilah, A.C. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008).
- Amalia, Euis, "Potensi dan Persoalan LKMS/BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT di 6 Kota Pulau Jawa", Makalah disajikan dalam International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World, Universitas Airlangga, Surabaya, 1- 3 Agustus 2008.
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. ed. 4. (Yogyakarta: BPFE, 2010)
- Black, John, *Urban Transport Planning*. (London, Croom Helm. 1981)
- Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014.
- Devito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. (Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2011)

- Elisabeth, Adriana dkk., *Pemetaan peran dan kepentingan para actor dalam konflik di Papua*. (Jakarta: LIPI, 2004)
- Fani Rahmadani, (2017), *Pengaruh Etnosentrisme Dan Stereotip Remaja Etnik Lampung Terhadap Komunikasi Antar budaya Dengan Etnik Bali*. Lampung: Universitas Lampung.
- Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 14.
- Fleisher B, Haizheng Li, dan Min Qiang Zhao. 2009. Human Capital, Economic Growth, and Regional Inequality in China. *Journal of Development Economics*, Department of Economics, Ohio State University, Columbus, OH 43210, United States. No 17.
- Fisher, Simon dkk., *Mengelola konflik*, (Jakarta: The British Council, 2000)
- Hammond, Jenny and Friends. *English for Social Purpose*, (Sydney. Macquarie University, 1992).
- Hemafitria, *Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPKN)*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2019.
- Hollewan, JF., *Van Vollenhoven of Indonesian Adat Law: Selection From Het Adatrecht Van Nederlandesch Indie*, (Vol 1, 1918: Vol II, 1931), M Nijhoff, The Hague, 1981.
- Ibrahim, I.S. & Akhmad, B.A., *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Intan, Permata, Sari, *Keberpihakan Media dalam Pemilihan Presiden 2014*, *Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 21 No. 1, Juli 2018: 73-86 ISSN: 1410-8291 | e-ISSN: 2460-0172,
- Ihromi, TO., *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Obor Indonesia, 2006).
- Ishak, Otto syamsuddin dkk., *Oase gagasan papua damai*, (Jakarta: Imparsial, 2012),
- Ishadi SK., *Dunia Penyiaran Prospek dan Taniangan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Jamli, Edison, dkk., *Kewarganegaraan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

- James A Banks, 1993, *Multicultural Education: Historical Development, Dimensions and Practice in Review of research in Education*, vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington D.C.: American Educational Research Association,
- James A, Bank dan Cherry A. Mc Gee (ed), *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey Bass, 2011).
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern jilid 2*. Robert M.Z. Lawang. *Penerjemah*. (Jakarta: Gramedia, 1990)
- Junaedi, F., *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013).
- Karen Armstrong, *Islam A Short History (Sepintas Sejarah Islam)*, (Yogyakarta: IKON TERALITERA, 2002)
- Kasinyo Harto, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*, (Jakarta: PT. Rajawal Press, 2014).
- Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, (Jakarta. Gramedia, 2010).
- Keraf, Gorys, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores: Nusa Indah, 2004).
- Kuswandi, Wawan, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Kymlicka, W. & Banting, K., *Multiculturalism and the Welfare State Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*, (New York: Oxford University Press, 2006)
- Liliweri, Alo, *Prasangka&Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural*. (Yogyakarta: PT LKiS, 2005).
- Liliweri, Alo. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009).
- Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Kesehatan*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008).

- Menteri PPN/ Kepala Bappenas. Bambang Brodjonegoro. *Memberikan sambutan pada Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Selasa (10/7) IDF 2018.*
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol 1: hal, 1-15*
- Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutaithir*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Najwan, Konflik Antar Budaya dan Antar Etnis di Indonesia Serta Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 195 – 208.*
- Nastiti, Aulia. D. (2010). “Korean Wave” di Indonesia: Antara Budaya Pop, Internet, dan Fanatisme Pada Remaja (Studi Kasus Terhadap Situs Assian Fans Club Di Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya). *Journal of Communication. 1 (1).*
- Payiz Zawahir Muntaha dan Ismail Suardi Wekke. (2017). *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1.
- Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat*, (Jakarta. CV. Rajawali, 1986)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Reinaja Rosdakarya. 1993). *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi dengan Contoh Analisis Statistik*, (Bandung: PT Remaja Roasdakarya, 2001).
- Saad, Munawar M., *Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas*. (Pontianak: Kalimantan Persada Press, 2003)
- Satiman, Sudewo. *Dengan Semangat Berkobar; Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).
- Setiawan, Nurkholis dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010).
- Subiakto, H. & Ida, R., *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

- Sudibyo, A., *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001)
- Sutarno. (2014). *Pendidikan Multikultural*. Banjarmasin: Pendidikan Jarak Jauh Kerja Sama Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Dengan FKIP ULM BJM.
- Syahputra, I., *Rezim Media: Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme dan Infotainment dalam Industri Televisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- T.A. Tatag Utomo. *Mencegah & Mengatasi Krisis Anak melalui Pengembangan Sikap Mental Orang Tua*. Grasindo.
- Ulfianti, S. (2012), *Fanatisme Remaja Indonesia Pada Korean Wave* Jurnal Artikel Korean Wave. 1(1)
- Utomo, W.P., Menimbang Media Sosial dalam Marketing Politik di Indonesia: Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2013, [Online] 17 (1), 67–84.
- UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839). Pada tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437)
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844).
- Van Vollenhoven, cetakan kedua 1987, *Penemuan Hukum*, Djembatan, 1987.
- Wijayanti, Ardiani. A. (2012). Hallyu: Youngstres Fanaticism of Korean Pop Culture (Study of Hallyu Fans Yogyakarta City). *Journal of Sociology*. 3 (3).
- Widjojo, Muridan S., *Papua road map*, (Jakarta: LIPI, 2009).
- William Montgomery Watt, *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3-4.

Zawahir Muntaha, Payiz dan Ismail Suardi Wekke. (2017). *Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia dalam Keberagaman*, Journal Intizar, Volume 23, Nomor 1.

BAB XIII ISU GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Pendahuluan

Globalisasi merupakan suatu proses yang muncul dari sebuah ide, lalu ditawarkan kepada bangsa lain yang pada akhirnya sampai pada titik kesepakatan dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yaya menyebutkan globalisasi adalah keseluruhan proses manusia, dimasukkan ke dalam masyarakat dunia tunggal. Proses ini bersifat majemuk, sehingga globalisasi dipandang kemajemukan, namun memiliki kesamaan kebutuhan.⁴⁹⁶

M. Waters menyebutkan globalisasi adalah sebuah proses sosial bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka makin dekat satu dengan lain.⁴⁹⁷ Suatu proses hubungan atau transaksi ekonomi, politik, dan sosial kultural makin tidak memperhitungkan batas-batas negara dan mengaburkan batas kedaulatan suatu negara.⁴⁹⁸ Suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat seluruh dunia.⁴⁹⁹ Suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah suatu negara.⁵⁰⁰ Suatu proses munculnya masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis dan lembaga-lembaga politik dunia.⁵⁰¹ Suatu proses beraneka macam kejadian, keputusan dan aktivitas di belahan dunia yang

⁴⁹⁶Suryana, Yaya, *Pendidikan Multikultural; Suatu Upaya Pengamatan Jati Diri Bangsa Konsep-Prinsip-Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

⁴⁹⁷Waters, Alison Oxford Essential Dictionary, (New York: Oxford University Press, 2009).

⁴⁹⁸Sri Budi Eko Wardani. *Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Banten Tahun 2006*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

⁴⁹⁹Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

⁵⁰⁰Achmad Suparman, *Ekonomi Lokal dan Daya Saing Global*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

⁵⁰¹Amal, *Ichlasul Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1996).

satu bisa membawa konsekuensi penting bagi beraneka macam seseorang dan masyarakat di belahan dunia yang lain.⁵⁰²

Bank Dunia menunjukkan globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara-negara lain.⁵⁰³ International Monetary Fund (IMF) memaparkan bahwa globalisasi berarti meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkat dan bergamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat.⁵⁰⁴ Meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini tiap-tiap negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun semakin tergantung satu dengan lainnya.⁵⁰⁵ Pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.⁵⁰⁶ Proses peningkatan kesalingtergantungan masyarakat dunia dinamakan dengan globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kesenjangan tingkat kehidupan antara masyarakat industri dan masyarakat dunia ketiga.⁵⁰⁷

Peter Drucker, menyebutkan globalisasi merupakan zaman transformasi sosial.⁵⁰⁸ Sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau *worldculture*).⁵⁰⁹ Joseph Stiglitz menyebutkan globalisasi adalah integrasi lebih dekat dari

⁵⁰²Mc Grew, Anthony and Held, David, (2001). *The Global Transformations Reader; an Introduction to the Globalization Debate*. (Cambridge: Polity Press, 2001). Baca Juga: Aryana KJ dan McGrew P., *Quality attributes of yogurt with Lactobacillus casei and various prebiotics*. LWT 40, 2007, 1808-1814.

⁵⁰³Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 261.

⁵⁰⁴Joicey, N. and Pickford, S. *The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, the New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations*, (Ashgate Publishing, 2011).

⁵⁰⁵Scholte, R. dkk., *Stability in bullying and victimization and its association with social adjustment in childhood and adolescence*. Journal of Abnormal Child Psychology, 35 (2), 2007, 217-228.

⁵⁰⁶Princeton N. Lyman, *Globalization and the demands of governance*, *Georgetown Journal of International Affairs*: (Winter/Spring), Premier Issue. 2000

⁵⁰⁷Giddens, Anthony (ed.), *Emile Durkheim; Selected Readings*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

⁵⁰⁸Drucker, Peter F. *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Pustaka Binaman, 2010).

⁵⁰⁹Jackson, Karl D, Lucian W. Pye, *Political Power and Communications in Indonesia*, (California: University of California Press, 1978).

negara dan penduduk dunia dibawa oleh pengurangan besar biaya transportasi, komunikasi, dan dimudahkannya rintangan arus barang, jasa, modal, pengetahuan, dan orang diseluruh perbatasan.⁵¹⁰ Perkembangan ekonomi global, semakin terintegrasi ditandai oleh perdagangan bebas, arus modal yang bebas, dan menekan lebih murah pasar tenaga kerja asing.⁵¹¹ Nayef R.F. Al-Rodhan, globalisasi adalah proses meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-manusia.⁵¹² Thomas L. Friedman, Globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi, yaitu kapitalisme dan pasar bebas sedangkan dimensi ideologi adalah teknologi informasi yang menyatukan dunia.⁵¹³

Era globalisasi berpengaruh kepada pengolah SDM berkualitas. SDM berkualitas merupakan modal dalam masuk abad globalisasi dengan persaingan antar bangsa yang ketat. Abad 21 merupakan abad kualitas,⁵¹⁴ ikut serta dalam persaingan global maka harus punya keunggulan kompetitif memadai. Keunggulan kompetitif dapat diperoleh dalam pendidikan bermutu.⁵¹⁵ Hussein Ahmad menyebutkan proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan kehidupan manusia di seluruh dunia.⁵¹⁶

Perkembangan pembangunan dunia pendidikan terdapat isu-isu negatif, seperti keadaan ekonomi negara membangun, di samping perdagangan pendidikan dan budaya dari negara-negara Barat yang menguasai pasaran pendidikan. Krisis muncul dalam pembiayaan belanja pembangunan

⁵¹⁰Stiglitz, Joseph E., *Economic of the Public Sector. Third Edition*. W.W. Norton and Company Ltd. London. 1997.

⁵¹¹Whitehead, Alfred, North, *Merriam-Webster Unabridge's Dictionary*, Version 2,5. Merriam- Webster. Inc, 2000.

⁵¹²Rodhan (al), Nayef R.F, *Program on the geopolitical implications of vlobalization and transnational security, definition of globalization*, GCSP, 2006.

⁵¹³Thomas L. Friedman, *Globalisasi The World Is Flat. Cet. 2*, Dian Rakyat, 2000

⁵¹⁴J.M. Juran, "How to Think about Quality" dalam *Juran's Quality Handbook*, eds. Joseph M. Juran et al. (New York: MCGraw-Hill Companies, Inc., 1999), h.2. 16.

⁵¹⁵Payne, Adrian, *Service Marketing*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000), h. 272

⁵¹⁶Ahmad, Ejaz., Brooke J. E., Hussain I., and Khan M. H. 1995. Reproduction in Eurasian Wild Boar in Central Punjab, Pakistan. *Acta Theriologica*, 1995, 40: 163- 173.

pendidikan, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan, buku teks, literasi komputer, termasuk tenaga pengajar yang kompeten dan profesional dalam memajukan dunia pendidikan. Berpotensi menimbulkan kebingungan karena peleburan yang rendah, sehingga terjadi persaingan global, meningkatnya perbelanjaan pendidikan, sehingga menyulitkan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, semakin menambah jurang pendidikan.⁵¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat tulisan dengan judul Isu globalisasi dalam pendidikan Islam.

B. Isu-isu Globalisasi

Globalisasi mengandung nilai positif, namun disisi lain berdampak negatif yang menimbulkan isu-isu yang tidak baik seperti dalam pengelolaan perkembangan dunia pendidikan terutama penggunaan teknologi informatika. Isu-isu globalisasi terkesan positif dalam pendidikan, seperti; (1) budaya pembelajaran sepanjang hayat; (2) kebolehan berkomunikasi dalam Bahasa ibundan dan Bahasa antar bangsa; (3) menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari; (4) pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar; (5) perubahan peranan guru; (6) peluang pendidikan terbuka luas; (7) persaingan yang sehat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan inovasi; (8) kolaborasi sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran.⁵¹⁸

Sedangkan isu-isu negatif seperti; (1) kadar pengangguran semakin meningkat; (2) meningkatnya sumber daya manusia yang profesional ke luar negeri; (3) terpinggirkan bahasa melayu sebagai bahasa ibu; (4) perdagangan pendidikan; (5) penyebaran sumber-sumber yang tidak sesuai dengan intelek dan rohani; (6) berlaku penindasan dalam merebut peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan di sebuah negara; dan (7) pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial.⁵¹⁹

⁵¹⁷Rodhan (al), Nayef R.F, *Program on the geopolitical implications of vlobalization and transnational security, definition of globalization*, GCSP, 2006.

⁵¹⁸Thomas L. Friedman, *Globalisasi The World Is Flat. Cet. 2*, Dian Rakyat, 2000.

⁵¹⁹Thomas L. Friedman. *Ibid.*, h. 201

Globalisasi menunjuk adanya proses. Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat dunia untuk mengikuti sistem yang seragam. Pada penghujung abad ke-20, umat manusia dihadapkan pada gejala baru, yaitu globalisasi.

Era globalisasi, hubungan antar manusia tidak terbatas dalam satu wilayah saja, tetapi sudah antarnegara (transnasional). Dengan demikian, orang biasa berkomunikasi dengan orang lain, di negara lain serta berpindah-pindah dengan cepat dari satu negara ke negara lain. Gambaran kehidupan global adalah sebagai berikut. Seseorang berada di Jakarta pada pagi hari, siang harinya yang bersangkutan, sudah berada di Singapura untuk mengadakan pertemuan dan sore harinya yang bersangkutan berada di Bali untuk menikmati *sunset*. Pada saat itu pula memberitahukan kepada keluarganya di Jakarta melalui sarana komunikasi. Orang yang bersangkutan tidak perlu membawa sarana pakaian dan uang banyak, tetapi cukup membawa kartu ATM. Faktor pendorong globalisasi adalah kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi. Sedangkan saluran globalisasi adalah media massa, pariwisata, dan migrasi internasional, serta perdagangan internasional.⁵²⁰

Globalisasi merupakan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi, informasi, serta perkembangan transportasi. Sehingga semakin meningkatkan hubungan antar masyarakat dari berbagai negara dunia. Peristiwa di wilayah tertentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di bagian lain. Hubungan masyarakat semakin erat antar manusia, meliputi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan.⁵²¹

Globalisasi mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Aspek tersebut adalah sebagai berikut, (1) Aspek teknologi. Kemunculan berbagai ragam teknologi yang memudahkan manusia dalam memenuhi

⁵²⁰ Candra C., *“Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Multikultural dalam Membina Kesadaran Demokrasi Warganegara”*. Dalam Budimansyah (Editor) *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*, (Bandung: Widya Aksara Press, 2012).

⁵²¹ Rodhan (al), Nayef R.F, *Program on the geopolitical implications of vlobalization and transnational security, definition of globalization*, GCSP, 2006.

kebutuhan hidup; (2) Aspek ekonomi. Adanya global yang dirincikan ekonomi pasar bebas. Barang dan jasa dari berbagai negara keluar masuk negara dan saling mengisi untuk pemenuhan kebutuhan; (3) Aspek ideologi dan politik. Munculnya ide keterbukaan, demokrasi, pemerintah yang bersih, nilai hak asasi manusia; (4) Aspek sosial budaya. Masuknya nilai dan budaya dari satu bangsa ke bangsa lain. Perilaku sosial dan budaya sebuah bangsa dipengaruhi oleh bangsa lain; (5) Aspek pertahanan keamanan. Kebutuhan untuk memelihara kebutuhan bersama dari gangguan keamanan yang bersifat ancaman bersama pula. Contohnya terorisme dan pembajakan.

C. Ciri-ciri Globalisasi

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan makin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia: (1) hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia; (2) perubahan dalam jarak ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.⁵²² (3) Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan Internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO); (4) Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang *fashion*, literatur, dan makanan; (5) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain.

⁵²²Kymlicka, W. & Banting, K., *Multiculturalism and the Welfare State Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*, (New York: Oxford University Press, 2006), Baca Juga: Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan hal yang serupa, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial.⁵²³

D. Isu Global dalam Pendidikan Islam

Isu-isu global Pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut: (1) narkoba; (2) radikalisme; dan (3) pornografi.⁵²⁴

1. Narkoba

Narkoba adalah bagian dari khamar Allah SWT berfirman, yang artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.⁵²⁵ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵²⁶ Selanjutnya pada ayat 91 dijelaskan: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁵²⁷

Tafsir mengenai perbuatan setan yang dimaksudkan di atas adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi destruktur manusia.

⁵²³ Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

⁵²⁴ Abdul Jabar, *Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengguna Narkoba di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Plaju Palembang*, Tarbiyah, UIN Raden Fatah Palembang, 2016

⁵²⁵ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Baqarah ayat 219.

⁵²⁶ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Maidah ayat 90

⁵²⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Maidah ayat 91

Hal-hal tersebut bisa dipacu dari khamar (termasuk narkoba) dan judi potensi memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah SWT dan salat.⁵²⁸

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk) bisa menjerumuskan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan (menghilangkan kesadaran) dan melemahkan. Untuk itu, khamar dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat dalam penyalah guna khamar (narkoba), dilaknat oleh Allah SWT, entah itu perbuatannya, pemakaiannya, penjualannya, pembeliannya penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Persoalan narkoba adalah bagian dari persoalan abadi manusia. Sebab persoalan ini telah ada dari sebelumnya dan selalu ada sampai kapanpun. Oleh karena itu hal ini juga bagian dari perjuangan abadi manusia. Kita tidak boleh putus selalu mencegah, menaggulangi dan menyembuhkan putra-putri kita dari bahaya narkoba.

2. Radikalisme

Radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya sebagai berikut: (1) sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain; (2) sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain; (3) sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak; (4) sikap revolusioner, kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.⁵²⁹

Al-Qur'an mengecam keras sikap Ahli Kitab yang terlalu berlebihan dalam beragama seperti firman Allah SWT yang artinya: Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.⁵³⁰ Semua ungkapan

⁵²⁸Erfan priyambodo, *Narkoba Ditinjau dari Sisi Berbagai Agama di Indonesia*, Diakses dari, staffnew.uny.ac.id, tanggal 15 Desember 2019.

⁵²⁹Nala Auna Rabba, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Radikalisme di SMA Khadijah Surabaya*. Tarbiyah, UIN Sunan Ampel, 2019, h. 16

⁵³⁰Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS An-Nisa' ayat 171.

mengenai radikal mengacu pada satu titik bahwa radikal adalah sikap yang keras ingin melakukan perubahan terhadap sesuatu sampai asal atau akar dan terkadang tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh sikap tersebut. Tindakan kelompok radikal, jika dikaitkan dengan Islam berarti kelompok Islam tersebut menggunakan landasan ajaran Islam untuk melakukan perubahan yang drastis dan ekstrem.

Islam tidak mengajarkan tindak kekerasan dan sikap ekstrem seperti tersebut dalam defenisi radikalisme di atas. Radikalisme dalam Islam disini dimaksud sebagai fenomena aktual yang terjadi dan dapat diamati dalam keragaman kelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Kelompok ini, seringkali membawa simbol-simbol agama dan melakukan pembenaran atas tindakan-tindakan dengan dalil-dalil dari Al-Qur`an. Mereka melakukan klaim sepihak bahwa sikap dan tindakannya merupakan bagian dari Islam.⁵³¹

3. Pornografi

Konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminalogi Islam, persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat, *tabarruj*, dan pakaian. Aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu dan membangkitkan nafsu orang yang melihatnya. Pakaian merupakan alat yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan *tabarruj* menggambarkan penampilan seseorang dalam berpakaian yang cenderung berlebihan atau mencirikan penampilan orang yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan berpakaian.⁵³²

Aurat menurut Islam sebagai berikut.

1. Defenisi aurat

Menurut Ensiklopedia Islam, aurat berarti bagian tubuh yang wajib ditutup menurut perintah agama, jika terbuka dapat menimbulkan malu,

⁵³¹ Nala Auna Rabba, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Radikalisme di SMA Khadijah Surabaya*. Tarbiyah, UIN Sunan Ampel, 2019, h. 17

⁵³² Irsyadunnas, *Pornografi Dalam Perspektif Islam Al-Qur'an Hadits*, Desember 2007, h.10

melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga memperlihatkannya dosa. Aurat bisa dipahami dengan batas minimal anggota atau bagian tubuh manusia, sehingga menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu, jika dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh tersebut harus ditutup dan dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan manusia. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, aurat dapat dipahami sebagai bagian tubuh manusia yang haram dilihat oleh orang lain dan orang yang melihatnya berdosa sehingga bagian tersebut wajib ditutup.⁵³³

Allah SWT berfirman yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁵³⁴

2. Batasan aurat

Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali memberikan batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Pendapat yang lain disebutkan, bagian anggota tubuh laki-laki yang termasuk aurat adalah alat kelamin dan dubur, sedangkan pusar, lutut dan paha tidak termasuk aurat bagi laki-laki. Dari perbedaan pendapat di

⁵³³Abd. Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).

⁵³⁴Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS An-Nur ayat 31

atas, ada ulama yang mencermatinya yaitu Wahbah Zuhaili menyatakan dari kedua pendapat tersebut pendapat pertama lebih pantas untuk diterima.⁵³⁵

3. Batasan aurat wanita

Secara umum juga ada dua pendapat yang muncul berkaitan dengan batasan aurat wanita, pendapat *pertama* mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangannya, pendapat ini dipegang oleh sebagian besar mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i. Pendapat *kedua* mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh wanita selain dari wajah dan telapak tangan, pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Syafi'i, Hambali, sebagian pengikut Hanafi.⁵³⁶

Dengan demikian Isu-isu globalisasi dalam pendidikan Islam terjadi, seperti; narkoba, radikalisme dan pornografi dalam dunia pendidikan, isu globalisasi tersebut dapat dicegah dan diantisipasi melalui pendidikan Islam, sehingga generasi penerus bangsa terhindar dari bahaya narkoba, radikalisme dan pornografi.

E. Isu-isu Global dalam Kehidupan

Akibat arus budaya global, isu-isu internasional sekarang ini banyak berpengaruh pada aspek politik. Pengaruh itu, melalui isu tentang demokrasi, isu hak asasi manusia, dan transparansi (keterbukaan). Pada aspek sosial budaya muncul isu tentang perlunya sikap pluralisme dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam bidang ekonomi muncul pasar global (*global market*) dan pesaing global, sedangkan di bidang muncul isu keamanan muncul isu terorisme.

Beberapa isu internasional yang sering terdengar adalah sebagai berikut; (1) Demokrasi; (2) Hak asasi manusia (HAM); (3) Transparansi (keterbukaan); (4) Pelestarian lingkungan hidup; (5) pluralisme.⁵³⁷

⁵³⁵Irsyadunnas, *Pornografi Dalam Perspektif Islam" Al-Qur'an Hadits*, Desember 2007, h.11-13

⁵³⁶Irsyadunnas, *Ibid.*,h.11-13

⁵³⁷ Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), Baca Juga: Tilaar, H.A.R (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Tranformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grassindo, 2004)

1. Demokrasi

Paham demokrasi berdasarkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di negara. Demokrasi sebagai sistem politik harus mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan. Semua negara ingin disebut sebagai negara demokrasi. Negara-negara yang belum berpemerintahan demokrasi atau masih melakukan praktik pemerintahan otoriter banyak dikecam oleh negara lain. Negara-negara otoriter umumnya terkucilkan dari pergaulan internasional. Contoh Negara Myanmar (Burma).⁵³⁸

2. Hak asasi manusia

Masalah hak asasi manusia berkaitan erat dengan demokrasi. Sekarang ini dunia sangat memperhatikan penegakan hak asasi manusia. Adanya berbagai perang, pertentangan dan konflik antar bangsa dikarenakan adanya penindasan terhadap hak asasi manusia dan perilaku sewenang-wenang. Masalah hak asasi manusia merupakan masalah internasional.

3. Transparansi (keterbukaan)

Transparansi atau keterbukaan terutama ditunjukkan pada penyelenggara pemerintahan negara. Pemerintahan yang tertutup tidak lama bertahan lama sebab kemajuan informasi telah mampu menerobos berbagai ketertutupan yang disembunyikan pemerintah. Pemerintahan yang tertutup juga dianggap tidak demokratis karena tidak ada pertanggungjawaban publik dan tidak mengikutsertakan rakyat dalam bernegara. Hal ini bertentangan dengan pesan demokrasi. Penyelenggaraan negara diharapkan berlaku adil dan transparan terhadap rakyatnya.

4. Pelestarian lingkungan hidup

Lingkungan hidup merupakan isu internasional yang ditunjukkan terhadap negara-negara. Sekarang ini, lingkungan hidup yang rusak dapat menjadi ancaman baru bagi umat manusia. Negara-negara yang memiliki kekayaan

⁵³⁸Tilaar, H.A.R (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grassindo, 2004), http://douxnanaz.blogspot.com/2011/06/isu-isu-globalisasi_20.html,

alam dan hutan dihimbau untuk serius dalam melestarikan lingkungan hidup. Misalnya kebakaran hutan di Kalimantan bukan hanya merugikan Indonesia, tetapi mengganggu negara-negara tetangga, bahkan mengancam ekosistem dunia. Tindakan pengrusakan lingkungan juga mendapat kecaman masyarakat internasional.

5. Pluralisme

Dalam masyarakat global, hubungan antar manusia makin intensif dan tidak hanya manusia sebangsa, tetapi manusia berbeda ras, agama, nilai budaya, Bahasa, dan adat. Sikap menghargai keberanekaan dan perbedaan (*pluralisme*) sangat dibutuhkan. Jika suatu bangsa memaksa nilai budayanya dan tidak menghargai budaya lain, hubungan global rusak.

F. Isu-isu Pasar Global

Pasar global merupakan pilihan strategis dan menarik. Pasar global bertujuan memajukan negara dan untuk menyejahterakan masyarakat luas dan lebih merata. Dalam era global, barang, jasa dan produk dari berbagai Negara masuk dan saling berkompetisi dengan produk lokal. Arus keluar masuk barang dan jasa tidak lagi dibatasi. Di wilayah-wilayah regional dibentuk pasar bersama, misalnya di Asia dengan pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area), Tahun 2003, di Amerika dengan NAFTA.⁵³⁹ Faktanya, banyak perusahaan, mampu bersaing dengan sukses di pasar global sekalipun, namun yang paling penting adalah untuk tetap memperhatikan pasar domestik.

Negara yang masuk kedalam pasar global tersebut mau tidak mau, harus menghadapi sebuah kompetisi atau persaingan. Persaingan antar bangsa yang ketat. Abad 21 merupakan abad mutu,⁵⁴⁰ ikut serta dalam persaingan global maka harus punya keunggulan kompetitif memadai. Hal ini dikarenakan

⁵³⁹Tilaar, H.A.R (2004). *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Tranformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grassindo, 2004), Baca Juga: http://douxnanaz.blogspot.com/2011/06/isu-isu-globalisasi_20.html,

⁵⁴⁰J.M. Juran, *How to Think about Quality*, dalam *Juran's Quality Handbook*, eds. Joseph M. Juran et al. (New York: MCGraw-Hill Companies, Inc., 1999), h.2. 16.

negara yang tidak memiliki kesiapan strategis dan tidak mampu bersaing dalam menghadapi pasar global tersebut, maka tergerus dan terpinggirkan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi persaingan pasar global yaitu bidang harga, produk, pemasaran, dan strategi lainnya. Seperti negara-negara di Eropa menyikapi pasar global, yaitu dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan untuk lebih memusatkan arah pandangan ke usaha kecil dan menengah UKM telah menjadi kecenderungan, semakin meratanya peranan UKM tersebut, dinamika perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat meningkatkan.

UKM lebih bisa diandalkan, karena UKM merupakan simbol kemandirian suatu negara. Akan tetapi, seberapapun besar skala usaha yang dijalankan pada saat ini, selalu dihadapkan pada permasalahan yang kadang membuat usaha tumbang dan terkapar yaitu persaingan. Semakin maju dan berkembang perekonomian dalam suatu negara, maka semakin ketat pula persaingan. UKM merupakan usaha sangat berharga. Hal ini dibuktikan pada saat krisis moneter, UKM mampu bertahan dan berkembang dalam menaikkan ekonomi rakyat.

G. Isu-isu Akulturasi

Akulturasi terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul, jika terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Dalam akulturasi, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu, sebagian berusaha menolak pengaruh itu. Contoh akulturasi yang mudah ditemui ialah dalam perbauran kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia.⁵⁴¹

Akulturasi memiliki faktor penyebab baik secara internal maupun eksternal. Pendidikan Islam juga terjadi akulturasi dan menimbulkan isu-isu

⁵⁴¹ Irianto, A.M., (2016), *Komodifikasi Budaya di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal: Studi Kasus Eksistensi Industri Pariwisata Dan Kesenian Tradisional Di Jawa Tengah*, Vol. 27. No. 1 2016. pp 213-236

akulturasi. Demikian juga dalam era globalisasi terjadi kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi, informasi, serta perkembangan *transpose*. Berdasarkan dua hal di atas, maka semakin meningkatkan hubungan antar masyarakat dari berbagai negara dunia.⁵⁴²

Secara sepintas akulturasi mirip dengan asimilasi. Perbedaannya adalah akulturasi itu peleburan kebudayaan dua masyarakat namun tidak menimbulkan perubahan semua unsur hingga kepribadian asli kedua masyarakat, namun hanya unsur-unsur tertentu saja yang melebur. Unsur itu menjadi bagian kebudayaan yang diserapnya, tanpa mengubah ciri-ciri masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama akulturasi, menurut Herkovits, Linton dan Redfield, yang penulis kutip dari Muhammad Fauzy adalah fenomena yang akan terjadi tatkala kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda terlibat dalam kontak yang berlangsung secara tangan pertama (langsung), disertai perubahan terus-menerus, sejalan pola-pola budaya asal dari kelompok itu atau dari kedua kelompok itu dibawah definisi itu, akulturasi dibedakan dari perubahan budaya yang hanya merupakan salah satu aspeknya, dan asimilasi dan yang pada saat tertentu merupakan suatu fase awal akulturasi.

Akulturasi yang terjadi pada suatu masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi akulturasi adalah sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi yang sumbernya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor internal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut; (1) penduduk yang semakin bertambah dan berkurang karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi; (2) adanya penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat; (3) adanya proses penyempurnaan

⁵⁴²Zakso, A., *Pelestarian dan Akulturasi Adaptasi Budaya Daerah Kasus di Singkawang*. Dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 3, No. 2 Oktober 2012.

(inovasi) terhadap penemuan-penemuan baru sehingga menambah atau mengganti sesuatu yang ada di masyarakat; (4) terjadinya konflik di dalam masyarakat, baik antar individu maupun kelompok; (5) terjadinya pemberontakan atau revolusi pada suatu negara.⁵⁴³

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor penyebab terjadinya akulturasi yang sumbernya berasal dari luar. Beberapa faktor eksternal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) terjadinya perubahan alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat; (2) terjadinya peperangan pada suatu negara; (3) adanya pengaruh kebudayaan asing melalui proses difusi (penyebaran budaya), akulturasi, dan asimilasi.⁵⁴⁴

H. Isu-isu Akulturasi Pendidikan Islam

Akulturasi antara unsur-unsur Islam dengan budaya nusantara tidak mengeliminasi prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Budaya-budaya nusantara yang mengandung unsur syirik maka tidak layak digunakan sebagai *urf* atau hukum, artinya akulturasi itu terjadi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan atau diganti, dan inilah makna Islam di suatu tempat atau negeri.⁵⁴⁵

Perubahan budaya yang termasuk dalam proses akulturasi yang mana unsur budaya yang lama bercampur dengan unsur budaya yang baru sehingga membentuk sistem yang baru. Beberapa tradisi suku Kokoda telah mengalami percampuran baik dalam fungsi dan penerapannya. Bentuk percampuran ini dapat ditemukan dalam mantra-mantra yang dimiliki suku Kokoda. Mantra-mantra ini dibaca dalam kegiatan tertentu dengan tujuan tertentu.

⁵⁴³Zakso, A. (2012). *Pelestarian dan Akulturasi Adaptasi Budaya Daerah Kasus di Singkawang*. (Dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 3, No. 2 Oktober 2012).

⁵⁴⁴Zakso, A. *Ibid.*, Vol. 3, No. 2.

⁵⁴⁵Ismail Ruslan, *Akulturasi Islam, Tradisi dan Modernitas dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak*, IAIN Pontianak, h.10

Pada zaman dahulu, mantra-mantra sering digunakan terutama saat *Baku onge* atau perang suku. Setelah mantra dibacakan barulah mereka melakukan perang antar suku. Meskipun secara berperang saat *baku onge* sudah tidak lagi dilakukan, mantra tersebut masih ada dan tetap diturunkan dari generasi ke generasi. Saat ini, mantra-mantra tersebut hanya dibacakan dan dipakai saat terjadi masalah genting. Seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan agama, konten dalam mantra- mantra ini mengalami akulturasi yakni adanya pencampuran tradisi dan ilmu agama dimana mantra-mantra yang dibaca berupa bacaan- bacaan mengaji Al-Qur'an dan salawat.⁵⁴⁶

Suku Kokoda memiliki tahapan atau ritual sebelum pernikahan yang disebut dengan *karego* atau *lamaran*. Dalam acara ini, apabila keluarga mempelai wanita setuju, calon mempelai harus keluar rumah dan mempelai pria harus mengejar mempelai wanita. Jika mempelai wanita sudah tertangkap mereka *Baku polo* atau berpelukan. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur kedua mempelai. Tradisi ini tidak selalu dilakukan oleh keluarga calon pengantin terutama keluarga yang sudah memiliki pendidikan dan pengetahuan lebih luas tidak lagi menerapkan tradisi tersebut. Beberapa bagian seperti “baku polo” tidak lagi dilakukan. Sementara unsur yang ditambahkan dalam ritual ini adalah adanya pelaksanaan *ijab qabul* dan *walimah* (pesta).

Selanjutnya, bentuk akulturasi terjadi juga dalam hal penanganan musibah. Ketika seseorang terkena musibah di kampung Kokoda, saudara atau orang lain yang pernah dibantu oleh orang tersebut harus menanamkan sesuatu benda (biasanya tiang). Hal ini diyakini sebagai tolak sial agar orang lain tidak terjatuh di tempat yang sama. Sesuatu yang ditanam biasanya dicabut dan digantikan dengan tanaman hidup. Sesuatu yang ditanam tersebut diibaratkan sebagai perwujudan diri dari orang yang jatuh. Akulturasi yang terjadi dalam hal ini adalah pada jaman dahulu kebiasaan ini hanya berlaku bagi orang Kokoda saja, namun saat ini kebiasaan tersebut berlaku

⁵⁴⁶Raisa Anakotta dkk, *Akulturasi Masyarakat Lokal dan Pendetang dan Popua Barat*, vol. 21, No.1, p29-37 , 2019, h.33

untuk siapapun selama musibah yang dialami terjadi di kampung suku Kokoda.⁵⁴⁷

Akulturası terjadi di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Mengacu pada pengertian akulturası, adapun beberapa contoh akulturası adalah sebagai berikut; Seni bangunan, seni rupa, seni sastra, system pemerintahan dan budaya asing lainnya.⁵⁴⁸

1. Seni Bangunan

Akulturası terjadi dalam seni bangunan. Salah satu contohnya adalah Bangunan Masjid Menara Kudus (Masjid Al-Aqsa) di Jawa Tengah, dimana bangunannya merupakan perpaduan budaya Jawa-Hindu dengan Islam.

2. Seni Rupa

Perpaduan antara budaya India dan Indonesia terjadi melalui seni rupa, yaitu adanya patung Budha di Candi Borobudur dan juga relief-relief yang dilukis di rumah panggung, perahu bercadik, dan hiasan merpati, yang merupakan karya seni asli Indonesia.

3. Seni Sastra

Penyebaran agama Islam di Indonesia merupakan salah satu contoh akulturası dimana tulisan Arab kemudian berkembang menjadi tulisan Arab Gundul atau Arab Melayu.

4. Sistem Pemerintahan

Kerajaan Hindu dan Budha pada masa lalu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari adanya jenjang pemerintahan dan perubahan kepala pemerintahan yang dulunya kepala suku menjadi raja.

5. Budaya Asing lainnya

Terdapat beberapa budaya asing lainnya, yang diterapkan di Indonesia sebagai akibat akulturası, diantaranya Angpaw (Tiongkok), Halloween (Eropa), dan Valentine (Eropa).

⁵⁴⁷ Raisa Anakotta dkk., *Ibid*, h. 34

⁵⁴⁸ Raisa Anakotta dkk., *Ibid*., h. 34

I. Kesimpulan

Globalisasi merupakan sebuah proses sosial yang muncul, ide dan gagasan kemudian ditawarkan kepada bangsa lain, sehingga menjadi kesepakatan, pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di dunia. Isu global dalam kehidupan sebagai berikut; (1) demokrasi artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. rakyat memegang kekuasaan tertinggi di negara; (2) hak asasi manusia artinya perang, pertentangan dan konflik antar bangsa dikarenakan adanya penindasan dan perilaku sewenang-wenang; (3) transparansi artinya penyelenggaraan negara diharapkan berlaku adil dan transparan terhadap rakyat; (4) pelestarian lingkungan artinya tindakan pengrusakan lingkungan, mengancam ekosistem dunia; (5) pluralisme artinya sikap menghargai keberanekaan dan perbedaan; (6) akulturasi artinya proses sosial yang timbul dan terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih saling mempengaruhi. Contoh akulturasi dalam perbauran kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia.

J. Saran

Isu global yang sudah baik dalam kehidupan masyarakat, dapat dipertahankan bahkan jika perlu lebih ditingkatkan, terutama peningkatan nilai demokrasi artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, hak asasi manusia, transparansi dalam penyelenggaraan Negara, pelestarian lingkungan hidup, pluralisme dengan meningkatkan sikap menghargai keberanekaragaman dan akulturasi, sehingga terciptanya masyarakat yang damai, tenteram, sejahtera dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jabar. (2016). *Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Pengguna Narkoba di Yayasan Rehalibitasi Narkoba Ar-Rahman Plaju Palembang*, Tarbiyah. UIN Raden Fatah Palembang.

Achmad Suparman. (2002). *Ekonomi Lokal dan Daya Saing Global*. (Jakarta: Bumi Aksara).

Ahmad, Ejaz. Brooke J. E., Hussain I., and Khan M. H. (1995). *Reproduction in Eurasian Wild Boar in Central Punjab*. Pakistan: Acta Theriologica.

- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. (2002). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.
- Amal, Ichlasul. (1996). *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Aryana KJ dan McGrew P. (2007). *Quality attributes of yogurt with Lactobacillus casei and various prebiotics*. LWT 40: 1808-1814.
- Apridar. (2012). *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erfan Priyambodo. (2019). *Narkoba Ditinjau dari Sisi Berbagai Agama di Indonesia*.
- Drucker, Peter F. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman.
- Giddens, Anthony (ed.), (1995). *Emile Durkheim; Selected Readings*. Canbridge: Cambridge University Press.
- Irsyadunnas. (2007). *Pornografi Dalam Perspektif Islam Al-Qur'an Hadits*.
- Ismail Ruslan. (2007). *Akulturasi Islam, Tradisi dan Modernitas dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak*, IAIN Pontianak.
- J.M. Juran (1999). *How to Think about Quality dalam Juran's Quality Handbook*, Eds. Joseph M. Juran et al. New York: MCGraw-Hill Companies, Inc.
- Jackson, Karl D, Lucian W. Pye. (1978). *Political Power and Communications in Indonesia*. California: University of California Press.
- Joicey, N. and Pickford, S. (2011). *The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, the New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations*. Ashgate Publishing.
- Mc Grew, Anthony and Held, David. (2001). *the Global Transformations Reader; an Introduction to the Globalization Debate*. Cambridge: Polity Press.
- Nala Auna Rabba. (2019). *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Radikalisme di SMA Khadijah Surabaya*. Surabaya: Tarbiyah UIN Sunan Ampel.

- Payne, Adrian. (2000). *Service Marketing*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Princeton N. Lyman. (2000). *Globalization and the demands of governance, Georgetown Journal of International Affairs: (Winter/Spring)*. Premier Issue.
- Raisa Anakotta dkk. (2019). *Akulturası Masyarakat Lokal dan Pendetang dan Papua Barat*, vol. 21, No.1, p29-37.
- Rodhan (al), Nayef R.F. (2006). *Program on the geopolitical implications of vlobalization and transnational security, definition of globalization*, GCSP.
- Selo Soemardjan. (1998). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Scholte, R. dkk. (2007). *Stability in bullying and victimization and its association with social adjustment in childhood and adolescence*. Journal of Abnormal Child Psychology.
- Sri Budi Eko Wardani. (2007). *Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Banten Tahun 2006*. Jakarta: Magister Universitas Indonesia.
- Stiglitz, Joseph E. (1997). *Economic of the Public Sector. Third Edition*. London: W.W. Norton and Company Ltd.
- Suryana, Yaya, 2015, Pendidikan Multikultural; Suatu Upaya Pengamatan Jati Diri Bangsa Konsep-Prinsip-Praktek, Bandung: Pustaka Setia.
- Thomas L. Friedman. (2000). *Globalisasi the World Is Flat*. Cet. 2, Dian Rakyat
- Waters. (2009). *Alison Oxford Essential Dictionary*. New York: Oxford Universiy Press.
- White head, Alfred, North (2000). *Merriam-Webster Unabridge's Dictionary*. Version 2, 5. Merriam-Webster. Inc.
- Zakso, A. (2012). *Pelestarian dan Akulturası Adaptasi Budaya Daerah Kasus di Singkawang*. (Dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 3, No. 2.

BAB XIV MULTIKULTURAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Pendidikan sejak kemerdekaan sampai era orde baru telah mengabaikan kekayaan kebhinekaan kebudayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi.⁵⁴⁹ Demokrasi menjadi pilihan bangsa sejak gerakan reformasi pada abad ke-21, abad persaingan antar bangsa yang ketat.⁵⁵⁰ Era reformasi membawa angin demokrasi sehingga menghidupkan wacana pendidikan multikultural.⁵⁵¹ Era reformasi pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli system pendidikan untuk kelompok tertentu. Sedangkan pendidikan multikultural belum dianggap penting walaupun realitas budaya dan agama sangat beranekaragam.⁵⁵² Dengan demikian era reformasi ini, tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali seperti otonomisasi pendidikan dalam mengembangkan multikultural, agar pendidikan menjadi tempat dan lahan subur bagi perkembangan kebhinnekaan kebudayaan Indonesia.⁵⁵³

Pendidikan multikultural semakin mengemuka seiring dengan terus bergulirnya arus reformasi, demokratisasi dalam kehidupan bangsa dan bernegara, yang berimplikasi terhadap penguatan *civil society* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pendidikan Multikultural di Negara yang menganut demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada, telah melaksanakannya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara kulit putih dan kulit hitam, bertujuan memajukan integritas nasional.⁵⁵⁴

⁵⁴⁹H.A.R. Tilaar. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), h. 16

⁵⁵⁰J.M. Juran, *How to Think about Quality* dalam *Juran's Quality Handbook*, eds. Joseph M. Juran et al. (New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 1999), h.2. 16.

⁵⁵¹H.A.R. Tilaar. *Ibid.*, h. 16

⁵⁵²Ruslan Ibrahim. *Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama*. *Jurnal Pendidikan Islam*. El-Tarbawi. No.1 Vol 1, 2008. h. 116

⁵⁵³H.A.R. Tilaar. *Ibid.*, h. 16

⁵⁵⁴Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. *Journal Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2

Amerika, Canada, dan Australia merupakan sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme. Masyarakat imigran tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya, dengan membawa kebudayaan, adat istiadat masing-masing. Amerika, Canada, dan Australia merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, tanpa menghilangkan identitas dan nenek moyang sebelumnya.⁵⁵⁵

Dalam pengembangan masyarakat multikultural di Amerika, Canada, dan Australia, masih terdapat pada kalangan masyarakatnya yang belum terpenuhi hak-hak sipilnya, sehingga peran pendidikan multikultural dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hak-hak masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini diangkat dengan judul multikultural dalam pendidikan.

B. Peran Lembaga Pendidikan dalam Multikultural

Multikultural adalah keragaman budaya.⁵⁵⁶ Dengan demikian pendidikan multikultural adalah proses kegiatan belajar mengajar, membimbing, melatih peserta didik menghargai keragaman budaya. Ali Maksum menyebutkan pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan dalam merespon perubahan sosi-kultural dan lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, pendidikan dituntut mampu merespon perkembangan keragaman masyarakat dan populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok sosial.⁵⁵⁷

Menurut Zamroni, pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, menjamin semua

⁵⁵⁵Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konseptual*. *Journal Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2

⁵⁵⁶Naim dan Achmad Sauqi, Ngainun, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 30

⁵⁵⁷Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2011).

peserta didik akan berhasil mencapai prestasi maksimal, sesuai dengan minat, bakat dan ketertarikannya.⁵⁵⁸ Sehingga peserta didik mampu hidup berdampingan ditengah-tengah masyarakat yang beranekaragam.

Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kemampuan peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap dan bertindak dalam menghadapi realita kehidupan yang berkemajuan dan berkeadilan didasari atas perbedaan multikultur dan multietnis. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan hiterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan agama.

Mahfud menyebutkan dalam menghadapi pluralisme budaya dalam realitas kehidupan, diperlukan paradigma baru yang lebih toleran, yaitu paradigma pendidikan multikultural. Maksudnya mengarahkan peserta didik untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, etnis maupun agama.⁵⁵⁹ Paradigma ini dimaksudkan, agar peserta didik hendaknya apresiatif terhadap budaya orang lain, perbedaan dan keberagaman merupakan kekuatan, kekayaan dan khazanah bangsa. Pandangan tersebut diharapkan sikap eksklusif yang selama ini bersemayam dalam otak peserta didik dan sikap membenarkan pandangan sendiri (*truth claim*) dengan menyalahkan pandangan dan pilihan orang lain dapat diminimalisasi atau dihilangkan.⁵⁶⁰

Banyak fakta di negeri ini tentang kerusuhan dan konflik yang terjadi disebabkan oleh SARA (suku, adat, ras dan agama). Bukti ini menunjukkan kegagalan dalam proses pendidikan dalam menciptakan dan mengembangkan kesadaran dan tindakan dalam pluralisme dan

⁵⁵⁸ *Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Multikultural Dan Pendidikan Agama Islam* http://eprints.walisongo.ac.id/7499/3/115112025_Bab2.pdf, h. 1. diakses pada tanggal 1 Januari 2020 Pukul 13.20

⁵⁵⁹ Mahfud, Choirul, *Elaborasi Konsep Pendidikan Multikultural, Skripsi Sarjana Pendidikan*, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 2005). Baca Juga: Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Cet Ke-1, h. 185-186.

⁵⁶⁰ Agus Munadlir. *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. JPSPD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, h. 118

multikulturalisme. Simbol budaya, ideologi, agama, bendera, baju dan atribut lainnya, sebenarnya boleh berbeda, namun pada hakikatnya kita adalah satu yaitu bhinneka tunggal ika. Setuju dalam perbedaan (*agree in disagreement*).

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dengan berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, budaya, dan agama, agar saling kerjasama dan tolong menolong. Perbedaan manusia merupakan sunnatullah bersifat alami. Disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13, artinya wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT menjadikan kamu sekalian dari yang satu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa.⁵⁶¹

Proses pendidikan dalam rangka mewujudkan insan yang bertakwa, maka guru di sekolah memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan multikultural dan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan dalam mendorong, memahami, dan berperilaku dalam realita kehidupan berdasarkan lintas budaya dari para peserta didik. Materi, cara mengajar, dan kepribadian guru dapat mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah yang diasumsikan peserta didik memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya.

Bangsa Indonesia yang multikultur mutlak harus dipandang dari kacamata multikulturalisme. Magnis Suseno menyebutkan Indonesia hanya dapat bersatu, jika pluralitas agama yang menjadi kenyataan sosial dihormati.⁵⁶² Ini dimaksudkan multikulturalisme agama tidak akan menghilangkan identitas setiap komponen bangsa dan partisipasi agama, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan agama sendiri tentang yang

⁵⁶¹Agus Munadlir. *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. JPSPD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, h. 119

⁵⁶²Magnis Suseno. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005)

baik kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu diperlukan transformasi kesadaran pendidikan multikultural menjadi identitas nasional dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.

Di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah guru perlu memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Strategi yang perlu digunakan ada bermacam-macam seperti: diskusi, simulasi, bermain peran, observasi, studi kasus dan *problem solving*. Melalui diskusi guru dapat memberikan masukan dan memperoleh informasi dari peserta didik tentang sumbangan aneka budaya dan suku dalam hidup bersama sebagai bangsa. Pembelajaran dengan diskusi dapat bertukar pikiran dengan peserta didik dari dari berbagai budaya.⁵⁶³ Pembelajaran dengan simulasi dan bermain peran, peserta didik difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang yang memiliki agama, budaya dan etnik yang berbeda dalam pergaulan sehari-hari.

Dalam kegiatan-kegiatan tertentu perlu dilakukan bersama dengan kepanitiaan bersama yang melibatkan aneka macam latar belakang peserta didik dari berbagai agama, etnik, budaya, bahasa. Melalui observasi dan studi kasus peserta didik dan guru mengadakan kegiatan bersama di dalam realita kehidupan masyarakat kultural. Kegiatan tersebut diharapkan untuk dapat mengamati proses sosial yang terjadi antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara warga masyarakat tersebut.

Di dalam masyarakat modern, lembaga pendidikan paling tidak memiliki tiga fungsi utama antara lain: (1) pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan individu-individu sesuai dengan kriteria keahlian, (2) pendidikan mengajarkan kemampuan-kemampuan praktis yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, (3) pendidikan berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral. Sekolah sebagai agen perubahan (*change*

⁵⁶³Abdullah Aly, Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 60-73

agent) diharapkan dapat menyediakan ketrampilan hidup (*life skill*) dan moralitas publik kepada peserta didik.⁵⁶⁴

Masyarakat hendaknya berpartisipasi di dalam proses pendidikan di sekolah, dengan memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat mendorong dan mengembangkan cakrawala pendidikan menuju masyarakat multikultural yang harmonis. Guru merupakan ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam usaha menentukan keberhasilan pemahaman lintas budaya peserta didik, cara mengajar, kepribadian guru, materi pembelajaran dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran dalam mendukung pengembangan situasi dan kondisi yang kondusif di sekolah berdasarkan pada kehidupan mutltikultural bagi warga sekolah khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.⁵⁶⁵

C. Membangun Pendidikan Berkesadaran Multikultural

Pendidikan merupakan sarana untuk penjagaan nilainilai yang dirasakan mampu mendorong perkembangan dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Dalam pendidikan multikultural diharapkan seorang guru dituntut profesional, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan peserta didik menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik, dan kejujuran dalam prilaku keseharian.

Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal; (1) membangun sikap persamaan (*equality*); (2) mendorong demokrasi substansial; dan (3) membangun *gender equality*.⁵⁶⁶

Pertama, membangun sikap persamaan (*equality*). Sejarah kehidupan manusia selama berabad-abad menunjukkan bahwa persamaan dan

⁵⁶⁴Agus Munadlir. *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. JPSPD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, h. 121

⁵⁶⁵Agus Munadlir. *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. JPSPD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2 Agustus 2016, h. 121

⁵⁶⁶Ulfa Masamah dan Muhammad Zamhari, *Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Berkesadaran Multikultural*. Journal Quality, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 281

perbedaan antar manusia selalu menjadi bahan kajian yang mungkin mendasari hampir semua teori tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya. Perbedaan yang lebih lanjut dapat ditemukan oleh seorang manusia saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Bikhu Parekh menyebutkan banyak kajian yang berusaha memahami manusia dalam kaitannya dengan teori substantif persamaan, ini lebih banyak memperhitungkan kelompok marginal atau terpinggirkan. Persamaan mensyarakat adanya pelibatan, kebebasan dan sama dalam kesempatan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Derajat paling dasar adalah adanya penghormatan pada hak masing-masing individu⁵⁶⁷

Guru harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, *equality* dan toleransi kepada peserta didik. Dengan menekankan setiap orang dengan segala latar belakangnya memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Tidak boleh satu kelompok mendominasi kelompok yang lainnya. Kelompok mayoritas tidak boleh menghegemoni kelompok minoritas. Disinilah penanaman nilai multikultural ini menjadi penting dalam pendidikan di Indonesia. ⁵⁶⁸

Peserta didik hendaknya ditanamkan semangat bekerjasama dalam kesedaerajatan, kesamaan dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama, dan gender. Menurut Abdurrahman Wahid, kata kunci dalam kehidupan berbangsa adalah adanya persamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan atau dihormati keberadaannya, persamaan mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama atas hukum. Dengan demikian peserta didik dapat mengasah rasa sensitivitas terhadap kultur-kultur minoritas dan menggerakkan kelompok kultur yang mayoritas untuk mempunyai perasaan dan sikap yang sama dengan kelompok kultur lainnya.⁵⁶⁹

⁵⁶⁷Bikhu Parekh. *What is Multiculturalism? Jurnal India Seminar*. Desember 1999. Raz J. *Ethics in Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*. (Oxford: Clarendon Press, 1996), h. 177.

⁵⁶⁸Moeis, Isnarmi, *Pendidikan Multikultural Transformatif Integritas Moral, Dialogis, dan Adil*. (Padang: UNP Press, 2014).

⁵⁶⁹Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Kedua, mendorong demokrasi substansial. Keragaman yang ada di Indonesia seringkali menumbuhkan konflik kekerasan. Konflik perbedaan gagasanpun telah merambah perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial dan ekonomi. Disinilah dunia pendidikan berbasis multikultural harus mampu mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan sehingga konflik bisa dikelola dengan baik.

Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsensus dalam masyarakat. Kebutuhan akan konsesnsus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar prinsip dari kesamaan dan hak individu. Guru dengan pendidikan multikulturalnya selalu mendorong untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana membangun konsensus seluruh warga negara. Pendidikan multikultural menginginkan adanya demokrasi yang substansional, tidak hanya prosedural. Demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya seremonial. Karena demokrasi yang demikian akan selalu mendorong adanya persamaan warga dalam hukum.⁵⁷⁰

Pendidikan multikultural harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleransi dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada. Pendidikan harus mampu membangun sikap hidup yang multikultural bukan monokultural, cara hidup pambaruan bukan pembauran, pro-eksistensi bukan koeksistensi, bukan separasi tetapi interaksi. Guru melalui pendidikan multikultural merupakan sarana yang paling baik untuk proses pembudayaan. Peserta didik akan terlatih dan terbangun kesadarannya untuk bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam kehidupan mereka.⁵⁷¹

Ketiga, membangun *Gender Equality*. Gender merupakan suatu sifat yang diletakan pada lakilaki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial maka gender tidak berlaku untuk selamanya, dapat berubah-ubah, serta berbeda-beda satu

⁵⁷⁰Marshall, Patricia L., *Using my you Lie Moment to Theorize Persistent Resistance to Critical Multicultural Education in International Journal of Multicultural Education*. Volume 17, No. 2, 2015, hal 117-134

⁵⁷¹Ulfa Masamah dan Muhammad Zamhari, *Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Berkesadaran Multikultural*. Journal Quality, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 183

dengan yang lainnya dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan. Lebih lanjut, berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu: marginalisasi, sub-ordinasi, stereotype, kekerasan (*violence*) dan beban kerja (*double burden*).⁵⁷²

Akibat dari ketidakadilan tersebut terlihat saat ini kebanyakan perempuan sangat minim mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam kehidupan sosial jika dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga dalam bidang keagamaan.⁵⁷³ Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip kulliyah al-khams, yang merupakan tujuan utama syariat (*maqashid as-syariat*). Prinsip *al-kulliyah al-khams* memberi penekanan kesamaan dan kesetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan serta hak-hak mereka yang vital. Perempuan juga memiliki potensi untuk bisa memainkan peran-peran yang selama ini diklaim hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak di antara kaum perempuan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik dan publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.⁵⁷⁴

Guru dengan pendidikan multikultural seharusnya mendasarkan kepada Al-Qur'an dalam membangun kesadaran dan menanamkan kesetaraan kepada peserta didik, karena Al-Qur'an banyak memuat konsep kesetaraan gender. *Pertama*, Al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di segala bidang kehidupan.

Kesamaan tersebut dapat dilihat dari dimensi: *pertama*, hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak-hak

⁵⁷²Umar, H. *Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)

⁵⁷³Abdul Rachman, Arifin. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung. 2001)

⁵⁷⁴Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad Tarj. Ali Audah*, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2010).

untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik dan hak-hak lainnya yang berkenaan dengan urusan publik. *Kedua*, segi ajaran agama. Islam mengajarkan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan balasan ketika melakukan kebaikan dan begitu pula sebaliknya. *Ketiga*, segi hak-hak dalam keluarga, Islam memberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris kepada perempuan.⁵⁷⁵

Guru seharusnya menekankan pemahaman teks-teks keagamaan dengan pendekatan sosiologis-kontekstual, karena hal ini berkaitan dengan persoalan partikular. Seiring dengan perkembangan evolutif kesadaran mereka bahwa eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan mengalami pergeseran yang cukup signifikan serta perubahan yang mendasar sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-hak asasi dasar (*basic rights*) dan keadilan sebagai warga negara secara personal. Semangat dari penafsiran teks-teks agama hendaknya mendasarkan pada prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmatan, tanpa harus terbatas oleh sekat gender, jenis kelamin, dan sistem sosial.⁵⁷⁶

Pemikiran multikultural dalam pendidikan menemukan titik temunya. Berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan multikultural haruslah diarahkan untuk mencari keadilan gender. Hal ini tentunya berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dikalangan umat Islam harus mendasarkan pada kerangka keseimbangan (*tawazun, balance*) dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan kesejarahan dan sosiologis, pendekatan masalah dan pendekatan ekonomi.⁵⁷⁷

⁵⁷⁵Kim, Hyein Amber, *Biracial Identity Development: A Case of Black Korean Biracial Individuals in Korea* dalam *International Journal of Multicultural Education*. Volume 18, No. 3, 2016, hal 40-57

⁵⁷⁶Shaleh, Rachman, Abdul, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

⁵⁷⁷Hasyim, Dardiri HA, Yudi Hartono. *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. (Surakarta: Sebelas Maret Universiti Press, 2008)

Dengan demikian pendidikan multikultural akan mampu membangun reaktualisasi dan pemahaman baru yang dibangun berdasarkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Guru dengan pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun pemahaman yang humanis dan berwawasan gender, agar perempuan mempunyai peran dan kebebasan dalam berbagai sektor kehidupan.

James A. Banks mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (1) integrasi *content integration*; (2) *knowledge construction*; (3) *prejudice reduction*; (4) *equitable pedagogy*; dan (5) *empowering school culture and social structure*.⁵⁷⁸

Pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural adalah pendekatan kajian kelompok tunggal (*Single Group Studies*) dan pendekatan perspektif ganda (*Multiple Perspectives Approach*). Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal.⁵⁷⁹

D. Implementasi Kurikulum Pendidikan Multikultural

Agar pendidikan lebih multikultural, maka kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran guru harus dibuat multikultural. Isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain. Suasana sekolah amat penting dalam penanaman nilai multibudaya.⁵⁸⁰ Sekolah harus dibangun dengan suasana yang menunjang penghargaan budaya lain. Relasi guru, karyawan, siswa

⁵⁷⁸Banks, James A. *Multicultural Education Issues and Perspectives*. (United States: John Wiley & Sons Inc, 2013)

⁵⁷⁹Ulfa Masamah dan Muhammad Zamhari, *Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Berkesadaran Multikultural*. *Journal Quality*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 186

⁵⁸⁰Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta Tahun 2008*. (Surakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

yang berbeda budaya diatur dengan baik, ada saling penghargaan. Anak dari kelompok lain tidak ditolak tetapi dihargai.⁵⁸¹

Kegiatan ekstrakurikuler hendaknya juga multinilai. Sikap menghargai orang yang berbeda dari budaya lain lebih berkembang bila siswa mempraktikkan dan mengalami sendiri. Maka, model *live-in*, tinggal di tengah orang yang berbudaya lain, amat dapat membantu siswa menghargai budaya lain. Misalnya siswa dari Bali ikut *live-in* satu minggu di tengah orang Sunda. Jika mereka mengalami bahwa di situ diterima dengan baik, mereka dibantu lebih menghargai budaya Sunda. Proyek dan kepanitiaan di sekolah baik juga diatur dengan lebih variasi dan beragam. Setiap panitia terdiri dari aneka macam siswa dari berbagai suku, ras, agama, budaya, dan gender. Ini lebih menumbuhkan semangat kesatuan dalam perbedaan yang ada.⁵⁸²

Kurikulum yang diperlukan dalam pendidikan multikultural mempunyai tiga komponen utama; yaitu isi, metode, dan manusia. *Isi* mencakup ilmu pengetahuan, teori, konsep, fakta, kontribusi, dan perspektif dari kelompok yang berbeda suku, etnisitas, gender, bahasa, kelas sosial, agama, orientasi seksual, cacat dan tidak cacat, kepercayaan politik dan sebagainya yang secara historis tidak terpresentasikan dalam ranah pendidikan.⁵⁸³

Metode, mencakup strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya pengajaran dan pembelajaran yang berbeda, kebijakan-kebijakan akademik yang mendukung rekrutmen, mentoring, memori siswa multikultural, pengajar, populasi staff, dan proses kurikulum yang mendorong eksplorasi, pengembangan, dan implementasi kurikulum multikultural.

Manusia, menyangkut siswa multikultural, pengajar, dan populasi staff yang mendukung dan mengembangkan implementasi kurikulum multikultural melalui metode yang telah digunakan. Walaupun begitu, perumusan dan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia masih memerlukan

⁵⁸¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Model Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan SMA/MA/SMK/MAK Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Tahun 2017.

⁵⁸²Imam Nasruddin. *Ibid.*, h. 10

⁵⁸³Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. *Panduan Membuat Bahan Ajar* (Surabaya: Kata Pena, 2014)

pembahasan serius dan khusus. Hal ini bukan hanya karena menyangkut masalah isi pendidikan multikultural itu sendiri, tetapi juga mengenai strategi yang ditempuh; misalnya dalam bentuk mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (*separated*), atau sebaliknya terpadu atau terintegrasi (*integrated*).

Terlepas dari berbagai isu dan masalah, yang jelas perkembangan Indonesia sekarang kelihatannya membutuhkan pendidikan multikultural, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan keikaan di tengah kebhinnekaan yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon. Langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

E. Kesimpulan

Multikultural dalam pendidikan yang dikembangkan memiliki relevansi dengan konteks Indonesia, yaitu memiliki semboyan bhinneka tunggal Ika. Semboyan ini dapat mengakomodasi secara proporsional, normatif dan demokratis bagi bangsa Indonesia. Multikulturalisme pada prinsipnya adalah membangun dirinya, bangsa dan negara tanpa merasakan sebagai beban dan hambatan, namun didasarkan pada ikatan persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta saling menghormati, menghargai, toleransi dan bekerja sama dalam membangun Indonesia yang maju, aman, damai, tenteram, harmonis dan sejahtera.

F. Saran

Pengembangan pendidikan multikultural yang telah relevan dengan semboyan bhinneka tunggal ika secara proporsional, normative dan demokratis dala konteks Indonesia, dapat dipertahankan bahkan jika perlu lebih ditingkatkan, terutama peningkatan nilai persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Aly. (2003). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Abdullah. (2008). *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta Tahun 2006/2007*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Abdul Rachman, Arifin. (2001). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Agus Munadlir. (2016). *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. JPSPD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2.
- Ali Maksum. (2011). *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Banks, James A. (2013). *Multicultural Education Issues and Perspectives*. United States: John Wiley & Sons Inc
- Bikhu Parekh. (1996). *what is Multiculturalism?* Dalam Jurnal India Seminar, Desember 1999. Raz J. *Ethics in Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics*. Oxford: Clarendon Press.
- Dede Rosyada. (2014). *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1.
- Haekal, Muhammad Husain. (2010). *Sejarah Hidup Muhammad Tarj. Ali Audah*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Hasyim, Dardiri HA, Yudi Hartono. (2008). *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Surakarta: Sebelas Maret Universiti Press.
- J.M. Juran. (1999). *How to Think about Quality*” dalam *Juran’s Quality Handbook*, Eds. Joseph M. Juran et al. (New York: MCGraw-Hill Companies, Inc.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Model Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan SMA/MA/SMK/MAK Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Menteri Pndidikan dan Kebudayaan.
- Kim, Hyein Amber. (2016). *Biracial Identity Development: A Case of Black – Korean Biracial Individuals in Korea* dalam *International Journal of Multicultural Education*. Volume 18, No. 3.

- Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. (2014). *Panduan Membuat Bahan Ajar (BukuTeks Pelajaran Sesuai dengan Kurikulum 2013)*. Surabaya: Kata Pena.
- Magnis-Suseno. (2005). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mahfud, Choirul. (2005). *Elaborasi Konsep Pendidikan Multikultural*. Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel.
- Mahfud, Choirul. (2006). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet Ke-1.
- Marshall, Patricia L. (2015). *Using My 'You Lie Moment' to Theorize Persistent Resistance to Critical Multicultural Education in International Journal of Multicultural Education*. Volume 17, No. 2.
- Masamah, Ulfa dan Muhammad Zamhari. (2016). *Peran Guru Dalam Membangun Pendidikan Berkesadaran Multikultural*. Journal Quality, Vol. 4, No. 2.
- Munadlir, Agus. (2016). *Strategi Sekolah Dalam Pendidikan Multikultural*. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Vol. 2, No. 2.
- Moeis, Isnarmi. (2014). *Pendidikan Multikultural Transformatif Integritas Moral, Dialogis, dan Adil*. Padang: UNP Press
- Naim dan Achmad Sauqi, Ngainun. (2008). *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nasruddin, Imam. (2014). *Menggagas Pendidikan Multikultural*. Journal Ilmiah.
- Rosyada, Dede. (2014). *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1.
- Shaleh, Rachman, Abdul. (2004). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ulfa Masamah dan Muhammad Zamhari. 2016). *Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Berkesadaran Multikultural*. Journal Quality, Vol. 4, No. 2.
- Umar, H. (1999). *Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BAB XV

MULTIKULTURAL DALAM BERAGAMA

A. Pendahuluan

Agama sangat penting sebagai pandangan hidup. M. Amin Abdullah menyebutkan tradisi agama telah mendarah daging dalam sejarah kehidupan umat manusia, seperti Timur Tengah dengan tradisi Islam, Eropa, dan Amerika dengan tradisi Kristen, Cina dengan tradisi Konfusianisme, Thailand dengan Budhisme, India dengan Hinduisme.⁵⁸⁴ Indonesia terdiri atas enam agama, yaitu Islam (87, 18 %), Kristen (6, 96 %), Katolik (2, 91%), Hindu (1, 69%), Buddha (0, 72%), Khonghucu (0, 05%) dan agama lainnya (0, 50%).⁵⁸⁵

Agama di Indonesia tidak mutlak, akibat perpindahan penduduk, pencampuran budaya dan saling mempengaruhi dalam keberagaman.⁵⁸⁶ Terdiri atas 1.340 suku bangsa.⁵⁸⁷ Keragaman Indonesia tidak saja tercermin dari banyaknya pulau yang dipersatukan di bawah satu kekuasaan negara, melainkan juga keragaman warna kulit, bahasa, etnis, budaya dan agama.⁵⁸⁸

Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan dan keyakinan, diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Perilaku yang diperankan oleh individu atau kelompok, terkait sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut masing-masing masyarakat. Perbedaan pandangan dapat menimbulkan fanatisme sempit, pengucian diri terhadap pandangan lain dalam masyarakat, sehingga agama memiliki potensi menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal, yang akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Hubungan antaragama rentan konflik karena agama menjadi alat bagi banyak kepentingan seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial,

⁵⁸⁴M. Amin Abdullah. *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. (Jakarta: PSAP, 2005), h. 1-2

⁵⁸⁵Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), h.13.

⁵⁸⁶Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional*. *Journal Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 1 Mei 2014.

⁵⁸⁷Data BPS. Hasil sensus BPS Tahun 2010.

⁵⁸⁸Clifford Geertz. *Occasional Paper of The Social Science*, Desember, 2001, h. 11

budaya dan lainnya.⁵⁸⁹ Seperti hubungan antaragama seringkali diwarnai prasangka yang mengganggu kerukunan antaragama karena sering dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan multitafsir.⁵⁹⁰

Agama dapat menjadi faktor signifikan bagi munculnya konflik sosial yang luar biasa implikasinya karena melibatkan sisi yang paling dalam pada emosi manusia.⁵⁹¹ Seperti peristiwa yang terjadi di Poso yang disebabkan oleh konflik agama Islam dan Kristen dan unsur-unsur lain dari luar dan munculnya gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka yang menginginkan pemisahan diri dari negara Indonesia. Ancaman terhadap toleransi seringkali muncul dari perilaku pemeluk agama fundamentalis, dengan wawasan sempit (*closed mindedness*).⁵⁹² bahkan menengarai intoleransi tidak hanya terjadi antaragama, namun dapat terjadi pada intraagama seperti pada berkembangnya ajaran Islam transnasional yang eksklusif, tertutup dari Islam arus utama (*mainstream*) yang inklusif, toleran dan sudah lebih lama berkembang di Indonesia.⁵⁹³

Keragaman agama di Indonesia dapat menjadi satu keunikan bangsa Indonesia dibanding bangsa lainnya di dunia. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman agama. Maka sangat penting untuk mengedepankan toleransi dan menghargai agama dan peribadatan antar agama. Setiap agama memiliki aturan sendiri bagi penganutnya, maka hal ini juga harus menjadi dasar dalam ranah toleransi,

⁵⁸⁹Abdullah, M. A. *Kerukunan Umat Beragama: Perspektif Filosofis-Pedagogis*. Harmoni—Jurnal Multikultural & Multireligius. Vol. 1. No. 4. 2002, h. 24-38

⁵⁹⁰Susetyo, D.P.B., *Stereotip dan Relasi Antarkelompok*. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2010).

⁵⁹¹Bukhori, B., *Model Toleransi Mahasiswa Muslim terhadap Umat Kristiani* (Studi pada Umat Islam). Disertasi. (Yogyakarta: Program Doktor Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2013).

⁵⁹²Sarwono, S.W., *Psikologi Sosial- Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

⁵⁹³Sulistio, *Konflik Intraagama di Indonesia-Antara Islam Transnasional dan Islam Arus Utama*. Prosiding. Diskusi Psikologi Sosial Quo Vadis Konflik Sosial di Indonesia. (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2015).

sehingga makna toleransi diletakkan pada porsinya. Toleransi secara bahasa Latin yaitu *tolerare*, toleransi berarti sabar dan menahan diri.⁵⁹⁴

Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat multikultural. Suryadinata menyebutkan multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman termasuk keragaman agama.⁵⁹⁵ Sehingga terhindar terjadinya diskriminasi dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka bab ini mengambil judul multikultural dalam beragama.

B. Pengertian Masyarakat Multikultural Beragama

Multikultural adalah kebudayaan. Secara hakiki, multikultural merupakan pengakuan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.⁵⁹⁶ Paradigma multikulturalisme memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain (*the others*). Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam dan etnis, agama, budaya hingga orientasi politik, bisa mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di belakang hari.⁵⁹⁷

Conrad P. Kottak menjelaskan kultural memiliki beberapa karakter khusus, antara lain: (1) kultur adalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus; (2) kultur adalah sesuatu yang dipelajari; (3) kultur adalah sebuah symbol; (4) kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami; (5) kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi

⁵⁹⁴Dede Rosyada. *Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konseptual*. Journal Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 1 Mei 2014, h. 2

⁵⁹⁵Leo Suryadinata. *Indonesia State Policy toward Ethnic Chinese; Forum Assimilation to Multikulturalisme*. Jurnal Antropologi Indonesia. (Bali: Universitas Udayana, 2002).

⁵⁹⁶Choirul Mahfiid, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 75.

⁵⁹⁷Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 65

atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat; (6) kultur adalah sebuah model; (7) kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif.⁵⁹⁸

Abdullah menyatakan multikulturalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal, tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Penekanan utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan budaya.⁵⁹⁹ Multikulturalisme merupakan pengakuan beberapa kultural yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sederajat dan saling menguntungkan satu dengan lain. Atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural. Multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman budaya.⁶⁰⁰

Multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman kultural. Multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin politik pragmatis, multikultural merupakan sebuah pandangan kehidupan manusia (paradigma). Pierre L. van den Berghe membuat karakteristik masyarakat multikultural ini, yaitu: (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik; (5) kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (6) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta (7) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.⁶⁰¹

Masyarakat multikultural adalah sikap menerima kemajemukan, ekspresi budaya manusia dalam memahami pesan utama agama, terlepas dari rincian para penganutnya. Basis utamanya dieksplorasi dengan melandaskan pada

⁵⁹⁸Ngainun Nairn dan Ahmad Syaui, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 123 - 125

⁵⁹⁹Abdullah, Taufik. *Menteri-menteri Agama RI (Biografi Sosial Politik)*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998).

⁶⁰⁰Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 75

⁶⁰¹Pierre L. van den Berghe dikutip oleh Michael Banton, *Racial and Ethnic Competition* (New York: Cambridge University Press, 1983), h. 95.

ajaran Islam, sebab dimensi Islam menjadi dasar pembeda sekaligus titik tekan dari konstruksi pendidikan ini. Penggunaan kata pendidikan Islam tidak dimaksudkan untuk menegasikan ajaran agama lain atau pendidikan non Muslim, tetapi justru untuk meneguhkan, bahwa Islam dan pendidikan Islam sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis-multikultural.⁶⁰²

Multikultural mengandung tiga aspek, yaitu (1) keanekaragaman subkultural; (2) keanekaragaman perspektif; dan (3) keanekaragaman komunal. Robert W. Hefner mengemukakan bahwa multikultural adalah agar dimasukkannya kaum marjinal yang tidak diuntungkan, termasuk komunitas religius kedalam kehidupan publik.⁶⁰³ Dengan demikian pengertian masyarakat multikultural dalam beragama merupakan sikap saling menerima, menghargai, menghormati dan melindungi keberagaman agama, sehingga memiliki kesetaraan dalam kehidupan masyarakat.

C. Peran Agama dalam Masyarakat Multikultural

Multikultural dalam agama memerlukan manajemen konflik, sebuah kelapangan, sehingga manajemen konflik dan ketegangan secara berkesinambungan dapat dikelola dengan baik. Jika multikultural tidak dikelola dengan baik dan bijaksana, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, maka sering terjadi konflik, seperti terjadi konflik di Poso, Aceh, Ambon, Maluku dan Papua, sehingga pada akhirnya merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Agama Islam berkaitan dengan aqidah, Islam tidak dicampurkan dengan agama lain. Sesuai QS. Al Kafirun yang artinya: Hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan utukkulah agamaku.⁶⁰⁴

⁶⁰²Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 41

⁶⁰³Dodi S. Truna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 66

⁶⁰⁴Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Kafirun ayat 1-6

Agama Islam di Indonesia dikenal sangat moderat. Moderasi ini tumbuh secara organik dari akar sejarah. Islamisasi yang terjadi di tanah air justru berawal dari cara-cara yang sangat multikultural, ditandai pengakuan nilai-nilai lokal berdampingan dengan nilai-nilai lain dalam masyarakat.⁶⁰⁵

Islam mengajarkan kepada pemeluknya, agar tetap saling tolong menolong, membantu yang sedang tertimpa musibah, sebagai bentuk hubungan yang baik terhadap sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, ras dan budaya. Allah SWT berfirman yang artinya. Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶⁰⁶ Sehingga menjadikan kehidupan umat manusia itu terciptanya suasana kedamaian dan kesejahteraan.

Agama Islam melarang umatnya saling menghina atau mengolok-olok satu dengan lainnya. Allah SWT berfirman dala Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13, yang artinya. Janganlah sekumpulan orang-orang merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁶⁰⁷ Ayat ini menegaskan kepada semua manusia agar saling menghormati, menghargai, melindungi dan tidak saling merendahkan, menghina dan mencela serta tidak boleh membicarakan keburukan orang lainnya. Karena hal ini berpotensi munculnya permasalahan atau konflik antar umat beragama. Maka Rasulullah SAW mengajarkan manusia untuk selalu menjaga lisan. Seperti hadits berbunyi: Barang siapa yang beriman kepada

⁶⁰⁵Abdurrahman Wahid. *Hubungan antar-agama, Dimensi Internal dan Eksternalnya di Indonesia dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, Seri Dian I Tahun I*. (Yogyakarta: Penerbit Dian / Interfidei,t.t.), h.12

⁶⁰⁶Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Hujurat ayat 13

⁶⁰⁷Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Hujurat ayat 13

Allah dan Rasul-NYA, maka hendaklah berkata baik atau diam. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya.⁶⁰⁸

Dengan demikian peran agama dalam membangun multikultural dalam beragama sangat penting, dalam upaya membentuk lingkungan masyarakat dan kondisi bangsa semakin utuh dan kuat dalam kesatuan. Agama adalah landasan seseorang dalam berbuat kebaikan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya beberapa konflik yang ada di Indonesia juga atas dorongan fanatisme sempit golongan baik agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha maupun Konghuchu. Dalam hal ini, masing-masing agama menegaskan dalam ibadah ritual agama, tidak boleh dicampuradukkan dan sangat dilarang dalam agama, Allah SWT berfirman. Untukmu agamamu dan untukulah agamaku.⁶⁰⁹ Maka jika kemudian ada yang menganggap hal ini bertentangan dengan pancasila, atau tidak toleransi maka hal ini harus diluruskan. Islam sangat bertoleransi dengan agama lain, dapat dilihat dalam masyarakat mayoritas Muslim, selalu tercipta kedamaian dan keharmonisan serta toleransi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

D. Membangun Toleransi dalam Masyarakat Multikultural

Toleransi dalam beragama menjadi sangat penting. Islam telah memberi pedoman sangat jelas, bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 256, yang artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).⁶¹⁰ Semua orang dipersilahkan memilih agama sesuai keyakinan masing-masing. Tidak boleh memaksakan agama dalam bermasyarakat. Agama merupakan keyakinan yang dipilih oleh penganutnya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Islam sangat tegas dalam perkara ibadah. Bukan karena tidak toleransi tetapi ini merupakan konsep toleransi yang baik untuk ditanamkan kepada masyarakat yang beragama. Aku tidak menyembah yang kamu sembah.⁶¹¹ Dalam beragama, seseorang tidak boleh memaksakan, apalagi jika

⁶⁰⁸HR. Bukhori

⁶⁰⁹Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS Al Kafirun ayat 1-6

⁶¹⁰Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS Al Baqoroh ayat 256

⁶¹¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. QS. Al Kafirun ayat 2

mengganggu, tentu sangat tidak dibenarkan. Setiap orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Jika sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang Kristen ke gereja, demikian pula agama lainnya.

Hukum telah menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, ⁶¹² Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.⁶¹³ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.⁶¹⁴ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama, tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan.⁶¹⁵ Wajib menghormati hak asasi orang lain.⁶¹⁶ Selanjutnya mengatur pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.⁶¹⁷

Agama menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, melindungi dan bahkan saling bertolong menolong di dalam kebaikan.⁶¹⁸ Umpama semua umat beragama, mampu menunjukkan perilaku terbaik, sesuai perintah ajaran agamanya, maka sebenarnya tidak terjadi persoalan toleransi terkait agama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

⁶¹²Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

⁶¹³ Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

⁶¹⁴ Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

⁶¹⁵Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

⁶¹⁶Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

⁶¹⁷Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

⁶¹⁸Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Maidah ayat 2

Jika tidak terpelihara rasa toleransi di antara mereka, seperti yang berbeda merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Boleh jadi, gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari aspek lain, seperti ekonomi, sosial, hukum, keamanan dan sebagainya. Misalnya melihat seseorang terlalu memonopoli kegiatan ekonomi, sehingga merugikan atau mengganggu orang lain, sehingga muncul rasa kecewa dan atau sakit hati. Demikian pula jika terdapat sekelompok orang tidak mempedulikan dan bahkan berperilaku merendahkan, maka orang lain, merasa terganggu. Hal demikian tersebut kemudian menjadikan pihak lain merasa dirugikan, direndahkan atau dikalahkan. Padahal sekalipun mereka memeluk agama berbeda, tetapi jika mereka masih sanggup menjaga hubungan baik, berperilaku adil, jujur, menghormati pihak lain, maka tidak terjadi persoalan dalam kehidupan bersama. Semua orang merasa senang jika diperlakukan dengan cara-cara baik, darimanapun datangnya kebaikan itu. Orang yang berperilaku baik diterima oleh siapapun.

E. Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Multikultural

Islam berarti tunduk, patuh, dan damai. Karakteristik dan watak dasar Islam adalah gagasan komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam kehidupan manusia. Islam sebagai agama diturunkan untuk mewujudkan kedamaian dan perdamaian dan rahmat bagi sekalian alam semesta.⁶¹⁹ Segala bentuk terorisme, brutalisme, perusakan, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Muslim radikal, mengatasmakan Islam, sebenarnya bertentangan dengan watak dasar dan misi damai Islam itu sendiri. Islam tidak mengajarkan terorisme, brutalisme, perusakan, pembakaran ataupun tindak tanduk kekerasan lainnya.⁶²⁰ Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, meletakkan konsep dan doktrin yang memberikan rahmat bagi alam semesta. Islam sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis-multikultural,

⁶¹⁹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Anbiya ayat 107.

⁶²⁰ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999, hlm. 200.

memandang dan menempatkan harkat martabat manusia sebagai individu maupun sebagai anggota sosial dalam masyarakat.

Nilai-nilai Islam yang menghargai dimensi pluralis multikultural adalah: *Pertama*, konsep kesamaan (*as-sawiydti*), memandang manusia pada dasarnya sederajat. Satu-satunya pembedaan kualitatif dalam pandangan Islam adalah ketakwaan. Konsep ini secara sosiologis membongkar pandangan feodalisme, baik feodalisme religius, feodalisme kapitalis ataupun feodalisme aristokratis.⁶²¹ Islam pada esensinya memandang manusia dan kemanusiaan secara sangat positif dan optimistik. Seluruh manusia berasal dari satu asal, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Namun dalam perkembangannya, kemudian terpecah menjadi bersuku-suku, berkaum-kaum atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaan dan peradaban masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi, saling mendekati, saling menghormati dalam interaksi sosial.⁶²² Islam dijadikan dasar perspektif kesatuan umat manusia (*universal humanity*), yang pada gilirannya mendorong solidaritas antar manusia.⁶²³ Nabi Muhammad SAW, membuat pernyataan etika global pada pelaksanaan ibadah haji terakhir: Wahai umat manusia, semua orang berasal dari Adam, sedangkan Adam dari ekstrak tanah. Orang Arab tidak lebih mulia dari pada non Arab, orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam, kecuali karena kelebihan ketakwaannya.⁶²⁴ Kemudian pada suatu saat Nabi Muhammad SAW melihat usungan jenazah, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri sebagai penghormatan. Diantara sahabat ada yang memberitahu, bahwa jenazah itu adalah jenazah orang Yahudi. Nabi bersabda: Tapi dia adalah

⁶²¹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005, hlm. 142.

⁶²²Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Hujurat ayat 13, dan Surat An Nisa ayat 1.

⁶²³ Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta: Bentang, 2000), h. 2

⁶²⁴Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 280.

manusia.⁶²⁵ Ini membuktikan Islam tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, etnis, suku dan kebangsaannya, hanya ketakwaan seseoranglah yang membedakannya dihadapan sang pencipta.

Kedua, konsep keadilan (*al-'adalah*), yang membongkar budaya nepotisme dan sikap-sikap korupsi, baik dalam politik, ekonomi, hukum, hak dan kewajiban, bahkan dalam praktek-praktek keagamaan. Allah SWT memerintahkan hambaNya untuk berlaku adil terhadap siapapun.⁶²⁶ Jangan sampai kebencian terhadap suatu pihak itu mendorong untuk tidak berlaku adil.⁶²⁷ Adil dilakukan terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok dan juga terhadap lawan.⁶²⁸ Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh kepada umatnya dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan. Seperti terjadi Fathu Makkah, Nabi dan para pengikutnya tidak melakukan tindakan balas dendam dan tidak pula memaksa orang-orang kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Para kepala suku masyarakat Arab di jazirah Arab berbondong-bondong datang kepada Nabi SAW dengan kesadaran sendiri yang mendalam, mereka menyatakan diri memeluk agama Islam.⁶²⁹ Konsep keadilan (*al-'adalah*) dan Konsep kebebasan/kemerdekaan (*al-hurriyah*), memandang semua manusia pada hakekatnya hanya hamba Tuhan saja, bukan hamba sesama manusia. Berakar dari konsep ini, maka manusia dalam pandangan Islam mempunyai kemerdekaan dalam memilih profesi, memilih wilayah hidup, bahkan dalam menentukan pilihan agamapun tidak dapat dipaksa.⁶³⁰

Ketiga, prinsip-prinsip kebebasan beragama ini pulalah yang telah dipraktikkan di Madinah oleh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau meletakkan dasar-dasar kerukunan hidup antar umat Islam, komunitas Yahudi dan

⁶²⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Ibid.*, h. 280.

⁶²⁶ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. An Nisa' ayat 58.

⁶²⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al Maidah ayat 8.

⁶²⁸ Muhammad Tholhah Hasan, *Ibid.*, h. 281.

⁶²⁹ Faisal Ismail, Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999, hlm. 201

⁶³⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. *Ibid.*, QS. Al-Baqarah ayat 256.

komunitas non Muslim lewat Piagam Madinah yang telah disepakati oleh para wakil dari masing-masing kelompok. Piagam Madinah sebagaimana dikenal dalam sejarah, merupakan suatu piagam politik pertama di dunia yang memuat dasar-dasar toleransi dan kebebasan agama yang dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, ide tentang toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama sebenarnya memiliki akar-akar histories yang sangat kuat, dalam struktur ajaran Islam dan menemukan bukti-bukti yang jelas dan nyata dalam praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Keempat, begitu pula ketika Yarusalem masuk dalam kekuasaan Islam, Umar Ibnu Khatthab memberikan kebebasan beragama kepada kelompok-kelompok non-Muslim dan membiarkan rumah-rumah ibadah (gereja dan sinagog) tetap berfungsi seperti sediakala. Lihat Yerusalem sekarang ini mempunyai rumah-rumah ibadah dari berbagai agama (Islam, Kristen dan Yahudi) yang diwarisi dari sejarah toleransi umat Islam di masa lampau. Begitu pula ketika Amru Ibn Ash berhasil menaklukkan negeri Mesir, tidak terjadi pemaksaan oleh umat Islam kepada penduduk setempat untuk memeluk agama Islam. Keberadaan komunitas Kristen di Mesir dewasa ini yang diperlakukan dengan baik dan adil oleh pemerintah dan rakyat mesir merupakan bukti nyata tentang toleransi umat Islam terhadap kelompok minoritas dan keadaan ini sebenarnya merupakan kesinambungan dari warisan sejarah toleransi umat Islam di masa lampau.⁶³¹

Kelima, konsep toleransi (*tasamuh*) yang merupakan sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Bahasa Arab menterjemahkan dengan *tasamuh*, berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Dengan demikian, toleransi dapat diartikan memberikan kemerdekaan kepada golongan kecil untuk menganut dan menyatakan pandangan-pandangan politik dan agamanya, memberikan hak-hak istimewa seperti yang diperoleh golongan besar. Toleransi berarti

⁶³¹Faisal Ismail, *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), h. 202

mbolehkan, membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi, toleransi mengandung konsesi artinya, pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati, bukan didasarkan kepada hak. Jelaslah bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan dalam menghormati perbedaan atau prinsip orang lain itu hendaklah tanpa mengorbankan prinsip sendiri.

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umat. Suatu tanda bahwa ada sikap dan suasana toleransi di antara sesama manusia, atau katakanlah di antara pemeluk agama yang berbeda ialah ketika adanya sikap mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, *agree in disagreement* atau setuju dalam perbedaan, saling mengerti dan adanya kesadaran serta kejujuran.⁶³²

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin sudah mengembangkan prinsip-prinsip multikulturalisme jauh sebelum wacana multikulturalisme itu muncul. Islam adalah agama yang sempurna, didalamnya ada aturan-aturan tentang urusan dunia dan akhirat. Diantaranya adalah terdapat dasar-dasar peraturan untuk hidup berdampingan secara damai dengan siapapun. Semuanya itu untuk menjaga agar persaudaraan dan suasana aman, damai, tenteram dan harmonis tetap berjalan.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan instrumen pendidikan yang mampu menjawab persoalan kemajemukan beragama. Pendidikan Islam merupakan satu jawabannya, karena pendidikan Islam merupakan ranah yang strategis untuk membangun bangsa, menjadi bangsa yang bermartabat. Selain itu, pendidikan dapat membentuk manusia yang cerdas, bermoral, memiliki semangat hidup dan memiliki semangat mengembangkan ilmu dan

⁶³²Umar Hasyim, *Toleransi dan kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: FT. Bina Ilmu, 1991), h. 23-25.

teknologi guna membangun bangsanya. Pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dalam menyatukan bangsa yang terdiri dari berbagai macam budaya dan agama.⁶³³

Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, perlu mengembangkan konsep pendidikan multikulturalisme. Desain pendidikan multikulturalisme sebaiknya masuk dalam kurikulum, serta pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstrakurikuler atau menjadi bagian kurikulum mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri, atau sebaliknya terpadu atau terintegrasi.⁶³⁴

Konsep pendidikan Islam saat ini, harus mampu mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme yang terkandung dalam ajaran Islam. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islam, yaitu: ⁶³⁵ *Pertama*, Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keragaman. Dengan demikian, diharapkan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keragaman yang ada. *Kedua*, Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang pluralis-multikultural. Hal ini penting dilakukan, karena tanpa adanya usaha secara sistematis, realitas keragaman dipahami secara sporadis, fragmentaris atau bahkan memunculkan eksklusivitas yang ekstrem. *Ketiga*, Pendidikan Islam tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas suku, agama, ras atau golongan. Mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan secara setara, egaliter dan diberikan medium yang tepat untuk mengapresiasi karakteristik yang mereka miliki. Masing-masing anak memiliki posisi sederajat dan harus memperoleh perlakuan yang

⁶³³Choirul Mahfiid, *Pendidikan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 208

⁶³⁴Hujar AH. Sanaky, *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 204

⁶³⁵Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan aplikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 53 - 54

setara. *Keempat*, pendidikan Islam memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya *sense of self* kepada setiap anak didik. Ini penting untuk membangun kepercayaan diri, terutama bagi anak didik yang berasal dari kalangan ekonomi kurang beruntung, atau kelompok yang relatif terisolasi.⁶³⁶

Pendidikan Agama masih banyak menuai kritik. Seperti faktor penyebab kegagalan pendidikan agama adalah karena praktik pendidikannya lebih banyak memperhatikan aspek kognitif dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan kurang pembinaan aspek afektif dan konatif volutif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Atau dalam praktiknya, pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi Islami. Pendidikan agama lebih mengutamakan pengajaran agama daripada pendidikan moral. Padahal intisari pendidikan agama justru terletak pada pendidikan moral tersebut.

Berkaitan dengan tantangan modernitas yang kian kompleks, terutama dengan pluralitas dan multikulturalitas, selain langkah-langkah tersebut, perlu juga melakukan beberapa hal yang lain.⁶³⁷ *Pertama*, selain memberi uraian tentang ilmu-ilmu keislaman klasik, anak didik perlu juga diperkenalkan dengan persoalan-persoalan modernitas yang arnat kompleks sebagaimana yang dihadapi umat Islam sekarang ini dalam hidup keseharian mereka.

Kedua, pengajaran ilmu-ilmu keislaman tidak seharusnya selalu bersifat doktrinal, melainkan perlu dikedepankan uraian dimensi histories dari doktrin-doktrin keagamaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dapat melatih para peserta didik untuk merumuskan ulang pokok-pokok rumusan realisasi agama yang sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman serta bagaimana mereka dapat mencari jalan keluar (*problem solving*) sesuai dengan nilai-nilai keagamaan Islam yang meraka yakini.

Ketiga, pengajaran yang dulunya hanya bertumpu pada teks (*nash*) perlu diimbangi dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas terhadap konteks

⁶³⁶Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, *Ibid.*, h. 53 - 54

⁶³⁷M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), h. 78-81.

dan realitas, mengingat bahwa nash itu terbatas, sedangkan kejadian-kejadian yang dialami manusia selalu berkembang.

Keempat, penekanan pada aspek kognitif anak harus diimbangi dengan aspek afektif dan psikomotorik. Penghayatan dan internalisasi budi pekerti dan akhlak batiniah yang bernuansa penghayatan tasawuf merupakan sebuah metode pendidikan dan pengajaran yang lebih menekankan pada kematangan dan kedewasaan berpikir dan berperilaku, seperti penanaman sifat rendah hati, kesabaran, toleransi, tenggang rasa, kepuasan batiniah, cara berfikir yang matang, dan seterusnya.

Kelima, Pendidikan Agama Islam era modernitas tidak lagi memadai jika hanya terfokus pada pembentukan moralitas individual yang saleh, namun kurang begitu peka terhadap, *moralitas public*. Moralitas publik sangat terkait dengan realitas struktur sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial budaya yang mempunyai logika kepentingan sendiri-sendiri. Pendidikan Islam perlu memasuki diskursus moralitas publik, lantaran sumber kejahatan moral tidak lagi hanya dari individu-individu, melainkan telah bergeser ke struktur jaringan yang sangat kompleks.

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan *out put* yang memiliki kesalehan individual juga kesalehan social sebagai modal utama dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompleks dengan kondisi masyarakat yang multikultural dan multireligius. Terbentuknya anak didik yang memiliki cakrawala pandang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, memiliki sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda serta jauh dari sikap *stereotip*, *egoistic*, *individualistic* dan *eksklusif* akan menciptakan suasana masyarakat yang bermoral, toleran, damai dan harmonis.

F. Kesimpulan

Masyarakat yang beranekaragam agama, suku, ras, budaya, bahasa dan adat istiadat, maka harus dibangun rasa toleransi. Dalam toleransi beragama, masyarakat multikultural harus mengedepankan kebersamaan beragama dalam satu bangsa, sehingga menjadikan agama sebagai dasar

pokok kebersamaan membangun satu kesatuan bangsa. Setiap agama memiliki ajaran dan syariat. Konsep toleransi dalam beragama sudah sangat jelas, baik yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan dalam UUD 1945 tentang beragama. Oleh karenanya, membangun toleransi dalam beragama harus mengedepankan rasa kasih sayang, saling tolong-menolong, saling menghargai, menghormati dan saling melindungi dalam beribadah antar agama, serta menjauhkan sikap saling mengejek atau menghina atau bahkan merendahkan. Sehingga konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan bijak dan tidak terulang terus-menerus.

G. Saran

Jika Kebersamaan dalam keberagaman beragama dalam satu bangsa, menjadikan agama sebagai dasar pokok kebersamaan dalam membangun satu kesatuan bangsa Indonesia sudah membaik, dapat dipertahankan bahkan jika perlu lebih ditingkatkan, terutama peningkatan nilai toleransi dalam beragama dengan mengedepankan rasa kasih sayang, saling tolong menolong, menghargai, menghormati dan saling melindungi dalam beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2005). *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: PSAP.
- Abdullah, M.A. (2002). *Kerukunan Umat Beragama: Perspektif Filosofis-Pedagogis. Harmoni–Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 1. No. 4.
- Abdullah, Taufik. (1998). *Menteri-menteri Agama RI (Biografi Sosial Politik)*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM). Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.
- Abdurrahman Wahid. *Hubungan antar-agama, Demensi Internal dan Eksternalnya di Indonesia dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama, Seri Dian I*. Yogyakarta: Penerbit Dian / Interfidei, t. t.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi. (2002). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo.

- Bukhori, B. (2013). *Model Toleransi Mahasiswa Muslim terhadap Umat Kristiani (Studi pada Umat Islam)*. Yogyakarta: Program Doktor Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Choirul Mahfiid. (2006). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dodi S. Truna. (2010). *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Faisal Ismail. (1999). *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Hasan, Muhammad Tholhah. (2005). *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hasyim, Umar. (1991). *Toleransi dan kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: FT. Bina Ilmu.
- Hujar AH. Sanaky. (2016). *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Ismail, Faisal. (1999). *Islam Idealitas Hahiyah dan Realitas Insaniyah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Mahfiid, Choirul. (2006). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Tholhah Hasan. (2005). *Islam dalam Pcrspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press.
- Ngainun Nairn dan Ahmad Syauqi, (2008), *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, Jogyaakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pierre L. van den Berghe dikutip oleh Michael Banton, *Racial and Ethnic Competition* (New York: Cambridge University Press, 1983).
- Ruslani. (2000). *Masyarakat Kitab dan Dialog Antaragama, Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*. Yogyakarta: Bentang.
- Sarwono, S.W., (1999), *Psikologi Sosial- Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susetyo, D.P.B., (2010), *Stereotip dan Relasi Antarkelompok*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

- Susetyo, D.P.B., Widiatmadi, E. (2011). *Kehidupan Multikultural Orang Semarang. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Psikologi Multikulturalisme*, di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus.
- Sulistio, (2015), *Konflik Intraagama di Indonesia-Antara Islam Transnasional dan Islam Arus Utama. Prosiding. Diskusi Psikologi Sosial–Quo Vadis Konflik Sosial di Indonesia*. Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Truna, Dodi S, (2010), *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan. (2013). *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Umar Hasyim, (1991), *Toleransi dan kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: FT. Bina Ilmu.
- Zubaedi, (2006), *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB XVI

MULTIKULTURAL DALAM MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Masyarakat multikultural sangat penting untuk dibahas, karena masyarakat multikultural memiliki potensi konflik. Hal ini disebabkan struktur sosial pada setiap kelompok sosial memiliki perbedaan dalam persepsi, selera, nilai-nilai, norma, sehingga berpotensi terjadi konflik. Menurut Taquiri, konflik merupakan warisan kehidupan sosial, yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara berterusan.⁶³⁸ Hubungan saling ketergantungan berpotensi melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu dengan yang lain.⁶³⁹ Robbin menyebutkan keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok.⁶⁴⁰

Masyarakat multikultural di Indonesia, faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik adalah berbau SARA, yaitu suku, agama, ras antar golongan, seperti yang terjadi di Aceh, Ambon, Papua, Kupang, Maluku dan berbagai daerah lainnya. Realitas dan fenomena tersebut dapat mengancam integrasi bangsa, di satu sisi membutuhkan solusi konkret dalam penyelesaiannya, di sisi lain multikulturalisme dijadikan sebagai acuan utama terbentuknya masyarakat multikultural yang damai.⁶⁴¹

Masyarakat multikultural terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya dan kekurangannya yang berpotensi terjadinya konflik, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti,

⁶³⁸Davis, Keith dan John W. Newstrom. *Perilaku Dalam Organisasi*. (Jakarta: Erlangga, 1985).

⁶³⁹Gibson, et al. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

⁶⁴⁰Robbins, P. Stephen. *Organization Theory: Structure, Desain and Application*. Third edition. (Singapore: Prantice Hall, 1990)

⁶⁴¹Liu, Y.D dan Lin C.F., (2011), The Development of Cultural Tourism: A Review of UK Experience. Vol 6, No. 2 2011. pp. 363-376

nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.⁶⁴² Acuan utama dalam masyarakatkan Indonesia yang multikultural adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan, sehingga nantinya terwujud masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, dan harmonis dalam perbedaan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan ini di tandai adanya perbedaan golongan, suku bangsa, dan etnik masyarakatnya. Masing-masing golongan, suku bangsa, dan etnik mempunyai kebudayaan sendiri secara bersama-sama hidup dalam satu wadah dan berada dibawah naungan sistem dan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk sampai masa reformasi terlihat jelas dalam pluralisme budaya tetap terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁴³ Sejarah perkembangan keberagaman kebudayaan tersebut merupakan konfigurasi dari masing-masing kebudayaan yang memperlihatkan adanya prinsip-prinsip kesamaan dan saling menyesuaikan satu dengan lainnya, sehingga menjadi landasan terciptanya kebudayaan nasional Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat tulisan dengan judul multikultural dalam masyarakat.

B. Pengertian Masyarakat Multikultural

Masyarakat merupakan suatu sistem, setiap daerah memiliki anggota masyarakat masing-masing, dan menganut sebuah budaya yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri sebagai acuan nilai, norma, identitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat tersebut. Maclver menjelaskan masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara,

⁶⁴²Kim, Hyein Amber. 2016. "Biracial Identity Development: A Case of Black – Korean Biracial Individuals in Korea " dalam International Journal of Multicultural Education. Volume 18, No. 3 hal 40-57

⁶⁴³Middya Boty, *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, JSA Vol 1 No 2, 2017, h. 1.

wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan, pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia secara keseluruhan dan selalu berubah.⁶⁴⁴ Auguste Comte menyebutkan masyarakat adalah suatu keseluruhan organik, keseluruhan yang pada dasarnya selalu terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Masyarakat bersifat dinamis dan selalu berkembang. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat selalu berubah setiap saat sehingga perubahan ini terus berlangsung seiring dengan berjalannya waktu.⁶⁴⁵ Hasan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terkumpul dari beberapa manusia, dengan atau karena sendirinya, saling bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya.⁶⁴⁶ Sehingga dengan sendirinya mereka menciptakan sebuah kebudayaan yang khas dan berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat tercipta dari perkumpulan individu yang memiliki komitmen yang kuat untuk hidup bersama secara berdampingan dalam keberagaman kebudayaan.

Azyumardi Azra menjelaskan multikultural pada dasarnya adalah pandangan dunia yang dapat diterjemahkan sebagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas dan multikultural dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang diwujudkan dalam kesadaran politik.⁶⁴⁷

Rifai Harahap menyebutkan multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang

⁶⁴⁴Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2010), h. 62

⁶⁴⁵ Kim, Hyein Amber. 2016. "Biracial Identity Development: A Case of Black – Korean Biracial Individuals in Korea " dalam *International Journal of Multicultural Education*. Volume 18, No. 3 hal 40-57

⁶⁴⁶Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta 2009), h. 60

⁶⁴⁷Azra Azyumardi. *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut.⁶⁴⁸

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa ada tiga bentuk dari kebudayaan, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) wujud ide, yang sifatnya abstrak dan tidak dapat diraba, tetapi memiliki lokasi didalam kepala tiap-tiap individu. Wujud ide ini baru tampak, jika dihasilkan dalam bentuk karya-karya yang jelas; (2) Kelakuan berpola dari manusia untuk masyarakat, yaitu aktifitas yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat; (3) Hasil karya manusia yaitu sebuah wujud atau sifat yang paling konkrit.⁶⁴⁹

Dengan demikian masyarakat multikultural merupakan pandangan dunia yang diwujudkan dalam kesadaran komunitas manusia yang tinggal secara bersama-sama dan memiliki saling keterkaitan satu dengan lain dan tinggal dalam sebuah daerah yang sederajat, sehingga tercipta perkumpulan individu yang memiliki komitmen yang kuat untuk hidup bersama secara berdampingan dalam masyarakat yang beragam.

Abu Ahmadi menyebutkan agar sekelompok individu dapat dikatakan sebagai masyarakat, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: (1) harus ada sekumpulan individu dalam volume yang cukup banyak sehingga kelihatan sebagai sebuah perkumpulan yang besar; (2) telah memiliki tempat tinggal pada sebuah daerah tertentu dan dalam waktu yang cukup lama; (3) adanya aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur sistem kehidupan mereka untuk kepentingan dan tujuan bersama.⁶⁵⁰

C. Hakikat Masyarakat Multikultural

Multikultural berasal dari bahasa Inggris, yaitu multikultural. Jika dikaitkan dengan masyarakat maka arti adalah suatu masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan. Masyarakat multikultural ada bermacam-macam

⁶⁴⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

⁶⁴⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 45

⁶⁵⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.107

kebudayaan yang hidup bersama dan saling berdampingan serta saling berinteraksi dalam suatu masyarakat. Masyarakat multikultural merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

J. S. Furnivall memaparkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Lawrence A. Blum, seorang guru besar filsafat di Universitas of Massachusetts di Amherst, menawarkan definisi multikulturalisme sebagai berikut. Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.⁶⁵¹

Pierre L. Van Den Berghe menjelaskan ciri-ciri masyarakat multikultural diantaranya adalah: (1) terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus diantara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif seringkali mengalami konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi; (6) adanya dominasi politik suatu kelompok terhadap kelompok lain.⁶⁵² Dengan masyarakat multikultural ada tiga kemungkinan terjadinya interaksi dari unsur-unsur kebudayaan, yaitu: (1) hubungan antara unsur-unsur budaya daerah; (2) hubungan antara unsur-unsur budaya daerah dengan unsur budaya luar; (3) hubungan antara unsur-unsur budaya nasional dengan unsur budaya luar.

Parekh membedakan lima macam multikulturalisme, yaitu: (1) Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat dimana berbagai

⁶⁵¹Blum, Andrew. *Blue Helmets from the South: Accounting for the Participation of Weaker States in United Nations Peacekeeping Operation*. The Journal of Conflict Studies, Vol XX, no.1 Spring, 2000.

⁶⁵²Van den Berghe, Pierre L. *The Ethnic Phenomenon*. (New York: Elsevier, 1981)

kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain; (2) Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa; (3) Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan, mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar; (4) Multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.⁶⁵³

D. Karakteristik Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang kelompok suku bangsa dan budayanya berada dalam kesetaraan derajat dan toleransi sejati. Adapun karakteristik dari suatu masyarakat multikultural dapat diuraikan sebagai berikut; (1) dalam masyarakat multikultural, tiap-tiap budaya bersifat otonom; (2) masyarakat multikultural dalam perkembangannya akan bersinggungan dengan konsep hidup bersama untuk mencari kehidupan

⁶⁵³Zakki Mubarak, dkk, *Buku Ajar II Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terintegrasi (MPKT) cet. Kedua: Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*, (Depok: Penerbit FE UI, 2008), h. 183-185.

bersama; (3) adanya semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat; (4) dikembangkannya toleransi, saling memahami, dan menghargai perbedaan yang ada; (5) terkait dengan upaya pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis.⁶⁵⁴

Penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut. Keragaman ras, etnis, suku, ataupun agama menjadi karakteristik tersendiri seperti bangsa Indonesia. Masyarakat multikultural Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang berdasar pada ideologi multikulturalisme atau *Bhinneka Tunggal Ika*, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal. Namun, keanekaragaman budaya dan masyarakat sering dianggap pendorong utama munculnya masalah baru.

Keanekaragaman budaya berpotensi menimbulkan permasalahan baru sebagai berikut; (1) keanekaragaman suku bangsa. Indonesia adalah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai karakter, adat istiadat, bahasa, kebiasaan; (2) Keanekaragaman agama. Dampak interaksi dengan bangsa lain, masuknya beragam bentuk pengaruh agama dan kebudayaan. Selain berdagang, para saudagar Islam, Hindu, Budha membawa dan menyebarkan ajaran agamanya; (3) Keanekaragaman ras. Dampak terbukanya letak geografis Indonesia, banyak bangsa luar masuk berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Misalnya, keturunan Arab, India, Persia, Cina dan Hadramaut. Bangsa-bangsa asing tersebut mampu berkembang secara turun temurun membentuk golongan sosial dalam masyarakat Indonesia. Ada yang mampu mendominasi perekonomian. Misalnya, keturunan cina. Indonesia yang

⁶⁵⁴Middya Boty, *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, JSA Vol. 1 No. 2, 2017, h. 1.

memiliki berbagai etnis, agama, budaya berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Berkaitan keanekaragaman dengan perbedaan identitas dan konflik sosial muncul tiga pandangan; (1) pandangan primordialisme. Kelompok ini menganggap perbedaan berasal dari genetika seperti suku, ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan kepentingan etnis maupun budaya; (2) pandangan kaum instrumentalisme. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materil maupun nonmateril; (3) pandangan kaum konstruktivisme. Kelompok ini beranggapan bahwa identitas kelompok bersifat kaku. Sehingga etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah. Kenyataan ini menjadikan suatu tantangan baru bagi bangsa untuk mewujudkan masyarakat multikultural yang damai.⁶⁵⁵

Upaya membangun Indonesia multikultural yang damai, dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu; *Pertama*, menyebarkan konsep multikulturalisme secara luas dan memahamkan akan pentingnya multikulturalisme bagi bangsa Indonesia, serta mendorong keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. *Kedua*, membentuk kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya. *Ketiga*, berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.⁶⁵⁶

Masyarakat yang terdiri atas individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Jika dalam

⁶⁵⁵Suardi, *Masyarakat Multikultural Bangsa Indonesia*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 6.

⁶⁵⁶Suardi, *Ibid.*, h. 6.

suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu, maka semua pemeluk agama diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Jika individu dalam masyarakat berlatarbelakang budaya Aceh, Jawa, Madura misalnya, tiap-tiap individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Dengan demikian, tiap-tiap identitas individu dan kelompok dapat bertahan dan membentuk mosaik yang indah.

E. Pandangan Masyarakat Multikultural

Membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu, ada beberapa nilai yang harus dihindari, yaitu primordialisme, etnosenterisme, diskriminatif, dan stereotipe. Penjelasan setiap komponen tersebut, yaitu: (1) Primordialisme; (2) Etnosentrisme; (3) Diskriminatif; (4) Stereotip.⁶⁵⁷

Pertama, Primordialisme. Artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan baik. Disuatu sisi primordialisme merupakan hal yang baik karena hakikatnya ingin melestarikan budaya yang ada ditempat individu itu lahir, namun juga sikap ini tidak baik untuk dikembangkan di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia karena merupakan suatu bentuk embrio konflik, apabila sikap ini ada dalam diri warga suatu bangsa, dan kecil kemungkinan mereka untuk bisa menerima keberadaan suku bangsa yang lain. Contoh menganggap suku Makassar lebih bagus dari suku Toraja.

Kedua, Etnosentrisme. Artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain karena menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik dengan menggunakan ukuran budaya sendiri. Contoh memberikan ukuran bahasa yang baik itu berdasarkan bahasa sendiri.

Ketiga, Diskriminatif. Adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sikap ini sangat berbahaya untuk

⁶⁵⁷Suardi, *Ibid.*, h. 9.

dikembangkan karena bisa memicu munculnya antipati terhadap sesama warga masyarakat, seperti perbedaan perlakuan antara orang miskin dan orang kaya dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Keempat, Stereotip. Adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian atau stereotip bagi suku tersebut, seperti stereotip untuk suku Makassar sebagai suku yang kasar, padahal tidak semua orang yang bersuku Makassar adalah orang kasar, ada diantara mereka yang memiliki jiwa yang lemah lembut.⁶⁵⁸

Masyarakat Indonesia modern memiliki tugas besar dalam membangun kerjasama dan saling menghormati. Terkait politik dan hukum. Toleransi menuntut keadilan dan tidak memihak, terhadap penegakan hukum, administrasi dan proses pengadilan. Pengucilan dan marginalisasi dapat mengarah pada frustrasi, permusuhan dan fanatisme. Agar masyarakat memiliki sikap toleransi, UNESCO menyarankan meratifikasi, konvensi hak-hak asasi manusia internasional, menyusun undang-undang untuk menjamin kesederajatan dan kesempatan kepada semua kelompok masyarakat.⁶⁵⁹

Hans Kung, menyebutkan *no ordering of the world without a world ethic; no peace among the nations without peace among the religions; no peace among the religions without dialogue among the religions.*⁶⁶⁰ Artinya tidak ada suatu tatanan dunia yang sukses, jika tidak dilengkapi dengan etika dunia; tak ada perdamaian antar negara, tanpa adanya perdamaian antaragama; tak ada perdamaian antar agama, tanpa adanya dialog antar agama). Keragaman tidak dapat dihindari khususnya di era globalisasi, bahkan sudah menjadi suatu yang intens dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu pembinaan agar kehidupan yang beragam tetap hidup harmonis, saling toleransi, saling

⁶⁵⁸Suardi, *Ibid.*, h. 9.

⁶⁵⁹Ambarwangi, S. 2016. *Pendidikan Multikultural di Sekolah melalui Pendidikan Seni Tradisi*. HARMONIA Jurnal, Volume 13, No. 1 / Juni 2013.

⁶⁶⁰Suardi, *Ibid.*, h. 10.

menghargai dan melindungi dalam keragaman budaya, etnik, golongan dan agama.

F. Kesimpulan

Multikultural dalam masyarakat dipandang sebagai kekayaan yang sangat berharga, tidak dipandang sebagai perbedaan yang harus diperselisihkan. Multikultural diramu menjadi bentuk optimalisasi kemampuan manusia sebagai makhluk yang kreatif dan inovatif. Multikultural sebagai desain pengelolaan keragaman yang lebih komprehensif, menjaga tatanan masyarakat yang seimbang dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga inti multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain sebagai satu kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, dan agama. Desain masyarakat multikultural dapat dikaji menggunakan paradigma positifistik, pospositivistik, kritis dan poststrukturalis sebagai suatu kesatuan yang integratif.

G. Saran

Jika multicultural dalam masyarakat sudah dapat dipandang sebagai kekayaan yang sangat berharga, dapat dipertahankan bahkan jika perlu lebih ditingkatkan, terutama peningkatan desain pengelolaan keragaman budaya, terciptanya satu kesatuan dalam masyarakat tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Abu. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Boty Middy. (2017). *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, JSA Vol 1 No 2.

Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mubarak Zakki, dkk. (2008). *Buku Ajar II Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terintegrasi (MPKT) cet. Kedua: Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*, Depok: Penerbit FE UI.

Middya Boty. (2017). *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kel. Sukajadi Kec. Sukarami Palembang*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, JSA Vol. 1 No. 2.

Nurani Soyomukti. (2010). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Arruzz Media.

Soekanto Soerjono. (2012), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suardi. (2017). *Masyarakat Multikultural Bangsa Indonesia*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Zakki Mubarak, dkk. (2008). *Buku Ajar II Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terintegrasi (MPKT) cet. Kedua: Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat*. Depok: Penerbit FE UI.

BAB XVII

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, mulai bab I sampai dengan bab XVI, maka pada bagian penutup ini membahas hasil kajian, implikasi, dampak dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam tulisan tentang multikultural dalam pendidikan, sebagai berikut:

Bab Pertama, Kebudayaan sebagai dasar keberadaan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Sehingga gagasan pendidikan multikultural di Indonesia berdampak pada peningkatan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat, yang dipersepsikan sebagai jembatan, dalam mencapai kehidupan bersama umat manusia, dalam berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah keberagaman budaya. Untuk memperkokoh pluralisme, maka implementasi kebudayaan sebagai keberadaan pendidikan multikultural dituntut berpegang pada prinsip-prinsip; menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang, kurikulum dicapai sesuai penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang beragam, dan harus mendukung prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Bab Kedua, Multikulturalisme berawal dari keberagaman budaya, yang menekankan kepada kesejahteraan, toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian, dan saling menghargai. Isu multikulturalisme muncul pada tahun 2002 sebagai dampak kesadaran bahwa kesatuan bangsa dan integrasi bangsa, politik keberagaman dianggap semakin kurang relevan dengan kondisi dan semangat otonomi daerah (*desentralisasi*) dan kedaerahan turut meningkat reformasi politik tersebut. Multikulturalisme muncul pertama sekali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris dan Jerman. Dengan mengakui keberagaman dalam masyarakat dengan mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir tiori dasar multikulturalisme yaitu demokrasi, toleransi, kesetaraan, saling

menghormati, dan menghargai. Untuk mewujudkan kesejahteraan, toleransi, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, perdamaian dan saling menghargai, melindungi segenap keberagaman, maka ditingkatkan pemahaman tentang teori, tujuan dan manfaat multikultural dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera dan harmonis.

Bab Ketiga, Gagasan multikulturalisme di Indonesia dan dunia Islam berawal dari keinginan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan. Pendidikan multikultural dipersepsikan sebagai jembatan dalam mencapai kebersamaan dalam keberagaman, saling menghargai, menghormati dan hidup rukun serta harmonis. Multikultural menurut Islam adalah *sunnatullah* yang tidak berubah, tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan, Islam sangat menghargai multikultural karena Islam adalah agama yang tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati. Untuk menjaga kebersamaan dalam keberagaman segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hendaknya implementasikan gagasan multikulturalisme dalam upaya mewujudkan masyarakat yang damai, tenteram dan harmonis.

Bab Keempat, Pendidikan multikultural sebagai keragaman dalam pendidikan. Pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*, pendidikan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama). Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan dalam mencapai kebersamaan dalam keberagaman dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Untuk tercapainya kehidupan yang rukun, damai, tenteram dan harmonis dalam masyarakat global, maka diperlukan pendidikan multikultural membahas isu dan masalah pendidikan, mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural.

Bab Kelima, Pendidikan Islam multikulturalisme merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, nilai dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat yang setara dan adil. Pendidikan Islam multikultural berdampak memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional dan memantapkan jati diri Bangsa. Pendidikan multicultural dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional, meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, disiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani, sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan di masyarakat melalui pendidikan Islam multikultural. Implikasi pendidikan Islam multikultural sebagai wahana strategis membangun kesadaran kolektif warga mengukuhkan ikatan sosial, menghargai keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, sehingga semua warga merasa setara dan adil dalam upaya menjaga keutuhan negara dan bangsa. Dengan demikian disarankan jika ingin masyarakat merasa setara dan adil, maka tingkatkan pemahaman dan implementasi pendidikan Islam multikultural.

Bab Keenam, Karakteristik dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengembangan pendidikan multikultural dapat dilakukan dan diarahkan kepada usaha edukatif, melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan kepada para peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai dan ideologi, sehingga memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai. Karakteristik pendidikan multikultural adalah pendidikan yang tidak membenci orang lain, pendidikan dasar dan hak dasar peserta didik, pendidikan luas untuk keadilan sosial, pendidikan sebagai proses prestasi belajar, lingkungan belajar kondusif, preferensi belajar siswa, pedagogik kritis dalam berfikir kritis peserta didik oleh

budaya, bahasa, keluarga, sekolah artistik dan pengalaman pendidikan. Implikasi pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi pendidikan dan sebagai proses yang berlangsung terus menerus berjalan secara efektif. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, melalui penambahan materi multikultural yang ada dalam aktualisasinya bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran. Jika ingin pendidikan multikultural di Indonesia baik, maka tingkatkan pemahaman karakteristik dan bentuk multikultural.

Bab Ketujuh, Peran guru adalah melatih dan mendidik peserta didik dengan memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme untuk menjadi warga negara yang baik. Seorang guru diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi peserta didik dan masyarakat. Membangun paradigma keagamaan, keragaman bahasa, membangun sensitivitas gender, sifat kepedulian sosial, sikap anti diskriminasi etnis, perbedaan kemampuan, serta membangun sikap anti diskriminasi umur. Peran guru dalam proses mentransformasi nilai-nilai ajaran Islam, yang mengakomodir aspek-aspek perbedaan kemanusiaan sebagai *sunnatullah* yang harus diterima dengan penuh arif, bijaksana dan lapang dada terhadap multikultural, seperti kasih sayang, cinta seseorang, tolong menolong, toleransi, menghargai keberagaman dan sikap-sikap lain yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Implikasi untuk meningkatkan peran guru dalam melatih dan mendidik peserta didik, memberikan pendidikan moral dan agama, menanamkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme untuk menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik.

Bab Kedelapan, Peran sekolah/madrasah/pesantren sebagai sistem pengembangan pendidikan multikultural pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda. Secara intrinsik filosofi, visi dan tujuan pendidikan para pengembang pembelajaran sangat dipengaruhi oleh akar budaya pengembang yang melandasi pandangan hidupnya. Pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran multikultural haruslah didahului oleh sosialisasi agar para pengembang (guru) dapat

mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, proses belajar di kelas dan evaluasi sesuai dengan prinsip pendekatan multikultural. Pendekatan multikultural bukan saja mampu menjadi media pengembangan budaya lokal tetapi juga merupakan media pengembang budaya nasional, maupun budaya universal. Implikasi peran sekolah/madrasah/pesantren, untuk menyusun Langkah-langkah pembelajaran berbasis keberagaman budaya menuju transformasi kurikulum multikultural, seperti status quo atau kurikulum dominan, hari libur dan pahlawan, integrasi pembelajaran, keragaman budaya, reformasi struktural, hubungan manusia, seperti pendidikan kebersamaan dalam keberagaman. Jika ingin mengembangkan pendidikan Islam Multikultural maka tingkatkan peran guru dan model pendidikan Islam multikultural.

Bab Kesembilan, Solusi pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia yang sering terjadi adalah dengan menyerahkan berbagai bentuk keragaman dan perbedaan, seperti; suku, agama, ras dan adat istiadat, sehingga saling menghargai dalam segala bidang dan kegiatan, memahami kondisi masing-masing dan harmonis. Dengan demikian tidak terjadi sementasi, struktur dalam lembaga yang nonkomplementer, konflik, tidak terjadi integrasi dengan paksaan dan tidak ada dominasi politik terhadap kelompok lain. Implikasi Pendidikan multikultural diharapkan peserta didik dapat menghargai perbedaan agama, suku, ras dan bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman suku bangsa tentu banyak permasalahan dibalik keragaman tersebut. Jika keberagaman masih menjadi konflik disarankan untuk segera diperbaiki dan jika keberagaman sudah menjadi asset kekayaan bangsa dan sudah mendapatkan pemecahan permasalahannya untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

Bab Kesepuluh, Pendidikan multikultural di Indonesia menjadi sangat urgen karena masyarakatnya terdiri atas berbagai macam ras, suku budaya, bangsa dan keyakinan agama, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Melalui pendidikan multikultural yang

memperkenalkan budaya asli kepada peserta didik diharapkan peserta didik tidak melupakan asal budayanya sendiri. Pendidikan multikultural tidak hanya dipelajari dalam pendidikan formal saja, melainkan dipelajari masyarakat luas, secara non formal melalui berbagai macam diskusi, presentasi dan konferensi agar terciptanya masyarakat Indonesia yang tenteram, damai dan harmonis. Implikasi pendidikan multikultural kepada peserta didik, tingkatkan pemahaman tentang urgensi pendidikan multicultural, sehingga memiliki cakrawala pandang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, memiliki sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda, sehingga terciptanya suasana masyarakat yang bermoral, toleran, damai dan harmoni.

Bab Kesebelas, Dimensi yang terkandung dalam pendidikan multikultural adalah dimensi integrasi isi/materi atau *content integration*, dimensi konstruksi pengetahuan atau *knowledge construction*, dimensi pengurangan prasangka atau *prejudice reduction*, dimensi pendidikan yang sama/adil atau *equitable pedagogy* dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial atau *empowering school culture and social structure*. Pendidikan Islam multikultural memiliki beberapa dimensi, yaitu pendidikan Islam multikultural berawal dari Ketuhanan dan berkembangnya gagasan multikultural, pendidikan Islam multikultural mengajarkan ajaran agama tentang toleransi, pendidikan Islam multikultural mengajarkan ajaran agama tentang pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan pendidikan Islam multikultural mengajarkan ajaran agama tentang keadilan. Implikasi peserta didik, untuk meningkatkan pemahaman tentang dimensi pendidikan Islam multikultural, sehingga peserta didik memiliki sikap dan perilaku dewasa penuh persahabatan, hidup damai, tenteram dan harmonis.

Bab Keduabelas, Pendidikan multikultural merupakan proses upaya mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah, mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi keberagaman budaya. Problema pendidikan multikultural di masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

keragaman identitas budaya daerah, kurang kokohnya nasionalisme, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya, fanatisme sempit, konflik kesatuan Nasional dan multikultural. Implikasi pendidikan multikultural di Indonesia sebagai proses upaya mengembangkan kepribadian pesesrta didik, Implementasikan berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi keberagaman budaya. Sehingga peserta didik terhindar dari sifat prasangka, *stereotipe*, *etnosentrisme*, *rasisme*, diskriminasi dan *scope goating*, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai dan kokoh dalam mempertahankan Negara kesatuan Republik Indosesia.

Bab Ketigabelas, Globalisasi merupakan sebuah proses sosial yang muncul, ide dan gagasan kemudian ditawarkan kepada bangsa lain, sehingga menjadi kesepakatan, pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di dunia. Isu global dalam kehidupan sebagai berikut; (1) demokrasi artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. rakyat memegang kekuasaan tertinggi di negara; (2) hak asasi manusia artinya perang, pertentangan dan konflik antar bangsa dikarenakan adanya penindasan dan perilaku sewenang-wenang; (3) transparansi artinya penyelenggaraan negara diharapkan berlaku adil dan transparan terhadap rakyat; (4) pelestarian lingkungan artinya tindakan pengrusakan lingkungan, mengancam ekosistem dunia; (5) pluralisme artinya sikap menghargai keberanekaan dan perbedaan; (6) akulturasi artinya proses sosial yang timbul dan terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih saling mempengaruhi. Contoh akulturasi dalam perbauran kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia. Implikasi untuk ditingkatkan pemahaman terkait Isu global dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki nilai demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, hak asasi manusia, transparansi dalam penyelenggaraan Negara, pelestarian lingkungan hidup, pluralisme dengan meningkatkan sikap menghargai keberanekaragaman dan akulturasi, sehingga terciptanya masyarakat yang damai, tenteram, sejahtera dan harmonis.

Bab Keempatbelas, Multikultural dalam pendidikan yang dikembangkan memiliki relevansi dengan konteks Indonesia, yaitu memiliki semboyan *bhinneka tunggal ika*. Semboyan ini dapat mengakomodasi secara proporsional, normatif dan demokratis bagi bangsa Indonesia. Multikulturalisme pada prinsipnya adalah membangun dirinya, bangsa dan negara tanpa merasakan sebagai beban dan hambatan, namun didasarkan pada ikatan persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta saling menghormati, menghargai, toleransi dan bekerja sama dalam membangun Indonesia yang maju, aman, damai, tenteram, harmonis dan sejahtera. Implikasi pengembangan pendidikan multikultural yang telah relevan dengan semboyan *bhinneka tunggal ika* secara proporsional, normative dan demokratis dalam konteks Indonesia, dapat dipertahankan bahkan jika perlu lebih ditingkatkan, terutama peningkatan nilai persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila.

Bab Kelimabelas, Masyarakat yang beranekaragam agama, suku, ras, budaya, bahasa dan adat istiadat, maka harus dibangun rasa toleransi. Dalam toleransi beragama, masyarakat multikultural harus mengedepankan kebersamaan beragama dalam satu bangsa, sehingga menjadikan agama sebagai dasar pokok kebersamaan membangun satu kesatuan bangsa. Setiap agama memiliki ajaran dan syariat. Konsep toleransi dalam beragama sudah sangat jelas, baik yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan dalam UUD 1945 tentang beragama. Multikultural berdampak membangun toleransi dalam beragama harus mengedepankan rasa kasih sayang, saling tolong-menolong, saling menghargai, menghormati dan saling melindungi dalam beribadah antar agama, serta menjauhkan sikap saling mengejek atau menghina atau bahkan merendahkan. Sehingga konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan bijak dan tidak terulang terus-menerus. Implikasinya untuk meningkatkan nilai toleransi dalam beragama dengan mengedepankan rasa kasih sayang, saling tolong menolong, menghargai, menghormati dan saling melindungi dalam beribadah. Sehingga mewujudkan Kebersamaan dalam keberagaman agama, menjadikan agama sebagai dasar

pokok kebersamaan dalam membangun Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bab Keenambelas, Multikultural dalam masyarakat dipandang sebagai kekayaan yang sangat berharga, tidak dipandang sebagai perbedaan yang harus diperselisihkan. Multikultural diramu menjadi bentuk optimalisasi kemampuan manusia sebagai makhluk yang kreatif dan inovatif. Multikultural sebagai desain pengelolaan keragaman yang lebih komprehensif, menjaga tatanan masyarakat yang seimbang dalam satu kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Sehingga inti multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain sebagai satu kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, dan agama. Desain masyarakat multikultural dapat dikaji menggunakan paradigma positifistik, pospositivistik, kritis dan postrukturalis sebagai suatu kesatuan yang integrative. Implikasi. Jika multicultural dalam masyarakat sudah dapat dipandang sebagai kekayaan yang sangat berharga, dapat dipertahankan bahkan jika perlu lebih ditingkatkan, terutama peningkatan desain pengelolaan keragaman budaya, terciptanya satu kesatuan dalam masyarakat tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnis, gender dan agama.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PERSONAL

Nama Lengkap: Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
Jabatan : Kepala SPI IAIN Bengkulu
Email : khairiah685@gmail.com
khairiah@iainbengkulu.ac.id

Alamat Kantor : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Tempat, Tanggal Lahir : Geunteng, 15 Mai 1968
Suami : Drs. H. Syarifuddin, MS
Anak : 1. Firdaus Muttaqin, ST, MT
 2. Syauqas Rahmatillah, S. Ak
 3. Fitria Qadriani
Orang Tua : Ayah: H. Muhammad Bin H. Ali Bin H. Andah
 Bin H. Menara
 Ibu : Hj. Musanah Binti Ahmad

B. PENGALAMAN PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat	Tahun	Nama Institusi	Jurusan / Prodi	Lulus/ Gelar
S-3	2017	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	Manajemen Pendidikan	Lulus/ Dr
S-2	2006	Universitas Bengkulu (UNIB)	Manajemen Pendidikan	Lulus/ M.Pd
S-1	1994	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang	Tarbiyah/ Pendidikan Agama Islam	Lulus/ Dra
SLTA	1987	MAN Banda Aceh	IPA/ Biologi	Lulus
SLTP	1984	MTsN Meureudu, Aceh	-	Lulus
SD/MI	1981	MIN Kuta Rentang, Aceh	-	Lulus

C. PENGALAMAN JABATAN

No	Nama Jabatan	Tahun
1.	Kepala MTs Mambaul Ulum Bengkulu Tengah	1998
2.	Kepala Seksi (Kasi) pengembangan santri Bidang Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	2007
3.	Kepala Seksi (Kasi) Siaran Tamaddun Bidang Penais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	2009
4.	Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	2010

5.	Kepala Bidang (Kabid) Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	2011
6.	Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	2013
7.	Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2014
8.	Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2019

D. PENGALAMAN KEPANGKATAN

No	Nama Kepangkatan / Golongan	Tahun
1.	CPNS / III A	1997
2.	PNS / Penata Muda / III A	1998
3.	Penata Muda Tingkat I / III B	2000
4.	Penata / III C	2002
5.	Penata Tingkat I / III D	2004
6.	Pembina / IV A	2006
7.	Pembina Tingkat I / IV B	2012
8.	Pembina Utama Muda / IV C	2015

E. PENGALAMAN MENGAJAR

No	Nama Tempat Mengajar	Tahun
1.	Tenaga Pengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2016
2.	Tenaga Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2017

F. PENGALAMAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN KURSUS

No	Nama Diklat dan Kursus	Tahun
1.	Penataran Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)	1988
2.	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Menjahit Pakaian Wanita dan Anak	1989
3.	Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Komputer	1995
4.	LPJ (Diklat Prajabatan)	1997
5.	Pelatihan Penerapan Teknik Peta Konsep Pada Pembelajaran di Sekolah	2000
6.	Has Successfully Attained The First Level In The Tummo Rei ki	2001
7.	Has Successfully Attained The Second Level In The Tummo Rei ki	2002

8.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV	2009
9.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III	2013
10.	Pendidikan dan Pelatihan (Training Of Trainers) Sosialisasi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	2013
11.	Pendidikan dan Latihan Agen Perubahan	2018
12.	Pendidikan dan Latihan Profesi Audit Internal	2019
13.	Pendidikan dan Latihan Manajemen Risiko	2020

G. PENGALAMAN SEMINAR/ CONFERENCE

No	Nama Seminar/ Conference	Tahun
1.	Certificate Kemampuan Berbahasa Inggris (UPT Unib Bengkulu)	2005
2.	Sertifikat Kegiatan Orientasi Penyusunan Laporan	2007
3.	Sertifikat Koordinasi dan Singkronisasi Tenaga Teknis Penerangan Agama Islam (Jakarta)	2009
4.	Sertifikat Pertemuan dan Konsultasi Seniman dan Budayawan Muslim Tingkat Nasional (Jakarta)	2009
5.	Sertifikat Lulus Tes Calon Pengawas (Bengkulu)	2010
6.	Sertifikat Temu Wicara Pengawasan Bidang Pendidikan Tingkat Nasional (Jakarta)	2012
7.	Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (Bengkulu)	2012
8.	Sertifikat Manajer Pendidikan Inovatif di Era Globalisasi	2013
9.	Certificate Of Appreciation National Seminar Shariah and Economic Islam Faculty IAIN Bengkulu (Bengkulu)	2014
10.	Sertifikat Workshop Revitalisasi Tugas dan Fungsi Pejabat Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Medan Sumatera Utara)	2014
11.	Sertifikat Capacity Building (Bengkulu)	2014
12.	Certificate Has Participated on Seminar on Science Integration In Facing Global Spectrum IAIN Bengkulu	2014
13.	Sertifikat Rakornas Jarlitbang Dikbud: Peningkatan Konektivitas Penelitian Kebijakan dan Isu-isu Strategis Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta)	2014

14.	Sertifikat Seminar Nasional: Penguatan Fungsi Manajer Pendidikan dalam Implementasi Kurikulum 2013	2014
15.	Sertifikat Seminar Nasional: Integritas Ilmu Umum dan Agama. (Bengkulu)	2016
16.	Certificate International Conference On Mathematics, Statistics and Computer Science (ICMSCS 2017) Bengkulu	2017
17.	Certificate of Appreciation Has Attended International Seminar On Tesol (ISOT) Bengkulu	2017
18.	Certificate of Appreciation This Certificate Is Proudly Presented; International Conference on Sosial Science (ICEESS) Strengthening Knowledge Integration For The World Civilization. (Palopo)	2017
19.	Sertifikat Sosialisasi Peraturan dan Mekanisme Izin Perjalanan Luar Negeri (Bandung)	2017
20.	Certificate Of Appreciation This Certificate Is Proudly Presented. International Conference On Islamic Education (ICIE). (Bandung)	2018

H. PENGALAMAN MENULIS BUKU

No.	Nama Judul Buku	Tahun
1.	Buku: Bunga Rampai Islam dan Gender; Hak Mendapatkan Ilmu dan Pengajaran, perspektif Gender	2017
2.	Buku: Kesempatan Mendapatkan Pendidikan dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Keluarga	2018
3.	Buku: Dari Ruang Kelas Evaluasi Kelembagaan Pendidikan Islam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu	2019
4.	Buku: Leadership Education	2019

I. PENGALAMAN MENULIS ARTIKEL/ JURNAL

No.	Nama Tulisan Artikel/ Jurnal	Tahun
1.	Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan Manajer Pendidikan Inovativ di Era Globalisasi. Dengan Judul: Kajian Pengaruh Perubahan Kurikulum terhadap Profesionalisme Guru MAN dan SMAN Kota Bengkulu	2013
2.	Jurnal Nuansa: Pengaruh Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan PTAIN	2015
3.	Jurnal Nuansa: Pengaruh Implementasi Budaya Kerja (Catatan Laporan Capaian Kinerja Harian)	2016

	Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	
4.	Jurnal Nuansa: Pengaruh Struktur Organisasi (<i>Organizational Structure</i>), Kepuasan Kerja (<i>Job Satisfaction</i>) Terhadap Komitmen Organisasi (<i>Organizational Commitmen</i>) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2017
5.	Jurnal An-Nizom: Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesempatan Anak Mendapatkan Pendidikan di Desa Harapan Makmur Bengkulu	2018
6.	Jurnal Al-Fitrah: Strategi Of Early Childhood Learning Model Development	2018
7.	Jurnal Nuansa: Peningkatan Mutu Pendidikan Menuju Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Pada MTsN Di Kota Bengkulu	2018
8.	Jurnal An Nizon: Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesempatan Anak Mendapatkan Pendidikan Di Desa Harapan Makmur Bengkulu	2018
9.	Prosiding Implementasi E-Performance Dan Sasaran Kinerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.	2019
10.	Jurnal JPI: The Effects of University Leadership Management: Efforts to Improve the Education Quality of State Institute for Islamic Studies (IAIN) of Bengkulu	2019
11.	Jurnal Nuansa: Evaluasi Program Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Menuju World Class University Pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	2019
12.	Proceedings of the International Conference on Educational Sciences and Teacher Profession (ICETeP 2018)	2019
13.	Jurnal Al Ulum: Trust, Justice, Ethics and Job Performance in Islamic Perspectives on Education Personnel From The Bengkulu State Religion Institute (IAIN)	2019

J. PENGALAMAN MENELITI

No.	Nama / Judul Penelitian	Tahun
1.	Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga Terhadap Kesempatan Anak Untuk	1993

	Mendapatkan Pendidikan di Desa Transmigrasi Harapan Makmur Bengkulu Utara	
2.	Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan MTsN Di Kota Bengkulu	2006
3.	Pengaruh Implementasi Budaya Kerja (Catatan Laporan Capaian Kinerja Harian) Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2016
4.	Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Di Provinsi Bengkulu	2017
5.	Pengaruh Struktur Organisasi (<i>Organizational Structure</i>), Kepuasan Kerja (<i>Job Satisfaction</i>) Terhadap Komitmen Organisasi (<i>Organizational Commitmen</i>) Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2017
6.	Pengaruh Kemampuan dan Kepribadian Terhadap Kinerja Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.	2017
7.	Pengaruh Peran Kepemimpinan dan Manajemen Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.	2018
8.	Peran Jaringan Internet Dalam Upaya Implementasi Program Digitalisasi Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.	2018
9.	<i>Trust, Justice, Ethics</i> Terhadap <i>Job Performance</i> Dalam Perspektif Islam Pada Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.	2018

K. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Nama Pengabdian Masyarakat	Tahun
1.	Ketua Koppontren (Koperasi Pondok Pesantren)	2001
2.	Manajer P2KER Unit Simpan Pinjam (USP) Pola Syariah Sistem Muamalah	2001
3.	Pengurus Yayasan Al Muttaqin Harapan Makmur	2002
4.	Pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum	2002
5.	Pengurus Lembaga Tilawatil Quran (LPTQ)	2004
6.	Pengurus Ikatan Persatuan Haji Indonesia (IPHI)	2006
7.	Pembina Ikatan Guru Raudhatul Atfal (IGRA)	2010
8.	Pembina Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) MTs dan MA	2010
9.	Pembina Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) MA se-Provinsi Bengkulu	2010

10.	Pengurus Forum Group Diskusi (FGD) Ka.Biro/ Kabag AUAK se-Indonesia	2014
11.	Pengurus LP Ma'arif Provinsi Bengkulu	2019

L. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA

No	Nama Tempat Mengajar	Tahun
1.	Piagam Penghargaan Wisuda Terbaik dengan Yudisium Cumlaude	2006
2.	Piagam Penghargaan dengan Predikat dengan pujian	2006
3.	Piagam Penghargaan Musabaqah Qiraat Al Kutub (MQK) Tingkat Nasional	2008
4.	Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia. Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	2009
5.	Piagam Penghargaan sebagai nara sumber kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	2011
6.	Piagam Penghargaan sebagai nara sumber kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) UMUM Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	2012
7.	Piagam Penghargaan sebagai nara sumber dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja (PK) Pengawas PK Guru dan PAK Guru	2013
8.	Piagam Penghargaan Kuliah Umum Kewirausahaan	2016
9.	Piagam Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	2016
10.	Piagam Penghargaan Focus Group Discussion Forum Kepala Biro dan Kabag Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) se-Indonesia	2016
11.	Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia. Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	2018

Bengkulu, Mei 2020

Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

